



**PERUBAHAN RENSTRA  
DINAS KESEHATAN  
PROVINSI RIAU  
2019 - 2024**

**DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**



## GUBERNUR RIAU

### PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 30 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Unsur Pemerintahan Umum sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 15 Juli 2022

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR 30

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan kehendak-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 selesai disusun, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau menguraikan upaya-upaya terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program urusan kesehatan yang terdapat dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ke dalam beberapa kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut disusun secara terencana melalui pendanaan indikatif yang berkelanjutan serta terukur melalui target-target indikator kinerja kegiatan (output) di setiap tahunnya. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi setiap unit pelaksana teknis di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam menyusun kebijakan dan dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah. Melalui dokumen ini, Dinas Kesehatan Provinsi Riau beserta seluruh perangkatnya menegaskan peran dan tanggung jawabnya terhadap keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Sebagai apresiasi, kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, Kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Juli 2022

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau



H. Zainal Arifin, SKM, M.Kes.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19700405 198912 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau .....	8
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Riau .....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	105
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....	109
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Riau.....	109
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Riau .....	115
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD Provinsi .....	120
3.4 Telaahan Renstra Kabupaten / Kota.....	123
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	126
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	128
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	134
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Riau .....	134
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	158
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	160
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	161
BAB VIII PENUTUP .....	164
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021 .....	17
2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021 .....	18
2.3	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan .....	19
2.4	Jenis Jabatan dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021.....	20
2.5	Status Kepegawaian berdasarkan Status Kepegawaian dan Gender Pada UPT khusus Tahun 2021 .....	22
2.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Pada UPT khusus Tahun 2021..	23
2.7	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Pada UPT khusus Tahun 2021.....	24
2.8	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Pada UPT khusus Tahun 2021 .....	25
2.9	Daftar Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020 .....	27
2.10	Daftar Unit Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang masih Operasional 2020	27
2.11	Daftar Aset Tetap RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2020 .....	27
2.12	Daftar Unit Usaha RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau yang masih Operasional 2020 .....	28
2.13	Daftar Aset Tetap RS Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2020 .....	28
2.14	Daftar Unit Usaha RS Jiwa Tampan Provinsi Riau yang masih Operasional 2020 ...	28
2.15	Daftar Aset Tetap RSUD Petala Bumi Provinsi Riau Tahun 2020 .....	29
2.16	Daftar Unit Usaha RSUD Petala Bumi Provinsi Riau yang masih Operasional 2020	29
2.17	Jumlah Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020	31
2.18	Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020.....	32
2.19	Jumlah Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020 .....	33
2.20	Persentase Kematian Covid-19 Pada Kabupaten/Kota dengan Kasus Konfirmasi di Provinsi Riau .....	35
2.21	Capaian Vaksinasi Dosis 1,2 dan 3 Provinsi Riau Per Kabupaten/Kota Tgl. 31 Desember 2021 .....	36

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah .....	3
1.2	Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah .....	3
2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau .....	10
2.2	Struktur Organisasi Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad .....	13
2.3	Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Petala Bumi .....	15
2.4	Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan .....	16
2.5	Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2021.....	17
2.6	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2021.....	19
2.7	Tingkat Pendidikan PNS di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2021.....	19
2.8	Tingkat Jenis Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2021.....	21
2.9	Status Kepegawaian berdasarkan Gender Pada UPT khusus Tahun 2021.....	22
2.10	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Pada UPT khusus Tahun 2021...	23
2.11	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Pada UPT khusus Tahun 2021.....	24
2.12	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Pada UPT khusus Tahun 2021	24
2.13	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Pada Masing-masing UPT khusus Tahun 2021	26
2.14	Angka Harapan Hidup Di Provinsi Riau .....	30
2.15	Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Riau Tahun 2020 .....	31
2.16	Persentase Penyebab Kematian Bayi Di Provinsi Riau Tahun 2020 .....	33
2.17	Penyebab Kematian Balita di Provinsi Riau Tahun 2020 .....	34
2.18	Kasus Konfirmasi Covid 19 Provinsi Riau Bulan Desember 2020 s/d 31 Desember 2021.....	34
2.19	Trend BOR ICU dan Isolasi Rumah Sakit Rujukan Covid 19 Provinsi Riau Januari s/d Desember 2021.....	34
2.20	Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) Tahun 2020 .....	43
2.21	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai ART Tahun 2020 .....	44
2.22	Perbandingan Jumlah Kasus DBD Tahun 2019 s,d 2021 di Provinsi Riau .....	45

2.23	Angka Kesekitan DBD Kab/Kota se Provinsi Riau .....	46
2.24	Angka Kematian akibat DBD Kab/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2019-2021.....	47
2.25	Jumlah RS di Provinsi Riau Tahun 2016-2020 .....	62
2.26	Perkembangan Rumah Sakit berdasarkan Kepemilikan Tahun 2016-2020 .....	63
2.27	Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus di Provinsi Riau .....	64
2.28	Jumlah RS berdasarkan Tipe di Provinsi Riau Tahun 2020 .....	64
2.29	Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Riau Tahun 2020 .....	65
2.30	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1000 di Provinsi Riau Tahun 2016-2020.....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif secara social dan ekonomi ( UU No.17 Tahun 2007).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Riau perlu menyusun Renstra Tahun 2019-2024 agar lebih selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah secara transparan (*clean government and good governance*) dan SMART (*specific, measurable, achievable, realistic dan timely*).

Substansi Renstra adalah penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Gubernur Provinsi Riau serta Program Prioritas Dinas Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan Riau masyarakat seutuhnya dengan menyelaraskan permasalahan kesehatan di tingkat regional, nasional maupun lokal area, berdasarkan isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, dan indikator kinerja.

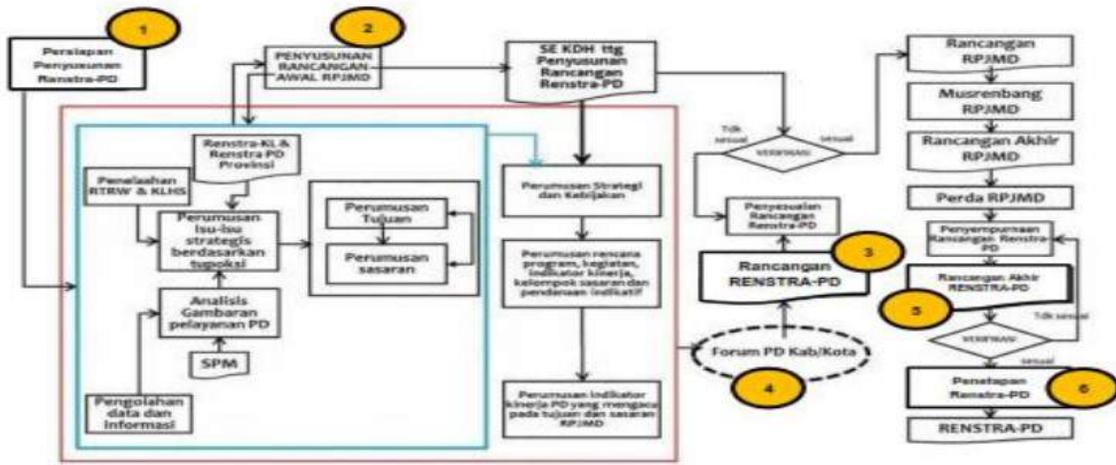
Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025, maka visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 adalah **“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat agamis, sejahtera lahir dan bathin di Asia tenggara Tahun 2025”**. Dokumen Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Riau serta mengacu pada misi Gubernur Riau yaitu **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Beriman Berkualitas dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya”**.

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 juga sebagai pedoman dalam mengatasi isu-isu strategis di bidang kesehatan dengan menerapkan paradigma pembangunan kesehatan baru yang mengacu pada Program Indonesia Sehat dengan menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan yang mendukung agenda prioritas yang dikenal dengan **“NAWA CITA”** presiden terutama dalam poin 5. **“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”** dengan menerapkan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk mendukung visi Kementerian Kesehatan **“ Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan berkeadilan”**. Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini acuan utama yang digunakan mengikuti Visi, Misi, arah kebijakan dan rencana Program Indikatif Gubernur/Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2019-2024. Adapun Visi Gubernur/Wakil Gubernur Riau adalah: **“ Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”**

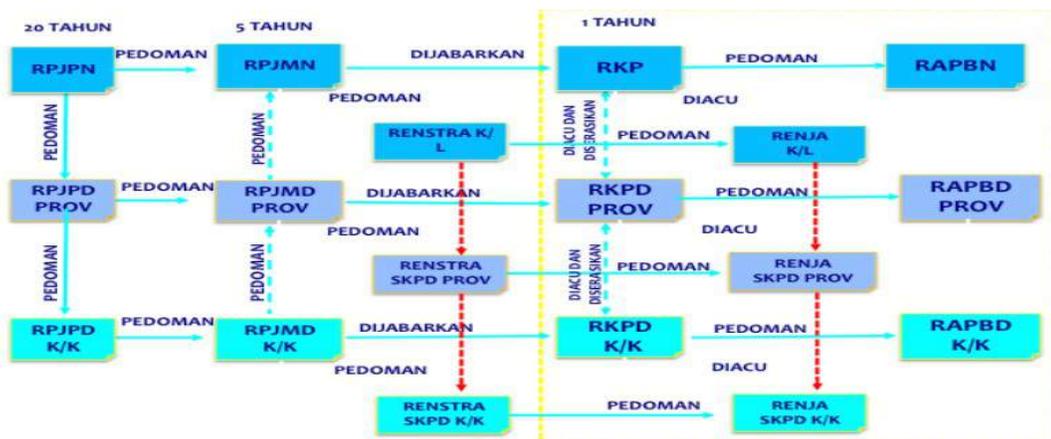
Rencana Strategis ini mengacu pada peraturan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Proses penyusunan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

**Gambar 1.1**  
**Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**



Hubungan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau dengan Dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara vertikal bahwa Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau, RPJMN Bidang Kesehatan dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI. Kemudian secara horizontal Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau berperan sangat penting dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat pada bagan alur berikut :

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah**



Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 disusun dalam rangka menindaklanjuti penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Beberapa hal yang melatarbelakangi Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 antara lain **Aspek Regulasi** yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (terjadinya perubahan struktur pendapatan dan belanja), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (terjadinya perubahan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan). **Aspek Sinkronisasi Kebijakan** dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (harus melakukan penyelarasan target indikator makro serta program prioritas). **Aspek Penyempurnaan Dokumen dan Aspek Keuangan** dengan adanya Kebijakan Pemerintah terkait stabilitas keuangan untukantisipasi dan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19), Fokus Pencapaian Target Kinerja RPJMD, Perubahan Sasaran Strategi/Arah Kebijakan serta Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk Periode 5 (lima) tahunan, juga berpedoman pada Perda Perubahan RPJMD 2019-2024 tersebut, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan Pencapaian Sasaran, Agenda dan Misi Pembangunan Daerah.

## 1.1 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Renstra Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 ).
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024 ( Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4 );
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Tampan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Petala Bumi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk memperbaharui kebijakan Renstra 2019 – 2024 dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah. Hal ini sebagai tindak lanjut evaluasi Renstra dengan mempertimbangkan perubahan mendasar seperti Aspek

Regulasi, Aspek Sinkronisasi Kebijakan Daerah, serta Aspek Penyempurnaan Dokumen dan Keuangan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2019-2024 adalah untuk:

- 1). Sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja pembangunan Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan analisis gambaran umum keuangan daerah;
- 2). Merumuskan dan menetapkan kembali kebijakan pembangunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, seperti permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan yang selaras dengan penyesuaian kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;
- 3). Merumuskan dan menetapkan kembali rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pendanaan indikatif berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 2 tahun terakhir; dan
- 4). Sebagai pedoman untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode Renstra.

### 1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2019-2024

**BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Riau**

Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Prov. Riau

**BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau**

Bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2020-2024 dan Renstra Kabupaten/Kota, telaahan KLHS RPJMD

Provinsi Riau Tahun 2019-2024, serta penentuan isu-isu strategis pembangunan kesehatan Provinsi Riau

**BAB IV : Tujuan dan Sasaran**

Bab ini memaparkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

**BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini memaparkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan.**

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kesehatan**

Pada bagian ini dikemukakan Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII : Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau**

##### **2.1.1. Dinas Kesehatan Provinsi Riau**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau seberikut :

##### **A. Tugas Pokok :**

Dinas Kesehatan menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

##### **B. Fungsi :**

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

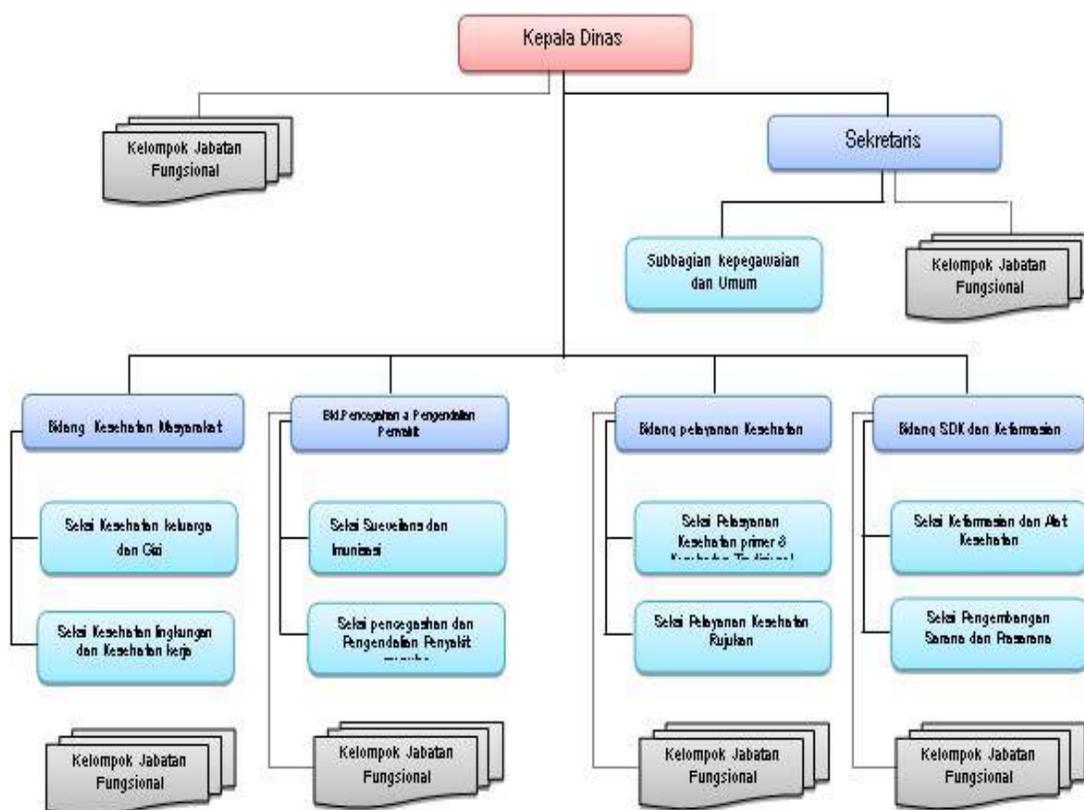
##### **C. Susunan Organisasi**

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Riau sesuai Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 , terlampir pada Lampiran I  
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional

- b. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
  - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
  - 2) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
  - 1) Seksi Surveilansi dan Imunisasi; dan
  - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional; dan
  - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, terdiri dari :
  - 1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
  - 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar. 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau**



Struktur Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagian mengalami perubahan, UPT diluar Rumah Sakit ( Bapelkes, Instalasi Farmasi dan Labkesda ) tidak mengalami perubahan sedangkan Rumah Sakit ( RSUD Arifin Achmad, RSUD Jiwa Tampan, RSUD Petala Bumi, mengalami perubahan dari Perangkat Daerah menjadi UPT Bersifat Khusus, Perubahan struktur UPT rumah sakit bersifat khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau, pada Peraturan tersebut dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi terdapat rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional, Sebagai unit organisasi bersifat khusus rumah sakit daerah provinsi memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

### **2.1.2. RSUD Arifin Achmad**

#### **A. Tugas Pokok :**

Sebagaimana pada Peraturan Gubernur Riau No, 61 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang kedudukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang selanjutnya disebut RSUD Arifin Achmad unit pelaksana teknis bersifat khusus Dinas Kesehatan yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD Arifin Achmad, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Tugas dan fungsi tata kerja RSUD Arifin Achmad melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medik, dan penunjang medik, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dipimpin oleh seorang Direktur, dan dibantu oleh Wakil Direktur, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian.

Direktur harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan keahlian di bidang perumahasakitan, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSUD Arifin Achmad selanjutnya digunakan untuk sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan daerah.

#### **B. Fungsi RSUD Arifin Achmad :**

Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan program di bidang pelayanan kesehatan;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- d. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- g. penyelenggaraan pelayanan medis;
- h. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- i. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- j. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- k. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang kesehatan;
- l. penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat dibidang kesehatan;
- m. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- n. penyelenggaraan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum,

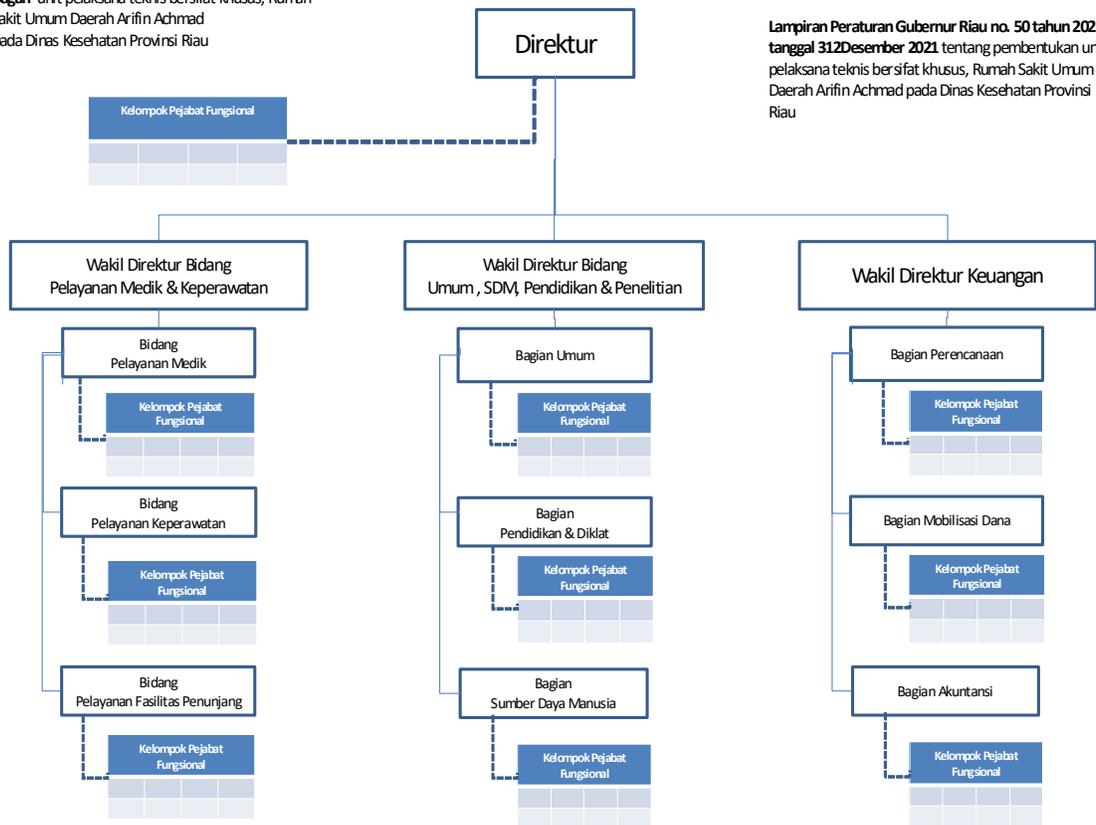
- o. Pemeliharaan peningkatan perorangan melalui pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis

**C. Struktur Organisasi :**

**Gambar. 2.2**  
**Struktur Organisasi Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad**

Bagan unit pelaksana teknis bersifat khusus, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Lampiran Peraturan Gubernur Riau no. 50 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang pembentukan unit pelaksana teknis bersifat khusus, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau



### 2.1.3. RSUD Petala Bumi

Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi telah ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur Riau No. 41 Tahun 2021 sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Khusus yang berada dibawah Dinas Kesehatan Provinsi Riau, yang memberikan pelayanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam Pengelolaan Keuangan, barang Milik Daerah, serta bidang Kepegawaian.

#### A. Tugas Pokok :

RSUD Petala Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

#### B. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas RSUD Petala Bumi menyelenggarakan fungsi :

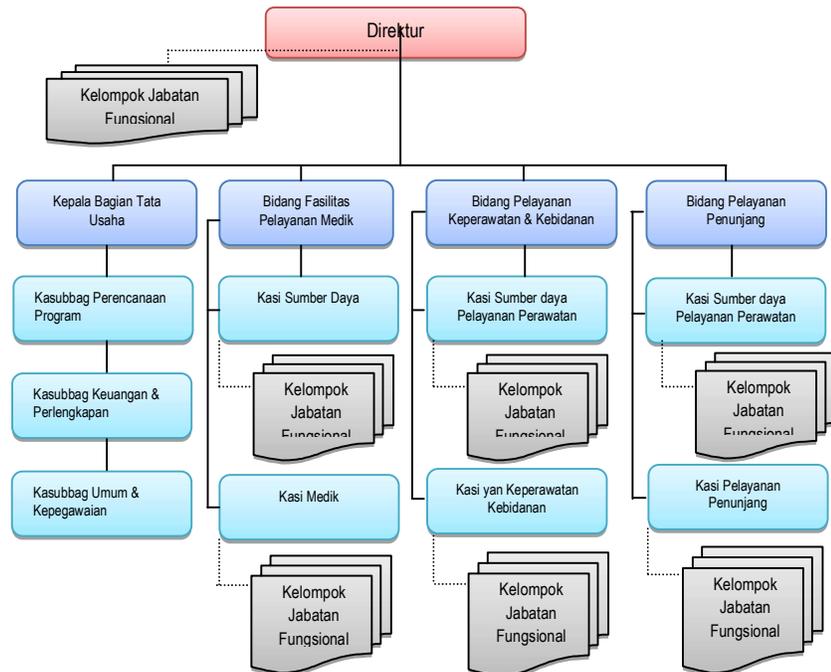
- 1) Penyelenggaraan perencanaan program dibidang kesehatan;
- 2) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 4) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat ke 2 dan ke 3 sesuai kebutuhan medis;
- 5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 6) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- 7) Penyelenggaraan pelayanan medis;
- 8) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- 9) Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- 10) Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- 11) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang kesehatan;
- 12) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat bidang kesehatan;

- 13) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- 14) Penyelenggaraan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

### C. Struktur organisasi

Susunan organisasi RSUD Petala Bumi sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut :

**Gambar 2.3**  
**Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Petala Bumi**



#### 2.1.4 Rumah Sakit Jiwa Tampan

##### A. Tugas Pokok :

Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus RS Jiwa Tampan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat

##### B. Fungsi :

- a. Penyelenggaraan perencanaan program di bidang pelayanan Kesehatan;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan

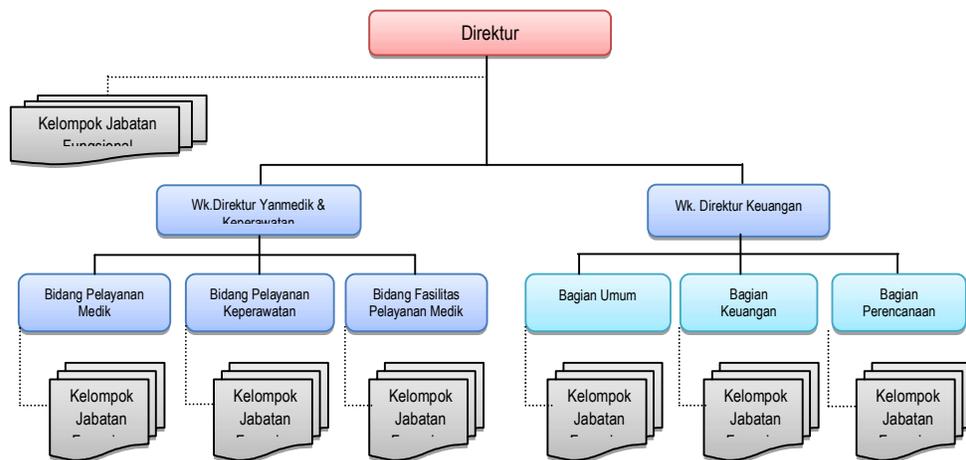
- c. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
- d. Pemeliharaan dan peningkatan Kesehatan perorangan melalui pelayanan Kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan
- g. Penyelenggaraan pelayanan medis
- h. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
- i. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan
- j. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
- k. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan dibidang Kesehatan
- l. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat dibidang Kesehatan
- m. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan akuntansi
- n. Penyelenggaraan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

**C. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi RS Jiwa Tampan sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut :

**Gambar 2.4.**

**Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Tampan**



## 2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Riau

### 2.2.1. Dinas Kesehatan

Untuk melaksanakan Urusan Wajib Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau didukung oleh pegawai berdasarkan data tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Jumlah dan status kepegawaian,

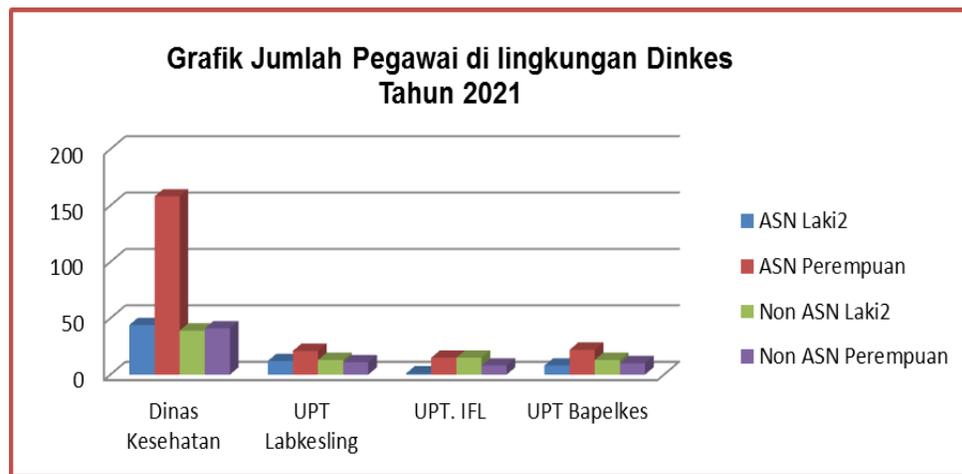
Pengawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau pada tahun 2021 berjumlah 281 orang. Petugas Pegawai tersebut ditugaskan di Dinas Kesehatan Provinsi dan 3 UPT ( UPT Instalasi Farmasi dan Logistik, UPT Labkesling dan UPT Bapelkes).

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021**

No	Unit Kerja	ASN		Non ASN	
		Lk	Pr	Lk	Pr
1	Dinas Kesehatan	44	158	39	41
2	UPT Labkesling	12	21	13	11
3	UPT Instalasi Farmasi dan Logistik	1	15	15	8
4	UPT Bapelkes	8	22	13	10
	Jumlah	65	216	80	70

Sumber : Subbag kepegawaian dan Umum

**Gambar 2.5**  
**Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2021**



Dari grafik diatas tergambar bahwa secara keseluruhan PNS wanita lebih banyak dibandingkan dengan PNS Laki-laki ( 1 : 4) yaitu 1 berbanding 4. Sementara jumlah PNS laki-laki yang paling sedikit ada di UPT Instalasi Farmasi dan Logistik.

**b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan;**

Dari PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Riau maka dapat dirinci berdasarkan golongan sebagai berikut :

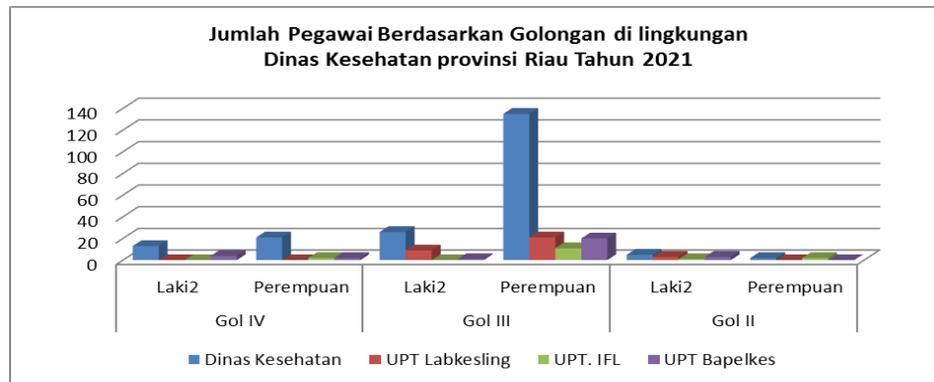
**Tabel 2.2**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2021**

No	Unit Kerja	Gol IV		Gol III		Gol II	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Dinas Kesehatan	13	21	26	135	5	2
2	UPT Labkesling	-	-	9	21	3	-
3	UPT Instalasi Farmasi dan Logistik	-	2	-	11	1	2
4	UPT Bapelkes	4	2	1	20	3	-
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>187</b>	<b>12</b>	<b>4</b>

Sumber : Subbag kepegawaian dan Umum

**Gambar 2.6**



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa pangkat dan golongan yang terbanyak adalah golongan III dan yang sedikit adalah pangkat dan golongan II dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Sedangkan PNS yang tidak ada pangkat/golongan IV adalah UPT, Labkesling.

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan;

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan**

No	Jenis pendidikan	Unit Kerja							
		Dinkes		UPT Farmasi dan Logistik		UPT Labkesling		UPT Bapelkes	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	S3	2	-	-	-	-	-	-	-
2	S2	12	16	1	2	2	3	3	3
3	SI/DIV	16	113	-	10	3	11	3	10
4	DIII	7	12	-	2	-	5	-	2
5	SLTA	9	14	1	-	3	6	5	4
6	SLTP	1	-	-	-	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	47	155	2	14	8	25	11	19

Sumber : Subbag kepegawaian dan Umum

**Gambar 2.7**  
**Tingkat Pendidikan PNS di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2021**



Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum

Dari grafik diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau Sarjana (SI/DIV) lebih banyak (64%), Pasca Sarjana (S2) 14%, Diploma (DIII) 9% dan Pendidikan tingkat Doktor (S3) 1%.

Sementara masih ada tingkat pendidikan SLTA (11%) dan SLTP (1%), Sebagai mana amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur pengembangan karier PNS tidak lagi menggunakan sistem daftar urut kepangkatan (DUK), melainkan dengan sistem merit, Sistem merit adalah pengembangan karier PNS yang mengacu pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar

tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kecacatan, Jadi diharapkan bagi pendidikan masih ditingkat SLTA dan SLTP dapat meningkatkan jenjang pendidikannya ke yang lebih tinggi.

**d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan;**

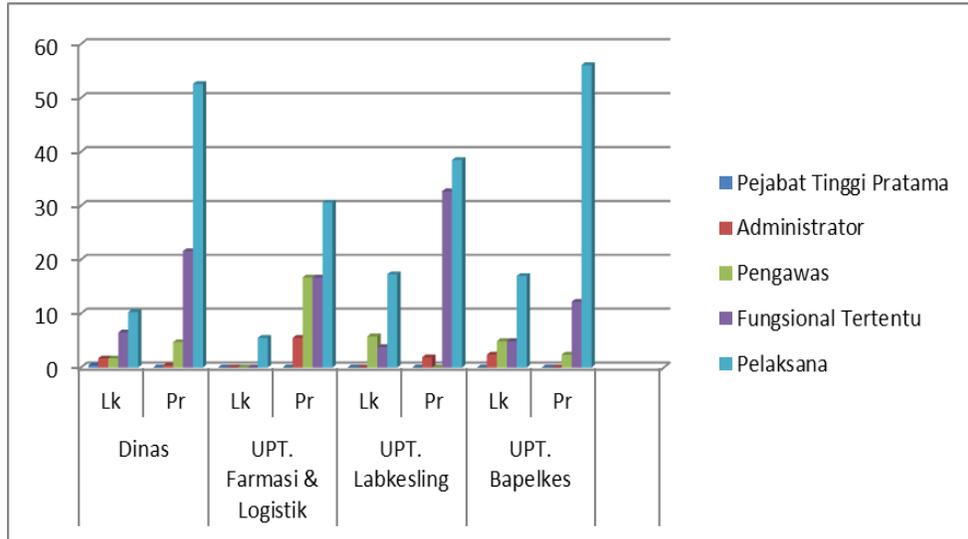
Dibawah ini adalah jenis jabatan baik jabatan administrator, Pengawas, Fungsional tertentu dan jabatan Pelaksana dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Jenis Jabatan dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau**  
**Tahun 2021**

No	Jenis Jabatan	Unit kerja							
		Dinas		UPT, Farmasi & Logistik		UPT, Labkesling		UPT, Bapelkes	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Pejabat Tinggi Pratama	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Administrator	4	1	-	1	-	1	1	-
3	Pengawas	4	11	-	3	3	-	2	1
4	Fungsional Tertentu								
	a, Adminkes	3	20	-	-	-	-	-	-
	b, Nutrisionis	-	4						
	c, Epidemiologi	3	6						
	d, Penyuluh Kesmas	1	5						
	e, Sanitarian	1	1						
	f, Pembimbing Kesja	1	5						
	g, Dokter	-	-	-	-	-	1	-	-
	h, Apoteker	-	-	-	2	-	-	-	-
	i, Asisten Apoteker	-	-	-	1	-	-	-	-
	j, Pranata laboratorium	-	-	-	-	2	15		
	k, Radiografer	-	-	-	-	-	1	-	-
	m, Perencana Ahli	4	4	-	-	-	-	-	-
	n, Widyaiswara	-	-	-	-	-	-	2	5
	o, Analis Kepegawaian	-	1	-	-	-	-	-	-
	o, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1	-	-	-	-	-	-	-
	p, Arsiparis	-	4	-	-	-	-	-	-
	q, Prana Komputer	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelaksana	24	122	1	11	9	20	7	23
	<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>184</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>29</b>

Sumber : Subbag kepegawaian dan Umum

**Gambar 2.8**  
**Tingkat Jenis Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan**  
**Tahun 2021**



Sumber : Subag Kepegawaian dan Umum

Dari grafik diatas diketahui bahwa baik Dinas Kesehatan maupun UPT diajarannya tenaga pelaksana masih mendominasi lebih banyak, sementara tenaga fungsional tertentu pada Dinas Kesehatan laki-laki sekitar 8% dan wanita 20%, UPT Farmasi laki-laki 0% dan wanita 18%, UPT, Labkesling fungsional tertentu laki-laki 4% dan wanita 32% dan di UPT, Bapelkes laki-laki 5% dan wanita 11%.

### 2.2.2. UPT RUMAH SAKIT BERSIFAT KHUSUS

Sumber daya Kesehatan di 3 (tiga) UPT bersipat Khusus yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2021 dan menjadi UPT Khusus Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagai berikut :

#### A. Jumlah dan status kepegawaian

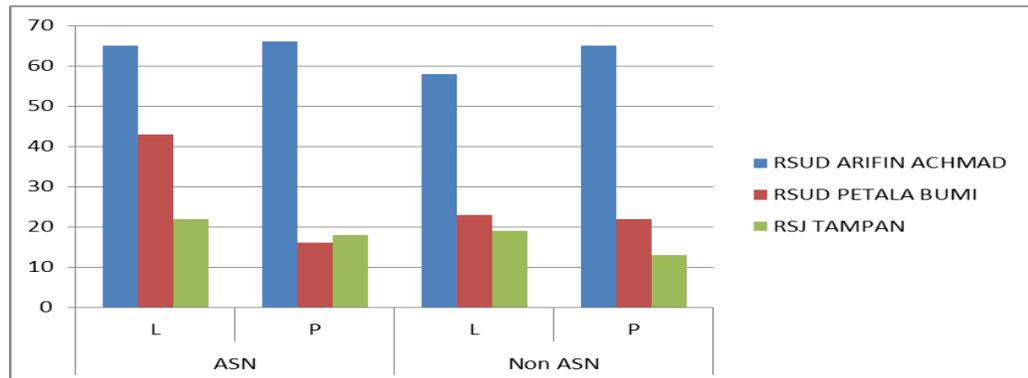
Jumlah pegawai yang terdapat di 3 (tiga) UPT Khusus berdasarkan status kepegawaian ASN dan Non ASN serta gender yaitu :

**Tabel 2.5**  
**Status Kepegawaian berdasarkan Status Kepegawaian dan Gender**  
**Pada UPT khusus Tahun 2021**

No	Unit Kerja UPT, Khusus	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1,	RSUD Arifin Achmad	214	636	235	464	1549
2,	RSUD Petala Bumi	43	150	92	157	442
3,	RS Jiwa Tampan	74	174	77	90	415
JUMLAH		331	960	404	711	2239

*Sumber data : UPT Khusus*

**Gambar 2.9**  
**Status Kepegawaian berdasarkan Gender**  
**Pada UPT khusus Tahun 2021**



*Sumber : UPT Khusus*

Dari grafik diatas diketahui bahwa dari ketiga UPT Khusus jumlah ASN terbanyak adalah di RSUD Arifin Achmad yaitu 65% laki-laki dan 67% perempuan dan yang jumlah tenaga yang rendah adalah di RSJ Tampan untuk ASN laki-laki yaitu sekitar 41% dan RSUD Petala Bumi untuk ASN perempuan yaitu 18%, Disamping itu tenaga non ASN sama atau hampir sama dengan tenaga ASN pada UPT Khusus, seperti di RSUD Arifin Achmad dengan rata-rata berada diatas 60%.

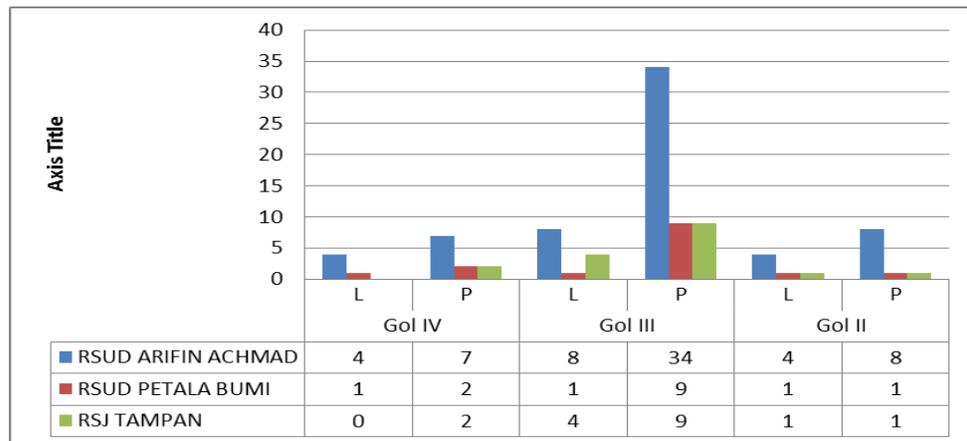
## B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

**Tabel 2. 6**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**  
**Pada UPT khusus Tahun 2021**

No	Unit Kerja UPT Khusus	Gol IV		Gol III		Gol II	
		L	P	L	P	L	P
1	RSUD ARIFIN ACHMAD	56	95	105	443	53	98
2	RSUD PETALA BUMI	13	24	18	111	14	13
3	RSJ TAMPAN	10	32	47	119	17	23
JUMLAH		79	151	170	673	84	134

Sumber data : UPT Khusus

**Gambar 2.10**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**  
**Pada UPT khusus Tahun 2021**



Sumber data : UPT Khusus

Dari grafik diatas diketahui bahwa golongan yang terbanyak adalah golongan III yaitu ada 42% perempuan dan 13 % laki-laki, sedangkan sedikit adalah golongan IV, 5% laki-laki dan golongan II yaitu 6% perempuan.

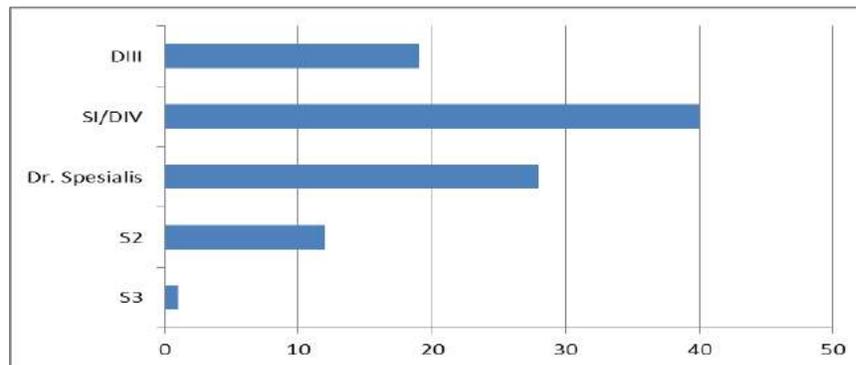
C. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**  
**Pada UPT khusus Tahun 2021**

No	Jenis pendidikan	Unit Kerja UPT Khusus							
		RSUD ARIFIN ACHMAD		RSUD PETALA BUMI		RSJ TAMPAN		JUMLAH	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	S3	3	5	0	0	0	0	3	5
2	S2	64	61	12	1	11	12	87	74
3	Dr, Spesialis	70	285	8	17	1	14	79	316
4	SI/DIV	40	239	72	22	59	143	171	404
5	DIII	37	46	10	51	41	94	88	191
6	SLTA			4	6	24	28	28	34
7	SLTP			0	0	0	0	0	0
8	SD			0	0	1	0	1	0
	Jumlah	214	636	106	97	137	291	457	1024

Sumber data : UPT Khusus

**Gambar 2.11**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**  
**Pada UPT khusus Tahun 2021**



Sumber data : UPT Khusus

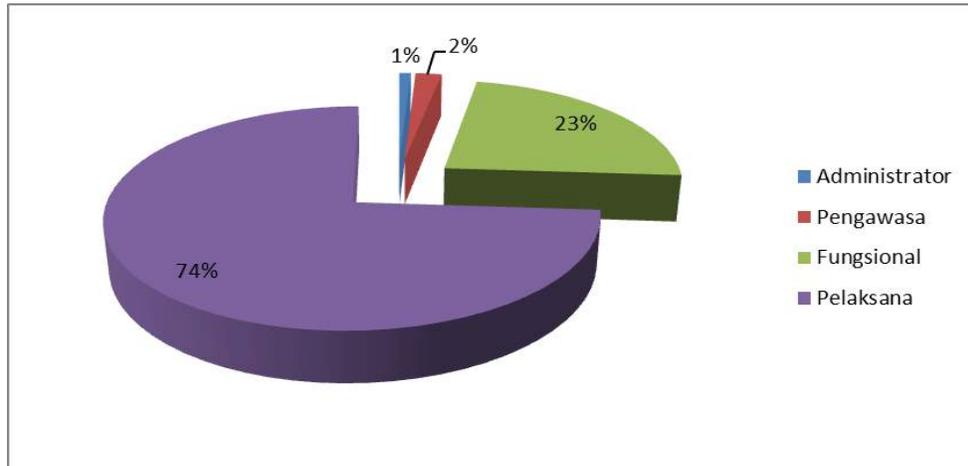
Berdasarkan tingkat pendidikan SDM yang ada di ketiga UPT Khusus, terbanyak adalah tingkat sarjana professional 40%, kemudian dokter spesialis 29% serta tingkat pendidikan DIII Teknis 19%, Sedangkan tingkat pendidikan S2 dan S3 merupakan tingkat pendidikan manajemen.

#### D. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**  
**Pada UPT khusus Tahun 2021**

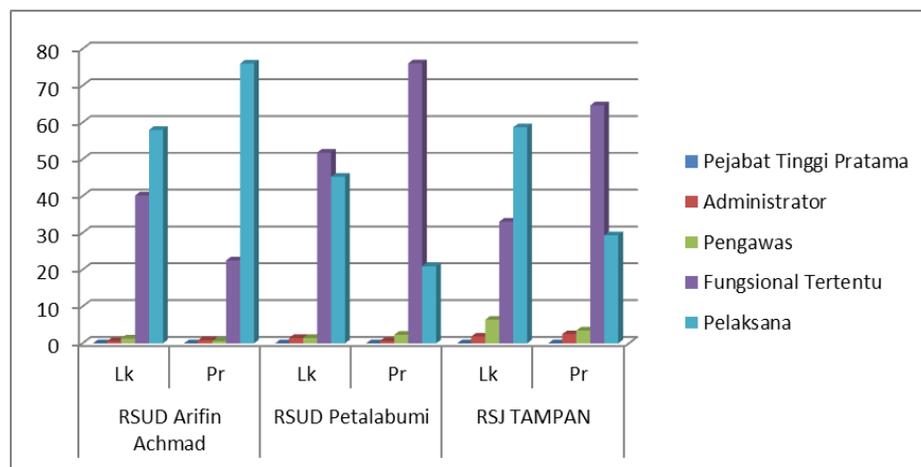
No	Jenis Jabatan	Unit kerja UPT, Khusus							
		RSUD ARIFIN ACHMAD		RSUD PETALA BUMI		RSJ TAMPAN		JUMLAH	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Pejabat Tinggi Pratama	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Administrator	3	11	2	2	6	3	7	18
3	Pengawas	7	8	2	7	6	6	16	22
4	Fungsional Tertentu								
	a. dokter Spesialis	31	27	8	17	0	6	40	49
	b.dokter Sub Spesialis	5	19			0	1	5	19
	c. dokter	18	21	10	18	4	13	28	39
	d. dokter gigi	5	10	3	7	1	8	8	17
	e. dokter gigi spesialis	1	4					1	4
	b. Adminkes	3	9			1	1	3	9
	c. Nutrisionis	0	16	0	9	1	7	1	32
	c. Epidemiologi	1	0					1	0
	d. Penyuluh Kesmas	0	1					0	1
	e. Sanitarian	0	5	0	3			0	8
	f. Pembimbing Kesja	0	1					0	1
	h. Apoteker	1	16	3	8	0	4	4	28
	i. Asisten Apoteker	1	14	1	3	0	7	9	18
	j. Bidan	0	106	0	51			0	15
	k. Perawat	124	489	26	74	16	66	42	140
	l. Asisten Anestesi			2	0			2	0
	m. Fisioterapi			1	3			1	3
	n. Rekam Medis			4	8	1	5	5	17
	o. Pranata laboratorium	3	28	4	16	0	5	12	49
	p. Radiografer	8	11	4	4	3	2	15	17
	q. Elektromedik					1	1	1	1
	r. Perencana Ahli	1	0	0	2			1	2
	s. Widyaiswara	0	0					0	0
	t. Analis Kepegawaian	0	0					0	0
	u. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	0	0					0	0
	v. Arsiparis	1	0			1	3	1	0
	w. Prana Komputer	0	0					0	0
5	Pelaksana/ Staff	325	505	62	63	33	36	575	1222
	<b>Jumlah</b>	<b>538</b>	<b>1301</b>	<b>132</b>	<b>295</b>	<b>74</b>	<b>174</b>	<b>778</b>	<b>1731</b>

**Gambar 2.12**  
**Jumlah Pegawaian Berdasarkan Jabatan Pada UPT khusus**  
**Tahun 2021**



Jumlah pegawai berdasarkan jabatan diantara jabatan administrator, pengawas, fungsional tertentu dan pelaksana, karena di UPT Khusus tidak terdapat jabatan pratama, Karena UPT bersifat khusus merupakan unit pelaksana teknis yang merupakan pelayanan terdepan kepada masyarakat terutama dalam memberikan pelayanan pengobatan sudah sewajarnya jabatan fungsional tertentu harus lebih banyak, bila dikumulatikan dari ketiga UPT Khusus bahwa jabatan fungsional tertentu ada 23%, seperti berikut ini :

**Gambar 2.13**  
**Jumlah Pegawaian Berdasarkan Jabatan**  
**Pada Masing-masing UPT khusus Tahun 2021**



## B. Aset / Modal, dan Unit Usaha yang Masih Operasional

### B.1. Dinas Kesehatan

Jumlah Aset tetap Dinas Kesehatan Provinsi Riau tercatat sebagai berikut :

**Tabel 2.9**

**Daftar Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020**

Kode Bidang	Pembidangan	Nilai
01	Golongan Tanah	16.379.700.000,00
02,	Golongan Peralatan dan Mesin	112.191.652.174,12
03,	Golongan Gedung dan Bangunan	94.130.926.287,22
04,	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.659.129.229,00
05,	Golongan Aset Tetap Lainnya	127.754.570,00
06,	Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.148.443.480,00
	<b>Jumlah</b>	<b>236.637.605.740,34</b>

Unit usaha yang masih operasional pada Dinas kesehatan Provinsi Riau sebagai berikut :

**Tabel 2.10**

**Daftar Unit Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang masih Operasional 2020**

No.	Unit Usaha	Jumlah	Satuan
1,	Kantin	2	Unit
2,	Koperasi Karyawan	1	Unit

### B.2. RSUD Arifin Achmad

Jumlah Aset tetap RSUD Arifn Achmad Provinsi Riau tercatat sebagai berikut :

**Tabel 2.11**

**Daftar Aset Tetap RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2020**

Kode Bidang	Pembidangan	Nilai
01	Golongan Tanah	82.122.185.000
02.	Golongan Peralatan dan Mesin	669.922.385.865
03.	Golongan Gedung dan Bangunan	455.732.040.546
04.	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.830.964.469
05.	Golongan Aset Tetap Lainnya	256.751.600
06.	Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.828.661.965
	<b>Jumlah</b>	<b>1.215.692.989.445</b>

Unit usaha yang masih operasional pada RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau sebagai berikut :

**Tabel 2.12**

**Daftar Unit Usaha RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau yang masih Operasional 2020**

No.	Unit Usaha	Jumlah	Satuan
1.	Kantin	6	Unit
2.	Gedung Serbaguna	1	Unit
3.	Koperasi Karyawan	1	Unit
4.	Telekomunikasi	1	Unit
5.	Sterilisasi	1	Unit
6.	Kantor Kas	2	Unit
7.	ATM	3	Unit
8.	Parkir	1	Unit

**B.3. RS Jiwa Tampan**

Jumlah Aset tetap RS Jiwa Tampan tercatat sebagai berikut :

**Tabel 2.13**

**Daftar Aset Tetap RS Jiwa Tampan Provinsi Riau Tahun 2020**

Kode Bidang	Pembidangan	Nilai
01	Golongan Tanah	77.413.294.660,00
02.	Golongan Peralatan dan Mesin	58.914.352.792,02
03.	Golongan Gedung dan Bangunan	107.989.283.553,81
04.	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.035.974.409,50
05.	Golongan Aset Tetap Lainnya	959.914.027,56
06.	Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.398.009.998,00
	<b>Jumlah</b>	<b>262.710.829.440,88</b>

Unit usaha yang masih operasional pada RS Jiwa Tampan Provinsi Riau sebagai berikut :

**Tabel 2.14**

**Daftar Unit Usaha RS Jiwa Tampan Provinsi Riau yang masih Operasional 2020**

No,	Unit Usaha	Jumlah	Satuan
1.	Kantin	5	Unit
2.	Koperasi Karyawan	1	Unit
3.	ATM Mandiri	1	Unit

#### B.4. Aset RSUD Petala Bumi

Jumlah Aset tetap RS Petala Bumi tercatat sebagai berikut :

**Tabel 2.15**

**Daftar Aset Tetap RSUD Petala Bumi Provinsi Riau Tahun 2020**

Kode Bidang	Pembidangan	Nilai
01	Golongan Tanah	41.944.800.000,00
02.	Golongan Peralatan dan Mesin	71.966.134.329,31
03.	Golongan Gedung dan Bangunan	429.261.495.350,20
04.	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	769.151.474,00
05.	Golongan Aset Tetap Lainnya	35.162.066,00
06.	Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan	737.000.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.280.976.743.219,51</b>

Unit usaha yang masih operasional pada RSUD Petala Bumi Provinsi Riau sebagai berikut :

**Tabel 2.16**

**Daftar Unit Usaha RSUD Petala Bumi Provinsi Riau yang masih Operasional 2020**

No,	Unit Usaha	Jumlah	Satuan
1,	Kantor Kas Bank Riau	1	Unit
2,	ATM Mandiri	1	Unit

#### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Riau

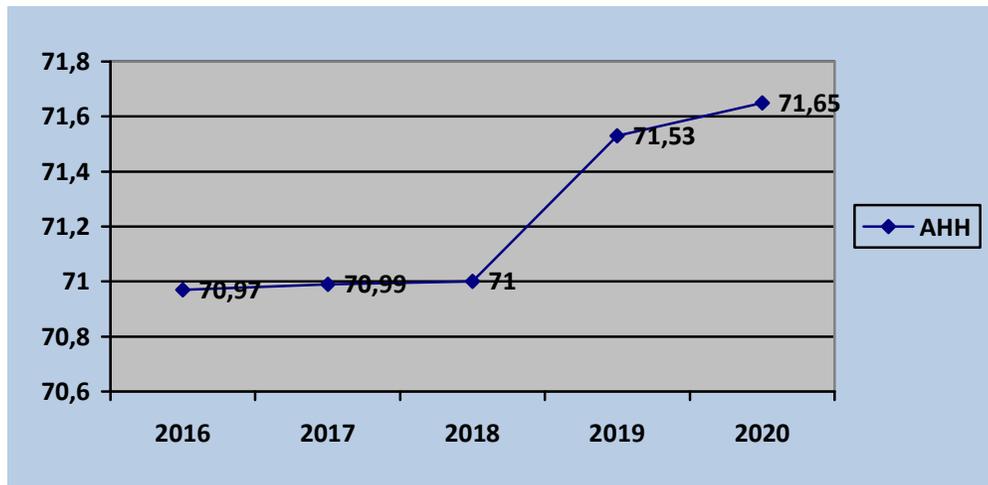
Dalam mengukur kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas Kesehatan menjelaskan dalam dua indikator yaitu Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) atau capaian indikator impact dan Capaian Indikator Kinerja Outcome dari upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi beserta jajaran kesehatan diseluruh Provinsi Riau, dengan Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

##### 2.3.1. Angka Harapan Hidup ( AHH )

Angka Harapan Hidup ( AHH ) merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, Adanya peningkatan Angka Harapan Hidup mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk yang berarti pula meningkatnya derajat kesehatan masyarakat suatu bangsa, Data AHH berikut ini

diperoleh survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik ( BPS ), Perkembangan AHH Provinsi Riau per tahun.

**Gambar 2.14.**  
**Angka Harapan Hidup Di Provinsi Riau Tahun**  
**2016 – 2020**



### 2.3.1 Mortalitas

Mortalitas adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu, Secara sederhana, mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami, Perpaduan informasi berupa angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian anak, serta prevalensi gizi buruk dan usia harapan hidup, menjadi perwakilan dari tingkat kesejahteraan penduduk, Selain itu, besarnya mortalitas menentukan arah pembangunan sebuah negara, Penghitungan mortalitas terdiri atas beberapa jenis, seperti: angka kematian bayi, angka kematian kasar, dan angka kematian menurut kelompok umur, Mortalitas secara rinci diartikan sebagai jumlah kematian spesifik pada suatu populasi dengan skala besar suatu populasi tiap dikali satuan, Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian tiap 1000 individu tiap tahun.

**a. Kematian Ibu**

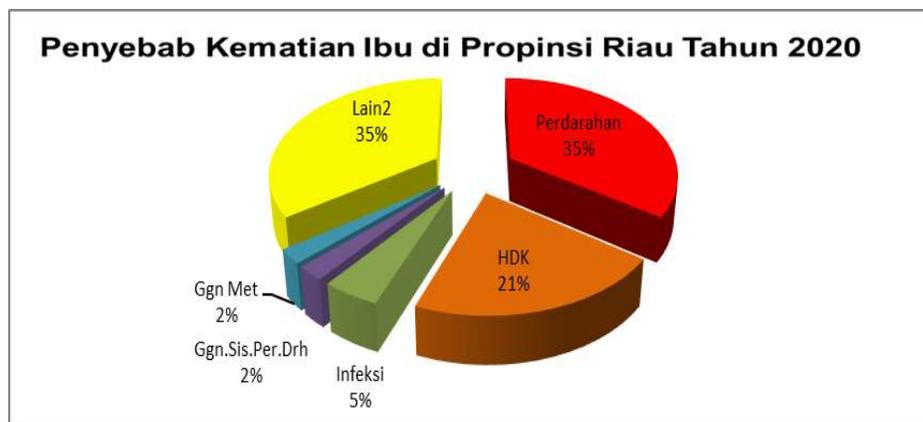
Tabel 2.17.  
Jumlah Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau  
Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Ibu				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kuantan Singinggi	11	9	5	10	14
2.	Indragiri Hulu	9	11	11	11	10
3.	Indragiri Hilir	11	9	9	7	10
4.	Pelalawan	9	6	12	10	8
5.	Siak	7	9	11	12	9
6.	Kampar	20	12	11	11	11
7.	Rokan Hulu	8	11	9	7	7
8.	Bengkalis	18	13	12	14	21
9.	Rokan Hilir	14	15	13	13	14
10.	Kep.Meranti	9	7	5	7	8
11.	Kota Pekanbaru	6	6	6	13	14
12.	Dumai	9	11	5	10	3
Provinsi Riau		131	119	109	125	129

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Prov,Riau

Jumlah Kematian Ibu adalah Jumlah ibu hamil, bersalin dan nifas yang meninggal di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu, Jumlah kematian ibu dari tahun 2016 sd 2020 terjadi perubahan fluktuatif, di tahun 2016 (131 kasus) terjadi penurunan sampai tahun 2018 (109 kasus), tetapi naik lagi pada tahun 2019 (125 kasus) dan 2020, (129 kasus), Jumlah kematian tertinggi di tahun 2020 berada pada Kab,Bengkalis (21 kasus) dan terendah di Kota Dumai (3 kasus), Angka ini merupakan angka absolut jumlah kematian di Propinsi Riau yang dilaporkan, sehubungan tidak adanya data survey kematian ibu di Provinsi Riau.

**Gambar 2.15.**



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa 3 penyebab kematian ibu terbesar di Propinsi Riau Tahun 2020 adalah perdarahan (35%), Lain-Lain (35%) dan Hipertensi Dalam

Kehamilan (21%), dan penyakit lain-lain (disebabkan kemungkinan adanya komplikasi seperti Anemia, Hipertensi, Diabetes Melitus, HIV, IMS, Malaria, TB, Kecacangan, Hepatitis B, dll yang terjadi dalam kehamilan).

## b. Kematian Bayi

**Tabel 2.18**  
**Jumlah Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Riau Tahun 2016-2020**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Bayi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kuantan Singingi	112	22	36	27	51
2.	Indragiri Hulu	56	19	16	33	43
3.	Indragiri Hilir	78	29	44	61	24
4.	Pelalawan	44	33	33	39	16
5.	Siak	34	32	47	60	71
6.	Kampar	45	40	60	51	46
7.	Rokan Hulu	39	31	26	19	39
8.	Bengkalis	49	36	42	49	42
9.	Rokan Hilir	3	34	23	18	34
10.	Kep,Meranti	27	15	23	30	46
11.	Kota Pekanbaru	21	7	4	30	40
12.	Dumai	44	90	44	58	130
	Provinsi	398	388	395	475	596

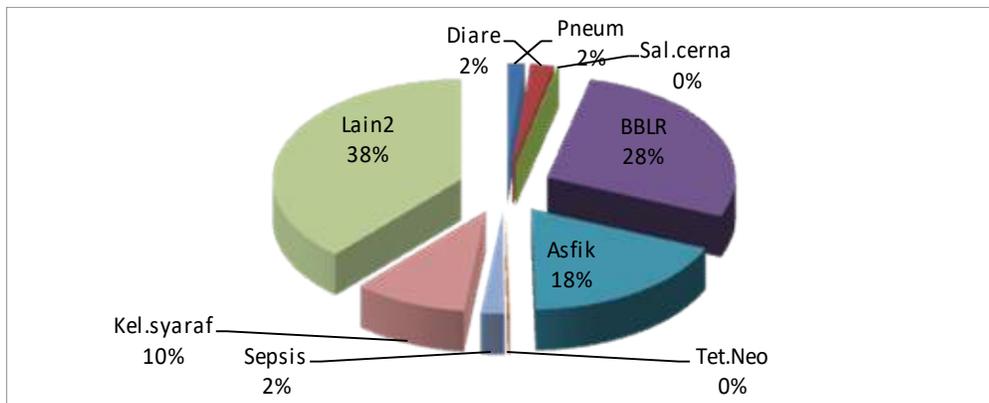
Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Riau

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kematian balita dari tahun 2016 sd 2020 sangat fluktuatif dari 398 kasus di tahun 2016 menurun menjadi 388 kasus di tahun 2017, tetapi terjadi kenaikan berturut2 sampai dengan tahun 2020 yaitu 596 kasus.

Pada tahun 2020 kematian bayi disebabkan karena BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) merupakan porsi terbesar (28%) dan terkecil karena tetanus neonatorum (0,2%), Masih ditemukannya 1 kasus Tetanus Neonatorum (0,2%) dari Kab. Bengkalis.

Gambaran penyebab kematian bayi tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.16**  
**Persentase Penyebab Kematian Bayi Di Provinsi Riau Tahun 2020**



### c. Kematian Balita

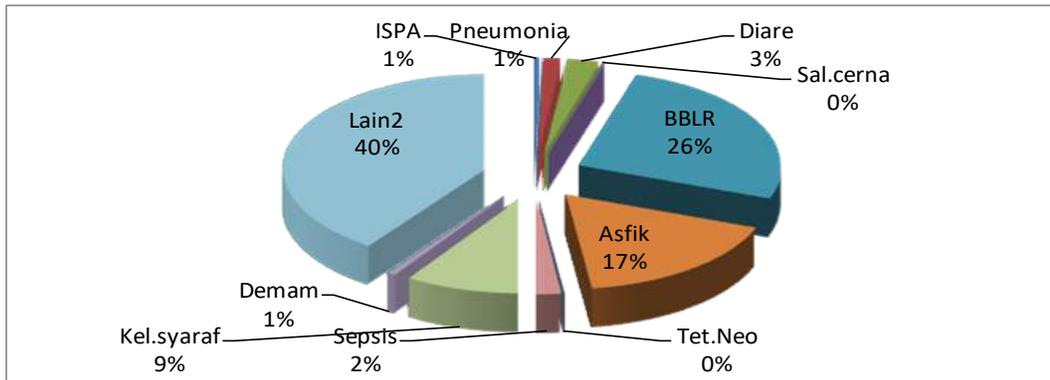
**Tabel 2.19**  
**Jumlah Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian Balita				
		2016	2017	2018	2019	2020
1,	Kuantan Singinggi	129	65	27	56	52
2,	Indragiri Hulu	56	56	34	41	46
3,	Indragiri Hilir	165	63	30	27	25
4,	Pelalawan	44	44	18	27	17
5,	Siak	45	67	50	88	76
6,	Kampar	155	83	6	36	53
7,	Rokan Hulu	41	51	18	19	39
8,	Bengkalis	56	87	49	47	43
9,	Rokan Hilir	84	70	64	43	37
10,	Kep,Meranti	74	47	33	32	42
11,	Kota Pekanbaru	65	69	79	57	130
12,	Dumai	139	104	71	74	72
Provinsi Riau		1053	806	479	547	632

Sumber :Profil Kesehatan Provinsi Riau

Dari tabel diatas Kab/Kota yang besar kasus kematian balita adalah Kota Pekanbaru (130 kasus), Siak (76 kasus), Dumai (60 kasus), Kasus kematian balita di Provinsi Riau Tahun 2016 sd 2020 perkembangannya fluktuatif, dari tahun 2016 sebesar 1053 kasus menurun sampai tahun 2019 menjadi 547 kasus, naik lagi menjadi 632 kasus di tahun 2020, Gambaran Penyebab kematian balita di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

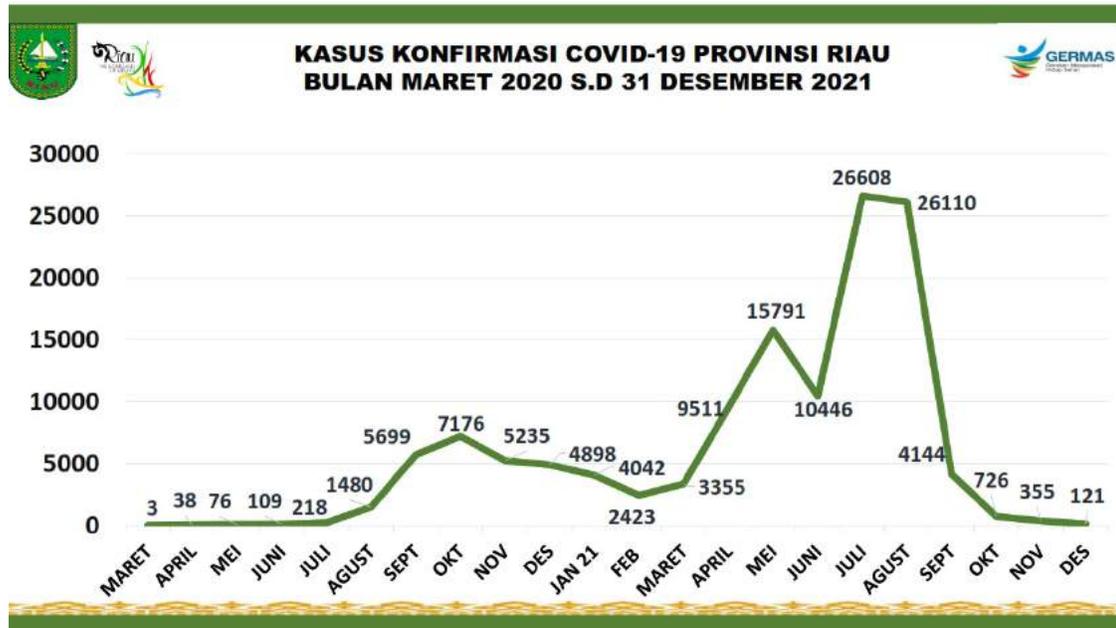
**Gambar 2.17**  
**Penyebab Kematian Balita di Provinsi Riau Tahun 2020**



Dari diagram diatas menunjukkan bahwa 3 penyebab kematian balita terbesar di Propinsi Riau Tahun 2020 adalah lain2 (40 %), BBLR (26 %), asfiksia (17 %), untuk kematian dan lain-lain perlu dirinci apa penyebabnya karena proporsinya yang terbanyak (40%), untuk itu dibutuhkan penjelasan yang terperinci apa penyebabnya agar dapat ditelusuri guna perbaikan pelayanan kedepan.

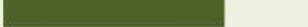
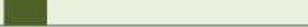
**d. Covid 19**

**Gambar 2.18**



Perkembangan kasus Covid19 pada tahun 2020 sebanyak 24,920 kasus, tahun 2021 sebanyak 103,645 kasus, Terjadi peningkatan kasus pada tahun 2021 dikarenakan adanya kasus Delta dan belum ada vaksinasi Covid-19, kemudian menurun lagi memasuki tahun 2022 dikarenakan capaian vaksinasi di Desember 2021 tercapai 70 % dari jumlah penduduk, penerapan PPKM sangat ketat.

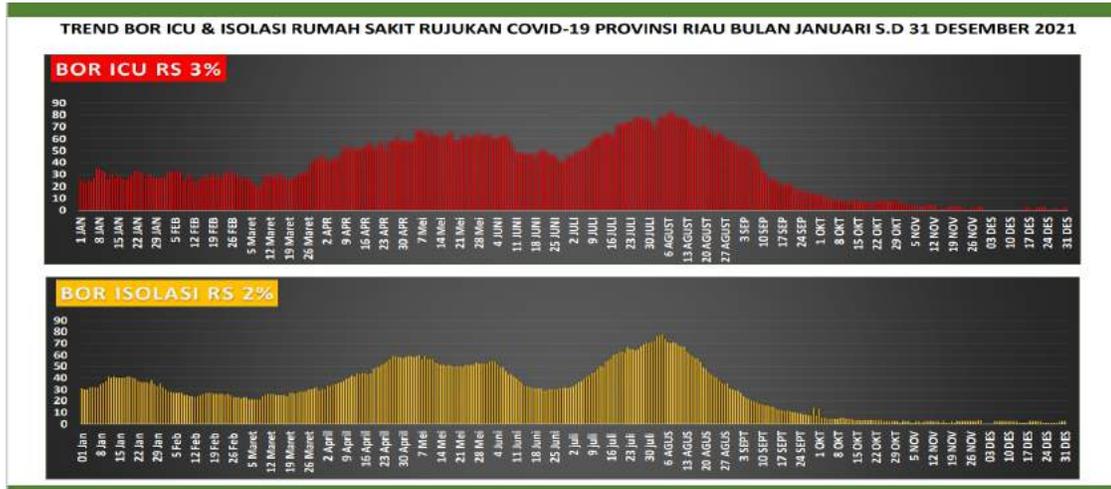
Tabel 2.20.

  <b>PERSENTASE KEMATIAN COVID-19 PADA KABUPATEN/KOTA DENGAN KASUS KONFIRMASI DI PROVINSI RIAU</b>					
NO	KABUPATEN/ KOTA	KASUS	KEMATIAN	PERSENTASE KEMATIAN	
1	PEKANBARU	51998	1281	6.6	
2	KAMPAR	8681	393	5.3	
3	PELALAWAN	3432	182	4.6	
4	INDRAGIRI HULU	6256	203	4.5	
5	INDRAGIRI HILIR	5636	190	4.1	
6	DUMAI	10335	249	3.7	
7	KEP. MERANTI	2004	75	3.4	
8	BENGKALIS	8973	412	3.2	
9	SIAK	9675	303	3.1	
10	KUANSING	5622	164	2.9	
11	ROKAN HILIR	5251	215	2.5	
12	ROKAN HULU	5327	354	2.4	
13	LUAR PROVINSI	5374	103	1.9	

TREND ANGKA KEMATIAN KONFIRMASI COVID-19 PROVINSI RIAU BULAN JANUARI S.D 31 DESEMBER 2021

Persentase Kematian akibat Covid-19 di Kabupaten / Kota terbesar adalah Kota Pekanbaru sebesar 6,6 % dilanjutkan oleh Kabupaten Kampar sebesar 5,3 %, sedangkan Persentase Kematian akibat Covid-19 di Kabupaten / Kota terkecil berada pada Kabupaten Rokan Hilir ( 2,5 %) dan Rokan Hulu ( 2,4 % ),

Gambar 2.19.



Trend BOR ICU dan Isolasi Rumah Sakit Rujukan Covid-19 hingga 31 Desember 2021 menunjukkan penurunan dimana BOR ICU RS ( 3 % ) dan BOR Isolasi RS ( 2 % )

Tabel 2.21.

KABUPATEN/ KOTA	SASARAN	VAKSINASI 1	%	VAKSINASI 2	%	VAKSINASI 3	%
PEKANBARU	748.096	735.075	98,26	575.328	76,91	9.070	82,06
KAMPAR	634.966	447.705	70,51	217.517	34,26	1.959	82,69
PELALAWAN	285.678	214.392	75,05	102.788	35,98	1.246	70,55
KUANSING	258.199	192.392	74,51	109.857	42,55	1.003	105,69
INHU	336.209	253.246	75,32	124.039	36,89	1.575	80,03
INHIL	506.802	363.996	71,82	134.547	26,55	1.783	66,75
SIAK	344.142	248.114	72,10	158.067	45,93	1.772	100,51
ROHUL	428.340	305.607	71,35	110.891	25,89	1.637	76,85
ROHIL	479.764	352.506	73,47	146.189	30,47	1.735	77,84
BENGGALIS	421.701	315.977	74,93	187.585	44,48	2.543	80,70
MERANTI	160.392	112.668	70,25	62.613	39,04	850	92,49
DUMAI	236.058	195.812	82,95	132.782	56,25	1.456	74,48
<b>TOTAL</b>	<b>4.840.347</b>	<b>3.737.490</b>	<b>77,22</b>	<b>2.062.203</b>	<b>42,60</b>	<b>26.629</b>	<b>80,88</b>

Capaian Vaksinasi sampai 31 Desember 2021, untuk Vaksinasi 1 ( 77,22 % ), Vaksinasi 2 ( 42,60 % ) dan Vaksinasi 3 ( 80,88 % ), Untuk Kabupaten / Kota yang sudah mencapai 70 % adalah Kota Pekanbaru dengan Vaksinasi 1 ( 98% ), Vaksinasi 2 ( 76,91 % ) dan Vaksinasi 3 ( 82,06 % )

### 2.3.2. Morbilitas

Angka kesakitan (morbidity) merupakan indikator penting yang digunakan untuk penilaian dan perencanaan program yang bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian di suatu wilayah, Tingkat angka kesakitan mempunyai peranan yang lebih penting dibandingkan dengan angka kematian karena apabila angka kesakitan tinggi maka akan memicu kematian sehingga otomatis menyebabkan angka kematian juga tinggi,

#### a. Tuberkulosis (TB)

##### 1) Succes Rate /SR

Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis, Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan yang mendapat pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan, Gambaran Angka Keberhasilan Pengobatan (Succes Rate) Tahun 2016 s,d 2020 bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.22**  
**Capaian Succes Rate TB Per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau**  
**Tahun 2016-2020**

No	Kabupaten/Kota	Persentase Succes Rate TB								
		2016	2017	2018	2019			2020		
					L	P	L+P	L	P	L+P
1,	Kuantan Singinggi	93,41	94,86	85,3	57,0	59,3	57,8	94,1	93,8	94
2,	Indragiri Hulu	90,26	92,94	90,5	65,9	65,5	65,8	92,3	90,3	91,4
3,	Indragiri Hilir	93,31	92,94	56,8	33,3	34,7	33,9	91,7	94,3	92,6
4,	Pelalawan	93,89	68,75	91,9	76,9	79	77,7	99,2	99,6	99,3
5,	Siak	81,62	74,73	85,2	82,0	85,7	83,3	92,2	97,6	94,1
6,	Kampar	85,57	83,46	69,2	64,2	58,9	62,3	94,4	94,5	94,5
7,	Rokan Hulu	92,65	87,13	51,1	90,8	89,3	90,3	97,4	95,8	96,9
8,	Bengkalis	82,99	83,68	95,1	87,6	89,8	88,3	89,9	93,2	91
9,	Rokan Hilir	86,45	88,56	86,1	92,6	91,3	92,1	91,8	94,2	92,6
10,	Kep,Meranti	85,15	90,17	84,3	75,4	89,2	80,4	59,3	63,3	60,7
11,	Kota Pekanbaru	71,94	86,07	90,4	69,5	66,5	68,3	82,1	87,1	84,1
12,	Dumai	90,93	88,22	88	90,8	94,7	92,0	92,9	92,6	92,8
Provinsi Riau		83,74	85,56	81,6	73,9	72,2	73,2	89,7	91,6	90,4
Nasional		85	85,1	84,6			86,6			73

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Riau dan Profil Kesehatan Nasional

Target WHO Angka Keberhasilan Pengobatan (Succes Rate) TB >85% berarti secara nasional Angka Keberhasilan Pengobatan TB tahun 2020 kurang dari target WHO tetapi untuk Provinsi Riau sudah tercapai target (90,4%), Angka Keberhasilan Pengobatan (SR) di Provinsi Riau dari tahun 2016 sd 2020 menunjukkan angka fluktuatif, terjadi kenaikan dari tahun 2016 (83,74%) ke tahun 2017(85,56%) tetapi menurun menjadi 81,6% di tahun 2018 dan 2019 (73,2%) dan naik lagi di tahun 2020 menjadi 90,4%, Ada tahun 2020 persentase Succes Rate tertinggi berada di Kab, Pelalawan (99,3%), Kab, Rokan Hulu (96,9%) dan terendah berada di Kab, Kep, Meranti (60,7%),

## 2) Case Detection Rate /CDR)

Case Detection Rate (CDR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus baru tuberkulosis, CDR menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program,

**Tabel 2.23**

**Capaian Case Detection Rate Per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020**

No	Kabupaten/Kota	Persentase Case Detection Rate TB				
		2016	2017	2018	2019	2020
1,	Kuantan Singingi	35	17	32	31	24
2,	Indragiri Hulu	26	21	17	24	26
3,	Indragiri Hilir	19	21	24	18	21
4,	Pelalawan	49	35	39	42	21
5,	Siak	37	18	22	25	21
6,	Kampar	32	28	31	34	32
7,	Rokan Hulu	56	42	37	52	37
8,	Bengkalis	36	25	22	33	30
9,	Rokan Hilir	38	29	36	50	37
10,	Kep,Meranti	38	28	33	28	19
11,	Kota Pekanbaru	59	48	66	50	31
12,	Dumai	59	31	36	43	36
Provinsi Riau		41	32	37,5	35,1	30
Nasional		35,8	42,4	67,2	64,5	41,7

Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

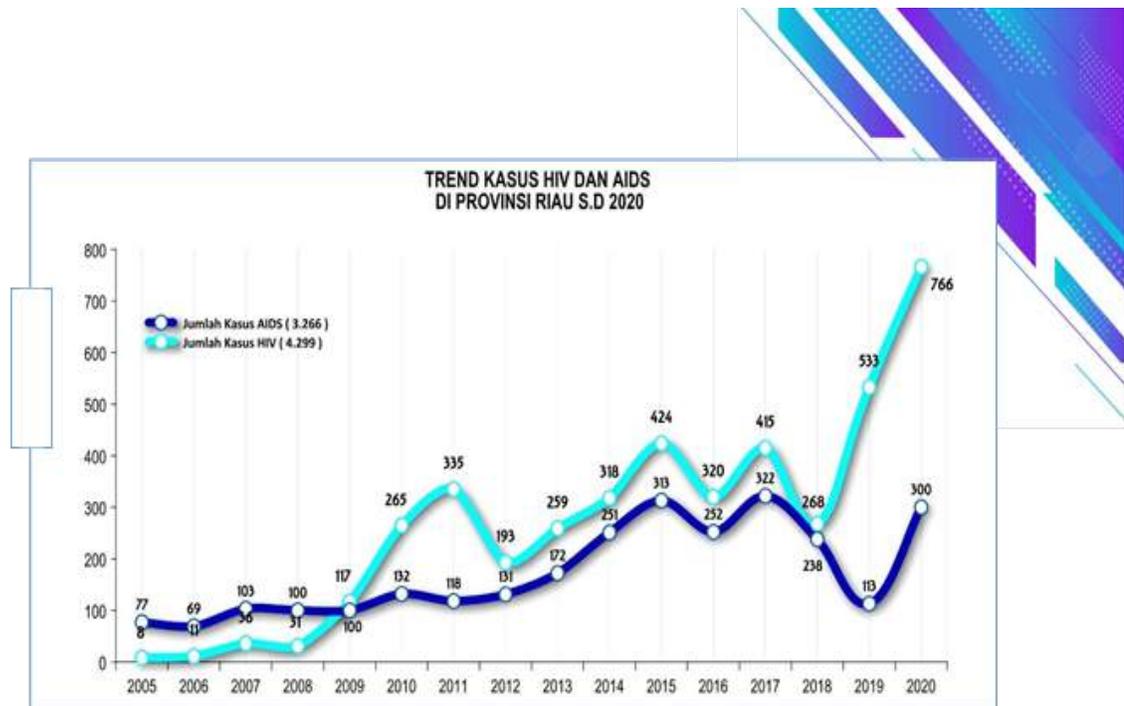
Tabl 2,23, menunjukkan bahwa Case Detection Rate kasus tuberkulosis Provinsi Riau pada tahun 2020 sebesar 30 % menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 (35,1%) dan 2018 (37,5%), Persentase CDR Provinsi Riau tahun 2020 (30%) dibawah angka nasional (41,7%) begitu juga tahun sebelumnya, Angka nasional pun tahun 2020 masih jauh dari

angka CDR yang direkomendasikan oleh WHO yang sebesar  $\geq 90\%$ , Kab/Kota yang capaian CDR nya tertinggi berada pada Kab,Rokan Hulu (37%) dan terendah dengan nilai sebesar 21% berada di Kab, Siak, Kab, Pelalawan dan Kab, Indragiri Hilir (21 %),

**b. Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency**

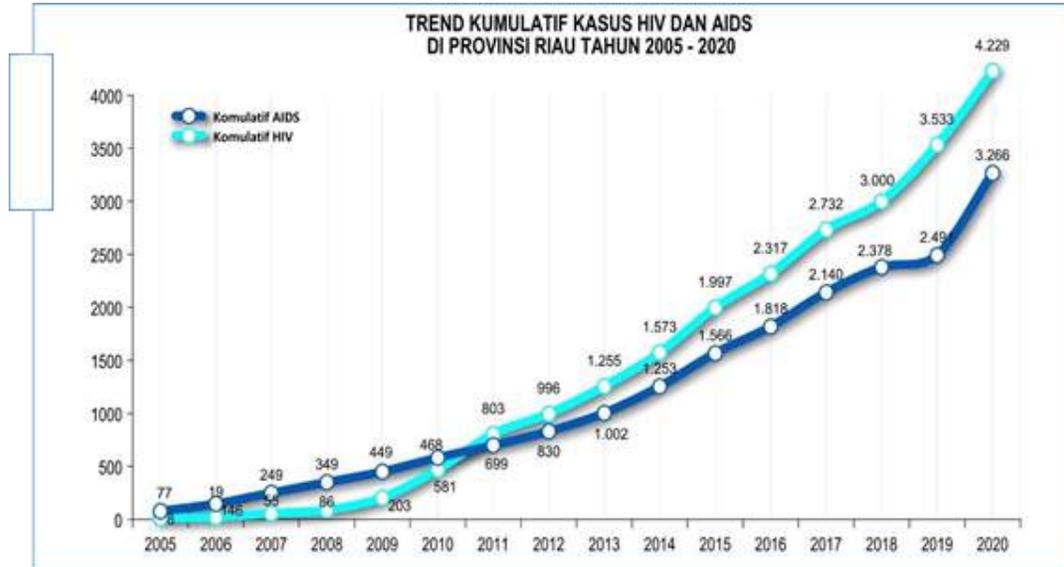
HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain,

Pemantauan secara terus menerus atau surveilans terhadap laju epidemiologi kasus HIV dan IMS sangat penting dikembangkan, agar data surveilans ini bisa digunakan untuk mengembangkan intervensi yang efektif menekan laju penularan HIV dan IMS sesuai kondisi wilayah. Dari hasil surveilans terhadap kasus HIV di Provinsi Riau sejak pertama kali ditemukan tahun 2005 sampai dengan 2020 tersebar di 12 kabupaten/kota, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



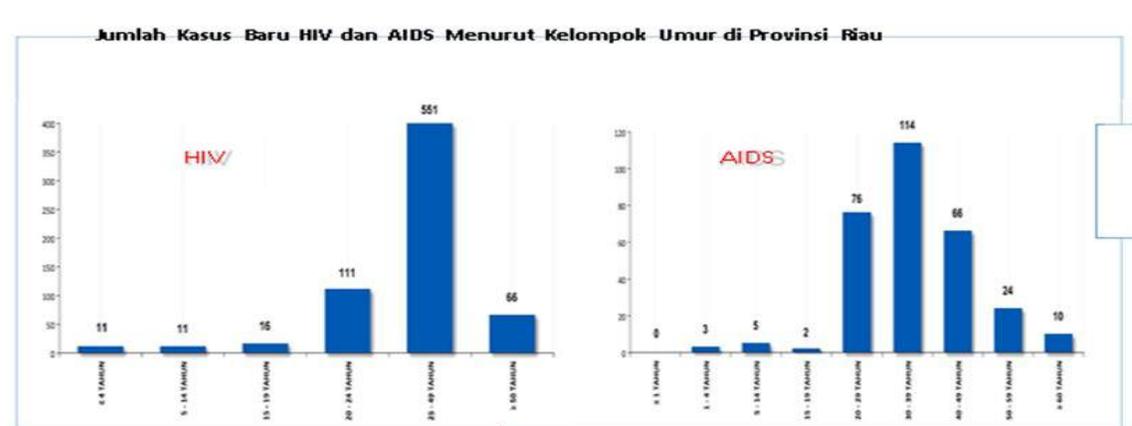
Jumlah penderita HIV mulai tahun 2019 meningkat signifikan dua kali lipat dari tahun sebelumnya 268 kasus menjadi 533 kasus dan di tahun 2020 meningkat lagi menjadi 766 orang.

Sedangkan penderita AIDS di tahun 2020 berbanding lurus dengan jumlah kasus HIV, yang berbeda di tahun sebelumnya, kondisinya berbanding terbalik dengan jumlah kasus HIV yang meningkat drastis, dimana tahun 2019 terjadi penurunan ditemukan 113 kasus dan di tahun 2020 meningkat kembali menjadi 300 kasus



Dari grafik diatas secara komulatif trend jumlah kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan secara komulatif dari tahun 2005-2020 meningkat terus. Tahun 2020, jumlah kasus HIV yang dilaporkan meningkat menjadi 4.229 kasus dan kasus AIDS menjadi 3.266 kasus.

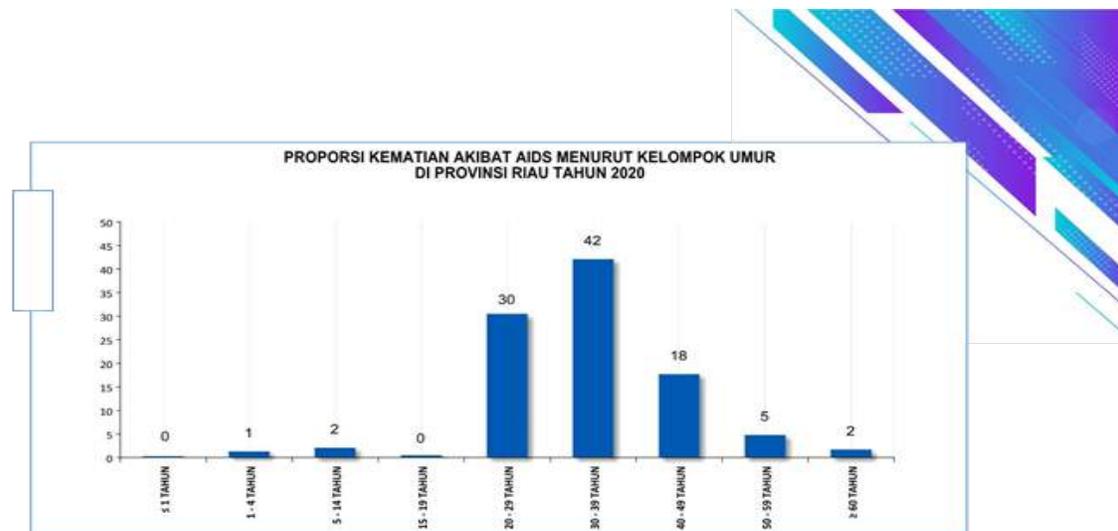
Dari gambar diatas secara komulatif trend jumlah kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan secara komulatif dari thun 2005 sd 2020 meningkat terus. Tahun 2020 jumlah kasus HIV yag dilaporkan meningkat menjadi 4.229 kasus dan AIDS menjadi 3.266 kasus.



Penderita HIV dari kelompok umur kebanyakan dari usia produktif, antara 20-49 tahun meningkat setiap tahunnya. Golongan umur yang paling tinggi ditemukan antara 25-49 tahun sebanyak 551 orang. Sedangkan dari kelompok umur penderita AIDS yang paling banyak yaitu pada kelompok umur antara 30-39 tahun sebanyak 114 orang



Kasus HIV dan AIDS yang ditemukan dan dilaporkan berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki untuk HIV sebanyak 75,30% dan kasus AIDS sebanyak 73,09%.



Dilihat dari grafik diatas, proporsi kematian diakibatkan AIDS tahun 2020 yang paling banyak pada kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 42 orang dan pada kelompok umur 20-29 tahun sebanyak 30 orang.

**TABEL 2.24.**  
**DATA TEMUAN KASUS HIV DAN ODHA BARU YANG MEMULAI ARV PER KAB/KOTA TAHUN 2016 – 2020**

No.	Kab./Kota	3.2 LBPHA	2016	%	3.2 LBP HA	2017	%	3.2 LBPH A	2018	%	3.2 LBP HA	2019	%	3.2 LBP HA	2020	%
1	Pekanbaru	283	383	73,9	286	453	63,1	321	417	77,0	332	241	137,8	303	376	80,6
2	Bengkalis	36	32	112,5	41	56	73,2	35	59	59,3	54	79	68,4	58	70	82,9
3	Dumai	40	43	93,0	45	74	60,8	54	34	158,8	32	68	47,1	20	34	58,8
4	Pelalawan	16	21	76,2	21	31	67,7	23	31	74,2	19	28	67,9	23	59	39,0
5	Rokan Hilir	31	14	221,4	30	39	76,9	27	13	207,7	27	45	60,0	27	45	60,0
6	Indragiri Hilir	21	41	51,2	30	23	130,4	24	27	88,9	24	12	200,0	21	26	80,8
7	Siak	7	0	#DIV/0!	10	21	47,6	9	22	40,9	6	20	30,0	5	14	35,7
8	Kampar	3	0	#DIV/0!	6	8	75,0	6	10	60,0	2	9	22,2	4	15	26,7
9	Kep, Meranti	3	9	33,3	7	13	53,8	19	23	82,6	12	28	42,9	21	19	110,5
10	Rokan Hulu	11	27	40,7	18	15	120,0	13	15	86,7	25	15	166,7	22	32	68,8
11	Kuansing	0	6	0,0	0	0	#DIV/0! !	8	16	50,0	8	7	114,3	12	15	80,0
12	Indragiri Hulu	0	0	#DIV/0!	0	8	0,0	4	8	50,0	35	35	100,0	20	21	95,2
<b>Jumlah</b>		<b>451</b>	<b>576</b>	<b>78,3</b>	<b>494</b>	<b>741</b>	<b>66,7</b>	<b>543</b>	<b>675</b>	<b>80,4</b>	<b>576</b>	<b>587</b>	<b>98,1</b>	<b>536</b>	<b>726</b>	<b>73,8</b>

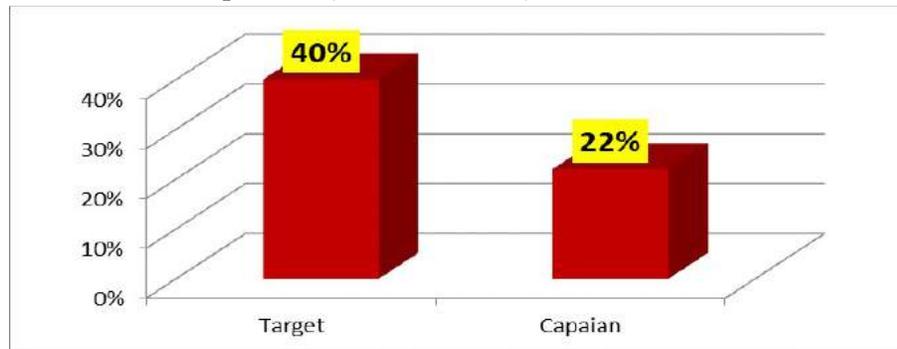
Keterangan :

LBPHA : Laporan Bulanan Perawatan HIV/AIDS

Data di atas adalah tentang persentase Orang Dengan HIV-AIDS baru yang memulai ART, dimana jumlah temuan kasus HIV baru dibandingkan dengan ODHA baru yang memulai pengobatan ARV per tahun, Seyogyanya semua temuan HIV baru mendapatkan pengobatan ARV untuk memutus mata rantai penularan, Namun bila dilihat dari tabel di atas diperoleh persentase yang fluktuatif, Data < 100% menunjukkan bahwa kasus HIV yang ditemukan belum semuanya diterapi yang pada umumnya disebabkan karena ;

- ◆ ODHA belum mau diterapi karena merasa masih sehat,
- ◆ Pindah atau tidak bisa dihubungi lagi oleh petugas kesehatan, rujuk keluar atau meninggal sebelum memulai ARV,
- ◆ Adapun untuk data > 100% artinya jumlah ODHA yang memulai ARV lebih banyak dibandingkan dengan temuan kasus HIV, dimana hal ini terjadi karena adanya temuan HIV pada tahun sebelumnya yang baru memulai ARV pada tahun tersebut dan adanya ODHA rujuk masuk yaitu ODHA dari luar wilayah yang memulai terapi di kab tersebut,
- ◆ Secara umum rendahnya persentase ODHA yang memulai ARV adalah karena lost to follow up atau ODHA yang tidak hadir /hilang baik sebelum atau setelah mendapat ARV, sebagian lagi karena meninggal/rujuk keluar/stop ARV karena alasan klinis,
- ◆ Tren data memperlihatkan adanya peningkatan sejalan dengan semakin banyaknya Faskes yang menyediakan ARV atau ODHA semakin mudah untuk mengakses pengobatan ARV dan kinerja tim di Faskes yang juga semakin baik.

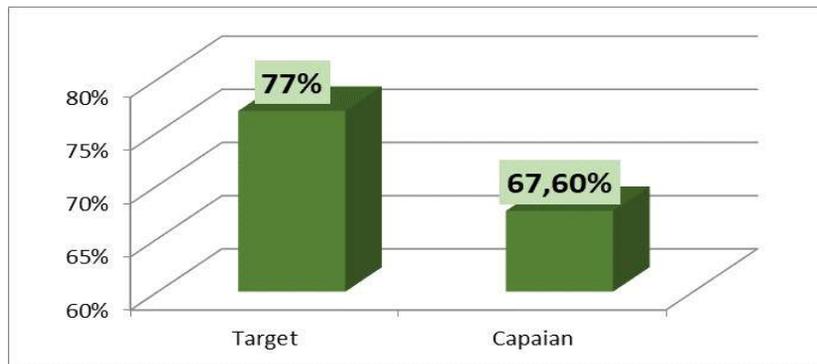
Gambar 2,20  
 Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) Tahun 2020



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Berdasarkan estimasi tahun 2020 Kemenkes diperkirakan ada 11,596 ODHA di Provinsi Riau, Sampai dengan Desember 2020 telah ditemukan 6,873 kasus HIV, dimana 3,266 diantaranya ditemukan sudah pada stadium AIDS, Temuan HIV di Provinsi Riau saat ini sekitar 58,9% dari perkiraan estimasi, dan yang sedang dalam terapi ARV hanya 22% dari 40% yang ditargetkan, Artinya target Renstra tahun 2020 ini belum bisa dicapai atau capaian kinerja hanya 55%, Gap antara temuan kasus HIV dengan estimasi ODHA cukup besar, dan yang membuat kinerja menjadi lebih rendah adalah karena ODHA yang tetap menjalani terapi ARV sampai saat ini jauh lebih kecil lagi dari temuan kasus karena; lost to follow up, berhenti, meninggal, rujuk keluar dan belum memulai ARV,

Gambar 2.21  
Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai ART Tahun 2020



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Grafik diatas menunjukkan Jumlah ODHA ditemukan yang memulai ARV (inisiasi pengobatan ARV) dibandingkan dengan jumlah ODHA baru yang ditemukan, Jumlah ODHA ditemukan melalui layanan tes konseling HIV baik dengan pendekatan sukarela maupun inisiasi petugas kesehatan, ODHA yang memulai ARV dilakukan di layanan perawatan dukungan dan pengobatan (PDP) yang dilakukan secara komprehensif dalam sebuah layanan maupun dengan proses rujukan, Capaian tahun 2020 ini sebesar 67,60% ODHA baru yang memulai ART, Capaian kinerja tahun 2020 ini sebesar 87,7% atau masih ada 12,3% ODHA ditemukan namun belum memulai terapi ARV, Data ini memperlihatkan bahwa upaya untuk memutus mata rantai penularan belum 100% bisa dilakukan, karena belum semua temuan HIV bisa diinisiasi ARV,

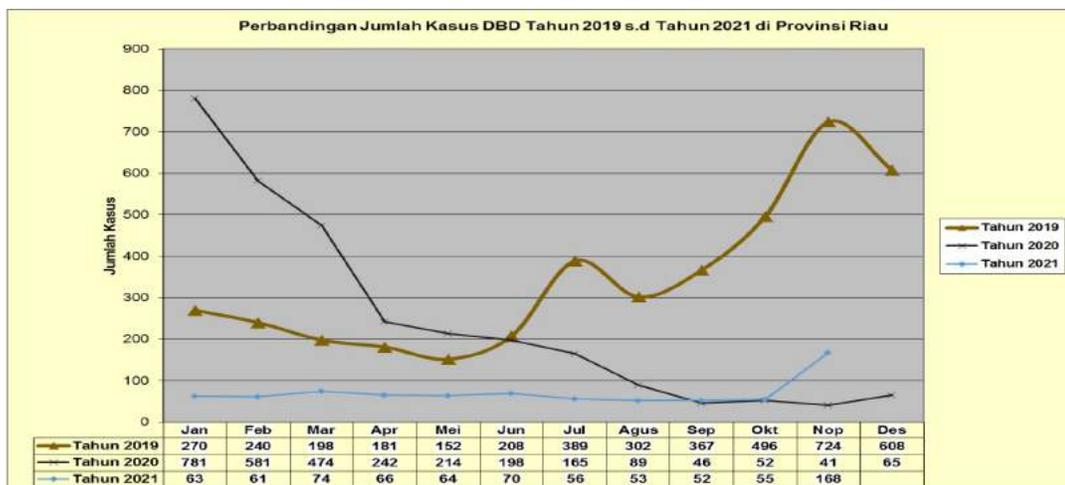
### c. Demam Berdarah Degue (DBD)

Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*, Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari empat virus dengue, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi untuk tetap siaga menghadapi kasus DBD, Melalui surat edaran itu, setiap daerah diimbau untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN),

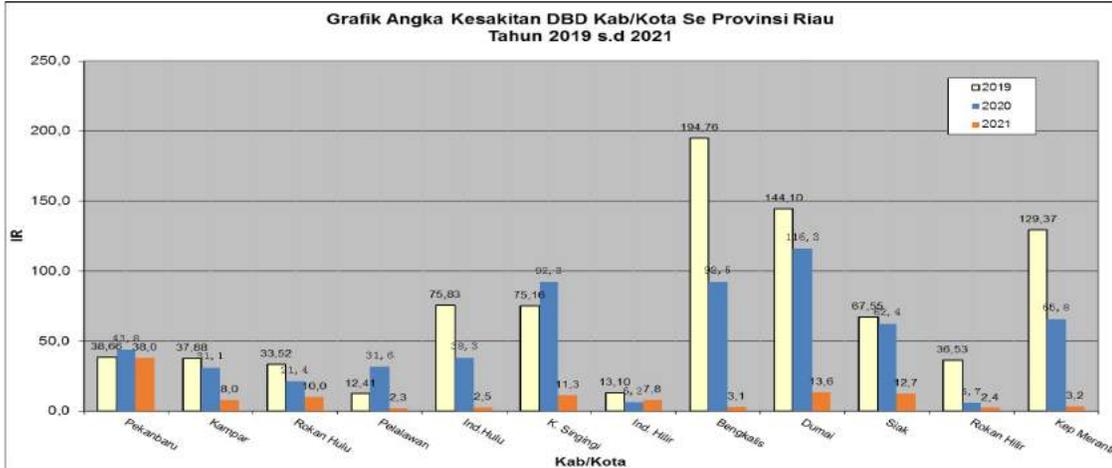
Gambaran jumlah kasus di Provinsi Riau Menurut Kab/ Kota bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.22

Perbandingan Jumlah Kasus DBD Tahun 2019 s,d 2021 di Provinsi Riau



Gambar 2.23  
 Angka Kesekitan DBD Kab/Kota se Provinsi Riau  
 Tahun 2019- 2021



Di Provinsi Riau jumlah kasus DBD yang dilaporkan pada tahun 2019 sebanyak 4,135 orang (IR = 59,3 per 100,000 penduduk, menurun di tahun 2020 menjadi 2,948 orang ( IR : 42,3 per 100,000 penduduk) menurun lagi di tahun 2021 cukup signifikan menjadi 595 kasus (IR : 8,5 per 100,000 ), Pada tahun 2019 dan 2020 kasus tertinggi berada di Kab,Bengkalis ( 1,116 orang /IR : 194,8 per 100,000 di tahun 2019 ; 530 orang / IR : 92,5 per 100,000 penduduk) dan Kota Dumai (446 orang/ IR : 144,1 per 100,000 di tahun 2019 ; 359 orang /IR : 116,3 per 100,000 penduduk),Sedangkan tahun 2021 penderita DBD terbesar berada di Kota Pekanbaru yaitu 286 orang / IR : 25 per 100,000 penduduk, IR terendah berada di Kabupaten Indragiri Hulu ( 6 orang /IR : 1,4 per 100,000 penduduk),

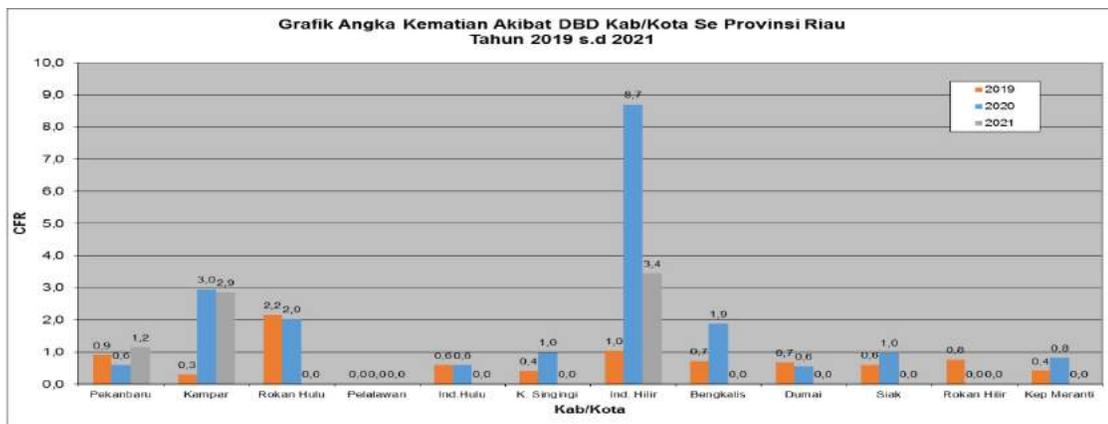
Tabel 2.25  
 Perbandingan Jumlah Kab Kota  
 dengan IR DBD < 49 per 100,000 penduduk

No	Tahun	Jumlah Kab/Kota dengan IR DBD < 49 per 100,000 penduduk	Jumlah Kab/Kota dengan IR DBD > 49 per 100,000 penduduk	Persentase Kab/Kota dengan IR DBD < 49 per 100,000 penduduk (%)
1	2021	12	0	100
1	2020	7	5	58
2	2019	6	6	50

Sumber : Laporan Seksi P2

Dari tabel diatas Tahun 2019 persentase Kabupaten/Kota dengan Incidence Rate /IR DBD < 49 per 100,000 penduduk ( target Kemenkes) adalah 50%, Kab/Kota dengan IR DBD yang masih berada diatas angka 49 per 100,000 penduduk adalah Bengkalis, Kota Dumai, Kab, Meranti, Kab, Siak, Kab, Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi, Tahun 2020 Persentase Kab/Kota dengan IR DBD , 49 per 100,000 penduduk di Provinsi Riau 58%,, Persentase Kab/ Kota yang mempunyai IR DBD diatas 49 per 100,000 penduduk adalah Kab,Bengkalis, Kota Dumai, Kab,Siak, Kab, Kuansing dan Kab, Kep, Meranti, Tahun 2021 Persentase Kab/Kota dengan IR DBD , 49 per 100,000 penduduk di Provinsi Riau sudah mencapai 100%, namun tetap perlu diwaspadai kemungkinan siklus peningkatan kasus,

**Gambar 2.24**  
**Angka Kematian akibat DBD Kab/Kota Se Provinsi Riau**  
**Tahun 2019-2021**



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pada tahun 2019 penderita DBD yang meninggal sebanyak 50 orang (CFR : 0,7 %) menurun di tahun 2020 kasus meninggal menjadi 38 orang (CFR 1,3 %) menurun lagi di tahun 2021 menjadi 7 orang ( CFR : 1,2), Angka kematian DBD/ Case Fatality Rate (CFR) tertinggi di Tahun 2019 berada di Kab,Rokan Hulu ( CFR : 2,2 % atau 5 orang meninggal dari 232 penderita DBD, tahun 2020 dan tahun 2021 CFR tertinggi berada di Kab, Indragiri Hilir ( Tahun 2020 CFR : 8,7% atau 4 orang meninggal dari 46 penderita , Tahun 2021 CFR :4,5 % atau 2 orang meninggal dari 44 penderita),

#### d. Imunisasi

Tabel 2.26

**Target dan Cakupan Imunisasi Dasar Tahun 2021**

NO	ANTIGEN	TARGET (%)	CAKUPAN (%)
1	Hepatitis B ( HB0 Total )	95	78,3
2	BCG	95	78,2
3	Polio 1	95	77,8
4	DPT-HB-Hib1	95	78,0
5	Polio 2	95	80,3
6	DPT-HB-Hib2	95	75,5
7	Polio 3	95	77,3
8	DPT-HB-Hib3	95	72,6
9	Polio 4	95	74,3
10	IPV ( Inactived Polio Vaccine )	95	64
11	Campak / Measles Rubella (MR)	95	76,4
12	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	93	70

Berdasarkan tabel 2,26 cakupan imunisasi rutin secara provinsi pada beberapa antigen dapat dilihat masih jauh dibawah target 95% dan masih belum ada peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, hal ini antara lain disebabkan karena kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada pelaksanaan pelayanan imunisasi di seluruh posyandu dan adanya kekuatiran orang tua untuk membawa anaknya ke posyandu atau faskes yang ada untuk melakukan imunisasi rutin setiap bulan,

#### e. Penyakit Tidak Menular

Indonesia saat ini berada dalam masa transisi epidemiologi, dimana dalam upaya pembangunan di bidang kesehatan menghadapi beban ganda penyakit, Satu pihak masih banyak penyakit infeksi/penyakit menular (malaria, demam berdarah dengue, leptospirosis, tuberkulosis, diare, dan lain-lain) yang harus ditangani, di lain pihak semakin meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) yang segera membutuhkan perhatian, Pentingnya penanggulangan penyakit tidak menular (PTM) kini telah menjadi perhatian serius bagi dunia, Hal tersebut dibuktikan dengan digunakannya

PTM sebagai salah satu target yang harus dicapai dalam Sustainable Development Goals (SDGs),

Penyakit Tidak Menular secara umum yang diharapkan perilaku hidup sehat hindari faktor risiko, deteksi dini dilakukan secara mandiri, di fasyankes, posbindu dan memanfaatkan telekonsultasi,

Tabel 2, 27  
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar (Kab/Kota)  
Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA $\geq$ 15 TAHUN	MENDAPAT PELAYANAN SESUAI STANDAR	%
1	Kuantan Singingi	72,090	3520	4,9
2	Indragiri Hulu	82,396	10318	12,5
3	Indragiri Hilir	427,051	22995	5,4
4	Pelalawan	95,021	7976	8,4
5	Siak	66,196	29985	45,3
6	Kampar	176,213	13915	7,9
7	Rokan Hulu	126,046	9014	7,2
8	Bengkalis	114,534	96853	84,6
9	Rokan Hilir	115,610	38892	33,6
10	Pekanbaru	236,922	1348	0,6
11	Dumai	66,830	22478	33,6
12	Meranti	39,757	12814	32,2
	RIAU	1,618,666	270108	16,7

Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tabel 2.28  
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Sesuai Standar Kabupaten/Kota  
Tahun 2020

NO	KABUPATEN	JUMLAH PENDERITA DM	PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	
			JUMLAH	%
1	Kuantan Singingi	2,637	1,449	54,9
2	Indragiri Hulu	2,717	2,524	92,9
3	Indragiri Hilir	3,396	1,398	41,2
4	Pelalawan	14,072	17,072	121,3
5	Siak	17,170	6,396	40,0
6	Kampar	5,621	3,084	54,9
7	Rokan Hulu	5,871	5,149	87,7
8	Bengkalis	9,263	9,263	100,0
9	Rokan Hilir	5,901	5,714	96,8
10	Pekanbaru	18,044	6,860	38,0
11	Dumai	3,577	2,916	81,5
12	Meranti	2,527	1,911	75,6
JUMLAH (KAB/KOTA)		90,796	63,736	70,2

*Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit*

### 2.3.3. Status Gizi

Salah satu komponen terpenting dalam pembangunan kesehatan adalah terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat terutama pada periode 1,000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), Periode kehamilan hingga anak berusia 2 tahun merupakan kesempatan emas dalam mencetak generasi berkualitas bebas stunting dan masalah gizi lainnya, Kekurangan gizi pada awal kehidupan berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan, Hal ini dikarenakan kurang gizi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan, berat badan lahir rendah (BBLR), kecil, pendek, kurus, serta daya tahan tubuh yang rendah, Dalam perkembangannya, seorang anak yang kurang gizi akan mengalami hambatan perkembangan kognitif dan kegagalan pendidikan sehingga

berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas di masa dewasa, Kurang gizi yang dialami saat awal kehidupan juga akan berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada kejadian penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, dan penyakit lainnya saat memasuki usia dewasa,

Masalah gizi di Indonesia dipengaruhi banyak faktor, diantaranya kemiskinan, kesehatan, pangan, pendidikan, air bersih, keluarga berencana, dan faktor lainnya, Oleh karena itu permasalahan perbaikan gizi masyarakat merupakan upaya dari berbagai sektor yang membutuhkan sinergi dan harus terkoordinasi,

#### a. Gizi buruk

Tabel 2.29  
Persentase Balita Gizi Buruk Menurut Kab/Kota di Provinsi Riau  
Tahun 2016 sd 2020

No	Kabupaten/Kota	Persentase Balita Gizi Buruk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1,	Kuantan Singingi	1,9	2,24	1,8	1,44	0,71
2,	Indragiri Hulu	2,9	1,81	0	2,26	0,90
3,	Indragiri Hilir	1,3	4,3	0,1	1,93	0,49
4,	Pelalawan	0,7	1,11	1,1	1,33	0,43
5,	Siak	1,4	1,5	2,7	2,15	1,10
6,	Kampar	0,6	0,21	2,4	1,47	1,24
7,	Rokan Hulu	0,2	1,65	3,3	1,51	0,53
8,	Bengkalis	1,0	1,39	1,2	1,28	1,93
9,	Rokan Hilir	1,0	1,81	0,2	0,82	0,81
10,	Kep.Meranti	0,4	0,63	1,9	1,46	1,9
11,	Kota Pekanbaru	0,7	0,89	0,9	1,46	0,58
12,	Dumai	0,2	0,33	0,1	0,71	0,03
Provinsi Riau		1,03	1,6	1,4	1,37	0,88
Nasional ( Riskesdas)				3,8		

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan tabel 2.20 Persentase Balita Gizi Buruk di Provinsi Riau cenderung menurun. Walaupun tahun 2017, Persentase Gizi buruk meningkat dari 1,03 menjadi 1,6, Namun 3 Tahun kemudian dari 2018 hingga 2020 menurun hingga mencapai 0,88, Persentase Gizi Buruk selama lima tahun sudah lebih rendah dari Persentase Gizi Buruk dari Hasil Riskesdas Tahun 2018 sebesar 3,8. Namun perlu dilakukan penelusuran daerah-daerah kantong Gizi Buruk untuk dilakukan intervensi secara menyeluruh, dengan melibatkan lintas sektor terkait.

## b. Gizi kurang

Tabel 2.30  
Persentase Balita Gizi Kurang di Provinsi Riau Tahun 2016 sd 2020

No	Kabupaten/Kota	Persentase Balita Gizi Kurang				
		2016	2017	2018	2019	2020
1,	Kuantan Singingi	8	8,13	11,2	8,6	4,3
2,	Indragiri Hulu	9,8	5,33	9,5	9,4	4,18
3,	Indragiri Hilir	10,4	5,53	15,7	11,1	2,17
4,	Pelalawan	6,4	6,11	10,4	6,5	1,26
5,	Siak	8,9	7,55	15,2	10,4	5,76
6,	Kampar	10	7,65	12,9	8,6	4,53
7,	Rokan Hulu	2,4	8,42	13,0	10,3	2,5
8,	Bengkalis	9	9,42	12,1	9,3	5,31
9,	Rokan Hilir	9	5,04	12,9	4,4	3,62
10,	Kep,Meranti	8,1	8,11	12,4	9,9	6,28
11,	Kota Pekanbaru	8,1	8,56	13,1	6,5	1,73
12,	Dumai	2,5	2,71	1,6	7,3	0,32
Provinsi Riau		7,71	7,3	10,7	6,61	3,5
Nasional				11,4(Riskesdas)		

Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan tabel 2,21 Persentase Balita Gizi Kurang di Provinsi Riau cenderung berfluktuatif, Tahun 2017, Persentase Gizi Kurang menurun dari 7,71 menjadi 7,3, Naik kembali pada Tahun 2018 sebesar 10,7 dan kembali turun Tahun 2019 dan Tahun 2020 hingga mencapai 3,5 persen. Persentase Gizi Kurang selama lima tahun sudah lebih rendah dari Persentase Gizi Buruk dari Hasil Riskesdas Tahun 2018 sebesar 11,4 persen.

## c. Stunting

Stunting adalah kondisi ketika balita memiliki tinggi badan dibawah rata-rata, Hal ini diakibatkan asupan gizi yang diberikan, dalam waktu yang panjang, tidak sesuai dengan kebutuhan. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.

**TABEL 2.31**  
**PREVALENSI STUNTING PROVINSI RIAU HASIL RISET/SURVEY**  
**TAHUN 2013 - 2021**

NO	KAB/KOTA	PREVALENSI STUNTING					
		2013 (RISKES DAS)	2016 (PSG)	2017 (PSG)	2018 (RISKESD AS)	2019 (SSGBI/S USENAS)	SSGI 2021
1	KUANTAN SINGINGI	38,7	19,4	27,3	24,6	29,55	22,4
2	INDRAGIRI HULU	40,5	24,2	33,6	32,2	29,67	23,6
3	INDRAGIRI HILIR	39,9	32,1	34,5	32,2	27,43	28,4
4	PELALAWAN	44,4	27,4	22,3	25,5	22,97	21,2
5	S I A K	24,4	23,6	23	21	27,79	19
6	KAMPAR	32,1	28,7	27	32,1	23,07	25,7
7	ROKAN HULU	58,9	17,9	37,2	27,3	24,37	25,8
8	BENGKALIS	26,9	27,5	26,5	32,3	21,07	21,9
9	ROKAN HILIR	27,3	31,1	36,1	38,1	28,87	29,7
10	KEPULAUAN MERANTI	37	23	24,7	29,9	25,1	23,3
11	KOTA PEKANBARU	34,7	23,9	27,7	16	18,58	11,4
12	KOTA D U M A I	34,1	22,2	30,1	17,3	11,59	23
	RIAU	36,6	25,1	29,7	27,4	23,95	22,3

Keterangan :

Sumber Data

Tahun 2013 : Riskesdas 2013  
Tahun 2016-2017 : PSG (Pemantauan Status Gizi)  
Tahun 2018 : Riskesdas 2018  
Tahun 2019 : Survei SSGBI dan Prediksi Susenas 2019  
Tahun 2021 : SSGI 2021

**Tabel 2.32**  
**Persentase Stunting Provinsi Riau Tahun 2020**  
**Berdasarkan e-PPGBM**

No	Kabupaten/Kota	TB/U				Jumlah Balita Diukur	Jumlah Balita Stunting	%
		Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi			
1	Kab Kuansing	574	1951	17378	152	20055	2525	12,59
2	Kab Inhu	691	2225	26987	285	30188	2916	9,66
3	Kab Inhil	393	961	32189	301	33844	1354	4,00
4	Kab Pelalawan	70	279	10923	105	11377	349	3,07
5	Kab SIAK	808	2219	22168	251	25446	3027	11,90
6	Kab Kampar	1270	2992	44916	952	50130	4262	8,50
7	Kab Rokan Hulu	638	1926	33697	362	36623	2564	7,00
8	Kab Bengkalis	1227	3008	34958	691	39884	4235	10,62
9	Kab Rokan Hilir	381	1473	33250	241	35345	1854	5,25
10	Kab Kep.Meranti	535	1401	12688	145	14769	1936	13,11
11	Kota Pekanbaru	155	351	20776	584	21866	506	2,31
12	Kota DUMAI	31	79	25126	87	25323	110	0,43
<b>JUMLAH</b>		<b>6773</b>	<b>18865</b>	<b>315056</b>	<b>4156</b>	<b>344850</b>	<b>25638</b>	<b>7,43</b>

Sumber: data e-PPGBM

Dilihat dari tabel diatas secara Provinsi persentase stunting dibawah target tetapi masih ada beberapa Kabupaten yang masih cukup tinggi dibandingkan Kabupaten lain seperti Kab. Kepulauan Meranti (13,11%), Kuantan Singingi (12,59%) dan Siak (11,9%) walaupun masih dibawah target Stunting nasional sebesar 24,1%

### 2.3.4. Pencapaian Universal Health Coverage

Hak hidup sejahtera lahir batin dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan beberapa hak warga yang termaktub dalam konstitusi negara Republik Indonesia, Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan serta jaminan sosial kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada tahun 2014, sebagai bentuk komitmen untuk memberikan perlindungan hak kesehatan, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, Program ini merupakan

upaya konkrit pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan semesta atau Universal Healthcare Coverage (UHC), Sampai 2019, cakupan kepesertaan JKN berdasarkan data per Desember 2019, baru 224,1 juta atau 83 persen dari total populasi penduduk.

Pemerintah Provinsi Riau mencanangkan program Universal Health Coverage (UHC) per tanggal 1 November 2012 dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

**Tabel 2.33**  
**Capaian Universal Health Coverage Provinsi Riau**  
**Tahun 2016 – 2020**

No	Kab/Kota	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Bengkalis	238,339	298,356	365,012	430,778	446,831
2	Indragiri Hilir	295,157	395,988	441,478	471,905	503,657
3	Indragiri Hulu	228,759	241,655	290,722	362,389	362,389
4	Kampar	316,812	431,948	590,171	635,806	635,806
5	Meranti	152,940	150,678	159,860	170,125	170,125
6	Kuansing	140,507	153,169	175,698	250,593	250,593
7	Pelalawan	171,938	211,985	273,729	308,651	308,651
8	Rokan Hilir	243,664	262,805	285,925	405,901	405,901
9	Rokan Hulu	185,908	190,475	284,339	339,089	339,089
10	Siak	145,239	193,333	190,514	331,657	331,657
11	Kota Dumai	200,066	200,826	226,494	269,082	269,082
12	Kota Pekanbaru	896,284	611,780	1,077,798	847,024	847,024
	<b>RIAU</b>	<b>3.360.658</b>	<b>3.342.998</b>	<b>4.117.523</b>	<b>4.660.461</b>	<b>4.870.805</b>
	<b>Sasaran</b>	<b>6.903.570</b>	<b>5.958.999</b>	<b>6.150.146</b>	<b>6.903.570</b>	<b>6.113.725</b>
	<b>Realisasi</b>	<b>48,68%</b>	<b>56,10%</b>	<b>66,95%</b>	<b>76,73 %</b>	<b>79,67 %</b>

Sumber : Data BPJS

### 2.3.5 Pencapaian SPM

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan

Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bagi Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, yang merupakan pelayanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan,
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, Pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB, Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB Provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut;
  - a. KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi yang meluas ke Kabupaten/kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
  - b. KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi berpotensi meluas ke Kabupaten/Kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
  - c. Pemerintah daerah Kabupaten/kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pengajuan permintaan bantuan dengan menggunakan formulir ditandatangani oleh kepala daerah Kabupaten/kota terdampak.

**Tabel 2.34**  
**Target dan capaian indikator SPM Provinsi urusan Bidang Kesehatan**  
**Tahun 2018-2020**

No,	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	Target/Capaian					
			Tahun 2018		2019		2020	
			Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana propinsi	Persentase (%) Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana propinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa propinsi	Persentase (%) Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa propinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	99,8

**a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Propinsi**

Pada saat bencana perlu adanya mobilisasi SDM Kesehatan yang tergabung dalam satu Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan yang meliputi;

- a. Rapid Health Assesment (RHA) atau Tim Penilaian cepat
- b. Tim Gerak Cepat (TGC)
- c. Tim Bantuan Kesehatan

Pemantauan kesiapsiagaan tim kesehatan di posko terpadu dalam rangka menghadapi hari libur/cuti bersama, hari raya Idul Fitri dan Natal serta Tahun Baru di beberapa Kabupaten Kota, seperti; Kabupaten Kampar, Siak, Rohul dan Kota Dumai.

Memasuki tahun 2019 telah terjadi bencana wabah Covid-19 sebagian kegiatan di pakai untuk situasi khusus adalah kondisi atau situasi di mana dilaksanakannya kegiatan berskala besar dan melibatkan banyak orang sehingga berpotensi terjadi krisis kesehatan, Upaya penanggulangan krisis kesehatan terkait situasi khusus ini berupa upaya peningkatan kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan yang berpotensi terjadi selama penyelenggaraan kegiatan khusus tersebut, seperti PSBB membuka 4 Posko besar di 5 Kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi lain, seperti Kabupaten Rohil berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Rokan Hulu berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Kabupaten Kampar berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan dengan provinsi Jambi.

Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat terkonfirmasi Covid-19 di tempat Isolasi Mandiri Milik Pemerintah Provinsi Riau dengan membuka 3 (tiga) tempat Isolasi Mandiri yaitu; Isolasi Mandiri LPMP, BPSDM dan BAPELKES.

**b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi**

Selama tahun 2020 telah terjadi Kejadian Luar Biasa sebanyak 46 kejadian, dengan jumlah populasi rentan sebanyak 1,786,328 jiwa rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.35**

**Kejadian Luar Biasa Kab/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020**

No	Kejadian Luar Biasa	Jumlah Kejadian	Lokasi
1	Malaria	9	Kec, Panipahan, Teluk Pulau, Kab, Rokan Hilir
2	Gigitan Hewan Penular Rabies	24	Kab, Rokan Hilir
3	Rabies / Lysavirus	4	Kab, Kuansing, Kab, Kampar
4	Keracunan Makanan	6	Kota Pekanbaru, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Siak
5	Diphtheriae	3	Kampar
<b>JUMLAH</b>		<b>46</b>	

Sumber ;Bidang Pelayanan Kesehatan

Dari jumlah kejadian luar biasa yang dilaporkan, yang meninggal dunia sebanyak 8 orang dari 1,972 jiwa kasus yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari 46 kejadian. Berdasarkan Permendagri 100 tahun 2018 Provinsi Riau selain bertanggung jawab terhadap capaian SPM dengan 2 indikator yaitu krisis bencana dan kejadian luar biasa (KLB) juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan capaian SPM kabupaten/kota se- Provinsi Riau.

### 2.3.6 Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit

#### a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Akreditasi Puskesmas merupakan kewajiban yang telah diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, dan diantara persyaratan wajib yang ditetapkan adalah puskesmas yang diusulkan untuk penilaian akreditasi adalah puskesmas yang telah teregistrasi, Dari jumlah puskesmas di provinsi Riau pada tahun 2021 sebanyak 234 puskesmas yang sudah teregistrasi sehingga diharapkan semua puskesmas tersebut dapat diakreditasi agar update memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan,

**Tabel 2.36**  
**Akreditasi Puskesmas per Kab/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021**

No	Kab/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	Status Akreditasi Puskesmas			Jumlah Puskesmas Belum Terakreditasi
					Dasar	Madya	Utama	
1	Kuansing	25	16	64	6	9	1	9
2	Inhu	20	18	90	9	9	0	2
3	Inhil	28	26	93	9	14	3	4
4	Pelalawan	14	14	100	3	8	3	0
5	SIAK	15	15	100	2	12	1	0
6	Kampar	31	31	100	11	15	5	0
7	Rokan Hulu	22	21	95	8	11	2	1
8	Bengkalis	18	16	89	6	9	1	2
9	Rokan Hilir	20	17	85	3	13	1	3
10	Kep,Meranti	10	9	90	3	4	2	1
11	Pekanbaru	21	21	100	3	10	8	0
12	DUMAI	10	10	100	1	7	2	0
<b>JUMLAH</b>		<b>234</b>	<b>214</b>	<b>91</b>	<b>63</b>	<b>121</b>	<b>29</b>	<b>23</b>

Sumber ;Bidang Pelayanan Kesehatan

**b. RS Pemerintah yang telah memenuhi syarat Akreditasi**

Rumah sakit Pemerintah yang telah memenuhi syarat Akreditasi pada tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 2.37**

RUMAH SAKIT PEMERINTAH TERAKREDITASI DI PROVINSI RIAU (per 6 Januari 2021)							
No	Nama Rumah Sakit	Kelas	Pemilik	Tgl Masa Berlaku	Status	Rating	Tgl Update
1	RS Umum Daerah Arifin Achmad	B	Pemprop	20-Sep-21	Tingkat Paripurna	★★★★★	06/01/2021
2	RS Umum Daerah Kota Dumai	B	Pemkot	22 Oct 2021	Tingkat Paripurna	★★★★★	29/07/2020
3	RS Umum Daerah Bengkalis	B	Pemkab	23 Oct 2021	Tingkat Paripurna	★★★★★	29/07/2020
4	RS Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura	C	Pemkab	07-Apr-22	Tingkat Paripurna	★★★★★	01/05/2019
5	RS Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	C	Pemkab	14 May 2022	Tingkat Paripurna	★★★★★	28/05/2019
6	RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	C	Pemkab	12 Dec 2021	Tingkat Utama	★★★★	05/08/2020
7	RS Umum Daerah Petala Bumi	C	Pemprop	12 May 2022	Tingkat Utama	★★★★	28/05/2019
8	RS Umum Daerah Teluk Kuantan	C	Pemkab	09 Dec 2021	Tingkat Madya	★★★	05/01/2019
9	RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi	C	Pemkab	09 Dec 2021	Tingkat Madya	★★★	04/01/2019
10	RS Umum Daerah Rokan Hulu	C	Pemkab	17 Dec 2021	Tingkat Madya	★★★	04/01/2019
11	RS Jiwa Tampan	A	Pemprop	11 Aug 2022	Tingkat Madya	★★★	03/09/2019
12	RS Umum Daerah Kec.Mandau	C	Pemkab	19 Aug 2022	Tingkat Madya	★★★	16/09/2019
13	RS Umum Daerah Selasih Riau	C	Pemkab	26-Nop-22	Tingkat Madya	★★★	11/12/2019
14	RS Umum Daerah Bangkinang	C	Pemkab	03-Jul-21	Tingkat Dasar	★★	11/08/2018
15	RS Umum Daerah Tengku Sulung	D	Pemkab	12-Jun-22	Tingkat Dasar	★★	30/06/2019
16	RS Tk. IV Pekanbaru	D	TNI AD	27 Oct 2022	Tingkat Dasar	★★	25/11/2019
17	RS Umum Daerah Indrasari Rengat	C	Pemkab	04-Apr-21	Lulus Perdana	★	28/07/2020
18	RSU TNI-AU Lanud Roesmin Nurjadin	C	TNI AU	28 May 2021	Lulus Perdana	★	28/07/2020
19	RS Bhayangkara Pekan Baru Polda Riau	C	POLRI	18-Jun-21	Lulus Perdana	★	28/07/2020
20	RS Umum Daerah Raja Musa	D	Pemkab	16 Dec 2021	Lulus Perdana	★	08/01/2019
21	RS Umum Universitas Riau	D	Kementerian Lain	16 Dec 2021	Lulus Perdana	★	03/01/2019
22	RS Pertamina Dumai	D	BUMN	25 Dec 2021	Lulus Perdana	★	04/01/2019

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan

Capaian indikator persentase rumah sakit pemerintah yang terakreditasi tahun 2020, versi 2012/SNARS dinilai Sangat Baik karena capaian sebesar 123% yaitu terealisasi 22 RS telah terakreditasi dari target 18 RS, Dari 25 RS Pemerintah/TNI/Polri yang ada di Propinsi Riau sudah 22 RS Pemerintah yang terakreditasi versi 2012/SNARS seperti pada tabel tersebut di atas.

Pada tahun 2020 target 9 RS yang akan melaksanakan re-Akreditasi dan Akreditasi perdana (2 RS Akreditasi perdana dan 7 RS re-Akreditasi), belum terealisasi karena belum ada RS yang melaksanakan re-Akreditasi dan belum ada RS yang melaksanakan Akreditasi perdana, Ini disebabkan karena adanya pandemic virus corona sehingga KARS tidak dapat melaksanakan Akreditasi, Bagi 7 RS yang status Akreditasi habis masa berlakunya pada tahun 2020 dan 2 RS baru yang sudah beroperasi > 2 tahun, Dengan adanya SE Menkes No, HK,02,01 / MENKES / 455 / 2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat dari KARS maka 7 RS yang seyogyanya akan dilakukan re-Akreditasi mendapat perpanjangan masa berlaku sertifikat akreditasi dari KARS, yaitu:

1. RSUD Arifin Achmad
2. RSUD Bengkalis
3. RSUD Dumai
4. RSUD Indrasari Rengat
5. RSUD Puri Husada Tembilahan
6. RS TNI AU
7. RS POLDA RIAU

Rumah Sakit Pemerintah yang belum terakreditasi versi 2012/SNARS sebanyak 3 (tiga) Rumah sakit antara lain :

1. RSUD Madani: Belum dilakukan bimbingan akreditasi, RS soft opening 26 Januari 2018, Grand Opening Bulan Februari 2020, Saat ini pelayanan yang diberikan sudah memenuhi standar pelayanan di PMK 56 Tahun 2014, tetapi karena masa pandemic Covid-19 maka RSD Pekanbaru Madani belum bisa dilaksanakan Akreditasi.
2. RSUD Kec, Tualang Perawang Kab, Siak: merupakan peningkatan dari Puskesmas Rawat Inap menjadi RSUD kelas D, Izin Operasional terbit Desember 2018, Sesuai dengan Permenkes nomor 34 Tahun 2017 tentang akreditasi RS menyatakan bahwa RS yang sudah operasional minimal selama dua tahun wajib akreditasi, Saat ini belum ada rencana untuk persiapan akreditasi karena RS masih

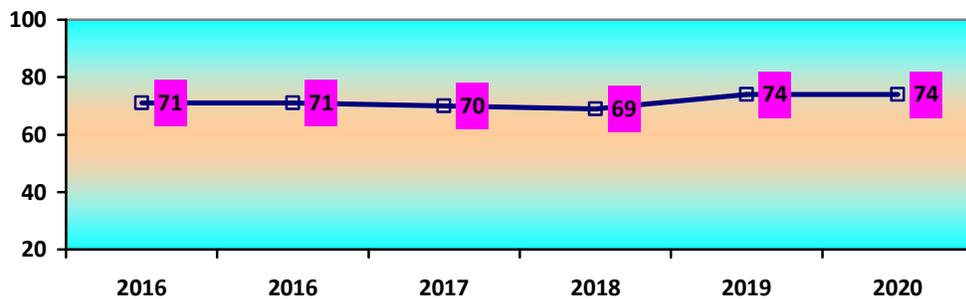
dalam proses pemenuhan SDM dan Alkes ditambah dengan adanya pandemic virus Corona.

3. RS Bhayangkara Dumai ijin operasional terbit bulan Februari 2019 maka RS Bhayangkara Dumai belum wajib melaksanakan Akreditasi, karena syarat nya setelah ijin operasional suatu RS terbit lebih 2 tahun, maka RS Wajib melaksanakan Akreditasi.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 - 2020) jumlah Rumah Sakit baik yang dikelola oleh institusi pemerintah maupun sektor swasta mengalami peningkatan, dimana tahun 2016 terdapat 71 Rumah Sakit bertambah menjadi 74 Rumah Sakit pada tahun 2020, Perkembangan Rumah Sakit di Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun (2016 -2020) cenderung mengalami peningkatan kecuali tahun 2017 dan tahun 2018 yang mengalami pengurangan 1 Rumah Sakit Swasta dibandingkan tahun 2016, Untuk Rumah Sakit Swasta di Provinsi Riau terus mengalami perkembangan terutama Kota Pekanbaru, hal ini seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru, Jumlah Rumah Sakit di Kota Pekanbaru sangat jauh perbandingannya dengan jumlah Rumah Sakit di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Perkembangan Rumah Sakit di Provinsi Riau dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

**Gambar 2.25**

**Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Riau Tahun 2016-2020**

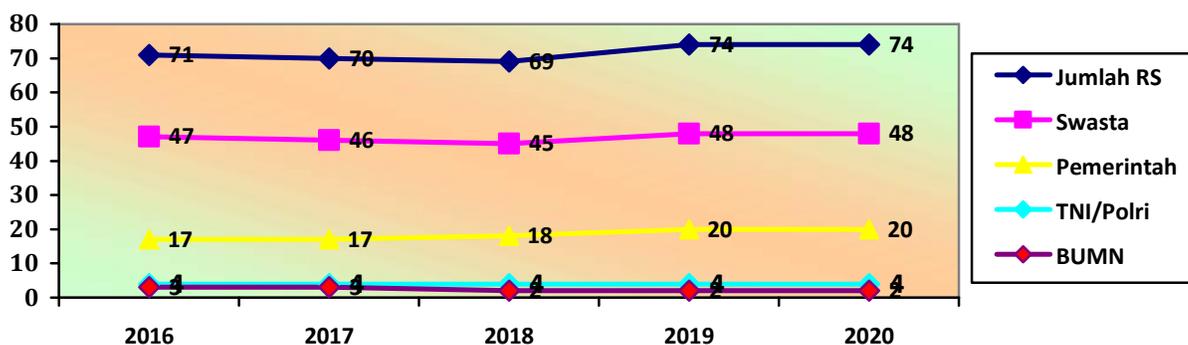


Rumah Sakit Publik di Indonesia dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, Kementerian lain serta swasta non profit (organisasi keagamaan dan organisasi sosial), Jumlah Rumah Sakit Publik di Provinsi Riau sampai dengan tahun 2020 sebanyak 24 unit, Sedangkan Rumah Sakit Privat dikelola BUMN dan Swasta (perorangan, perusahaan dan swasta lainnya).

Pada tahun 2020 terdapat 50 unit Rumah Sakit privat di Provinsi Riau, Rumah Sakit publik maupun privat menunjukkan peningkatan pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, namun dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2.26**

**Perkembangan Rumah Sakit Berdasarkan Kepemilikan Tahun 2016-2020**



Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan,

Bila Rumah Sakit dikelompokkan berdasarkan dua kategori maka di tahun 2020 Rumah Sakit umum ada sebanyak 82% (61) sedangkan untuk Rumah Sakit khusus sebanyak 18% (13) yang tersebar diseluruh Provinsi Riau, Undang-Undang No, 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Perbandingan antara rumah sakit umum dan rumah sakit khusus di Provinsi Riau tahun 2020 dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :

**Gambar 2.27**

**Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus di Provinsi Riau Tahun 2020**

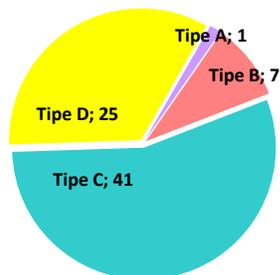


Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan

Kemudian bila dilihat Rumah sakit berdasarkan tipe, Diagram dibawah ini menyajikan tentang tipe Rumah Sakit berdasarkan fasilitas kesehatan dan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membuat rumah sakit terbagi menjadi 4 tipe yakni tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D, Tahun 2020 dari seluruh jumlah Rumah Sakit yang ada di Provinsi Riau yang berjumlah 74 rumah sakit, terdapat 25 Rumah Sakit tipe D, 41 Rumah Sakit tipe C, 7 Rumah Sakit tipe B dan 1 Rumah Sakit tipe A.

**Gambar 2.28**

**Jumlah RS berdasarkan Tipe di Provinsi Riau Tahun 2020**

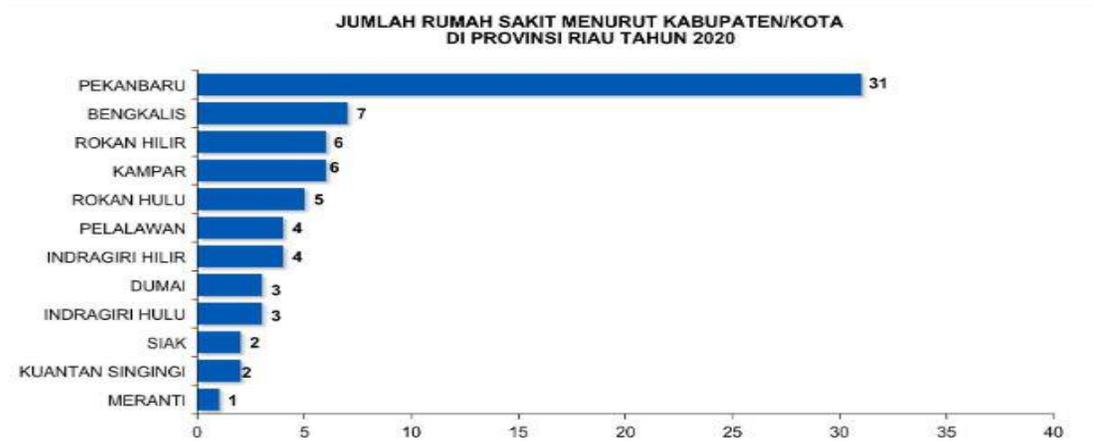


Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan

Penyebaran Rumah Sakit di Provinsi Riau pada tahun 2020 terbanyak berada di Kota Pekanbaru sebanyak 31 unit kemudian diikuti oleh Kabupaten Bengkalis sebanyak 7 Rumah Sakit dan Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 6 Rumah Sakit sedangkan Kabupaten yang paling sedikit Rumah Sakitnya adalah Kabupaten Siak, Kuantan Singingi masing-

masing 2 Rumah Sakit, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah yang paling sedikit memiliki masing 1 Rumah Sakit, Penyebaran Rumah Sakit menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.29**  
**Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Riau Tahun 2020.**



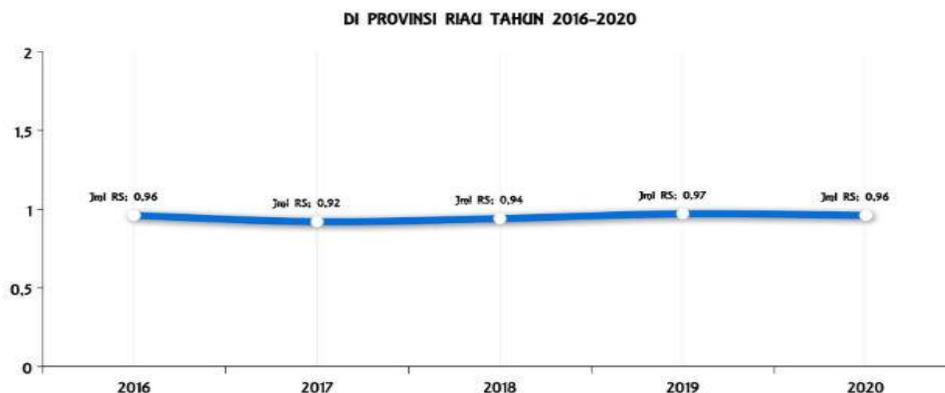
Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan

Sedangkan untuk jumlah dan rasio tempat tidur Rumah Sakit terhadap penduduk dapat menggambarkan kemampuan Rumah Sakit tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam hal daya tampung pasien rawat inap yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan rujukan, Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1,000 penduduk, Gambaran Rasio tempat tidur Rumah Sakit terhadap penduduk tahun 2020 sebesar 0,96 per 1,000 penduduk mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya tahun 2019 sebesar 0,97 per 1,000 penduduk.

Grafik dibawah ini menyajikan rasio tempat tidur Sakit Provinsi Riau kurun waktu lima tahun yakni pada tahun 2016 – 2020.

**Gambar 2.30**

Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1000 di Provinsi Riau Tahun 2016- 2020



Meskipun rasio tempat tidur Rumah Sakit terhadap penduduk tahun 2020 sebesar 0,96 per 1,000 penduduk mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau hanya 3 kabupaten/kota yang rasio tempat tidurnya mencapai 1 yakni Kota pekanbaru 2,96, Kabupaten Bengkalis 1,05 dan Kota Dumai 1,03, Tingginya rasio di Kota Pekanbaru disebabkan jumlah Rumah Sakit yang sebagian besar berada di Kota Pekanbaru.

### 2.3.8. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan, Salah satu pelayanan publik esensial pada kehidupan sehari-hari adalah pelayanan kesehatan, Upaya pemenuhan hak setiap manusia atas kesehatan adalah prinsip dasar dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, Hal ini tertuang dalam UndangUndang Dasar 1945 pasal 28H pasal 34 serta Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa, setiap orang memiliki hak yang sepadan untuk mendapatkan akses atas sumber daya pada bidang kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Dalam hal ini, terdapat fasilitas kesehatan dengan berbagai jenis pelayanan untuk dapat diakses oleh masyarakat, Pelayanan publik dalam hal ini pelayanan kesehatan masih dirasa belum memenuhi harapan masyarakat, Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring

sosial, Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah, Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat, Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka disusunlah sebuah indeks yang dikenal dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk tingkat kualitas pelayanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat dan telah diatur dalam PermenPANRB No, 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

**a. Rumah Sakit Arifin Achmad**

**Tabel 2.38**

**Gambaran Kinerja RSUD Arifin Achmad Tahun 2017 – 2020**

URAIAN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
KAPASITAS TEMPAT TIDUR	545 tt	545 tt	515 tt	505 tt
BOR	57,26 %	63,21%	67,32%	71,39%
LOS	4-5 Hari	5,37 Hari	4,87 Hari	5,51 Hari
TOI	-0,64 Hari	2,88 Hari	2,78 Hari	4,75 Hari
BTO	43 Kali	47 Kali	43 Kali	39 Kali
GDR	82,37 %	79,39 %	81,20 %	86,89%
NDR	52,33 %	49,66 %	51,60%	55,80%
JUMLAH KUNJUNGAN IRJA	158,766 org	171,836 org	117,506 org	145,620 org
JUMLAH KUNJUNGAN RAWA T INAP	26,754 org	26,436 org	31,800 org	19,603 org
JUMLAH KUNJUNGAN IGD	24,205 org	21,647 org	23,156 org	17,688 org
JUMLAH OPERASI	7855 operasi	7716 operasi	8259 operasi	6144 operasi

Tabel : 2.39

## Capaian IKM RSUD Arifin Achmad Tahun 2019 - 2021

IKM	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	80	81	82
Realisasi	80,19	82,31	84,7
Capaian	100,24	101,62	103,29

Sumber : UPT Khusus RSUD Arifin Achmad

Berdasarkan Grafik dan tabel diatas Capaian IKM RSUD Arifin Achmad telah tercapai diatas target dari tahun 2019 dari target 80 realisasi 80,19 capaian 100,24 , tahun 2020 dari target 81 realisasi 82,31 dengan capaian 101,62 , tahun 2021 dari target 82 realisasi 84,7 dengan capaian 103,29 dengan harapan untuk tahun selanjutnya juga akan tercapai.

## b. Rumah Sakit Jiwa Tampan

Tabel 2.40

## Gambaran Kinerja RS Jiwa Tampan Tahun 2017 - 2021

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	BOR (%)	80,49	102,52	115,63	87,34	96,84
2	BTO (kali)	8,18 (8 kali)	8,66 (9 kali)	8,39 (8 kali)	7,39 (7 kali)	8,10 (8 kali)
3	AVLOS (hari)	34,92 (35 hari)	42,51 (42 hari)	49,32 (49 hari)	42,25 (42 hari)	42,62 (43 hari)
4	TOI (hari)	8,71 (9 hari)	- 1,06 (-1 hari)	- 6,80 (-7 hari)	6,27 (6 hari)	1,42 (1 hari)
5	NDR (per mil)	0,213	0,502	0,518	1,082	2,468
6	GDR (per mil)	0,000	0,502	0,518	1,082	4,442
7	Rata-rata kunjungan rawat jalan perhari (orang)	118	158	109	73	77
8	Rata-rata kunjungan rawat inap perhari (orang)	5	5	5	5	6
9	Rata-rata kunj. UGD perhari (orang)	8	9	11	5	7
10	Jlh kunj. rawat jalan pertahun (orang)	28,677	37,950	24,687	17,853	18,921
11	Jlh kunj rawat inap pertahun (orang)	1,881	1,991	1,929	1,848	2,026
12	Jlh kunj. IGD pertahun (orang)	3,106	3,392	4,025	2,013	2,284
13	Jlh hari perawatan pertahun (hr)	67,574	86,635	97,073	79,917	88,367
14	Total lama pasien dirawat pertahun (hari)	65,693	84,644	95,144	78,069	86,341

**Tabel 2.41**  
**Capaian IKM RSJ Tampan Tahun 2019 - 2021**

IKM	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	81	81	82
Realisasi	85	82,31	84,7
Capaian	104,93	101,62	103,29

**Sumber : UPT Khusus RSJ Tampan**

Tempat tidur yang tersedia di Rumah Sakit Jiwa Tampan sejumlah 250 tempat tidur yang tersebar di 8 (delapan) ruang perawatan, Berdasarkan SK Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan Nomor: 121/RST- SK/53,95 bulan Desember tahun 2019 tentang penetapan jumlah tempat tidur pasien Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, yang terbagi menjadi kelas VIP, I, II, III, dan Unit Perawatan Insentif Psikiatri (UPIP) yang merupakan perawatan non kelas, Distribusi tempat tidur berdasar keputusan tersebut dapat dilihat pada tabel 2,28 berikut ini :

**Tabel 2.42**  
**Penetapan Jumlah Tempat Tidur RS Jiwa Tampan Tahun 2020**

No	Kelas Perawatan	Jumlah	Persentase
1	VIP	1	0,40%
2	Kelas I	7	2,80%
3	Kelas II	10	4,00%
4	Kelas III	198	79,20%
5	Non Kelas	34	13,60%
Jumlah		250	100,00%

Sumber :RS, Jiwa Tampan

**c. RSUD Petala Bumi**

RSUD Petala Bumi yang mempunyai 3 lantai terletak di lokasi yang strategis dengan luas tanah 7,750 M2 dan luas bangunan 5,435 M2, RSUD Petala Bumi dilengkapi dengan fasilitas pelayanan antara lain: Pelayanan Gawat Darurat,

Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Bedah Sentral, Pelayanan Intensive Care Unit (ICU), Pelayanan Perinatologi, Pelayanan khusus dan Pelayanan Penunjang-lain.

**Tabel 2.43**

**Gambaran Kinerja RSUD Petala Bumi Tahun 2017 - 2021**

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	BOR (%)	31%	39%	31%	23%	17%
2	BTO (kali)	38	4	39 kali	24 kali	16 kali
3	AVLOS (hari)	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	4 hari
4	TOI (hari)	7 hari	51 hari	7 hari	12 hari	20 hari
5	NDR (per mil)	7	51	9	20	33
6	GDR (per mil)	23	25	21	46	70

Keterangan :

BOR = Tingkat Hunian

LOS = Lama Hari Perawatan

GDR = Angka Kematian Kasar

NDR = Angka Kematian Bersih

**Tabel 2.44**

**Kunjungan Pasien RSUD Petala Bumi Berdasarkan Jaminan Pembiayaan**

NO	Kunjungan	2019	2020	2021
1	Non Asuransi /Umum	15089	6948	12190
2	Asuransi			
	BPJS	37801	28371	24967
	Jamkesda Kota	3630	446	-
	Dinsos	-	-	6
	Jamkesda Kampar	112	155	166
	Jampersal	125	78	23
	Covid		205	413
	TOTAL	56,757	36,203	37,765

**Tabel 2.45. Capaian IKM RSUD Petala Bumi 2019 - 2021**

IKM	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	>90%	>90%	>90%
Realisasi	96,83%	93,70	96,40
Capaian	107,50	104,00	107,50

**Sumber : UPT Khusus RSUD Petala Bumi**

### 2.3.9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Provinsi Riau memiliki beberapa tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan utama yang telah ditetapkan dalam peraturan gubernur dan dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tugas dan fungsi serta tanggungjawab tersebut dimaksud kemudian diimplementasikan dalam bentuk bentuk kegiatan, baik kegiatan yang bersifat rutin sesuai dengan target indikator

yang ada di OPD tersebut, Beberapa kegiatan OPD yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Provinsi Riau telah dilaksanakan sepanjang tahun 2017 diantaranya yang dapat dilihat pada table dibawah ini,

**Tabel 2.46 Indikator GERMAS**

KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
Kampanye Germas	Jumlah Kab,Kota yg melaksanakan minimal 5 tema kampanye Germas
Advokasi Penerapan KTR	Persentase Kab,Kota yg melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 % sekolah
Penguatan Partisipasi Masy dlm Upaya Promotif dan Aktif Preventif melalui UKBM	Persentase Posyandu Aktif
	Persentase Desa yg mengalokasikan Dana Desa utk UKBM sesuai NSPK Kes
Sosialisasi Gemar beraktivitas Fisik	Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik
Pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif	Jumlah petugas kesehatan yg menjadi konselor menyusui
	Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif
Deteksi Dini Penyakit	Jumlah Puskesmas yg melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan 30-50 tahun
	Jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di Instansi Pemerintah dan Swasta ( Untuk Kemenkes )
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yg melaksanakan STBM

## **Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat**

### **Kriteria 1**

Memiliki kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat dan atau kebijakan berwawasan kesehatan

adalah Kab/Kota telah memiliki/menerbitkan kebijakan Germas dan atau kebijakan berwawasan kesehatan, Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup ditetapkan oleh Pemda (bupati/walikota) mencakup 5 klaster germas yaitu :

- 1, Klaster Peningkatan Aktivitas Fisik
- 2, Klaster Peningkatan Edukasi dan Perilaku Hidup Sehat
- 3, Klaster Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi
- 4, Klaster Peningkatan deteksi dini dan Pencegahan Penyakit
- 5, Klaster Peningkatan Kualitas Lingkungan

Dan atau Kebijakan berwawasan kesehatan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota/Kepala OPD berupa Peraturan/Surat Keputusan/ Instruksi/Surat Edaran yang mendukung salah satu klaster germas,

### **Kriteria 2**

Melaksanakan Penggerakan Masyarakat dlm mendukung Germas, minimal 3 kali setahun dgn melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau Mitra Potensial

adalah kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan 5 (lima) Klaster Germas dan melibatkan unsur lintas sektor (OPD), pendidikan (sekolah), UKBM (Posyandu, Posbindu PTM, PosUkk, Pos Lansia, dll) dan atau mitra potensial (dunia usaha, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, dll) dan dilakukan minimal 3 (tiga) kali setahun.

Tabel 2.47  
 Capaian GERMAS Per Kabupaten / Kota Se Provinsi Riau  
 Tahun 2021

No	Kab/Kota	Status Lokus	Memiliki Kebijakan GERMAS sesuai dengan INPRES No,1 Tahun 2017 ( Melaksanakan 5 Kluster GERMAS ) dan atau Kebijakan Berwawasan Kesehatan	Melaksanakan Penggerakkan Masyarakat Dalam Mendukung Kluster GERMAS Minimal 3 Kali Setahun, dengan melibatkan Lintas Sektor , UKBM dan atau Mitra Potensial	Status Indikator
1	Kab Kuansing	Bukan Lokus	Memiliki ( 1 Kebijakan )	Melaksanakan ( 3 Kegiatan )	Memenuhi
2	Kab Inhu	Bukan Lokus	Memiliki ( 3 Kebijakan )	Melaksanakan ( 9 Kegiatan )	Memenuhi
3	Kab Inhil	Bukan Lokus	Memiliki ( 14 Kebijakan )	Melaksanakan ( 4 Kegiatan )	Memenuhi
4	Kab Pelalawan	Lokus	Memiliki ( 1 Kebijakan )	Melaksanakan ( 3 Kegiatan )	Memenuhi
5	Kab Kampar	Bukan Lokus	Tidak Memiliki	Tidak Melaksanakan	Tidak Memenuhi
6	Kab Rokan Hulu	Bukan Lokus	Memiliki ( 1 Kebijakan )	Melaksanakan ( 3 Kegiatan )	Memenuhi
7	Kab Bengkalis	Lokus	Memiliki ( 4 Kebijakan )	Melaksanakan ( 3 Kegiatan )	Memenuhi
8	Kab Rokan Hilir	Bukan Lokus	Memiliki ( 8 Kebijakan )	Melaksanakan ( 6 Kegiatan )	Memenuhi
9	Kota Pekanbaru	Bukan Lokus	Memiliki ( 5 Kebijakan )	Tidak Melaksanakan	Tidak Memenuhi
10	Kota DUMAI	Bukan Lokus	Memiliki ( 1 Kebijakan )	Melaksanakan ( 4 Kegiatan )	Memenuhi
11	Kab, SIAK	Bukan Lokus	Memiliki ( 5 Kebijakan )	Melaksanakan ( 3 Kegiatan )	Memenuhi
12	Kab, Kep, Meranti	Lokus	Memiliki ( 4 Kebijakan )	Melaksanakan ( 6 Kegiatan )	Memenuhi

Tabel 2.48 (form T-C. 23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan  
Provinsi Riau

No	Indikator Kinerja	Targ et SPM	Targe t IKK	Target Indikato r Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
1	Jumlah Kematian Ibu				<135	<135	<135	<131	<131	<131	145	131	119	109	125	129	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah Kematian Bayi				<1005	<1005	<1005	<1005	<1005	<1005	1103	398	388	395	475	596	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah Kematian Balita				<1053	<1053	<1053	<1053	<1053	<1053	1138	1053	806	479	547	632	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Succes Rate (SR) > 95%				78	81	84	85	85	85	84	83	85	82	87	73	107,69	102,47	101,19	96,47	102,35	85,88
5	Persentase jumlah kasus baru HIV per 1000 pddk < 0,5%				0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,012	0,009	0,011	0,08	0,084	0,077	1,33	1,13	1,57	13,33	14	12,83
6	Persentase penduduk usia > 18 tahun dengan tekanan darah tinggi 24,48%				na	<24,48	<24,48	<24,48	0	0	na	21,44	22,79	≥33,2	13,8	12,2	na	87,58	93,10	135,62	0,00	0
7	Persentase penduduk usia >18 tahun dengan gula darah > 2,30%				na	<2,3	<2,3	<2,3	0	0	na	0,97	0,97	<2,3	9,8	52,7	na	42,17	42,17	100,00	0,00	0
8	Peningkatan Perilaku Hidup Sehat				40	40	40	65	65	65	43,7	47,3	47,5	59,1	59,1	48,9	109,25	118,25	118,75	90,92	45,11	75,23
9	Peningkatan kesehatan lingkungan sehat (% desa sanitasi total berbasis masyarakat/STBM)				35	36	42	42	42	60	32,8	56,4	47,5	69,9	69,9	87,36	93,71	156,67	113,10	166,43	166,43	145,60
10	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit																					
	a.DBD (per 100.000 pddk)				60	62	64	66	68	68	51,4	62,5	29,1	12,4	59,3	42,54	85,67	82,90	80,31	77,98	87,21	62,56
	b.Malaria (per 1000 pddk)				<1/1000 pddk	<1/1000 pddk	<1/1000 pddk	<1/1000 pddk	<1/1000 pddk	<1/1000 pddk	0,104	0,047	0,033	0,011	0,019	0,242	104,00	47,00	33,00	11,00	11,00	NA
11	Peningkatan manajemen pelayanan penyakit (akreditasi)																					
	a.Puskesmas				na	8 kec, 11 pkm	45 kec, 60 pkm	100 kec, 133 pkm	166 kec, 217 pkm	166 kec, 217 pkm	na	19 kec, 23 pkm	69 kec, 71 pkm	149 kec, 174 pkm	166 kec, 217 pkm	164 kec, 214 pkm	na	209,09	118,33	130,83	100	98,61
	b.Rumah Sakit				18%	23%	50%	80%	85%	85%	18%	17,56%	40%	80%	85%	88%	100	76,35	80,00	100,00	100,00	123,00
12	Persentase Penggunaan Obat rasional di Fasilitas Dasar Pemerintah			80 persen	70	70	70	75	80	80	68,92	93,7	89	85,4	85,4		98,5	133,9	127,1	113,9	106,8	
13	Rasio tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk			0,85 per 1000 pddk	NA	NA	0,83 per 1000 pddk	0,85 per 1000 pddk	0,90 per 1000 pddk	0,90 per 1000 pddk	0,61 per 1000 pddk	0,62 per 1000 pddk	0,61 per 1000 pddk	3,73 per 1000 pddk	3,73 per 1000 pddk	0,96 per 1000	NA	NA	73,49	72,94	414,44	73,49
	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar			75%	NA	NA	35%	38%	40%	40%	52,6%	73,5%	51,1%	70,5%	70,5%	NA	NA	NA	146	185,5	176,25	NA
14	Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat )			60%	30	35	40	50	65	65	43,7	41,6	49,1	50,1	45,0	48,8	145,67	118,86	112,75	118,20	69,23	75,08
	Persentase RS yang menerapkan PKRS (Promosi Kesehatan di RS			50%	20	25	30	40	50	50	85	83	82,5	20,8	20,8		425,00	332,00	275,00	52,00	41,60	
	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat			80%	60	65	70	75	80	80	85,13	45	45	91,84	90,0	55,77	141,88	69,23	64,29	122,45	112,50	69,71
15	Prevalensi Gizi Buruk Balita			1,2 persen	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,03	1,02	1,6	1,4	1,37	0,88	73,57	78,46	123,08	116,67	0,00	73,33
16	Persentase kab/kota yang memenuhi syarat kualitas lingkungan			45 persen	20	25	30	35	40	40	34,95	66,67	33,33	33,33	44,5		174,75	266,68	111,10	95,23	111,25	
17	Persentase ODHA yang pernah mengakses layanan ARV			ODHA 94%	ODHA 81%	ODHA 83%	ODHA 85	ODHA 87	ODHA 90	ODHA 90	ODHA 76,9	ODHA 79,4	ODHA 81,9	ODHA 83	ODHA 13,2	ODHA 87,7	94,94	95,66	96,35	95,40	14,67	97,44

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
18	Angka kesakitan penyakit menular malaria			Malaria <1/1000 pddk	Malaria <1/1000 pddk	Malaria <1/1000 pddk	Malaria <1/1000 pddk	Malaria <1/1000 pddk	Malaria <1/1000 pddk	Malaria <1/1000 pddk	Malaria <0,10/1000 pddk	Malaria 0,05/1000 pddk	Malaria 1,2/1000 pddk	Malaria 0,01/1000 pddk	Malaria 0,005/1000 pddk	Malaria 0,242/1000 pddk	100	100	80	100	100	100
19	Case Notification Rate (CNR) semua kasusu TB per 100,000 penduduk			CNR 7000 kasus/100,000 pddk	CNR 100/100,000 pddk	CNR 100/100,000 pddk	CNR 102/100,000 pddk	CNR 107/100,000 pddk	CNR 112/100,000 pddk	CNR 112/100,000 pddk	CNR 68,83/100,000 pddk	CNR 99/100,000 pddk	CNR 152/100,000 pddk	CNR 170/100,000 pddk	CNR 72/100,000 pddk	CNR 134/100,000 pddk	68,83	99,00	149,02	158,88	64,29	119,64
20	Angka kesakitan penyakit Demam Berdarah (DBD)			DBD <45 kasus/100,000 pddk	DBD <50/1000,00 pddk	DBD <49/1000,00 pddk	DBD <48/1000,00 pddk	DBD <47/1000,00 pddk	DBD <46/1000,00 pddk	DBD <46/1000,00 pddk	DBD 51,4/1000,00 pddk	DBD 67,3/1000,00 pddk	DBD 30,6/1000,00 pddk	DBD 13,8/1000,00 pddk	DBD 20,9/1000,00 pddk	DBD 41/1000,00 pddk	102,80	137,35	63,75	29,36	45,43	89,13
21	Persentase bayi usia <1 tahun yang mendapatkan imunisasi dasar			IDL 100	IDL 90	IDL 91	IDL 92	IDL 93	IDL 93	IDL 93	IDL 80,11	IDL 80	IDL 73,3	IDL 81,5	IDL 81	IDL 59	89,01	87,91	79,67	87,63	87,10	63,44
22	Persentase UCI (Universal Child Immunization)			UCI 100	UCI 84	UCI 86	UCI 88	UCI 90	UCI 92	UCI 92	UCI 60,56	UCI 64,13	UCI 62,6	UCI 63,5	UCI 63,5	UCI 42,2	72,10	74,57	71,14	70,56	69,02	45,87
23	Persentase RS Pemerintah yang terakreditasi versi 2012 (17 RSUD Pemerintah, 5 RS TNI/Polri/Dikt)			80%	30	40	50	75	80	80	8,06	20,63	50	80	89	88	26,87	51,58	100,00	106,67	111,25	110,00
24	Persentase kec yang memiliki 1 puskesmas yang terakreditasi (166 kec)			60%	10	15	20	60	60	60	NA	6	40	89	90	94	NA	40	200	148,33	150	156,67
25	Persentase sarana dan prasarana RS memenuhi standar untuk mendukung akreditasi RS			85%	70	75	80	83	85	85					70	65					82,4	76,47
26	1,Angka kematian ibu melahirkan per 100,000 diukur dengan proksi: -Persalinan di fasilitas kesehatan (%)			Fasyankes= 77%	Fasyankes= 68	Fasyankes= 70	Fasyankes= 72	Fasyankes= 74	Fasyankes= 75	Fasyankes= 75	Fasyankes= 57,1	Fasyankes= 64,45	Fasyankes= 67,18	Fasyankes= 74,11	Fasyankes= 74,11	Fasyankes= 78,32	83,97	92,07	93,31	100,15	98,81	104,43
	-Kunjungan Antenatal (KN) (%)			KN= 78%	KN= 70	KN= 72	KN= 74	KN= 76	KN= 78	KN= 78	KN= 86,12	KN= 81,47	KN= 85,37	KN= 85,41	KN= 85,41	KN= 75,29	123,03	92,58	115,36	112,38	109,50	96,53
	2,Angka kematian bayi dan anak (per 1000) diukur dengan proksi Kunjungan Neonatal Pertama (KN 1)			KN1= 91%	KN1= 87	KN1= 88	KN1= 89	KN1= 90	KN1= 91	KN1= 91	KN1= 90,75	KN1= 86,37	KN1= 89,44	KN1= 89,81	KN1= 89,81	KN1= 74,3	104,31	98,15	100,49	99,79	98,69	81,65
27	Persentase ketersediaan obat dan logistik kesehatan			98%	94	95	96	97	98	98	84	84,86	86,45	87,2	90	98,23	89,36	89,33	90,05	89,90	91,84	100,23
28	Persentase fasyankes yang melaksanakan deteksi dan tata laksana dini faktor risiko penyakit tidak menular			80%	40	50	60	70	80	80	27,23	33,33	36,15	50,70	55,1		68,075	66,66	60,25	72,43	68,88	
29	(1)Persentase puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (tenaga kesling, tenaga kefarmasia, tenaga gizi, tenaga kesmas, dan analisis kesehatan)			95%	60	70	80	90	95	95	40	35,29	68,7	70,59	34,91	70,3	66,67	50,41	85,87	78,43	36,7	74
	(2)Persentase RSU kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang			95%	60	70	80	90	95	95	30	22	68,7	70,59			50	31,43	85,88	78,43		

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
30	Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi			78%	67	70	73	76	78	78	67	70	73	76	78	78	100	100	100	100	100	100
31	(1)Persentase Tenaga Kesehatan yang dilatih dengan kompetensi baik			95	95	95	95	95	95	95	NA	NA	NA	62,5			NA	NA	NA	65.79		
	(2)Persentase SDM Kesehatan yang terpenuhi kompetensi			65	65	65	65	65	65	65	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	(3)Persentase penelitian kesehatan yang dimanfaatkan			100	100	100	100	100	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32	(1)Persentase Krisis Kesehatan termasuk KLB yang ditangani <24 jam			100%	100	100	100	100	100	100	80	78	93,94	100	100	100	80	78	93,94	100	100	100
	(2)Persentase Tingkat Kebugaran Masyarakat			68%	50	55	60	65	68	68				79,6	67,6					122	99,41	
33	Persentase Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Klinis dan Lingkungan yang dilayani telah terakreditasi			Klinis=70%	Klinis=35	Klinis=40	Klinis=45	Klinis=65	Klinis=70	Klinis=70	60	65	55	55	100	NA	171.43	162.50	171.43	122.22	142.86	NA
				Lingk=100%	Lingk=100	Lingk=100	Lingk=100	Lingk=65	Lingk=100	Lingk=100	NA	55	55	55	100	NA	NA	55	55	55	100	NA
34	Persentase Masyarakat Miskin tidak mampu yang mempunyai jaminan kesehatan melalui JKN			75%	55	60	65	70	75	80	39,01	48,68	80,05	84,7	86	78,4	70,93	81,13	123,15	121,00	114,67	98

**Tabel 2.48.B. (form T-C. 23)**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD  
ARIFIN ACHMAD TAHUN 2015-2020**

No.	Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Arifin Achmad	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator SPM	Target Renstra Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A.	SPM																					
	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-		70	72	75	78	80	81	70	70,88	76,07	78,70	80,19%	82,31%	99,30%	98,44%	101,40%	100,90%	100,23%	101,61%
<b>1</b>	<b>Pelayanan Gawat Darurat</b>	-	-																			
1)	Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	-	-	5 menit terlayani setelah pasien datang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2)	Kemampuan menangani life saving anak dan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3)	Jam buka pelayanan gawat darurat			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4)	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat ATLS/ BCLS/ ACLS/PPGD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	90%	90%	99%	100%	100%	83%	90%	90%	99%	100%	100%
5)	Kepuasan Pelanggan			≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	75%	82,42%	83,60%	79%	75%	83%	107,14%	117,74%	119,43%	112,86%	107,14%	118,57%
6)	Kematian Pasien ≤ 24 jam			≤ 2/1000 (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	≤ 2/1000	≤ 2/1000	≤ 2/1000	≤ 2/1000	≤ 2/1000	≤ 2/1000	0,0009%	0,004%	0,004%	0,008%	0,001%	0,008%	100%	50%	50%	25%	50%	25%
7)	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2</b>	<b>Pelayanan Rawat Jalan</b>																					
1)	Indeks Kepuasan Pelanggan	-	-	90	90	90	90	90	90	90	80,17	68,14	75,27	77,88	78,36	83,19	89,07%	75,71%	83,63%	86,53%	87,06%	92,43%
2)	Waktu tunggu di rawat jalan			60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	44 menit	51 menit	68 menit	120 menit	75-85 menit	68-86 menit	136,36%	117,64%	88%	50%	75%	86%
3)	Dokter pemberi pelayanan di poliklinik			100% dokter spesialis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4)	Ketersediaan pelayanan			Pelayanan:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1) Klinik Umum																		
				2) Klinik Gigi																		
				3) Klinik Anak																		
				4) Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan																		
				5) Klinik Penyakit Dalam																		
				3) Klinik Jantung																		
				4) Klinik THT																		
				5) Klinik Mata																		
				6) Klinik Bedah																		
				7) Klinik Kulit - kelamin																		
				8) Klinik VCT																		
				9) Klinik Paru																		
				10) Klinik Saraf																		
				11) Klinik Pegawai																		

No.	Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Arifin Achmad	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator SPM	Target Renstra Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5)	Jam buka pendaftaran pasien			Hari Senin s.d Kamis pkl. 08.00 s.d 11.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Hari Jum'at pkl. 08.00 s.d 10.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Hari Sabtu pkl. 08.00 s.d 10.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6)	Jam buka pelayanan poliklinik			Hari Senin s.d Kamis pkl. 8.00 s.d 14.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Hari Jum'at pkl. 09.00 s.d 11.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Hari Sabtu pkl. 09.00 s.d 13.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Pelayanan Rawat Inap</b>																					
1)	Indeks Kepuasan Pelanggan	-	-	80	80	80	80	80	80	80	83,7	74,05	90	80,33	82,2	81,52	103%	92,50%	112%	100,41%	102,75%	101,90%
2)	Pemberi pelayanan di rawat inap			Dr. Spesialis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Perawat minimal Pendidikan D3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3)	Dokter penanggungjawab di rawat inap			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4)	Ketersediaan pelayanan			a. Medikal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				b. Surgical	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				c. Fetomaternal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				d. Perawatan Intensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				e. Irna Utama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5)	Jam visite dokter spesialis			Pkl. 08.00 s.d 14.00 WIB setiap hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6)	Kejadian infeksi pasca operasi			Max 1,5 %	Max 1,5 %	Max 1,5 %	Max 1,5 %	Max 1,5 %	Max 1,5 %	Max 1,5 %	0%	0%	0%	0%			100%	100%	100%	100%		
7)	Kejadian infeksi nosokomial			Max 1,5 %	Max 1,5 %	Max 1,5 %	Max 1,5 %	Max 1,5 %	Max 1,5 %	Max 1,5 %	0,06%	1,88%	0,23%	0,8%			100%	79,79%	100%	100%		
8)	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9)	Kematian pasien > 48 jam			≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	4,57%	4,6%	4,8%	4,8%	58,41%	48,68%	5,25%	5,22%	5%	5%	4%	0,5%
10)	Kejadian pulang paksa			Max 5 %	Max 5 %	Max 5 %	Max 5 %	Max 5 %	Max 5 %	Max 5 %	1,77%	3,6%	4,5%	17,72%	19,73%	22,12%	100%	100%	100%	0,3%	0,3%	0,2%
<b>4</b>	<b>Pelayanan Bedah</b>																					
1)	Waktu tunggu operasi elektif sejak ditetapkan oleh dokter bedah yang bersangkutan	-	-	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan (orthopedy 2-3 bulan dan onkologi 6-9 bulan)	2 bulan (orthopedy 2-3 bulan dan onkologi 6-9 bulan)	2 bulan (orthopedy 2-3 bulan dan onkologi 6-9 bulan)	2 hari - 2 bulan	< 2 hari - 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2)	Kejadian kematian dimeja operasi			Max 1 %	Max 1 %	Max 1 %	Max 1 %	Max 1 %	Max 1 %	Max 1 %	0%	0%	0%	0%	0%	0,02%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Arifin Achmad	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator SPM	Target Renstra Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3)	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4)	Tidak adanya kejadian operasi salah orang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5)	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6)	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7)	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal			6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan Persalinan dan Perinatologi</b>																					
1)	Kejadian kematian ibu karena persalinan	-	-	- Perdarahan - Pre Eklampsia - Sepsis	≤ 1 ≤ 30 ≤ 0,2	≤ 1 ≤ 30 ≤ 0,2	≤ 1 ≤ 30 ≤ 0,2	≤ 1 ≤ 30 ≤ 0,2	≤ 1 ≤ 30 ≤ 0,2	≤ 1 ≤ 30 ≤ 0,2	1,12 1,26 1	1,12 1,26 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
2)	Pemberi pelayanan			Pemberi Pelayanan : - Dokter Sp.OG - Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) - Bidan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3)	Pemberi pelayanan persalinan dengan			Tim PONEK yang terlatih :	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4)	Pemberi pelayanan			Pemberi Pelayanan : - Dokter Sp.OG - Dokter Sp.A - Dokter Sp.An	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5)	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,20%	88,51%	85,5%	87,90%			87,20%	88,51%	85,5%	87,90%		
6)	Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria			Max 20 %	Max 20 %	Max 20 %	Max 20 %	Max 20 %	Max 20 %	Max 20 %	52,39%	58%	63,5%	57%	58,60%	65,00%	38,18%	34,48%	31,50%	35,09%	34%	31%
7)	Kepuasan Pelanggan			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	93,63%	92,40%	92,40%	84,92%	82,64%		117,04%	115,50%	115,50%	106,15%	103,30%	
<b>6</b>	<b>Pelayanan Intensif (ICU/CVCU/PICU/NICU)</b>																					
1)	Rata - rata pasien yang kembali ke ruang perawatan intensif dengan kasus yang sama ≤ 72 jam	-	-	Maksimal 3 %	3	3	3	3			1,66	0,62	0,0622	0,19			100%	100%	100%	100%		

No.	Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Arifin Achmad	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator SPM	Target Renstra Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2)	Pemberi pelayanan Unit Intensif			Dokter spesialis anastesi dan dokter spesialis terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				100 % perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/CVCU/PICU/NICU/Setara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	34%	43%	41%	60,34%			34%	43%	41%	60,34%		
<b>7</b>	<b>Pelayanan Radiologi</b>																					
1)	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen			100% Dokter Sp.Rad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2)	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto			Max 2 Jam	Max 2 Jam	Max 2 Jam	Max 2 Jam	Max 2 Jam	Max 2 Jam	Max 2 Jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3)	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen			Max kerusakan foto 2 %	Max 2 %	Max 2 %	Max 2 %	Max 2 %	Max 2 %	Max 2 %	0,8%	0,8%	0,8%	0,5%	0,31%	0,08%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4)	Kepuasan pelanggan			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
<b>8</b>	<b>Pelayanan Laboratorim</b>																					
1)	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium			Patologi klinik : 100% Dokter Sp.PK dan tenaga analis yang mahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Waktu tunggu hasil pelayanan:																					
	a. Laboratorium Sentral			Max 6 jam	Max 6 jam	Max 6 jam	Max 6 jam	Max 6 jam	Max 6 jam	Max 6 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Laboratorium IRD			Max 2 jam	Max 2 jam	Max 2 jam	Max 2 jam	Max 2 jam	Max 2 jam	Max 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	< 2 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2)	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium			Patologi Klinik :100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3)	Kepuasan pelanggan			Patologi Klinik :80 %	80%	80%	80%	80%	80%	80%	90%	89,95%	91,6%	92,4%	93,79%	93,99%	112,50%	112,44%	114,5%	115,5%	117,2%	117,5%
<b>9</b>	<b>Pelayanan Farmasi</b>																					
1)	Waktu tunggu pelayanan obat jadi																					
	Rawat Jalan			30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	22 menit	25 menit	99 menit	60 menit	99 menit	80 menit	100%	100%	30,30%	50%	30,3%	38%
	Rawat Inap			max 2 jam	max 2 jam	max 2 jam	max 2 jam	max 2 jam	max 2 jam	max 2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Gawat Darurat			< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	5 menit	4 menit	2 menit	2 menit	2 menit	2 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2)	Waktu tunggu pelayanan obat racikan																					
	Rawat Jalan			60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	30 menit	60 menit	150 menit	135 menit	135 menit	90 menit	100%	100%	20%	22,22%	44,44%	66,67%
	Rawat Inap			max 2 jam	max 2 jam	max 2 jam	max 2 jam	max 2 jam	max 2 jam	max 2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Gawat Darurat			< 30 menit	< 30 menit	< 30 menit	< 30 menit	< 30 menit	< 30 menit	< 30 menit	10 menit	60 menit	3 menit	3 menit	3 menit	3 menit	100%	50%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Arifin Achmad	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator SPM	Target Renstra Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3)	Alat Kesehatan habis pakai																					
	Rawat Inap			max15 menit	max15 menit	max15 menit	max15 menit	max15 menit	max15 menit	max15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Gawat Darurat			5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	2 menit	2 menit	2 menit	2 menit	2 menit	2 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,99%	99,99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kepuasan pelanggan			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	72,41%	69,41%	64,86%	66%	66%	70%	80,45%	77,12%	72,07%	73,33%	73,33%	77,78%
	Penulisan resep sesuai formularium			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	<b>Pelayanan Gizi</b>																					
1)	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,99%	99,90%	100%	100%	100%	100%	99,99%	99,90%	100%	100%
2)	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien			Max 30 %	Max 30 %	Max 30 %	Max 30 %	Max 30 %	Max 30 %	Max 30 %	30%	37,34%	22,02%	14,1%	24,68%	8%	100%	80,34%	100%	100%	100%	100%
3)	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	70%	91,56%	98,59%	99,80%	99,50%	111,11%	77,78%	101,73%	109,54%	110,89%	110,56%
11	<b>Pelayanan Gakin</b>																					
1)	Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke Rumah Sakit pada setiap unit pelayanan			100% terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
12	<b>Pelayanan Rekam Medik</b>																					
1)	Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33%	31%	72,38%	60,35%	23,78%	73,70%	33%	31%	72,38%	60,35%	23,78%	73,70%
2)	Kelengkapan Informed Conent setelah mendapatkan informasi yang jelas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	96,26%	96,24%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	96,26%	96,24%
3)	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan			10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	15 menit	15 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	67,7%	67,7%	100%	100%	100,00%	100,00%
4)	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap			15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	12 menit	15 menit	15 menit	15 menit	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
13	<b>Pengelolaan Limbah</b>																					
1)	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
2)	Baku mutu limbah cair			a.BOD < 30 mg/l	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	92%	50%	16,47%	12,21%	75%	100%	92%	50%	16,47%	12,21%
				b.COD < 80 mg/l	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	92%	58,33%	60,66%	41,75%	75%	100%	92%	58,33%	60,66%	41,75%
				c.TSS < 30 mg/l	100%	100%	100%	100%	100%	100%	58%	92%	83%	58,33%	16%	9,88%	58%	92%	83%	58,33%	16,00%	9,88%
				d.PH 6-9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	92%	66,67%	7,72%	6,09%	75%	100%	92%	66,67%	7,72%	6,09%

No.	Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Arifin Achmad	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator SPM	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>14</b>	<b>Administrasi dan Manajemen</b>																					
1)	Cost Recovery			40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	52,04%	56,30%	47,08%	53,47%	44,49%	43,99%	130,10%	140,75%	117,70%	133,68%	111,23%	109,98%
2)	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
3)	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
4)	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
5)	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
6)	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
7)	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun			60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%		25,90%	15,49%	42,61%	6%			43,17%	25,82%	71,02%	10,00%	
8)	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap			Max 2 jam	Max 2 jam	Max 2 jam	Max 2 jam	Max 2 jam	Max 2 jam	Max 2 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9)	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75,0%	66,67%	83,3%	100%	100%	100%	75,0%	66,67%	83,3%	100%	100,00%	100,00%
<b>15</b>	<b>Ambulance / Kereta Jenazah</b>																					
1)	Waktu tanggap pelayanan ambulance/ kereta jenazah 24 jam			24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2)	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di rumah sakit			30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>16</b>	<b>Pelayanan pemeliharaan sarana medik dan non medik</b>																					
1)	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat (maksimal 30 menit)			30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	39 menit	<30 menit	<30 menit	15 menit	15 menit	15 menit	76,90%	100%	100%	200%	200%	200%
2)	Ketepatan waktu pemeliharaan alat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	40,62%	39,10%	3,30%	0%	0%	0%	40,62%	39,10%	3,30%
3)	Seluruh peralatan medis yang harus dikalibrasi sudah terkalibrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7,50%	26,35%	25,10%	47,47%	6,95%	88,05%	7,50%	26,39%	25,10%	47,47%	6,95%	88,05%
4)	Ketepatan waktu pemeliharaan alat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
<b>17</b>	<b>Pelayanan Laundry</b>																					
1)	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	94%	98%	98%	98%	100%	94%	94%	98%	98%	98%	100%

No.	Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Arifin Achmad	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator SPM	Target Renstra Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-							
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2)	Tidak adanya kejadian linen yang hilang			100%	100%	100%	100%	100%	Tidak Terdokumentasi															
<b>18</b>	<b>CSSD</b>																							
1)	Terlayannya permintaan sterilisasi untuk tindakan kedokteran dan keperawatan, pakaian operasi dan produk steril lainnya			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2)	Terlayannya permintaan sterilisasi pakaian operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3)	Terlayannya permintaan sterilisasi kapas/verban dan produk steril lainnya			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>19</b>	<b>Rehabilitasi Medik</b>																							
1)	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2)	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan			10%	10%	10%	10%	10%	Belum Terdokumentasi															
3)	Kepuasan Pelanggan:			95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	87,37%	87,37%	87,37%	87,37%	87,37%	87,37%		
	a. Terhadap Administrasi																							
	b. Terhadap Penata Rehab Medik (FT, OT, TW, Psikolog)																							
	c. Terhadap Kebersihan dan Kenyamanan																							
<b>20</b>	<b>Pencegahan dan pengendalian infeksi</b>																							
1)	Kegiatan surveylens infeksi nosokomial			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%		
2)	Ada Pengurus Komite PPI (SK Direktur RS tentang Struktur Organisasi PPI)			Anggota Komite PPI yang Terlatih 50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200,00%	200,00%		
3)	Ada Anggota Tim PPI yang Terlatih			Anggota Tim PPI yang Terlatih 50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%		
4)	Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) di Setiap Instalasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,52%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	90,52%		
<b>21</b>	<b>Pemulasaran Jenazah</b>																							
1)	Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah (otopsi)			≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	2-3 jam	2-3 jam	2-3 jam	2-3 jam	10-15 menit	10-15 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	a. Pelayanan Administrasi Pemulasaran Jenazah			≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	30 menit	30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	b. Pelayanan Visum Labor (Pemeriksaan Luar)			≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	c. Pelayanan Penitipan Jenazah			≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	≤ 1 jam	15 menit	15 menit	15 menit	30 menit	30 menit	30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	d. Pelayanan Otopsi			> 2 jam	> 2 jam	> 2 jam	> 2 jam	> 2 jam	> 2 jam	> 2 jam	3 jam	3 jam	3 jam	3 jam	30 menit	30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa standar yang belum tercapai yaitu :

1. Rawat Jalan

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 sebesar 83.19, sementara untuk waktu tunggu rawat jalan mencapai 75-85 menit. Untuk waktu tunggu rawat jalan ini tidak memenuhi target dimana target SPM adalah 60 menit. Hal ini terjadi karena sejak pandemi covid-19 dilakukan screening terlebih dahulu kepada pasien-pasien yang akan berobat, sehingga waktu tunggu lebih panjang.

2. Pelayanan Bedah Sentral

Berdasarkan target SPM waktu tunggu operasi elektif sejak ditetapkan oleh dokter bedah yang bersangkutan adalah 2 bulan, sementara pada tahun 2020 akibat pandemic covid-19 screening untuk pasien yang akan dioperasi lebih diperketat, sehingga menyebabkan waktu tunggu untuk operais elektif mencapai 6 bulan.

3. Pelayanan Farmasi

Untuk pelayanan farmasi target SPM tidak tercapai pada unit Rawat Jalan. Untuk waktu tunggu pelayanan obat jadi yaitu 30 menit, saat ini waktu tunggu masih 80 menit. Sementara untuk obat racikan yaitu 60 menit dan realisasi masih 90 menit. Hal ini disebabkan oleh jumlah pasien yang semakin meningkat sementara SDM tidak mencukupi. Kedepannya perlu dikaji kembali mengenai ketenagaan di farmasi.

4. Administrasi dan Manajemen

Pada administrasi dan manajemen, capaian karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam pertahun tidak memenuhi target dimana realisasi pencapaiannya hanya 6% dari target 100%. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi pembatasan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat kegiatan pelatihan dibatasi.

5. Pemeliharaan Sarana Medik dan Non Medik

Untuk ketepatan pemeliharaan alat capaian realisasi hanya sebesar 3.30% dikarenakan kekurangan sumber daya manusia. Sementara dari 2587 peralatan medis yang terkalibrasi baru sekitar 88.05%, hal ini disebabkan adanya refocussing anggaran akibat Covid-19.

**Tabel 2.48.C. (form T-C. 23)**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RS  
JIWA TAMPAN TAHUN 2015-2020**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun						
		SPM	IKK		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-22	25	26	
1.	<b>Instalasi Gawat Darurat</b>																						
	a.	Kemampuan menangani pasien dengan kegawatdaruratan psikiatri dan Life Saving	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b.	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Rawat Darurat	5 menit	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	c.	Kepatuhan cuci tangan	100%	-	-	75%	90%	90%	90%	90%	90%	88%	90%	75%	85%	90.41%	89.84%	117%	100%	83%	94%	100%	100%
	d.	Kepatuhan identifikasi pasien dengan nama dan tanggal lahir, nomor RM dan foto sebelum memberikan tindakan	100%	-	-	-	-	90%	93%	93%	93%	-	-	90%	97%	91.58%	98.38%	-	-	100%	104%	98%	106%
	e.	Kelengkapan Assesmen awal setiap pasien rawat inap dalam 1 x 24 jam.	100%	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	94%	95%	95%	95%	59.70%	93.36%	104%	105%	105%	105%	66%	104%
2.	<b>Unit Perawatan Intensife Psikiatri ( UPIP)</b>																						
	a.	Pasien yang dapat ditenangkan <48 Jam	95%	-	-	50%	60%	70%	80%	80%	80%	50%	76%	55%	49%	96.88%	95.78%	100%	126%	78.50%	61.20%	121%	120%
	b.	Tidak ada kejadian pasien lari	>95%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.96%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%
	c.	Kelengkapan Assesment awal setiap pasien rawat inap dalam 1 x 24 jam	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	89.70%	100%	99.40%	100%	100%	85%	89.70%	100%	99.40%	100%	100%
	d.	Kepatuhan identifikasi pasien dengan nama dan tanggal lahir, nomor RM dan foto sebelum memberikan obat.	100%	-	-	90%	90%	95%	95%	95%	95%	85%	88.30%	100%	99.83%	99.98%	98.38%	94%	98%	105%	105%	105%	104%
3.	<b>Rawat Jalan</b>																						
	a.	Pemberi Pelayanan di Poliklinik	100%	-	-	30%	50%	70%	80%	80%	80%	30%	62%	83.50%	86.70%	80%	80%	100%	124%	119%	108%	100%	100%
	b.	Ketersediaan Pelayanan	100%	-	-	70%	85%	100%	100%	100%	100%	70%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	104%	100%	100%	100%	100%
	c.	Jam buka pelayanan poliklinik	Hari Senin s.d Kamis pkl 08.00 s.d 16.00. Hari Kamis dan Jumat pkl. 08.00 s.d 16.30	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target	Target	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun						
		SPM	IKK	Indikator Lainnya	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-22	25	26	
	d	Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit	≥ 90 %	-	-	75%	85%	90%	90%	90%	90%	75%	80.20%	73%	67%	85%	86%	100%	94.3	81.10%	74.40%	94%	96%
	e.	Angka Pasien Drop Out pasien rehabilitasi medik	<50%	-	-	80%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	32%	14%	91%	93.70%	100%	100%	32%	14%	91%
	f	Kecepatan pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, < 2 hari	100%	-	-	80%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	93%	93.70%	100%	100%	100%	100%	93%
4.	Rawat Inap																						
	a.	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Dokter Spesialis Jiwa penanggung jawab pasien rawat inap	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	100%	-	-	78%	78%	100%	100%	100%	100%	78%	78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s.d 14	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	96.80%	100%	100%	100%	100%	97%	96.80%	100%	100%
	e.	Tidak ada kematian yang disebabkan oleh Syndrom Neuroleptic Malignan	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.30%	100%	100%	100%	100%	100%	99.30%	100%	100%
	f.	Tidak ada kematian yang disebabkan oleh Steven Jhonson	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	g.	Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa <42 hari	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73%	80.20%	80.12%	79.69%	100%	100%	73%	80.20%	80%	80%
	h.	Kejadian pulang paksa	< 5 %	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	i.	Angka verifikasi DPJP setelah komunikasi melalui telepon	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	87.80%	100%	84.47%	-	-	100%	87.80%	100%	84%
	j.	Kelengkapan asesment risiko jatuh setiap pasien rawat inap	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	98.70%	100%	100%	-	-	100%	98.70%	100%	100%
	k.	Ketepatan pemasangan baju identifikasi pasien beresiko (risk) pada pasien resiko jatuh	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	99.35%	98.60%	100%	100%	-	-	99.35%	98.60%	100%	100%
5.	Ruang Detoksikasi																						
	a.	Pemberian pelayanan di	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1) Dokter SpKJ	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%
		2) Dokter umum bersert	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%
		3) Perawat PK II	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	37%	37%	100%	100%	-	-	37%	37%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD		Target	Target	Target	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
			SPM	IKK	Indikator Lainnya	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-22	25	26
	b.	Jam visite DPJP	pukul 08.00-14.00 tiap hari kerja	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%
	c.	Kondisi fisik dan psikis akibat gejala putus opiad, alkohol, amfetamin teratasi pada minggu I	>95%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%
6.	Pelayanan Rawat Inap Napza																						
	a.	Pemberian pelayanan di R. Rehab	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Klien bertahan dalam p	90%	-	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	82%	94%	90%	100%	100%	100%	102.50%	117.50%	113%	125%
	c.	Randomurinalis is nega	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Kepatuhan identifikasi pasien dengan nama, tgl lahir, no RM dan foto sebelum memberikan obat.	80%	-	-	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%	125%	125%
7.	Pelayanan Rehabilitasi Psikososial																						
	a.	Pemberi pelayanan di unit rehabilitasi	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Ketersediaan pelayanan rehabilitasi psikososial	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Jam buka pelayanan	Pukul. 08.00-15.00 pada hari kerja	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Paket pelayanan	>10 kali(100%)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e.	Hasil pencapaian rehabilitasi psikososial	>75% -100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	75%	75%	75%
8.	Pelayanan Psikologi dan Psikometri																						
	a.	Pemberi pelayanan Psikologi	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Ketersediaan pelayanan	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Jam buka pelayanan	kul. 08.00-14.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Waktu tunggu hasil pemeriksaan psikologi	< 7 hari kerja -100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Pelayanan Konsultasi Keperaw																						
	a.	Pemberi Pelayanan	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Ketersediaan pelayanan konseling keperawatan jiwa	Pasien dan keluarga di poliklinik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD		Target	Target	Target	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
			SPM	IKK	Indikator Lainnya	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-1			-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-22	25	26
	c.	Jam Buka pelayanan konseling keperawatan jiwa	Hari Senin s.d Kamis pkl 08.00 s.d 15.00 Hari Kamis s.d Jumat pkl. 08.00 s.d 15.30	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Laboratorium																						
	a.	Waktu tunggu hasil pelayanan:																					
		- Laboratorium Sentral	a. Max 6 jam	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Laboratorium IRD	b. Max 2 jam	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan	Dokter Sp.PK dan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Angka ketepatan waktu pelaporan nilai kritis < 30 mt	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	98%	100%	100%	100%	100%	96%	98%	100%	100%
	d.	Ketepatan input data dan hasil pemeriksaan	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%
11	Radiologi																						
	a.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	Max 2 Jam	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen	Dokter Sp.Rad	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%
	c.	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Max kerusakan foto 2 %	-	-	2%	2%	2%	2%	2%	2%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Farmasi																						
	a.	Waktu tunggu pelayanan:	1. Waktu tunggu:																				
		1). Obat Jadi max 30 menit	a. Obat Jadi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	97%
		2). Obat Racikan max 60 menit	b. Obat Racil	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	98%
		3.) Alat Kesehatan habis pakai	c. Alkes Hab	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.88%	99.94%	99.96%	99.96%	99.98%	100%	99.88%	99.94%	99.96%	99.96%	99.98%
	c.	Tidak ada kesalahan penulisan etiket pada kantong obat	100%	-	-	80%	80%	100%	100%	100%	100%	80%	79.17%	99.90%	99.99%	99.99%	100%	100%	98.90%	99.90%	99.99%	99.99%	100%
	d.	Ketepatan penyimpanan dan pemberian label LASA	100%	-	-	80%	80%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	75%	100%	93.70%	93.70%	100%	100%	75%	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target	Target	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
		SPM	IKK	Indikator Lainnya	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-22	25	26
13	Gizi																					
	a.	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	90%	-	-	90%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	96%	99%	100%	100%	100%	100%	106.60%	99%	100%	100%
	b.	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	Max 20 %	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Kepatuhan penggunaan APD	100%	-	-	72%	80%	95%	100%	100%	100%	72%	80%	70%	85%	80%	84%	100%	100%	73.60%	85%	80%
14	Rekam Medik																					
	a.	Kelengkapan pengisian rekam medik rawat jalan 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63%	92%	91%	63%	67%	100%	63%	92%	91%	63%
	b.	Kelengkapan pengisian rekam medik rawat inap 2x24 jam setelah pasien keluar RS	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	89%	89%	82%	17.57%	-	-	89%	89%	
	c.	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	d.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	10 menit	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	100%	100%	
	e.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	15 menit	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	99.90%	100%	99.90%	100%	100%	97%	99.90%	100%	
	f.	Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan UGD rerata 20 menit	rata < 20 mer	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	100%	94%	100%	100%	100%	94%	
	g.	Waktu pengembalian rekam medis rawat inap 2x 24 jam setelah pasien keluar dari RS	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Pengelolaan limbah																					
	a.	Baku mutu limbah cair	BOD < 30 mg	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77.80%	77.80%	77.80%	100%	100%	100%	77.80%	77.80%	77.80%	
			COD < 80 mg	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55.60%	55.60%	55.60%	100%	100%	100%	55.60%	55.60%	55.60%	
			TSS < 30 mg	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33.30%	33.30%	33.30%	100%	100%	100%	33.30%	33.30%	33.30%	
			Ph 6-9	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77.80%	77.80%	77.80%	100%	100%	100%	77.80%	77.80%	77.80%	
	b.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81.80%	100%	81.80%	100%	100%	100%	81.80%	100%	81.80%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target	Target	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun						
		SPM	IKK	Indikator Lainnya	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-22	25	26	
16	Administrasi dan Manajemen																						
	Tata Usaha																						
	a. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Ketepatan waktu pengusulan SK jabatan fungsional	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66.70%	100%	100%	100%	100%	100%	66.70%	100%	100%	100%	100%	
	c. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat pegawai.	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	d. Angka survey kepuasan karyawan terhadap organisasi	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76.55%	76.60%	77%	76.60%	77%	100%	76.55%	76.60%	77%	76.60%	77%	
	Humas dan Perlengkapan																						
	a. Ketersediaan tenaga kehumasan RS	3 orang	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	
	b. Kecepatan dan ketepatan dalam pemberian informasi tentang RS terhadap pihak luar dalam 30 menit	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	89%	90%	89%	90%	-	-	89%	90%	89%	90%	
	c. Kecepatan dan ketepatan dalam menanggapi keluhan/komplain pihak luar	24 jam	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	88%	85%	88%	85%	-	-	88%	85%	88%	85%	
	Keuangan																						
	a. cost recovery	80%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	127%	105%			100%	83%	127%	105%			
	b. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	
	c. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	<3 jam	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	d. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai ketepatan waktu (sesuai kondisi keuangan)	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Perencanaan																						
	a. Ketersediaan dokumen Perencanaan	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target	Target	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun						
		SPM	IKK	Indikator Lainnya	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-22	25	26	
	b.	Ketepatan waktu pengajuan usulan perencanaan dari bagian/ bidang ke bagian perencanaan rumah sakit	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	97%	100%	100%	100%	100%	98%	97%	100%	100%
	c.	Ketersediaan LAKIP	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi kegiatan ke Direksi Rumah Sakit setiap bulan.	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan dan Penelitian																						
	a.	Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun	> 60%	-	-	-	-	> 60%	> 60%	> 60%	> 60%	-	-	17%	60%	40%	3%	-	-	28.30%	100%	60%	5%
17	Ambulance/Kereta Jenazah																						
	a.	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah	24 jam	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	91%	93%	100%	100%	100%	90%	91%	93%	100%	100%
	b.	Kecepatan memberikan pelayanan Ambulan Cawat Darurat , < 5 menit	5 menit	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	89%	90%	100%	100%	100%	90%	91%	93%	100%	100%
	c.	Kecepatan memberikan pelayanan Ambulan Jenazah < 30 menit	< 30 menit	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	91%	90%	100%	100%	100%	90%	91%	90%	100%	100%
	d.	Kecepatan memberikan pelayanan Ambulan Transportasi < 30 menit	< 30 menit	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	85%	100%	100%	100%	90%	90%	85%	100%	100%
18	Pemulasaran Jenazah																						
	a.	Waktu Tanggap (response time) Pelayanan Pemulasaran Jenazah	≤ 2 jam	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Instalasi CSSD dan Pelayanan laundry																						
	a.	Sterilisasi alat kesehatan	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Ketepatan waktu pendistribusian alat kesehatan steril	95%	-	-	95%	95%	95%	95%	95%	95%	90%	92%	92%	93%	92%	93%	94.70%	96.80%	96.80%	97.80%	92%	93%
	c.	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Tidak ada kejadian linen yang tertukar	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.60%	100%	99.60%	100%	100%	100%	99.60%	100%	99.60%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target	Target	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun							
		SPM	IKK	Indikator Lainnya	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-22	25	26		
	e.	Penyediaan linen utk ruang rawat inap tepat waktu sesuai jadwal	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	f.	Mutu sterilisasi instrum	100%	-	-	50%	60%	70%	80%	80%	80%	36%	50%	50%	80%	50%	27%	72%	83.30%	71.40%	100%	50%	80%	
20	Pelayanan pemeliharaan sarana medik dan non medik																							
	a.	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat (maksimal 30 menit)	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	80%	100%	80%	100%	80%	70%	80%	100%	80%	100%	80%	
	b.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	
	c.	Seluruh peralatan medis yang harus dikalibrasi sudah terkalibrasi	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	
21	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)																							
	a.	Komite PPI yang mempunyai Anggota Terlatih	Anggota Komite PPI yang Terlatih 50 %	-	-	50%	50%	50%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	
	b.	Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) di setiap Instalasi	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	98%
	c.	Kegiatan Surveilens Infeksi Nosokomial/HAI (Healthcare Associated Infection) di RS (minimal 1 parameter)	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22	K3RS																							
	a.	Pemantauan maintenance APAR	100%	-	-	80%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%	100%	100%	
	b.	Ketersediaan APAR di tiap unit	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	72%	72%	92%	100%	100%	65%	72%	72%	92%	100%	100%	
23	Gudang / Material																							
	a.	Ketepatan waktu penyusunan laporan ketersediaan barang tiap bulan /stock opname	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.8	100%	100%	100%	100%	100%	98.8	100%	100%	100%	100%	
	b.	Ketepatan waktu penyusunan laporan tahunan	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	95.60%	96%	95.80%	96%	95.80%	90%	95.60%	96%	95.80%	96%	95.80%	
	c.	Ketepatan waktu dalam pendistribusian barang	95%	-	-	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	94%	95%	94%	95%	100%	100%	98.90%	100%	94%	95%	

Dari tabel di atas, ada beberapa standar yang targetnya belum tercapai, yaitu:

1. Lama hari rawatan

Standar yang harus dicapai adalah kurang dari 42 hari. Rata-rata capaian selama tahun 2014-2020 belum tercapai sesuai standar. Hal ini disebabkan karena banyak pasien yang sudah tidak indikasi rawat tetapi tidak dijemput oleh keluarga. Keluarga tidak kooperatif karena pasien dianggap sebagai beban keluarga. Sehingga menyebabkan meningkatnya lama hari rawatan dan menumpuknya pasien inventaris di RS Jiwa Tampan. Solusi dari permasalahan ini yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Melakukan pemulangan pasien
- b. Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial mengenai peningkatan kapasitas Panti Laras.

2. Pasien yang dapat ditenangkan kurang dari 48 jam pada Unit Perawatan Intensif Psikiatrik (UPIP).

Standar ini belum tercapai disebabkan karena terbatasnya jumlah SDM Keperawatan sehingga mempengaruhi penatalaksanaan medis pasien gelisah. Solusi dari permasalahan ini adalah pemenuhan kebutuhan SDM Keperawatan sesuai standar.

3. Waktu tunggu pelayanan rawat jalan

Dari tahun 2014-2018, belum tercapai sesuai standar, akan tetapi pada tahun 2019 dan 2020 mulai menunjukkan peningkatan. Disebabkan karena telah mulai terpenuhinya kebutuhan SDM, dalam hal ini Dokter Spesialis Jiwa ( psikiater ).

**Tabel 2.48.D. (form T-C. 23)**

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN  
RSUD PETALA BUMI TAHUN 2015-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Satuan	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -						RASIO CAPAIAN TAHUN KE-					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Indeks kepuasan pelanggan/masyarakat		%	60	80	90	95	95	95	60	80	88.4	96.8	96.8	96.8	100	100	98	100	100	100
		Pelayanan sesuai dengan SPM dan persyaratan akreditasi RS	%	80	90	95	100	100	100	80	77	82	100	100	100	100	86	86	100	100	100
		BOR 60-80%	%	27	32	60	75	75	75	27	32	31	39	31	23	100	100	52	52	41	31
		LOS 6-9 hari	Hari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	100
		TOI 1-3 hari	Hari	9	7	6	3	3	3	9	7	7	51	7	24	100	100	83	67	67	67
		BTO 40-50 kali	Kali	32	39	40	45	45	45	32	39	38	4	39	12	100	100	95	87	87	87
		NDR < 25 ‰	‰	8	9	12	10	10	10	8	9	11	10	9	20	100	100	92	100	90	200
		GDR < 45 ‰	‰	17	21	25	20	20	20	17	21	23	25	23	46	100	100	92	75	75	75
		Jumlah SDM yang diberi pelatihan selama 20 jam/tahun sebesar ≥ 60% pada tahun 2019	%	44.5	54	60	70	70	70	44.5	54	56	40	40	40	100	100	93	57	57	57
		Ketersediaan peralatan sesuai kebutuhan	%	70	80	90	100	100	100	70	62	85	77	77	77	100	78	94	77	77	77
		Tata laksana administrasi sesuai SOP	%	70	80	90	100	100	100	70	70	95	95	95	95	100	88	106	95	95	95
		Terciptanya SIM RS dalam mendukung manajemen dan administrasi RS	Modul	2	3	9	6	-	-	2	3	8	5	-	-	100	100	89	83	-	-

NO	INDIKATOR	Target SPM	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE							REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -						RASIO CAPAIAN TAHUN KE-					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>I</b>	<b>IGD</b>																				
	Pemberian pelayanan kegawatdaruratan bersertifikat yang masih berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	61%	75%	80%	85%	85%	100%	61%	75%	80%	85%	85%
	Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
	Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	< 5 menit dilayani setelah ps datang	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
	Tidak adanya keharusan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kematian pasien di IGD (< 8jam)	< 2 perseribu	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
<b>II</b>	<b>Rawat Jalan</b>																				
	Ketersediaan pelayanan	4 pelayan spesialis dasar + 3 Spesialis penunjang	4 pelayan spesialis dasar + 3 Spesialis penunjang	4 pelayan spesialis dasar + 3 Spesialis penunjang	4 pelayan spesialis dasar + 3 Spesialis penunjang	4 pelayan spesialis dasar + 3 Spesialis penunjang	4 pelayan spesialis dasar + 3 Spesialis penunjang	4 pelayan spesialis dasar + 3 Spesialis penunjang	4 pelayan spesialis dasar + 3 Spesialis penunjang	4 pelayan spesialis dasar + 3 Spesialis penunjang	4 pelayan spesialis dasar + 3 Spesialis penunjang	4 pelayan spesialis dasar + 3 Spesialis penunjang	4 pelayan spesialis dasar + 3 Spesialis penunjang	4 pelayan spesialis dasar + 3 Spesialis penunjang	4 pelayan spesialis dasar + 3 Spesialis penunjang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jam buka pelayanan dengan ketentuan	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 – 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 – 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 – 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 – 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 – 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 – 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 – 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 – 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 – 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 – 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 – 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 – 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 – 11.00	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 – 11.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penegakkan diagnosa TB melalui pemeriksaan mikroskopis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pencatatan dan pelaporan TB di RS	> 60 %	> 60 %	> 60 %	> 70 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>III</b>	<b>Rawat Inap</b>																				
	Ketersediaan pelayanan	Sesuai jenis dan kelas RS	4 Spesialis dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%												
	Pemberi pelayanan di rawat inap	Sesuai pola ketenagaan, jenis dan kelas RS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
- Dokter spesialis																					
- Perawat minimal D3																					
	Tempat tidur dengan pengaman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Dokter penanggungjawab pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR	Target SPM	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE							REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -							RASIO CAPAIAN TAHUN KE-					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Jam visite dokter spesialis	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	08.00 s/d 14.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Kejadian infeksi nosokomial	< 9 %	< 9 %	< 9 %	< 9 %	< 9 %	< 9 %	< 9 %	< 9 %	< 9 %	< 9 %	< 9 %	< 9 %	< 9 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	0.01%	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Kematian pasien > 48 jam	< 0,24 %	< 0,24 %	< 0,24 %	< 0,24 %	< 0,24 %	< 0,24 %	< 0,24 %	< 0,24 %	1.20%	< 0,24 %	< 0,24 %	< 0,24 %	< 0,24 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>IV</b>	<b>Bedah Sentral</b>																					
	Waktu tunggu operasi elektif	< 2 hari	< 2 hari	< 2 hari	< 2 hari	< 2 hari	< 2 hari	< 2 hari	< 2 hari	2 hari	2 hari	< 2 hari	< 2 hari	< 2 hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Kejadian kematian di meja operasi	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/ lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET	< 6 %	< 6 %	< 6 %	< 6 %	< 6 %	< 6 %	< 6 %	< 6 %	< 6 %	< 6 %	< 6 %	< 6 %	< 6 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
<b>V</b>	<b>Pelayanan Persalinan, Perinatologi, KIA dan KB</b>																					
	Kematian ibu karena persalinan	1. Perdarahan < 1 %	1. Perdarahan < 1 %	1. Perdarahan < 1 %	1. Perdarahan < 1 %	1. Perdarahan < 1 %	1. Perdarahan < 1 %	1. Perdarahan < 1 %	1. Perdarahan < 1 %	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		2. Pre eklampsia < 30 %	2. Pre eklampsia < 30 %	2. Pre eklampsia < 30 %	2. Pre eklampsia < 30 %	2. Pre eklampsia < 30 %	2. Pre eklampsia < 30 %	2. Pre eklampsia < 30 %	2. Pre eklampsia < 30 %	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		3.Sepsis < 0,2 %	3.Sepsis < 0,2 %	3.Sepsis < 0,2 %	3.Sepsis < 0,2 %	3.Sepsis < 0,2 %	3.Sepsis < 0,2 %	3.Sepsis < 0,2 %	3.Sepsis < 0,2 %	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Pemberi pelayanan persalinan normal	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK Terlatih	Tim PONEK Terlatih	Tim PONEK Terlatih	Tim PONEK Terlatih	Tim PONEK Terlatih	Tim PONEK Terlatih	Tim PONEK Terlatih	Tim PONEK Terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif	Dr SpOG / Dr SpA / Dr SpAn	Dr SpOG / Dr SpA / Dr SpAn	Dr SpOG / Dr SpA / Dr SpAn	Dr SpOG / Dr SpA / Dr SpAn	Dr SpOG / Dr SpA / Dr SpAn	Dr SpOG / Dr SpA / Dr SpAn	Dr SpOG / Dr SpA / Dr SpAn	Dr SpOG / Dr SpA / Dr SpAn	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Kemampuan menangani BBLR (1500-2500 gr)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Pemberi pelayanan persalinan normal	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	Dr SpOG / Dr Umum / Bidan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK Terlatih	Tim PONEK Terlatih	Tim PONEK Terlatih	Tim PONEK Terlatih	Tim PONEK Terlatih	Tim PONEK Terlatih	Tim PONEK Terlatih	Tim PONEK Terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

NO	INDIKATOR	Target SPM	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -						RASIO CAPAIAN TAHUN KE-					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif	Dr SpOG / Dr SpA / Dr SpAn	Dr SpOG / Dr SpA / Dr SpAn	Dr SpOG / Dr SpA / Dr SpAn	Dr SpOG / Dr SpA / Dr SpAn	Dr SpOG / Dr SpA / Dr SpAn	Dr SpOG / Dr SpA / Dr SpAn	Dr SpOG / Dr SpA / Dr SpAn	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kemampuan menangani BBLR (1500-2500 gr)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kontrasepsi mantap dilakukan oleh SpOG a atau SpB atau SpU atau dokter umum terlihat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlihat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>VI</b>	<b>Pelayanan Perawatan Intensif</b>																			
	Rata-rata pasien yang kembali perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberi pelayanan unit intensif	Dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani	Dokter spesialis sesuai dengan kasus yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		Perawat dengan sertifikat/Perawat mahir ICU	Perawat dengan sertifikat/Perawat mahir ICU	Perawat dengan sertifikat/Perawat mahir ICU	Perawat dengan sertifikat/Perawat mahir ICU	Perawat dengan sertifikat/Perawat mahir ICU	Perawat dengan sertifikat/Perawat mahir ICU	Perawat dengan sertifikat/Perawat mahir ICU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>VII</b>	<b>Pelayanan Radiologi</b>																			
	a. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	5-20 Menit	5-20 Menit	5-20 Menit	5-20 Menit	5-20 Menit	5-20 Menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Radiologi	Dokter Sp.Radiologi	Dokter Sp.Radiologi	Dokter Sp.Radiologi	Dokter Sp.Radiologi	Dokter Sp.Radiologi	Dokter Sp.Radiologi	Ada/ Paruh waktu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	50%	0%	0%	0%	0%	0%
	c. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	Kerusakan foto ≤ 2%	Kerusakan foto ≤ 2%	Kerusakan foto ≤ 2%	Kerusakan foto ≤ 2%	Kerusakan foto ≤ 2%	Kerusakan foto ≤ 2%	Kerusakan foto ≤ 2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>VIII</b>	<b>Pelayanan Patologi Klinik</b>																			
	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium, kimia darah dan darah rutin CITO	≤ 120Menit	≤ 120Menit	≤ 120Menit	≤ 120Menit	≤ 120Menit	≤ 120Menit	≤ 120Menit	≤ 120Menit	≤ 120Menit	≤ 120Menit	≤ 120Menit	≤ 120Menit	≤ 120Menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tidak adanya kejadian tertukar spesimen	100%	Dokter Sp.Patologi KLinik	Tidak ada	Tidak ada	Dokter Sp.Patologi KLinik	Dokter Sp.Patologi KLinik	Dokter Sp.Patologi KLinik	Dokter Sp.Patologi KLinik	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Kemampuan Mikroskopis TB Paru	Tersedia tenaga, dan reagen	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Eksptisi hasil pemeriksaan laboratorium	SpPK	1 Org	1 Org	1 Org	1 Org	1 Org	1 Org	1 Org	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	INDIKATOR	Target SPM	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -						RASIO CAPAIAN TAHUN KE-					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>IX</b>	<b>Pelayanan Rehabilitasi Medik</b>																			
	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medic yang direncanakan	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>X</b>	<b>Pelayanan Farmasi</b>																			
	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	15-30 menit	15-30 menit	15-30 menit	15-30 menit	15-30 menit	15-30 menit	15-30 menit	15-40 Menit	15-40 Menit	15-40 Menit	15-40 Menit	15-40 Menit	15-40 Menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	98%	98%	98%	100%	100%	100%
<b>XI</b>	<b>Pelayanan Gizi</b>																			
	Kelepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	13	12.59	11	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>XII</b>	<b>Pelayanan Rekam Medik</b>																			
	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	98%	100%	100%	100%	100%	95%	98%	100%	100%	100%	100%
	Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Waktu penyediaan dokumen rekam medic pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	8-10 Menit	8-10 Menit	8-10 Menit	8-10 Menit	8-10 Menit	8-10 Menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Waktu penyediaan dokumen rekam medic pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>XIII</b>	<b>Pengelolaan Limbah</b>																			
	Baku mutu limbah cair sesuai standar	a.BOD < 30 mg/l	a.BOD < 30 mg/l	a.BOD < 30 mg/l	a.BOD < 30 mg/l	a.BOD < 30 mg/l	a.BOD < 30 mg/l	a.BOD < 30 mg/l	BOD 20,4 mg/l	BOD 20,4 mg/l	BOD 20,4 mg/l	BOD 20,4 mg/l	BOD 20,4 mg/l	BOD 20,4 mg/l	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b.COD < 80 mg/l	b.COD < 80 mg/l	b.COD < 80 mg/l	b.COD < 80 mg/l	b.COD < 80 mg/l	b.COD < 80 mg/l	b.COD < 80 mg/l	COD 68 mg/l	COD 68 mg/l	COD 68 mg/l	COD 68 mg/l	COD 68 mg/l	COD 68 mg/l	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. pH 6-9	c. pH 6-9	c. pH 6-9	c. pH 6-9	c. pH 6-9	c. pH 6-9	c. pH 6-9	c. pH 6-9	pH 7,28	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	100%	100%	100%
<b>XIV</b>	<b>Pelayanan Laundry dan CSSD</b>																			
	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	98%	100%	100%	100%	95%	95%	98%	100%	100%	100%
	Kelepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	95%	98%	100%	100%	100%	95%	95%	98%	100%	100%	100%
<b>XV</b>	<b>Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah</b>																			

NO	INDIKATOR	Target SPM	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -						RASIO CAPAIAN TAHUN KE-					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	30 Menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Waktu pelayan ambulance	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>XVI</b>	<b>Pelayanan Pemulasaraan Jenazah</b>																			
	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>XVII</b>	<b>Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit</b>																			
	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	80%	85%	90%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	70%	80%	90%	90%	90%	70%	70%	80%	90%	90%	90%
<b>XVIII</b>	<b>Pelayanan dan Pencegahan Pengendalian Infeksi</b>																			
	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedia APD disetap instalasi	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pencacatan dan pelaporan Infeksi nosokomia / HAI (Health Care Associated Infedion ) di Rumah Sakit	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>XIX</b>	<b>Pelayanan Administrasi dan Manajemen</b>																			
	Tindak lanjut Pengendalian Surat Masuk dan Keluar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kelengkapan Laporan Akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cost recovery	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang lagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	1 Jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Faktor penyebab BOR belum sesuai standar pada tahun 2019

1. Kualitas SDM masih memerlukan pelatihan untuk peningkatan kompetensi secara terus menerus, agar bisa melayani pasien lebih baik lagi.
2. Masih diperlukan kelengkapan sarana prasarana baik peralatan medis maupun non medis dan mebeuler lainnya serta perbaikan sarpras.
3. Terdapat banyak pilihan RS yg bekerja sama dg BPJS disekitar RS Petala bumi.

Faktor penyebab BOR belum sesuai standar pada tahun 2020

1. Memasuki awal pandemi covid-19
2. Jumlah SDM yang diberi pelatihan selama 20 jam/tahun sebesar  $\geq 60\%$  pada tahun 2019 karena adanya rasionalisasi anggaran maka kegiatan diklat tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dan tahun 2020 dengan adanya pandemi covid-19 maka anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 serta diklat tidak diselenggarakan karena adanya pembatasan kegiatan
3. Ketersediaan peralatan sesuai kebutuhan adanya beberapa alkes yang sudah tidak berfungsi dan perlu penggantian yang baru
4. Tata laksana administrasi sesuai SOP, Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) belum sesuai kesepakatan karena adanya kekurangan berkas untuk peng klaiman

2.3.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

**Tabel 2.49 ( Form T-C. 24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan**  
**Provinsi Riau**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
<b>Dinas Kesehatan Provinsi Riau</b>																	
APBD+DAK	235,225,148,683	128,738,443,390	112,511,909,308	208,504,675,563	217,038,879,516	170,888,033,577	95,400,362,473	78,995,881,454	193,936,433,182	146,833,942,931	72.65	74.10	70.21	93.01	67.65	-6,013,522,662	-1.25
Dekonsentrasi	23,407,072,000	21,796,706,000	45,320,129,000	22,833,147,000	24,108,276,000	19,348,771,857	16,770,278,099	26,280,292,351	20,022,827,239	20,566,840,428	82.66	76.94	57.99	87.69	85.31	304,517,143	0.66
Sub Total	258,632,220,683	150,535,149,390	157,832,038,308	231,337,822,563	241,147,155,516	190,236,805,434	112,170,640,572	105,276,173,805	213,959,260,421	167,400,783,359	73.55	74.51	66.70	92.49	69.42	-5,709,005,519	-1.03
<b>RSUD Arifin Achmad</b>																	
APBD+DAK	301,468,793,175	665,449,565,749	495,215,876,934	570,183,655,601	798,150,096,098	302,929,333,309	524,279,097,325	462,691,001,828	517,341,775,292	449,094,697,373	100.48	78.79	93.43	90.73	56.27	36,541,341,016	-11.05
<b>RSUD Petala Bumi</b>																	
APBD+DAK	46,630,000,000	72,600,850,117	75,100,539,877	71,578,891,311	82,027,349,501	NA	46,041,682,044	57,676,783,661	62,035,514,114	58,379,879,767	NA	63.42	76.80	86.67	71.17	3,084,549,431	1.94
<b>RSU Jiwa Tampan</b>																	
APBD+DAK	51,494,560,918	46,774,398,500	52,707,384,862	73,494,795,100	122,769,006,374	44,738,282,007	31,367,218,730	44,962,379,814	64,701,032,399	104,523,574,662	86.88	67.06	85.31	88.03	85.14	18,289,088,983	4.52
<b>Total</b>	<b>658,225,574,776</b>	<b>935,359,963,756</b>	<b>780,855,839,981</b>	<b>946,595,164,575</b>	<b>1,244,093,607,489</b>	<b>NA</b>	<b>713,858,638,671</b>	<b>670,606,339,108</b>	<b>858,037,582,226</b>	<b>779,398,935,161</b>	<b>NA</b>	<b>76.32</b>	<b>85.88</b>	<b>90.64</b>	<b>62.65</b>	<b>16,385,074,122</b>	<b>-3.42</b>

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran :

Rata-rata pertumbuhan anggaran pada Dinas Kesehatan dan RS dari tahun 2014 s.d 2018 sebesar Rp.16.385.074.122 Tetapi perkembangan anggaran selama lima tahun tersebut sangat fluktuatif

Tahun 2014 anggaran sebesar Rp.658.225.574.776 naik menjadi 935.359.963.756 tahun 2015

Pada tahun 2016 anggaran turun sebesar Rp.780.855.839.981 dan naik kembali sebesar Rp.946.595.164.575 pada tahun 2017 dan anggaran naik kembali pada tahun 2018 Rp.1.244.093.607.489

Dengan keadaan seperti itu maka pertumbuhan anggaran bisa dikatakan baik,

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi :

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi pada Dinas Kesehatan dan RS dari tahun 2014 s.d 2018 mengalami penurunan sebesar 3,42 %. Pertumbuhan realisasi tidak jauh berbeda dengan perkembangan anggaran, Tahun 2015 Ratio Realisasi 76,32% naik menjadi 85,88% ditahun 2016 dan 90,64 % ditahun 2017 kemudian turun menjadi 62,65% di Tahun 2018.

**Tabel 2.50.**  
**Capaian dan Realisasi Pendanaan Per Jenis Belanja**  
**Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2020**

Uraian	2018			2019			2020			Rata-Rata Pertumbuhan	
	Anggaran	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi
(1)							(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>DINAS KESEHATAN</b>											
<b>BELANJA</b>											
Belanja Operasi											
Belanja Pegawai	42,417,557,108	41,619,258,167	98,12	45,287,605,267	41,702,222,454	92,08	41,494,209,930	41,401,201,332	99,97%	973.350.491	(67.546.274)
Belanja Barang dan Jasa	158,727,719,548	102,024,543,464	64,28	192,060,338,611	159,104,508,144	82,84	248,660,065,233	227.737.776.557	91,59	61.632.482.374	91.396.598.887
Belanja Modal	15,893,602,860	3.190.141.300	20,07	17,536,699,975	12.549.543.527	71,56	11,133,907,353	9.438.520.137	84,77	(1.558.299.196)	7.803.890.532
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,210,139,860	1.973.560.600	14,94	13.809.410.875	11.754.697.741	85,12	10.316.407.353	8.891.497.097	86,19	(1.147.230.746)	8.349.536.819
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2,155,463,000	740.758.700	34,37	3.517.839.100	785.895.786	22,34	595.000.000	325.000.000	54,62	(99.043.450)	-185.310.807
Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan	528,000,000	475,822,000	90,12	209,000,000	8,950,000	4,28	212.500.000	212.062.040	99,79	(317.250.000)	-365.315.980
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0		450.000	0		10.000.000	9.961.000	99,61	5.000.000	4.980.500
<b>Sub Total</b>	217.038.879.516	146.833.942.931	67,65	254.884.643.853	213.356.274.125	83,71	301.288.182.516	278.577.498.026	92,46%	61.047.533.669	99.132.943.145
<b>RSUD ARIFIN ACHMAD</b>											
<b>BELANJA</b>											
Belanja Operasi	90.497.403.674,00	90.117.817.157,00	99,58	98,950,113,842,00	96,153,569,537,00	97,17	94,216,197,766,05	93,033,339,228,00	98,73	6,085,752,130,03	4,466,823,375,50
Belanja Pegawai	90.497.403.674,00	90.117.817.157,00	99,58	98,950,113,842,00	96,153,569,537,00	97,17	94,216,197,766,05	93,015,711,528,00	98,73	6,085,752,130,03	4,466,823,375,50
Belanja Barang dan Jasa	368,186,919,413,00	300,011,732,291,00	81,48	357,105,897,454,00	328,385,198,109,43	91,96	328,131,615,940,67	312,944,887,748,00	95,37	( 25,568,162,715,67)	20,653,310,638,08
Belanja Modal	248,968,369,337,00	58,965,147,925,00	23,68	155,644,951,177,00	90,073,298,907,00	57,87	92,967,399,200,26	65,947,035,235,00	70,94	(124,662,194,148,37)	19,045,019,146,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin											
Belanja Modal Gedung dan Bangunan											
Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan											
<b>Sub Total</b>	707,652,692,424,00	449,094,697,373,00	63,46	611,700,962,473,00	514,612,066,553,43	84,13	515,315,212,906,98	471,907,634,511,73	91,58	(144,144,604,734,01)	44,165,153,159,58

Uraian	2018			2019			2020			Rata-Rata Pertumbuhan	
	Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi
(1)							(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>RSUD PETALA BUMI</b>											
<b>BELANJA</b>											
Belanja Operasi	21,172,400,35785	20,062,773,411.00	94,76	25,918,609,256.40	22,465,749,030.00	86,68	24,958,075,387.70	22,465,749,030.00	89,78	1,892,837,514,93	1,201,487,809,50
Belanja Pegawai	21,172,400,35785	20,062,773,411.00	94,76	25,918,609,256.40	22,465,749,030.00	86,68	24,958,075,387.70	22,465,749,030.00	89,78	1,892,837,514,93	1,201,487,809,50
Belanja Barang dan Jasa	52,316,115,95000	33,849,773,165.08	64,70	45,917,307,710.19	37,649,893,487.00	81,99	44,657,573,752.69	37,649,893,487.00	83,77	(3,829,271,098,66)	1,900,060,160,96
Belanja Modal	8,538,833,193.00	4,467,333,191.00	52,32	15,124,906,624.00	12,844,126,358.00	84,92	6,290,040,196.00	4,765,367,296.00	75,76	(1,124,396,498,50)	149,017,052,50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,801,363,193.00	3,850,660,405.00	49,36	11,018,028,624.00	9,322,397,728.00	84,61	4,290,040,196.00	3,898,491,830.00	90,87	(1,755,661,498,50)	23,915,712,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	707,950,000.00	597,125,995.00	84,35	4,087,000,000.00	3,516,659,355.00		2,000,000,000.00	866,875,466.00	43,34	646,025,000,00	134,874,735,50
Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan										-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	29,520,000.00	19,546,000.00	66,22	19,878,000.00	5,069,275.00					(14,760,000,00)	(9,773,000,00)
<b>Sub Total</b>	<b>82,027,349,500.85</b>	<b>58,379,879,767.08</b>	<b>71,17</b>	<b>86,960,823,590.59</b>	<b>72,959,768,875.00</b>	<b>83,90</b>	<b>75,905,689,336.39</b>	<b>64,580,401,689.85</b>	<b>85,08</b>	<b>(1,936,433,583,73)</b>	<b>2,951,243,908,89</b>
<b>RSJ TAMPAN</b>											
<b>BELANJA</b>											
Belanja Operasi	35,260,857,218,00	33,682,330,357.00	95,52	34,564,205,549.00	33,611,457,305.00	97,24	34,063,189,940.00	31,873,706,957.00	93,57	(598.833.639,00)	(904.311.700,00)
Belanja Pegawai	35,260,857,218,00	33,682,330,357.00	95,52	34,564,205,549.00	33,611,457,305.00	97,24	34,063,189,940.00	31,873,706,957.00	93,57	(598.833.639,00)	(904.311.700,00)
Belanja Barang dan Jasa	32,146,705,850.00	26,881,508,603.76	83,62	65,073,199,751.38	37,085,008,341.00	56,99	50,326,855,997.00	36,304,464,787.00	72,14	9.090.075.073,50	4.711.478.091,62
Belanja Modal	55,361,443,306.00	43,959,735,701.00	79,40	39,204,696,500.00	15,988,316,685.00	40,78	14,852,578,071.00	5,164,313,180.00	34,77	(20.254.432.617,50)	(19.397.711.260,50)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,178,437,000.00	4,612,503,719.00	50,25	16,593,295,500.00	14,715,997,888.00	88,69	1,909,360,971.00	1,497,611,120.00	78,44	(3.634.538.014,50)	(1.557.446.299,50)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46,167,506,306.00	39,347,231,982.00	85,23	22,493,401,000.00	1,272,318,797.00	5,66	12,930,719,100.00	3,654,302,060.00	28,26	(16.618.393.603,00)	(17.846.464.961,00)
Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Belanja Aset Tetap Lainnya	15,500,000.00	-	-	118,000,000.00	-	-	12,498,000.00	12,400,000.00	99,22	(1.501.000,00)	6.200.000,00
<b>Sub Total</b>	<b>122.769.006.374,00</b>	<b>104.523.574.661,76</b>	<b>85,14</b>	<b>138.842.101.800,38</b>	<b>86.684.782.331,00</b>	<b>62,43</b>	<b>99.242.624.008,00</b>	<b>73.342.484.924,00</b>	<b>73,90</b>	<b>(11.763.191.183,00)</b>	<b>(15.590.544.868,88)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.129.487.927.814,85</b>	<b>758.832.094.732,84</b>	<b>67,18</b>	<b>1.092.388.531.716,97</b>	<b>887.612.891.884,43</b>	<b>81,25</b>	<b>991.751.708.767,37</b>	<b>888.408.019.151,58</b>	<b>89,58</b>	<b>(68.868.109.523,74)</b>	<b>64.787.962.209,37</b>

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Analisis SWOT merupakan salah satu alternatif internal dan eksternal pada permasalahan kesehatan yang ada di Provinsi Riau, Untuk mengetahui faktor keberhasilan perlu diidentifikasi terlebih dahulu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.51**

### **Analisis SWOT Permasalahan Kesehatan Provinsi Riau**

<p><b>Kekuatan (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Pimpinan</li> <li>2. Dukungan lintas program dan lintas sektor</li> <li>3. Adanya SOP pelayanan</li> <li>4. Sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>5. Akses pelayanan kesehatan sudah mencapai kab/kota</li> <li>6. Kualitas SDM sesuai standar</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terdistribusinya SDM secara merata</li> <li>2. Mandatory Anggaran &gt; 10 % namun Pengalokasian Anggaran belum proporsional</li> </ol>
<p><b>Peluang (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesehatan merupakan program prioritas</li> <li>2. Adanya dukungan legislatif</li> <li>3. Adanya dukungan peran serta masyarakat</li> <li>4. Dukungan pemerintah daerah dan pusat</li> <li>5. Pelayanan kesehatan swasta</li> <li>6. Kemajuan teknologi</li> <li>7. Ketersediaan institusi pendidikan</li> <li>8. Kebijakan UHC</li> </ol>	<p><b>Ancaman (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PHBS masih rendah</li> <li>2. Penduduk yang belum tertampung dalam JKN</li> <li>3. Pembangunan belum berwawasan kesehatan</li> <li>4. Keadaan ekonomi masyarakat</li> <li>5. Kurang akurasi data lintas program dan lintas sektor</li> <li>6. Kondisi geografis</li> <li>7. Ancaman penyakit / Pandemi / Katastropik</li> </ol>

Untuk mendapatkan Faktor Kunci Keberhasilan (CSF), sebelumnya dapat dilakukan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dengan melakukan pembobotan yaitu seberapa besar kemungkinan factor tersebut memberikan dampak terhadap factor strategis organisasi (belum terjadi dan kemungkinan dapat terjadi) dan dengan rating yaitu pengaruh factor tersebut terhadap organisasi (sudah terjadi), Penyimpulan factor kunci keberhasilan itu sendiri merupakan analisa secara menyeluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di lingkungan yang akan mendukung pencapaian visi dan misi organisasi,

**Tabel 2.52**

Analisis SWOT untuk Manajemen Strategik

<p><b>ANALISIS SWOT</b></p>	<p><b>Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komiten pimpinan</li> <li>b. Dukungan lintas program dan lintas sector</li> <li>c. Adanya SOP pelayanan</li> <li>d. Sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>e. Akses pelayanan kesehatan sudah mencapai kab/kota</li> <li>f. Kualitas SDM sesuai standar</li> </ul>	<p><b>Kelemahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum terdistribusinya SDM secara merata.</li> <li>b. Mandatory Anggaran &gt; 10 % namun Pengalokasian Anggaran belum proporsional</li> </ul>
<p><b>Peluang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kesehatan merupakan program prioritas</li> <li>b. Dukungan legislatif</li> <li>d. Dukungan Pemerintahan Daerah dan Pusat</li> <li>e. Pelayanan kesehatan Swasta</li> <li>f. Kemajuan teknologi</li> <li>g. Ketersediaan Institusi Pendidikan</li> </ul>	<p><b>S+O</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dengan adanya komitmen pimpinan, dukungan lintas program dan lintas sector dan dukungan legalitatif. Pemda dan kementerian kesehatan RI dapat meningkatkan program pembangunan kesehatan karena kesehatan akan menjadi program prioritas</li> <li>b. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan Kualitas SDM sesuai standar mendukung kemajuan teknologi dan institusi pendidikan</li> </ul>	<p><b>W+O</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya peran serta masyarakat dan pelayanan kesehatan dapat membantu mengatasi masalah kesehatan</li> <li>b. Adanya institusi pendidikan dan kemajuan teknologi dapat meningkatkan kualitas SDM</li> <li>c. Dukungan legislative. Pemda dan Kementerian Kesehatan diharapkan Pengalokasian anggaran kesehatan dapat lebih proporsional</li> </ul>
<p><b>Ancaman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PHBS masih rendah</li> <li>b. Penduduk yang belum tertampung dalam JKN</li> <li>c. Pembangunan belum berwawasan kesehatan</li> <li>d. Keadaan ekonomi masyarakat</li> <li>f. Kurang akurasi data lintas program dan lintas sector</li> <li>g. Kondisi Geografis</li> <li>h. Ancaman penyakit /pandemic/Katastropik</li> </ul>	<p><b>S+T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dengan adanya komitmen pimpinan dan dukungan lintas program dan lintas sector mengatasi kurangnya akurasi data serta pembangunan belum berwawasan kesehatan</li> <li>b. Dengan kualitas SDM yang cukup dan akses pelayanan kesehatan yang sudah mencapai kab/kota dapat mengatasi kondisi geografis yan sulit.</li> <li>c. Dengan adanya dukungan sarana dan prasarana diharapkan dapat mengatasi masalah kesehatan terutama ancaman penyakit / pandemic/katastropik</li> </ul>	<p><b>W+T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlunya peningkatan anggaran kesehatan dalam mengatasi keadaan ekonomi masyarakat, globalisasi, dan kondisi geografis</li> <li>b. Mengefektifkan SDM guna meningkatkan akurasi data baik lintas program maupun lintas sector</li> <li>c. Peningkatan SDM akan berguna mengatasi pembangunan yang belum berwawasan kesehatan</li> </ul>

### **Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factors)**

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien, Dari analisa SWOT untuk manajemen strategis didapatkan beberapa faktor kunci keberhasilan yaitu :

- 1, Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau.
- 2, Tersedianya sumber daya manusia yang professional menuju pelayanan kesehatan prima.
- 3, Terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan masyarakat (*public good*)
- 4, Terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif bagi kesehatan melalui pembangunan berwawasan kesehatan.
- 5, Terselenggaranya upaya kesehatan mandiri oleh masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam memelihara kesehatannya.

### **C. Tantangan**

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan, Hingga saat ini, seluruh unsur yang terlibat dalam sektor kesehatan telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut, namun masalah kesehatan tidak menjadi tanggung jawab tunggal sektor kesehatan, banyak sektor lain yang diperlukan keterlibatannya dalam ikut menjaga dan mewujudkan tercapainya derajat kesehatan masyarakat, antara lain sektor Pendidikan, Agama, Pertanian/Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, Transmigrasi dan Pemukiman, Kelautan, Peternakan dan sektor lainnya, Tantangan lainnya adalah perkembangan globalisasi yang menghilangkan batas antar wilayah dan antar Negara.

Perkembangan sistem pelayanan kesehatan dunia yang sangat pesat, tidak dapat dihindari akan memasuki pasar pelayanan kesehatan di Indonesia dan menggeser sistem pelayanan kesehatan di negara kita yang belum sesuai dengan kondisi terkini, Dengan adanya globalisasi, seluruh tenaga kesehatan ( Medis, Paramedis dan Non Medis) dituntut untuk memiliki kemampuan yang handal dan prima dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung,

Sejalan dengan tingginya tuntutan tersebut, sarana dan prasarana kesehatan dari level terendah hingga tertinggi harus disediakan dan dilengkapi segala fasilitasnya

agar dapat mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh masyarakat, Di lain pihak, makin banyak pasien di Puskesmas dan Rumah sakit yang membutuhkan pelayanan kesehatan, artinya dari sisi kuratif dan rehabilitatif terjadi peningkatan demand sementara dari sisi preventif dan promotif masih jauh ketinggalan.

Hal ini perlu perhatian serius, mengingat aspek preventif dan promotif merupakan strategi utama yang sangat efektif dan efisien dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menjadi tuntutan terbesar terhadap keberhasilan pembangunan sektor Kesehatan. Aspek promotif dan preventif ini harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan secara optimal dengan melibatkan seluruh lintas sektor terkait, stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat.

#### **D. Peluang**

Adapun peluang pengembangan pelayanan bagi sektor kesehatan ke depan sangat terbuka lebar, terlebih kesehatan merupakan program prioritas, dengan diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka sistem pemeliharaan kesehatan masyarakat akan tertata dengan baik, Sistem Kesehatan di Indonesia didukung oleh pembiayaan pemerintah yang cukup besar, Pembiayaan pemerintah bersumber baik dari pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, Anggaran pemerintah Pusat disalurkan melalui berbagai saluran misalnya DAU, DAK, DAK non fisik (BOK, Jampersal, Akreditasi Puskesmas/Rumah sakit). Sementara anggaran pemerintah daerah dapat dalam berbagai bentuk untuk mendukung program Pusat maupun untuk pembiayaan program inovasi daerah sendiri.

Dengan begitu banyaknya sumber-sumber pembiayaan sistem kesehatan di Indonesia, diharapkan dapat memberi daya ungkit terhadap layanan kesehatan, Aspek promotif-preventif-kuratif dan rehabilitatif mendapatkan porsi yang seimbang dan akan terlaksana dengan optimal, tenaga kesehatan akan termanfaatkan dengan baik pada aspek promotif-preventif-kuratif dan rehabilitatif, dan seluruh masyarakat akan terlayani dengan baik, Perkembangan teknologi dan informasi dewasa ini juga memberikan peluang terhadap peningkatan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih tingginya kejadian mortalitas dan morbiditas	Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita	
		Jumlah Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019 sebesar 125 kasus meningkat menjadi 129 kasus ( 2020 ) sedangkan target nya setiap tahun terjadi penurunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum semua pelayanan ANC terintegrasi . Data capaian program kesehatan ibu Kontak pertama ibu hamil K1 tahun 2019 sebanyak 142.968 ibu hamil tetapi yang diperiksa Hb hanya 89.968 org (86,34 %). Masih ditemukannya pengisian kohort yang tidak lengkap terutama dalam pengkajian komplikasi kepada ibu hamil seperti Anemia,Hipertensi, Diabetes Melitus,HIV,IMS, Malaria, TB, Kecacingan, Hepatitis B, dll, hal ini menunjukkan belum dilakukannya pengkajian terhadap komplikasi tersebut terhadap ibu hamil yang kontak ANC.</li><li>2.Penjaringan ibu hamil resti masih rendah, berdasarkan data program kesehatan ibu Provinsi Riau Tahun 2020, jumlah absolut ibu hamil yang dilakukan deteksi faktor resiko sebanyak 23.784 orang, sedangkan perkiraan ibu hamil yang mengalami komplikasi 33.118 orang (71,8%).</li><li>3.Cakupan penanganan komplikasi maternal Provinsi Riau Tahun 2020 masih rendah (realisasi 42,48% dari target 80%).</li><li>4.Respon Time RS lambat, RS belum mampu PONEK terutama belum tersedianya bank darah, Rujukan kasus dari pelayanan kesehatan primer ( PONEK ) belum</li></ol>

			<p>memenuhi standar, Program Perencanaan Persalinan Komplikasi ( P4K ) belum maksimal.</p> <p>5. Masih banyak bidan terutama bidan di desa belum memahami pelayanan Ante Natal Care sesuai standar ( 10T) dan Sistem pencatatan di registrasi kohort</p> <p>6. Petugas Puskesmas belum melakukan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi ( P4K) secara optimal khususnya kunjungan rumah kepada Ibu Hamil.</p>
		Masih Tingginya Jumlah Kematian bayi (AKB) Jumlah Kematian Bayi Tahun 2020 : 596 kasus meningkat jika dibandingkan tahun 2019 (475 kasus)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas Pelayanan Ante natal Care pada Ibu Hamil yang belum memenuhi standar sehingga kurang terpantaunya kondisi / perkembangan janin.</li> <li>2. Penanganan bayi baru lahir yang belum memenuhi standar.</li> <li>3. Kompetensi Petugas yang masih belum optimal di dalam penanganan bayi baru lahir terutama di dalam penanganan asfiksia dan berat badan lahir rendah (BBLR).</li> </ol>
		Masih Tingginya kasus kematian Balita tahun 2020, 632 kasus meningkat cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2019 (547 kasus).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Petugas yang masih belum optimal di dalam penanganan balita.</li> <li>2. Belum semua balita di wilayah kerja Puskesmas terjaring untuk dipantau tumbuh kembang dan kondisi kesehatannya.</li> </ol>
		Masih tingginya persentase balita gizi buruk & stunting di Provinsi Riau (Prevalensi Gizi Buruk pada balita 0,88%, nasional 3,8% ( Rikesdas 2018); Persentase stunting 22,3%, angka nasional data SSGI 2021 : 24,4%.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 99% kasus gizi buruk yang dilaporkan adalah berasal dari keluarga miskin</li> <li>2. 90% kasus gizi buruk yg dilaporkan adalah dengan disertai penyakit penyerta seperti TBC, Pneumonia, Batuk, demam, pilek, kelainan tumbuh kembang</li> <li>3. 90% kasus gizi buruk yang terjadi adalah berasal dari orang tua yg tdk tamat SD, bahkan tidak bersekolah</li> <li>4. Rendahnya Tingkat partisipasi masyarakat dalam hal Penimbangan anaknya ke Posyandu dengan D/S sekitar 30% di Provinsi Riau</li> <li>5. Petugas mengalami kesulitan dalam menjaring kasus Gizi buruk/stunting</li> <li>6. Kurangnya keterlibatan lintas sektoral dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah gizi.</li> </ol>

		<b>Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular Masih Tinggi</b>	
		<b>1. HIV</b>	
		<p>ODHA ( Orang Dengan HIV AIDS ) dengan terapi ART ( Anti Retroviral ) dari tahun 2019 s.d 2020 meningkat 14 % menjadi 23 % tetapi masih jauh dari target 2019 sebesar 23 % dan target 2020 sebesar 40 %.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya penemuan kasus HIV masih rendah 58,9%, rendahnya penemuan berdampak pada rendahnya ODHA yang akan diinisiasi ARV.</li> <li>2. Masih kurangnya tenaga pendamping untuk pengobatan ODHA dengan ARV.</li> <li>3. Kekhawatiran stigma diskriminasi.</li> <li>4. Lost to follow karena bosan /merasa efek samping obat.</li> <li>5. Ada kecenderungan ODHA dari kelompok populasi kunci yang ada di lokasi/lokalisasi sulit diinisiasi ARV atau diobati Sifilisnya karena dibatasi geraknya oleh mucikari/mami untuk datang ke Fasyankes.</li> <li>6. Belum semua Puskesmas melakukan kewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yaitu melakukan skrining HIV pada 8 kelompok sasaran yang rentan.</li> <li>7. Belum semua Puskesmas melakukan kewajiban melaksanakan Triple Eliminasi yaitu skrining HIV, Sifilis dan Hepatitis B pada ibu hamil.</li> <li>8. Koordinasi lintas program belum optimal sehingga menurunkan kesempatan untuk meningkatkan capaian program HIV.</li> <li>9. SIHA sebagai sistim informasi program HIV dan IMS belum optimal pemanfaatannya oleh Puskesmas dan RS yang melakukan layanan HIV dan IMS, sehingga data yang ada masih under reported.</li> </ol>
		<b>2. Tuberkulosis</b>	
		<p>Angka Keberhasilan Pengobatan TB Tahun 2020 Provinsi Riau sudah mencapai target ( 90,4 % ) sesuai Target WHO Angka Keberhasilan Pengobatan TB &gt; 85 %, Namun untuk Angka CDR Provinsi Tahun 2020 ( 30 % ) masih jauh dari angka CDR yang direkomendasikan oleh WHO <math>\geq 90\%</math></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beban kerja Pengelola Program TB meningkat dan difokuskan untuk penanganan Covid.</li> <li>2. Sinergisitas Pemeriksaan TB dengan Covid Tidak Berjalan.</li> <li>3. Masih banyak RS Pemerintah dan Swasta yang belum melaporkan Kasus TB melalui SITB.</li> </ol>

		<b>3. DBD</b>	
		Jumlah Kab/Kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk berfluktuatif 2018 : 100 %, 2019 : 50 %, 2020 : 58 % sehingga perlu kewaspadaan kemungkinan terjadinya wabah DBD.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.</li> <li>2. Akses air sulit menyebabkan warga masyarakat menyimpan air dalam bejana besar tanpa penutup.</li> <li>3. Kontur wilayah ditemukan tempat perindukan nyamuk DBD</li> </ol>
		<b>4. Hipertensi</b>	
		Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar : 11,25 %, Target Nasional : 100 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Skrining PTM belum optimal terutama pada masa pandemi Covid-19</li> <li>2. Masih banyak Fasyankes yang belum melaporkan Kasus Hipertensi</li> </ol>
		<b>5. Diabetes Militus</b>	
		Persentase Penderita Diabetes Militus yang mendapat pelayanan sesuai standar : 49,30 %. Target Nasional : 100 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Skrining PTM belum optimal terutama pada masa pandemi Covid-19</li> <li>2. Masih banyak Fasyankes yang belum melaporkan Kasus Diabetes Militus</li> </ol>
		Health Security untuk Penanganan Pandemi masih belum memenuhi standard.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Paradigma Kesehatan Untuk Semua.</li> <li>2. Masih terbatasnya Akses terhadap Tes Penyakit, Obat-Obatan dan Vaksin Penyakit Yang berpotensi Wabah / Covid-19</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Masih tingginya Kesenjangan dalam mendapatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>	Kuantitas dan Kualitas pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar (Permenkes 43 Tahun 2019 dan Permenkes 3 Tahun 2020. Sebesar 62,5% pada tahun 2018 dan 63,32% pada tahun 2019.</li> <li>2. Masih ada beberapa rumah sakit yang mengalami penurunan kelas karena sumber daya manusia dan sarana, prasarana dan alat tidak memenuhi standar (Permenkes 3 Tahun 2020 dan tidak sesuai dengan data yang di input dalam aplikasi. (8,5% )</li> <li>3. Persentase puskesmas yang memiliki 9 tenaga kesehatan</li> </ol>
		Pengelolaan Sistem JKN yang belum Optimal, Universal Health Coverage ( UHC ) terealisasi 79,67 % dari target 100 %.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya warga yang sudah memiliki JKN minta dialihkan ke PBI APBD dengan alasan sudah tak mampu bayar, yang berdampak kepada anggaran daerah</li> <li>2. Segmen Kepesertaan PBPU/BP dan PPU belum maksimal</li> <li>3. Masyarakat tidak dapat didaftarkan karena dokumen kependudukan tidak valid</li> </ol>

		Indeks Kepuasan Masyarakat sudah mencapai Target, tetapi ada beberapa standar pelayanan minimal yang belum terpenuhi	Kategori berdasarkan indikator kepuasan / SPM Rumah Sakit
			<p>1. Beberapa pelayanan belum optimal / memenuhi standar di RSUD Arifin Achmad antara lain terjadi pada :</p> <p>a) Waktu Tunggu Operasi Elektif sejak di tetapkan oleh dokter bedah yang bersangkutan ( tahun 2020 target 2 bulan realisasi sampai dengan 6 bulan )</p> <p>b) Waktu tunggu pelayanan rawat jalan belum memenuhi standar ( tahun 2020 waktu tunggu rawat jalan standar &lt; 60 menit , realisasi 68 – 86 menit )</p> <p>c) Waktu tunggu pelayanan farmasi belum memenuhi standar ( tahun 2020 waktu tunggu farmasi standar 30 - 60 menit , realisasi 80 – 90 menit )</p> <p>d) Peningkatan kompetensi SDM belum memenuhi standar pelatihan minimal 20 jam per tahun (tahun 2020 target 100% , realisasi 6%)</p> <p>e) Ketepatan waktu pemeliharaan alat medik belum sesuai standar ( tahun 2020 target 100%, realisasi 3,3% )</p>
			<p>2. Beberapa Pelayanan belum optimal / memenuhi standar di RS Jiwa Tampan antara lain pada :</p> <p>a) Pelayanan Rawat Jalan : Waktu tunggu melebihi standar 60 menit.</p> <p>b) Pelayanan Rawat Inap : Tingkat kepuasan pelanggan tercapai dibawah 90 % karena angka BOR (Bed Occupation Rate) dan ALOS (Average Length of Stay) yang tidak memenuhi standar.</p> <p>c) Pelayanan UPIP : Angka pasien yang dapat ditenangkan kurang dari 48 jam hanya tercapai 65,89 % sedangkan standar 95 %.</p> <p>d) Pelayanan Napza : Sarana dan prasarana belum optimal, diperlukan peningkatan kualitas Gedung secara menyeluruh..</p>
			<p>3. Beberapa Pelayanan belum optimal / memenuhi standar di RSUD Petala Bumi antara lain pada :</p> <p>a) Pelayanan K3RS (Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit)  Saat ini kegiatan K3RS berupa pelayanan MCU ( Medical Chek Up ) bagi petugas kesehatan di lingkup RSUD Petala Bumi. MCU terakhir di laksanakan pada th 2019,</p>

			<p>sebanyak 418 karyawan. Untuk tahun 2020 MCU tidak dilaksanakan. Pemeriksaan yang dilakukan hanya dilaksanakan bagi tenaga kesehatan RSUD Petala Bumi yang mengalami gejala covid-19.</p> <p>b) Pelayanan Akses Informasi dan Promosi Kesehatan  Akses informasi dan promosi kesehatan sangat diperlukan RSUD Petala Bumi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan efisiensi terhadap proses dan sumber daya yang digunakan.  Dengan promosi kesehatan masyarakat dapat lebih mengenal dan mengetahui keberadaan RSUD Petala Bumi sebagai pemberi layanan kesehatan. Karena dengan promosi masyarakat mengetahui pelayanan apa saja yang bisa mereka dapatkan di RSUD Petala Bumi.</p> <p>c) Ketersediaan Tenaga Medis dan Non Medis  Sampai dengan tahun 2020 jumlah tenaga PNS RSUD Petalabumi lebih banyak tenaga non PNS dibandingkan tenaga PNS. Ini terlihat pada tenaga teknis seperti Perawatan, tenaga medis non perawatan dan tenaga non medis. Selain itu untuk tenaga dokter spesialis masih ada yang non PNS sehingga mempengaruhi jam pelayanan.</p> <p>d) Belum Optimalnya Dokumen Survei Akreditasi  Berdasarkan hasil survei mandiri yang dilakukan oleh Tim Akreditasi RSUD Petala Bumi Tahun 2020 didapatkan hasil dari 16 Bab masih ada 3 Bab yang hasilnya dibawah 80% yaitu : Pelayanan Asuhan Pasien (PAP) 74,64%, Program Nasional (PN) 76,72% dan Manajemen Fasilitas Keselamatan (MFK) 62,62%. Sedangkan untuk 13 Bab lainnya hasilnya sudah diatas 80%. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa capaian Tingkat Akreditasi RSUD Petala Bumi masih dalam Tingkat Utama.</p> <p>e) Kompetensi SDM  Pada tahun 2019 jumlah SDM yang mengikuti pelatihan 170 orang (42%) dari 405 SDM RSUD Petala Bumi. Dari 170 orang tersebut yang terpenuhi 20 jam pelajaran hanya 153 orang (38%).  Jumlah sumber daya manusia RSUD Petala Bumi yang mengikuti pelatihan pada tahun 2020 berjumlah 26 orang dari 184 orang PNS (14%). Sedangkan yang terpenuhi untuk pelatihan yang lebih dari 20 jam pertahun berjumlah 3 orang (2%). Hal ini</p>
--	--	--	--

			<p>terjadi karena penyelenggara pelatihan tidak mengadakan pelatihan karena disebabkan pandemi covid-19. Hanya sebagian kecil saja pelatihan yang dilaksanakan secara online.</p> <p>f) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sampai dengan tahun 2020 ketersediaan alat kesehatan RSUD Petala Bumi masih sebesar 31,42%, dan prasarana 97,14%. Untuk Sarana sudah mencapai 100%.</p>
		Belum Optimalnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan gaya hidup masyarakat</li> <li>2. Tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat</li> <li>3. Dukungan Lintas Sektor / Pentahelix masih kurang, informasi dan pemahaman serta pengetahuan kesehatan masyarakat tentang GERMAS masih rendah ( 5 Kabupaten belum mempunyai kebijakan tentang GERMAS ditahun 2020 )</li> <li>4. Masih kuranya sumberdaya, potensi, dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dalam mencapai hidup sehat</li> <li>5. Masih minimnya keterlibatan pihak swasta dan ormas dalam pelaksanaan Germas Hidup Sehat ( Sudah ada keterlibatan, namun belum ada MoU ), yang sudah ada MoU kurang dari 10 %</li> </ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih

#### 3.2.1 Visi

Visi Gubernur dan wakil Gubernur Riau menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan wakil Gubernur Riau ini menjadi visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yaitu :

***“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.***

#### 3.2.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang

ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk mencapai visi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi- misi dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- Misi I Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya
- Misi 2 Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Misi 3 Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
- Misi 4 Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
- Misi 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Misi Gubernur dan wakil Gubernur Riau yang terkait langsung dengan Dinas kesehatan adalah Misi Pertama yaitu “ **Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya**”. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kesehatan melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan yaitu :

1. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif;
2. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.;
3. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
4. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan;
5. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan;
6. Penguatan Pelaksanaan JKN;

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat Dan Pendorong**  
**Yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Dan Misi Gubernur Riau**

No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya	Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM Kesehatan Belum memadai</li> <li>2. Fasilitas / SaranaPrasarana belum memadai</li> <li>3. Sistem Rujukan Belum optimal</li> <li>4. Pembiayaan Kesehatan masih kurang</li> <li>5. Regulasi masih kurang.</li> <li>6. Koordinasi lintas Program belum terpadu</li> </ol>	Komitmen Pemerintah terhadap kebijakan Bidang Kesehatan diantaranya : Standar Pelayanan Minimal (SPM),
		Masih tingginya Persentase Gizi Buruk dan Stunting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya permasalahan gizi dengan beban ganda (gizi buruk, gizi kurang dan gizi lebih/kegemukan).</li> <li>2. Koordinasi Lintas Program belum terpadu</li> </ol>	Regulasi Penanganan Stunting (Kemendagri, Kementerian Kesehatan dan Pergub).
		Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular dan Tidak Menular Masih Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya Penemuan Kasus.</li> <li>2. Pengobatan Penyakit masih belum optimal.</li> <li>3. Belum semua Puskesmas menjalan Standar Pelayanan Minimal.</li> <li>4. Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program belum optimal.</li> <li>5. Sistem Pencatatan dan Pelaporan belum optimal</li> </ol>	Komitmen Pemerintah terhadap kebijakan Bidang Kesehatan diantaranya : Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		Pengelolaan Sistem JKN yang belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan kesehatan belum menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat</li> <li>2. Masih banyak penduduk yang tidak memiliki persyaratan lengkap untuk bisa didaftarkan sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)</li> </ol>	Diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pembiayaan pemerintah bersumber baik dari pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Budget Sharing JKN dengan Kabupaten / Kota.

No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Penguatan Health Security untuk Penanganan Pandemi	Belum semua daerah mempunyai system tanggap darurat yang sesuai dengan standar.	Regulasi dalam Penguatan Health Security (Kemendagri, Kementerian Kesehatan dan Pergub)
		Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terutama pada perubahan gaya hidup yang mengakibatkan meningkatnya kasus penyakit degeneratif.	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), (Kemendagri, Kementerian Kesehatan dan Pergub).
		Kuantitas dan Kualitas pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar	Keterbatasan SDM kesehatan yang kompeten terutama di daerah sulit dijangkau atau daerah perbatasan, masih rendahnya  Kesiapan sarana dan Prasarana pelayanan Kesehatan terbatas untuk mencapai kelas Akreditasi	
		Beberapa standar pelayanan minimal belum terpenuhi		
			1. RSUD Arifin Achmad	
			Tenaga keperawatan dan non keperawatan yang belum sesuai dengan Standar Permenkes Nomor 3 Tahun 2020	1. Adanya dukungan pemerintah Provinsi Riau terhadap pengangkatan pegawai PNS dan non PNS Kesehatan. 2. Sebagian besar pelayanan sudah sesuai standar. 3. Ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan provinsi oleh Kementrian Kesehatan. 4. Tersedianya layanan Unggulan yang sudah ditetapkan
			Belum Sinkronnya Kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad sebagai RS Pendidikan dengan FK UNRI.	RSUD Arifin Achmad merupakan Rumah Sakit Pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes dan Gubernur Riau

No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			Sarana dan prasarana pengelolaan limbah cair medis belum sesuai standar.	Dukungan Anggaran dari Pemerintah Provinsi Riau terhadap pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan.
			<b>RS Jiwa Tampan</b>	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM medis dan non medis sesuai standar.</li> <li>2. Belum optimalnya pelaksanaan sistem informasi Rumah Sakit</li> <li>3. Keterbatasan sarana prasarana ruang rawat inap dan pengelolaan limbah</li> <li>4. Stigma negative masyarakat terhadap kesehatan jiwa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan dukungan Pemerintah</li> <li>2. Adanya regulasi RS untuk mendukung pengembangan pelayanan di luar kekhususan</li> <li>3. Telah terakreditasi pelayanan RS.</li> <li>4. Adanya kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan.</li> <li>5. Potensi peningkatan pendapatan</li> </ol>
			<b>3. RSUD Petala Bumi</b>	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengembangan pelayanan sebagai pelayanan unggulan agar RSUD Petala Bumi mampu bersaing di tengah era jaminan kesehatan nasional.</li> <li>2. Perlunya peningkatan profesionalisme SDM serta penambahan jumlah SDM sesuai kebutuhan rumah sakit</li> <li>3. Keterbatasan lahan dan ruangan sehingga penataan fungsi ruangan/bagian masih ada yang belum memenuhi syarat teknis sarana prasarana rumah sakit kelas C.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Provinsi Riau dalam pelayanan kesehatan.</li> <li>2. Dukungan <i>stakeholders</i> (dukungan pihak yang berwenang bagi peraturan dan kebijakan internal rumah sakit).</li> <li>3. Penetapan RSUD Petala Bumi sebagai PPK BLUD</li> <li>4. Dukungan pendanaan.</li> <li>5. Potensi peningkatan pendapatan.</li> <li>6. Telah terakreditasi lima pelayanan dasar.</li> </ol>

No	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
				7. Adanya kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan. 8. Tuntutan masyarakat untuk pelayanan kesehatan.
		Belum Optimalnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Adanya dukungan dari pihak swasta dalam pengerakkan Germas

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Provinsi

**Tabel 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Provinsi**

Sasaran Jangka Menengah Renstra KL	Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi masih rendah terlihat dari Jumlah Kematian Ibu, Bayi dan Balita cenderung mengalami peningkatan dan Status Gizi Masyarakat masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan masih terbatas</li> <li>2. Belum optimalnya kemitraan Bidan dan Dukun dalam pelayanan kesehatan reproduksi</li> <li>3. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pola asuh anak dan gizi kurang</li> <li>4. Ketersediaan Tenaga Kesehatan masih terbatas dan Penyebaran yang belum merata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Global SDG's untuk upaya penurunan AKI, AKB.</li> <li>2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai</li> </ol>

<p>2 Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan</p>	<p>Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Letak geografis yang sulit dan penyebaran penduduk yang tidak merata</li> <li>2. Tenaga kesehatan masih terbatas Distribusi Tenaga kesehatan yang</li> <li>3. Belum merata (tenaga kesehatan lebih banyak di perkotaan dibandingkan dengan didaerah)</li> <li>4. Belum maksimalnya pelayanan Standar Mutu di fasilitas Kesehatan Tingkat primer</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan No 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi</li> <li>2. Permenkes No. 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit</li> <li>3. Permenkes No. 71 Tahun 2013 Pelayanan Kesehatan Pada jaminan kesehatan</li> <li>4. Meningkatnya kerjasama antar organisasi profesi di Fasilitas Kesehatan</li> </ol>
<p>3 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat</p>	<p>Angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular masih relatif tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi infrastruktur didaerah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan masih terbatas</li> <li>2. Masih rendahnya Inovasi dalam penyampaian promosi kesehatan kemasyarakat</li> <li>3. Stigma negatif masyarakat untuk penderita penyakit tertentu seperti TBC, HIV-AIDS, usta dan masalah kejiwaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Global untuk upaya penurunan penyakit TB Paru serta adanya pelayanan DOTS bagi pengobatan TB Paru</li> <li>2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai</li> <li>3. Tersedianya EWARS (Early Warning And Respon System)</li> </ol>
<p>4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan</p>	<p>Pengelolaan obat belum Optimal Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum sesuai standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi di pusat dan daerah belum optimal</li> <li>2. Terbatasnya petugas yang memiliki kompetensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya NSPK tentang kefarmasian</li> <li>2. Bertambahnya sarana produksi dan pelayanan obat, obat tradisional, Perbekes</li> </ol>

		<p>pengelolaan obat</p> <p>3. Meningkatnya Jumlah, jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan Penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata</p> <p>4. Kondisi infrastruktur didaerah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan masih terbatas</p>	<p>3. Era Globalisasi dunia perdagangan bebas sudah dibuka</p>
<p>5 Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar</p>	<p>1. Penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata Komposisi tenaga kesehatan yang tidak berimbang</p> <p>2. Kurang minatnya tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah terpencil (tenaga kesehatan lebih banyak di perkotaan dibandingkan dengan didaerah)</p>	<p>Letak geografis yang sulit Kondisi infrastruktur didaerah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan masih terbatas</p>	<p>1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 1235/MENKES/SK/XII/2007 Tentang Pemberian Insentif bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang melaksanakan Penugasan Khusus</p> <p>2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 156/MENKES/SK/I/2010 Tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khusus Di Puskesmas Daerah terpencil, Perbatasan dan kepulauan</p> <p>3. Adanya Program Nusantara Sehat</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Kepmenkes RI Nomor 725/SK/V/ Menkes/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan.</p>

6 Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Pengelolaan Sistem JKN yang belum Optimal	Masih banyak penduduk yang tidak memiliki persyaratan lengkap untuk bisa didaftarkan sebagai peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)	Permenkes No. 71 Tahun 2013 Pelayanan Kesehatan Pada jaminan kesehatan
7 Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola	Lemahnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam hal keterkaitan program dan pendanaan	Belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah	UU 14/2008 dan PP 61/2010 tentang Keterbukaan informasi Publik mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan
8 Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	Pemanfaatan Sistem Informasi dalam meningkatkan pelayanan masih kurang	Terbatasnya anggaran program untuk Sistem informasi kesehatan	Dengan Pemanfaatan Sistem Informasi akan mendukung pemberian pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dan berkualitas.

### 3.4 Telaahan Kabupaten/Kota Provinsi Riau

**Tabel 3.4**  
**Telaah Renstra Kabupaten/Kota**

Renstra Kabupaten/Kota	Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<p>Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita a. Kematian Ibu terutama Kab yang mengalami peningkatan Kuantan Singingi, Bengkalis dan Kab. Kepulauan Meranti</p> <p>b. Kematian Bayi : Kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah kematian : Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak, Rokan Hilir, Kep. Meranti , Kota Pekanbaru dan Kota Dumai</p> <p>c. Jumlah Kematian Balita : Kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah kematian :</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM Kesehatan Belum memadai</li> <li>2. Fasilitas / SaranaPrasarana belum memadai</li> <li>3. Sistem Rujukan Belum optimal</li> <li>4. Pembiayaan Kesehatan masih kurang</li> <li>5. Policy Regulasi masih kurang</li> <li>6. Koordinasi lintas Program belum terpadu</li> </ol>	Komitmen Pemerintah terhadap kebijakan Bidang Kesehatan diantaranya : Standar Pelayanan Minimal (SPM),

	Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu, Kep. Meranti dan Kota Pekanbaru		
Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Akses Pelayanan belum merata  Masih ada Fasilitas Kesehatan yang belum memenuhi standar pelayanan kesehatan ( Akreditasi Pusk. dan Akreditasi RS )	Kondisi Geografis Provinsi Riau dimana ada beberapa daerah yang sulit diakses ( daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan )	Adanya Perhatian pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan.  Penetapan Standar Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Akses dan Mutu Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Adanya perbedaan antara RKO ( Rencana Kebutuhan Obat ) dengan Ketersediaan Obat oleh Penyedia.	Faktor Geografis menjadi kendala dalam distribusi obat  Ketersediaan obat yang kosong oleh penyedia	Sistem pengadaan obat sudah dipermudah
Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan	Banyaknya mutasi PNS Tenaga Kesehatan menyebabkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum memenuhi standar 9 Nakes	Adanya kesenjangan antara formasi yang dibutuhkan dengan formasi yang ada.	Dukungan dari Pemerintah Pusat dengan Program Nusantara Sehat
Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan	Terbatas Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan sarana pendukungnya dan Persebaran Fasilitas pelayanan kesehatan.	Kurangnya sarana pendukung untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti listrik, air bersih.	Dukungan Pemerintah Pusat untuk daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas Kinerja memberikan dampak kepada Perangkat Daerah untuk selalu memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan.	Penanggung Jawab Program / Bidang di Perangkat Daerah belum memprioritaskan untuk memenuhi standar-standar dalam Akuntabilitas Kinerja	Regulasi tentang Akuntabilitas yang mewajibkan setiap OPD untuk melaksanakan sesuai standar

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi Riau tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagai OPD Teknis bidang kesehatan. Kebijakan Kementerian Kesehatan berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di Provinsi. Demikian

pula kebijakan Provinsi juga berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di kabupaten/kota. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan tahun 2020 – 2024, Kementerian Kesehatan menetapkan lima tujuan Strategis Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
3. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
2. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Tujuan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang akan dicapai adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian melalui peningkatan akses, cakupan dan mutu pelayanan kesehatan serta penyediaan sumber daya kesehatan yang cukup, merata dan bermutu. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam periode 2019-2024 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatkan kesehatan Ibu, Anak dan kesehatan Reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
5. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
6. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
7. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan
8. Penguatan Pelaksanaan JKN
9. Peningkatkan Pelayanan Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi
10. Peningkatkan Jejaring Pelayanan Kesehatan.
11. Peningkatkan Pelayanan Rumah Sakit dengan berorientasi pada pasien safety.
12. Peningkatan kualitas pelayanan penunjang klinik dan non-klinik

Untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan maka strategi yang dilakukan akan mendukung semua capaian program dan oleh karena itu diperlukan dukungan kebijakan dari Dinas Kesehatan untuk mencapai strategis tersebut yaitu “ Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan

penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif di dukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

### 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 yang bertujuan terwujudnya ruang yang produktif, efisien, nyaman dan berkelanjutan untuk menjadikan Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu di Kawasan Selat Malaka.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsi pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program (KRP). Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, tujuan dilakukannya telaahan KLHS adalah untuk mengidentifikasi apakah ada program atau kegiatan pelayanan perangkat daerah yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KHLS.

**Tabel 3.5**  
**Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

RTRW / KLHS	Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )
<b>Rencana Tata Ruang Wilayah</b>			
Terwujudnya ruang wilayah yang berdaya saing global berbasis ekologi	Pelayanan kesehatan pada masyarakat sesuai rencana pengembangan kawasan pemukiman yang terkait dengan kawasan industri, jasa dan perdagangan serta kawasan rawan bencana [ banjir, kebakaran, dll]	1. Lemahnya Koordinasi dengan sector terkait.	1] Berdasarkan rencana tata ruang wilayah [RTRW] untuk aspek kesehatan diharapkan dapat mendukung fungsi kawasan berbasis ekologi
			2] Pengembangan kawasan pemukiman, kawasan industri dan

			jasa tetap memperhatikan aspek kesehatan dan lingkungan
<b>Kajian Lingkungan Hidup Strategis</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan angka kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Baru lahir dan Balita</li> <li>2. Mengakhiri Epidemii AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Tropis yang terabaikan dan memerangi Hepatitis, Penyakit Bersumber air, serta penyakit menular lainnya</li> <li>3. Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan</li> <li>4. Memperkuat Pencegahan dan Pengobatan, penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alcohol yang membahayakan</li> <li>5. Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</li> <li>6. Mencapai Cakupan Kesehatan Universal, termasuk perlindungan resiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang</li> <li>7. Mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah</li> <li>8. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Kesehatan belum berwawasan Lingkungan</li> <li>2. Belum Ada Juknis tentang Pembangunan berwawasan kesehatan</li> <li>3. Belum adanya kesatuan gerak dengan sector lain dalam peningkatan lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya Koordinasi dengan sector terkait.</li> <li>2. Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Tenaga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan adalah Pembangunan Berwawasan Kesehatan</li> <li>2. Banyak Lintas Sektor mempunyai tupoksi terkait lingkungan</li> </ol>

tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau.			
9. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang			

Hasil KLHS tersebut terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan dokumen KLHS Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024

**a. Penentuan Isu-Isu Strategis**

**Tabel 3.6**  
**Identifikasi Isu Strategis Daerah Provinsi Riau**

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Internasional		
		Krisis iklim berperan besar menyebabkan malnutrisi dan meningkatkan penyebaran penyakit endemik, seperti malaria. Dampak emisi karbon yang berasosiasi sangat kuat dengan kemunculan serangan jantung, stroke, kanker paru-paru, dan penyakit kronis pernapasan lainnya.	Merevitalisasi upaya penanganan penyakit menular, memprakarsai obat-obatan yang efektif melawan penyakit, mencegah serta merawat orang dengan penyakit tidak menular dan alami persoalan mental,  Mengupayakan pembangunan sektor di luar kesehatan (lingkungan, pertanian, dll.), serta menampilkan solidaritas antar institusi, lembaga, dan kelompok masyarakat.
		Kesiapan melawan pandemic Covid-19.	Solidaritas global, mempercepat akses terhadap tes, obat-obatan, dan vaksin Covid-19, menerapkan paradigma kesehatan untuk semua.

	<b>SDGs</b>		
	Tujuan ke 1 : Tanpa Kemiskinan – Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun	Pengelolaan Sistem JKN yang belum Optimal	<p>Ketersediaan fasilitas kesehatan primer atau tingkat pertama yang merata di seluruh daerah,</p> <p>Ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat primer,</p> <p>Remunerasi atau pendapatan yang adil bagi tenaga medis di semua fasilitas kesehatan.</p> <p>Besaran iuran peserta BPJS Kesehatan, khususnya Penerima Bantuan Iuran (PBI),</p> <p>Masyarakat memberlakukan pola hidup sehat agar BPJS tidak defisit</p>
	Tujuan ke 2 : Tanpa Kelaparan – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mendorong pertanian yang berkelanjutan	Masih tingginya Persentase Gizi Buruk dan Stunting	<p>Pendidikan ibu, Peningkatan pendapatan keluarga, pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, tingkat kecukupan zink, tingkat kecukupan zat besi, riwayat penyakit infeksi serta faktor genetik dari orang tua,</p>
	Tujuan ke 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera – menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia	Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita	<p>Kematian Ibu dipengaruhi persalinan oleh tenaga kesehatan, komplikasi kebidanan yang ditangani.</p> <p>Kematian Bayi dan Balita dipengaruhi oleh persalinan oleh tenaga kesehatan, komplikasi kebidanan yang ditangani, bayi lahir berat badan rendah.</p>
	Tujuan ke 4 : Air Bersih dan Sanitasi Layak – Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air	Pengelolaan Kesehatan Lingkungan	<p>Meningkatkan jumlah masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.</p> <p>Masih minim dukungan pemerintah daerah / desa dari</p>

	bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang		segi penyediaan sarana dan prasarana.
<b>2.</b>	<b>Nasional</b>	Masih Tingginya Angka Kematian Ibu, Bayi , Balita	Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Ibu dan Bayi
			Pemeriksaan Kesehatan, Pemberian Tablet Tambah Darah, Edukasi Gizi Seimbang, dan Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Anak Usia Sekolah dan Remaja
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, Pengelola Program, Lintas Sektor dalam upaya penurunan AKI AKB
			KIE, Kampanye lokal terkait penurunan AKI AKB
		Gizi lebih dan gizi kurang	Konvergensi lintas program/lintas sektor dalam upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat.
			Pemeriksaan dan pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, Pengelola Program, Lintas Sektor dalam upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat
			Kampanye lokal terkait Percepatan Perbaikan gizi masyarakat
		Perubahan beban penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular.	Perubahan Prilaku, Gaya Hidup yang menyebabkan factor resiko terjadi penyakit tidak menular.
		Penyakit menular harus dipantau melalui pengawasan atau surveilans yang efektif secara rutin dan terkoordinasi. Tiga penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah tuberkulosis, HIV/AIDS dan malaria, selain penyakit	Optimalisasi Penemuan Kasus Tuberkulosis, HIV / AIDS dan Malaria.  Pemantauan Pemberian Pengobatan Tuberkulosis, HIV/AIDS dan Malaria

		yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)	
		Penyakit infeksi baru dan kedaruratan kesehatan masyarakat Ancaman ketahanan kesehatan dapat muncul dalam bentuk ancaman biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit baru, kekurangan pangan, terlepas dari asal atau sumbernya ( Zoonosis, Covid-19 )	Komitmen Global dalam menghadapi Penyakit Infeksi Baru dan Kedaruratan kesehatan masyarakat.
		Surveilans penyakit berbasis laboratorium.	Respon SKD KLB Kapasitas SDM Komitmen Lintas Program dan Lintas Sektor
		Faktor Resiko Lingkungan	Penemuan Kasus Penegakan Diagnosa Penyakit Ketersediaan Obat dan Kepatuhan meminum Obat
		Pelayanan Kesehatan Primer, Sekunder dan Tertier	Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Akreditasi Fasilitas Kesehatan.  Dukungan Tenaga yang memenuhi standar pelayanan kesehatan.
		Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dukungan ketenagaan di Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
		Tata kelola pembangunan kesehatan, integrasi sistem informasi, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.	Dukungan sarana dan prasarana Sistem Informasi Kesehatan  Dukungan Tenaga IT dalam integrasi Sistem Informasi
		Pembiayaan Kesehatan.	Sarana dan Prasarana Fasilitas pelayanan kesehatan  Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan sudah sesuai standar.
		Sediaan farmasi dan alat kesehatan.	Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

			Distribusi dan Tata Pengelolaan Obat
		Pemberdayaan masyarakat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Penggerakkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Pertemuan koordinasi, advokasi, dan pendampingan dalam rangka penerapan GERMAS
			Pelaksanaan GERMAS, Aktifitas Fisik, Pemeriksaan Kesehatan Berkala, dan Edukasi Gizi Seimbang di tingkat Kabupaten/kota
			KIE, Kampanye Lokal mendukung Pelaksanaan Germas
<b>3.</b>	<b>Daerah</b>	Masih Tingginya Angka Kematian Ibu, Bayi , Balita	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Palayanan ANC terintegrasi</li> <li>2. Penjaringan ibu hamil resti ditingkatkan</li> <li>3. Penanganan komplikasi maternal sesuai Standar</li> <li>4. Respon Time RS Cepat</li> <li>5. Peningkatan Kemampuan SDM Kesehatan</li> </ol>
		Masih tingginya Persentase Gizi buruk dan stunting	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surveilans Gizi</li> <li>2. Edukasi Ke Masyarakat dalam penanganan kasus gizi buruk</li> <li>3. Partisipasi masyarakat dalam hal Penimbangan anaknya ke Posyandu</li> <li>4. Keterlibatan lintas sektoral dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah gizi.</li> </ol>
		Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KIE untuk meningkatkan kesadaran masyarakat</li> <li>2. Penerapan SPM</li> <li>3. Koordinasi Lintas Program</li> <li>4. Pemanfaatan Sistem Informasi Program</li> <li>5. Peningkatan Kemampuan Petugas</li> </ol>
		Pengelolaan Sistem JKN Yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edukasi ke masyarakat untuk ikut program JKN.</li> <li>2. Verifikasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan</li> </ol>
		Penguatan health security untuk penanganan pandemi	1.Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Paradigma Kesehatan Untuk Semua.

			2. Masih terbatasnya Akses terhadap Tes Penyakit, Obat-Obatan dan Vaksin Penyakit Yang berpotensi Wabah / Covid-19
		Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	1. Penggerakkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Pertemuan koordinasi, advokasi, dan pendampingan dalam rangka penerapan GERMAS
			2. Pelaksanaan GERMAS, Aktifitas Fisik, Pemeriksaan Kesehatan Berkala, dan Edukasi Gizi Seimbang di tingkat Kabupaten/kota
			3. Kampanye Lokal mendukung Pelaksanaan Gernas

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan sampai Tahun 2024. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu, Bayi , Balita
2. Masih tingginya Persentase Gizi buruk dan stunting
3. Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi
4. Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan belum memenuhi standar.
5. Pengelolaan Sistem JKN yang belum optimal
6. Penguatan health security untuk penanganan pandemi
7. Tingkat Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit masih belum mencapai Target
8. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam misi kesatu “Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya” adalah **“Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing** sedangkan sasarannya adalah **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”**.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Kepala Daerah Provinsi Riau dirumuskan Tujuan OPD Dinas Kesehatan adalah “Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan indikator Angka Harapan Hidup dan Sasaran Dinas Kesehatan ada 2 yaitu :

1. Menurunnya Mortalitas dan Morbiditas dengan indikator sebagai berikut :
  - a) Persentase Penurunan Kematian Ibu
  - b) Persentase Penurunan Kematian Bayi
  - c) Persentase Penurunan Kematian Balita
  - d) Prevalensi Stunting
  - e) Persentase Orang Dengan HIV AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA On ART )
  - f) Success Rate TB
  - g) Persentase Kab/Kota dengan IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk
  - h) Persentase Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan yang disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular.
  - i) Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi

2. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator sebagai berikut :
  - a) Persentase Pencapaian Universal Health Coverage
  - b) Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk berdampak Krisis Kesehatan akibat dan/atau berpotensi Bencana
  - c) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi
  - d) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan

Hal ini akan dijelaskan pada tabel dibawah (T-C. 25).

**Tabel. 4.1. ( Form T-C 25 )  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Riau**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi 2019	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perubahan Pada Tahun					Kondisi Akhir
					Realisasi 2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1. Menurunnya Mortalitas dan Morbiditas	Indikator Tujuan :							
			Angka Harapan Hidup	71,48	71,60	71,67	71,79	71,91	72,03	72,03
			Persentase Penurunan kematian ibu	Naik dari 109 menjadi 125 kasus(14,7)	Naik dari 125 mjd 129 kasus ( 3,2%)	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
			Persentase Penurunan Kematian Bayi	Naik dari 422 menjadi 496 (17,5%)	Naik dari 496 mjd 596(20,16%)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
			Persentase Penurunan Kematian Balita	Naik dari 479 menjadi 545(13,8%)	Naik dr 545 mjd 632 (16%)	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
			Prevalensi Stunting	24,1 ((SSGBI/SUSENAS)	NA	22,3	18,4	16	14	14
			Persentase Orang Dengan HIV AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA On ART )	22%	40	45	50	55	60	60
			Success Rate TB	73	90,4	91	92	93	95	95
	Persentase Kab/Kota dengan IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk	50%	58%	67	75	83	92	92		

		Persentase Pencegahan dan Pengendalian masalah Kesehatan yang Disebabkan oleh Penyakit Tidak menular	15,2	15	20	30	40	50	50
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100	99,8	100	100	100	100	100
	2. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Pencapaian Universal Health Coverage	76,73	76,63	87	90	92	95	95
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak krisis kesehatan akibat dan/atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	95%	91%	95	96	97	98	98
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kesehatan Masyarakat	RSUD.AA = 80,19	82,19	82	83	84	85	85
			RSJ.Tampan = 87	85	86	88	89	90	90
			RS. PB = 93,7	90	91	92	93	94	94

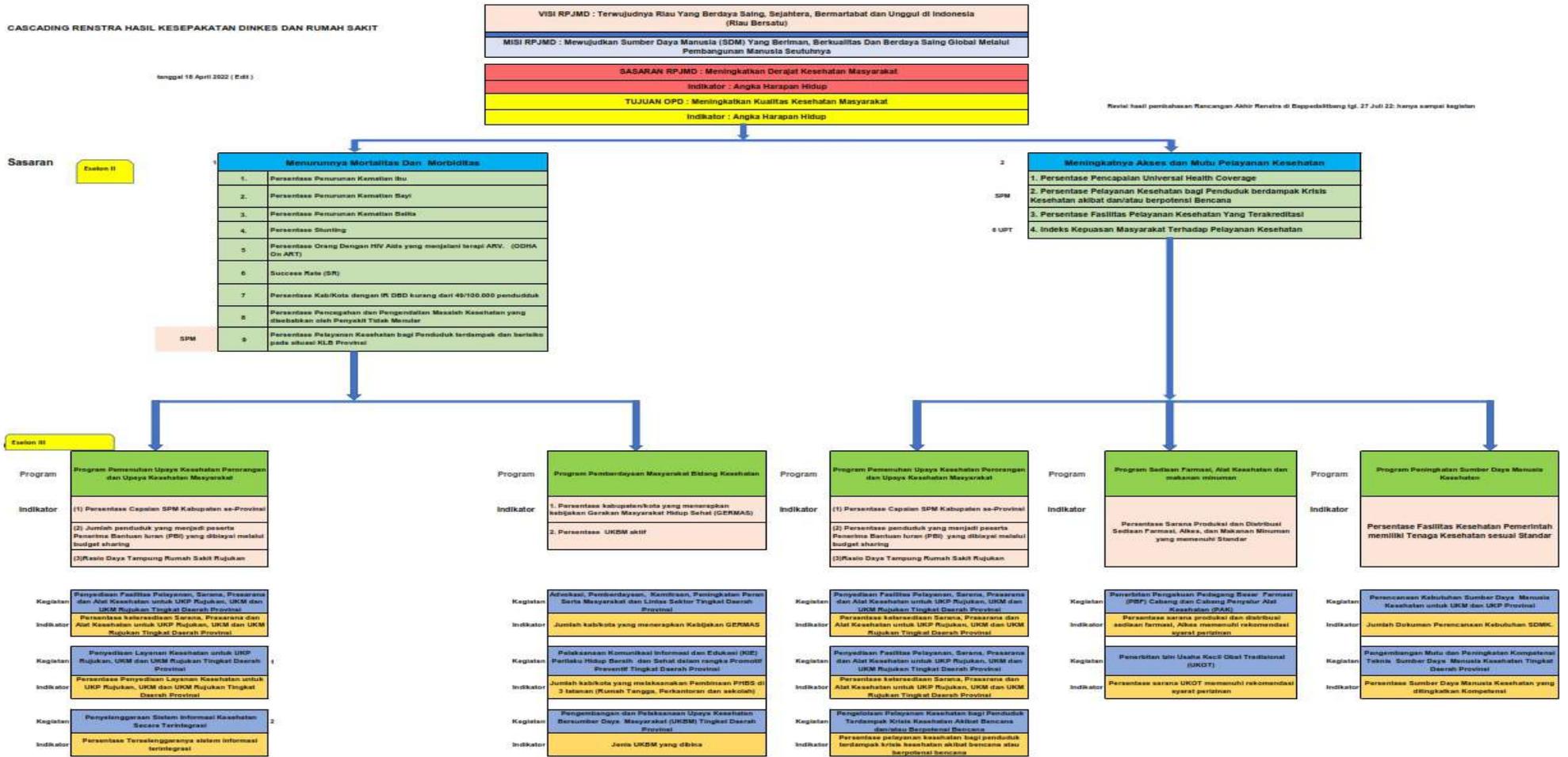
**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Kesehatan Provinsi Riau**

NO	Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perubahan				
			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Realisasi 2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat</b>	<b>Angka Harapan Hidup</b>	71,60	71,67	71,79	71,91	72,03
		<b>Sasaran 1: Menurunnya Mortalitas dan Morbiditas</b>					
		Persentase penurunan Kematian Ibu	Naik dari 125 mjd 129 kasus ( 3,2%)	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
		Persentase penurunan Kematian Bayi	Naik dari 496 mjd 596(20,16%)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
		Persentase penurunan Kematian Balita	Naik dr 545 mjd 632 (16%)	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
		Prevalensi Stunting	NA	22,3	18,4	16	14
		Persentase Orang Dengan HIV AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA On ART )	22	45	50	55	60
		Success Rate TB	90,4	91	92	93	95
		Persentase Kab/Kota dengan IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk	58	67	75	83	92
		Persentase Pencegahan dan Pengendalian masalah Kesehatan yang Disebabkan oleh Penyakit Tidak menular	15	20	30	40	50

		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100	100	100	100	100
		<b>Sasaran2 : Meningkatnya Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>					
		Persentase Pencapaian Universal Health Coverage	76,63	87	90	92	95
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak krisis kesehatan akibat dan/atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	91	95	96	97	98
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan ( RS AA )	82,19	82	83	84	85
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan ( RSJ )	85	86	88	89	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan ( RS PB )	90	91	92	93	94

## 4.2. CASCADING

Gambar 4.1. Cascading Dinas Kesehatan Provinsi Riau



Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	3
Indikator	Persentase Terselenggaranya sistem informasi terintegrasi	
Kegiatan	Pembelian Iru Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	4
Indikator	Persentase pembelian Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang direkomendasikan	
Program	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
Indikator	1. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD	
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Indikator	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	
	Persentase Layanan BLUD sesuai standar	

Kegiatan	Pengaliran Sistem Informasi Kesehatan
Indikator	Jumlah Dokumen Hasil Pengaliran Sistem Informasi Kesehatan
Kegiatan	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
Indikator	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan
Program	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>
Indikator	1. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara
	Peningkatan Pelayanan BLUD
	Persentase Layanan BLUD sesuai standar

### 4.3. Rencana Pengembangan 3 UPT RS dan UPT Labkesling

#### 1. RSUD Arifin Achmad

Sejalan dengan misi 1 Gubernur Riau yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat” dengan indikator “Angka Harapan Hidup”, maka RSUD Arifin Achmad melakukan pengembangan pelayanan sesuai dengan visi rumah sakit yaitu “Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Mandiri dengan Pelayanan Paripurna yang Memenuhi Standar Internasional”.

Adapun pengembangan pelayanan di RSUD Arifin Achmad sebagai berikut :

##### A. Pelayanan Jantung Terpadu

Pelayanan jantung terpadu yang ada di RSUD Arifin Achmad semakin berkembang baik dari segi cakupan maupun jenis pelayanan. Sejak tahun 2007 sudah mulai dilakukan pelayanan di unit Diagnostik invasif dan intervensi Non bedah bekerja sama dengan Pusat Jantung Nasional Harapan Kita dan sejak Tahun 2011 sudah melakukan pelayanan secara mandiri. Pada Tahun 2015 sudah dimulai pelayanan kardiologi intervensi dengan bekerjasama dengan Pusat Jantung Nasional Harapan Kita – Jakarta yang dimulai dengan tindakan diagnostik invasif khususnya penyadapan.

Berdasarkan KMK No. HK.01.07/menkes/7182/20 tentang Rumah Sakit Jejaring Rujukan Kardiovaskuler, SK Direktur RSUD Arifin Achmad no 92/SK/SDM/RSUD/2016 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Jantung Terpadu, dan SK Direktur RSUD Arifin Achmad no kpts.27/1/2018 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Arifin Achmad, dilakukan pengembangan terhadap pelayanan jantung terpadu. Dimulai pada tahun 2019 dilakukan rehabilitasi gedung Gedung IGD lama menjadi gedung IGD Komprehensif dan Pusat Jantung Terpadu dengan ICU bedah jantung 1 bed CVCU 4 bed Ruang Operasi Ruang Cathlab.

Sebagai Pusat Rujukan RSUD Arifin Achmad saat ini khususnya Pelayanan Jantung terpadu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai antara lain:

1. Kardiologi Klinik, meliputi Poliklinik, Bangsal Rawat, Perawatan Intensif Jantung (ICCU), Perawatan Intermediate Jantung (IMCC).

2. Diagnostik Non Invasif: Elektro Kardiograf, Treadmill Test, Holter Monitor, EKG.
3. Diagnostik Invasif: Laboratorium Kateterisasi, Elektro Fisiologi.
4. Rehabilitasi.
5. Bedah Jantung.
6. Penambahan Ruangan :
  - a. Ruang Poliklinik
  - b. Ruang tindakan
  - c. Ruang diagnostik non invasif
  - d. Ruang Rawat Inap kelas 3-1
7. Penambahan Alat
  - a. Cathlab
  - b. C-Arm
  - c. MS CT Scan 128 Slices
  - d. EKG
  - e. Echocardiogram
  - f. Pasien Monitor
  - g. Mesin Jantung paru
  - h. Bedah Set Jantung Dewasa
  - i. Bedah Set Jantung Anak
  - j. Rotablator
  - k. IVUS
  - l. OCT
  - m. FFR & IVUS
  - n. FFR
8. Penambahan Pelatihan 1 tim Pelayanan Jantung Terpadu yang terdiri dari :
  - a. 6 orang pelatihan Kardiologi dasar + lanjutan ICU Bedah Jantung
  - b. 3 orang Kardiologi Dasar + Lanjutan dan Intervensi Kateterisasi Jantung
  - c. 1 orang Perawat Perfusionis
  - d. 1 orang Perawat Sirkuler
  - e. 1 orang Dokter Anastesi Jantung
  - f. 1 orang Perawat Anastesi Jantung
  - g. Penambahan Dokter Spesialis BTKV, Dokter Spesialis Anastesi, Konsultan Anastesi Kardio Vaskuler

## B. Pelayanan Kanker Terpadu

Instalasi Kanker Terpadu merupakan salah satu Instalasi yang berperan penting di lingkungan RSUD Arifin Achmad memberikan pelayanan kemoterapy one day care dan beberapa poli onkologi sedangkan Instalasi Radioterapi adalah unit fungsional yang khusus memberikan layanan terapi radiasi baik terapi radiasi eksterna (Linac), maupun terapi radiasi interna (Brakiterapi).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Instalasi Radioterapi memerlukan sarana dan prasarana yang memadai sehingga tujuan untuk menyediakan pelayanan terapi radiasi yang bermutu, cepat, tepat, akurat dan benar sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat tercapai. Saat ini Instalasi Radioterapi memberikan layanan konsultasi Poliklinik, terapi radiasi eksterna (Linac), terapi radiasi interna (Brakiterapi), CT Simulator, Treatment Planning System (TPS) dan pembuatan alat bantu radiasi (moulding). Instalasi Radioterapi telah memiliki Linac sejak tahun 2007 dan mulai memberikan layanan terapi radiasi eksterna pada tahun 2009.

Pelayanan Kanker Terpadu RSUD Arifin Achmad memiliki beberapa fasilitas diantaranya :

- a. Instalasi Radioterapi
- b. Poliklinik Onkologi (Onkologi Radiasi, Bedah Onkologi, Penyakit Dalam Konsultan Hemato Onkologi, Konsultan Obstetri Onkologi, Anak Onkologi, Paru Konsultan Onkologi, dan THT Onkologi)
- c. Layanan Kemoterapi One Day Care
- d. Linac
- e. CT Simulator
- f. Brakhiterapi

Tujuan dari pengembangan Pelayanan Kanker terpadu di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau yaitu menjadikan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau sebagai Rumah Sakit Rujukan Provinsi pengampu Rumah Sakit lainnya di wilayah Provinsi Riau terkhusus menjadi Pusat Pelayanan Kanker terpadu yang excellence di wilayah Sumatera, pusat evaluasi dini dan staggng kanker serta pusat diagnostik dan terapi Kedokteran Nuklir.

Dalam rangka menuju rumah sakit tipe A, sesuai PMK no. 56 tahun 2014 salah satu pelayanan penunjang kesehatan yang sangat penting untuk dilengkapi yaitu pelayanan Kedokteran Nuklir. Keuntungan pemeriksaan di Kedokteran Nuklir yaitu pemeriksaan tidak invasif, dapat diulangi dengan segera tanpa memberikan radiasi tambahan ke pasien, dan yang terpenting adalah hasil pencitraan yang didapatkan adalah citra fungsi.

Selain membantu menegakkan diagnosis, Kedokteran Nuklir juga berperan dalam terapi penyakit tertentu, misalnya terapi kanker kelenjar tiroid dan hiperfungsi kelenjar tiroid, terapi paliatif nyeri tulang akibat penyebaran kanker, terapi inflamasi (peradangan) sendi lutut yang sulit diterapi dengan pengobatan oral atau injeksi, terapi keloid, terapi neuroendokrin tumor, terapi keganasan di hati, dan yang saat ini sedang berkembang pesat adalah teranostik (terapi dan diagnostik) yang bertujuan untuk terapi bersasaran (targeted therapy). Berbeda dengan terapi konvensional, radioisotop yang diberikan dalam terapi di Kedokteran Nuklir ini lebih selektif terhadap jaringan target sehingga meminimalisir efek samping pengobatan.

Kebutuhan yang mendesak untuk memulai pelayanan Kedokteran Nuklir, yaitu:

1. Alat SPECT/CT
2. Hot Laboratorium, berfungsi sebagai tempat preparasi bahan radioaktif yang akan diberikan ke pasien, baik untuk kepentingan diagnosis maupun terapi.
3. Ruang Rawat Inap Isolasi Radiasi untuk pasien kanker yang diterapi dengan radioaktif.
4. PET/CT Scan
5. Siklotron (Cyclotron) sebagai mesin penghasil FDG untuk PET/CT.
6. Linac dengan kemampuan IMRT, IGRT, VMAT Yang dilengkapi dengan Cone Beam CT (CBCT)
7. 4D CT- Simulator
8. Advance 4D Dosimetry (Absolute, Relative, IMRT, dan VMAT)
9. Kebutuhan ruangan seperti : bunker LINAC, ruang operator LINAC, ruang CT Simulator dan operator, ruanga molding, ruang dokter, ruang fisika medis dan dosimetri, ruang pendukung lainnya

### C. Pembangunan Poliklinik

Dengan adanya pengembangan pelayanan dan terjadinya pengembangan penyakit maka jumlah kunjungan di rawat jalan RSUD Arifin Achmad bertambah. Saat ini ruang poliklinik rawat jalan di RSUD Arifin Achmad terdiri dari 2 (dua) lantai dengan kapasitas ruang tunggu lantai 1 (satu) sebanyak 212 (dua ratus dua belas) orang dan lantai 2 (dua) sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang. Jika setiap pasien didampingi 1-2 orang maka akan menyebabkan penumpukan orang yang dan tidak dapat menerapkan protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19 saat ini.

Disamping itu akses menuju ke poliklinik lantai 2 hanya melalui tangga, sehingga pasien yang menggunakan kursi roda dan brankar tidak bisa naik ke poliklinik lantai 2 (dua).

Berdasarkan hal diatas maka RSUD Arifin Achmad berencana untuk melakukan pengembangan poliklinik rawat jalan

### D. Pengembangan SDM

Sejalan dengan Misi Pertama RSUD Arifin Achmad yaitu menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan sesuai dengan standar international dan menjadi pusat rujukan bagi Rumah Sakit lainnya di Provinsi Riau, RSUD Arifin Achmad menuju rumah sakit kelas A. Untuk itu diperlukan pengembangan SDM yang memenuhi standar RS Kelas A diantaranya adalah pelayanan medik dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3

Pengembangan SDM RSUD Arifin Achmad Tahun 2020/2021

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH		KETERANGAN
		Yang Tersedia	Kekurangan	
A	Dokter Spesialis/Sub Spesialis			
1	Spesialis Dasar	4	10	Kekurangan 4 Sub Spesialis Penyakit Dalam (reumatologi, alergi imunologi, psikosomatis, pulmonologi) dan 6 Sub Spesialis Anak (nefrologi, endokrinologi, alergi imonologi, pencitraan pediatri, nutrisi dan penyakit metabolik, infeksi dan penyakit tropik)

2	Penunjang Medik Spesialis	5	0	
3	Spesialis Lain	12	0	
4	Sub Spesialis	13	3	Kekurangan (kedokteran jiwa, saraf, kulit dan kelamin).

#### E. Trauma Center

Pengembangan layanan trauma center merupakan salah satu program unggulan rancangan RSUD Arifin Achmad. Hal ini didukung dengan unit pelayanan dan instalasi telah tersedia dan bersinergi secara baik, antara lain : layanan IGD 24 jam, layanan penunjang (radiologi dan laboratorium) 24 jam, Intensive Care Unit (ICU), layanan rehabilitasi medik dan layanan farmasi 24 jam. Selain itu RSUD Arifin Achmad juga memiliki dokter-dokter ahli yang terlibat dalam trauma center seperti dokter spesialis bedah, dokter spesialis ortopedi, dokter spesialis anestesi, serta perawat khusus yang terlatih.

#### F. Pelayanan Ginjal Terpadu

Rencana pengembangan layanan uro-nefrologi menjadi target kedepan RSUD Arifin Achmad, saat ini RSUD Arifin Achmad telah memiliki dokter spesialis urologi serta tenaga kesehatan yang mumpuni untuk memberikan layanan tersebut. Selain itu juga ditunjang dengan alat kesehatan canggih yang telah dimiliki RSUD Arifin Achmad baik untuk layanan diagnostik maupun kuratif untuk penanganan kasus uro-nefrologi, namun beberapa alat kesehatan utama yang sudah ada perlu dilakukan *upgrade*/penggantian.

## 2. RSUD Jiwa Tampan

Rumah Sakit Jiwa Tampan adalah rumah sakit khusus sebagai pusat rujukan regional pelayanan kesehatan jiwa khususnya di wilayah Provinsi Riau. Selain itu juga sebagai pusat pendidikan dan penelitian khusus kasus-kasus kejiwaan (center pendidikan psikiatri regional).

Faktor-faktor pendukung kelayakan pengembangan Rumah Sakit sebagai berikut :

1. Sebagai RS Pemerintah Tipe A Khusus Jiwa dibawah Pemerintah Provinsi Riau

2. Sebagai RS pusat rujukan regional pelayanan kesehatan jiwa dan rumah sakit Pendidikan kesehatan jiwa
3. Tersedianya lahan yang cukup untuk pengembangan
4. Tersedianya SDM dokter spesialis dan sub spesialis psikiatri dan non psikiatri

Pengembangan sarana fisik RS yang telah tersedia sesuai master plan:

1. Gedung Rawat Inap Intensif Psikiatri (UPIP) dibangun tahun 2016
2. Gedung IGD terpadu (IGD, Radiologi dan Laboratorium) dibangun tahun 2017
3. Gedung Rawat Jalan dibangun tahun 2018
4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dibangun tahun 2018
5. Gedung Rawat Inap Jiwa Fisik (DAK) dibangun tahun 2021
6. Gedung Instalasi Gizi dibangun tahun 2021

#### I. Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit

##### 1. Meningkatkan pelayanan unggulan :

###### a. Pelayanan Kesehatan Jiwa anak dan remaja

- Saat ini pelayanan Kesehatan jiwa anak dan remaja telah berjalan di klinik rawat jalan.
- Untuk pengembangan dan memenuhi persyaratan RS Khusus Tipe A maka pada tahun 2022 direncanakan penyediaan pelayanan rawat inap jiwa anak dan remaja sebanyak 10 TT beserta peralatan medis dan pendukung lainnya.
- Ruang yang digunakan adalah ex ruang manajemen yang difungsikan sesuai standar rawat inap jiwa anak dan remaja.

###### b. Pelayanan Kesehatan jiwa geriatri/lansia

Pengembangan pelayanan kesehatan jiwa geriatri direncanakan pengembangannya secara bertahap :

- Tahap pertama : pada tahun 2022 menyediakan pelayanan klinik jiwa geriatri terpadu di rawat jalan.
- Tahap kedua : pada tahun 2024 adalah penyediaan pelayanan rawat inap jiwa geriatri.
- Ruang yang digunakan adalah ex ruang rawat inap jiwa yang direhab dan dikondisikan sesuai standar jiwa geriatri.

###### c. Pelayanan Napza

- Saat ini pelayanan Napza telah berjalan dengan kondisi gedung rehabilitasi napza memerlukan banyak perbaikan dan pemeliharaan.
- Tahun 2022 direncanakan untuk penyediaan dokumen penilaian kelayakan Gedung.
- Tahun 2023 direncanakan untuk rehab berat gedung napza yang eksisting.

## 2. Meningkatkan pelayanan jiwa dewasa

- Saat ini terdapat 6 buah ruangan untuk pelayanan rawat inap pasien jiwa dewasa. Bangunan ini telah berdiri sejak tahun 1982 ( $\pm$  40 tahun). Kondisi umum ruangan membutuhkan banyak perbaikan/pemeliharaan.
- Untuk memberikan pelayanan paripurna kepada pasien jiwa maka direncanakan pada tahun 2024 pembangunan gedung rawat inap jiwa dewasa sesuai master plan.

## 3. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi psikososial

- Pelayanan rehabilitasi psikososial berfungsi untuk meningkatkan produktivitas pasien untuk kembali ke masyarakat. Kegiatan Rehabilitasi ini terdiri dari terapi kerja, olahraga, keterampilan, seni, pertanian/perkebunan, kerohanian, dll sehingga membutuhkan ruangan-ruangan yang representatif agar kegiatan rehabilitasi dapat berjalan optimal. Saat ini pelayanan rehabilitasi tersebut menggunakan ex ruangan manajemen (Gedung Saleh Hasyim).
- Pada tahun 2022 direncanakan penyediaan pelayanan *Day Care* bagi pasien jiwa yang telah pulang ke keluarganya. Untuk mengoptimalkan pelayanan *Day Care* ini pada tahun 2023 direncanakan pembangunan gedung rehabilitasi sesuai master plan. Dokumen Perencanaan (DED) gedung rehabilitasi psikososial telah tersedia tahun 2015 sehingga diperlukan review harga DED Gedung tersebut.

## 4. Meningkatkan pelayanan penunjang

### a. Pelayanan farmasi

Sejalan dengan terpenuhinya ruang rawat inap sesuai standar maka diperlukan pemenuhan gedung khusus depo farmasi rawat inap dan gudang obat sesuai standar akreditasi. Saat ini depo farmasi rawat inap masih bergabung dengan depo farmasi IGD. Pada tahun 2024 direncanakan pembangunan Depo farmasi rawat inap dan gudang obat, yang lokasinya berdekatan dengan ruang rawat inap pasien.

b. Pelayanan CSSD dan Laundry

Saat ini pelayanan CSSD belum memenuhi standar akreditasi sehingga direncanakan pelayanan CSSD di relokasi menggunakan ruangan ex gedung gizi. Gedung ex gizi ini sebagian juga digunakan untuk perluasan ruang pelayanan laundry. Rehab berat gedung untuk CSSD dan Laundry ini direncanakan tahun 2022.

II. Pengembangan Sarana Fisik Rumah Sakit

Dalam pengembangan sarana fisik, semua bangunan disesuaikan dengan kebutuhan ruang secara keseluruhan yaitu luas, nyaman, terintegrasi dan mudah diakses.

Ada 3 bagian perencanaan pengembangan sarana fisik RS Jiwa Tampan yaitu

1. Renovasi/rehabilitasi ruangan yang masih baik dan dapat digunakan
  - Ruang rawat inap jiwa geriatri
  - Gedung napza
2. Refungsi bangunan menyesuaikan dengan sistem zonasi
  - Ruang rawat inap anak dan remaja
  - Ruang CSSD dan Laundry
3. Pembangunan gedung baru
  - Gedung rawat inap jiwa dewasa
  - Gedung rehabilitasi
  - Gedung farmasi rawat inap dan Gudang obat

III. Pengembangan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit

Hal-hal penting yang harus diperhatikan terkait pengembangan SDM :

1. Pemenuhan kebutuhan SDM sesuai standar dan kebutuhan pelayanan
2. Konsep pengadaan SDM
3. Peningkatan kompetensi SDM sesuai standar
4. Reward dan punishment secara konsisten
5. Jaminan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja

Saat ini tercatat pegawai ASN berjumlah 245 orang dan 167 orang tenaga non ASN. Seiring dengan pengembangan pelayanan dan kebutuhan pelayanan maka dipandang perlu adanya penambahan SDM.

**Tabel 4.3.**

**Proyeksi penambahan kebutuhan SDM RSJ Tampan**

Jabatan	2022	2023	2024
<b>MEDIS :</b>			
Dokter Spesialis	2	2	1
Dokter Umum	3	2	2
<b>KEPERAWATAN :</b>			
Perawat	50	30	30
<b>TENAGA PENUNJANG :</b>			
Apoteker	2	3	3
Pranata Labor	2	2	2
Radiografer	2	1	-
Perekam Medis	2	2	2
Pranata Komputer	3	0	0

Untuk menunjang pengembangan pelayanan RS Jiwa Tampan sebagai RS Khusus Jiwa Tipe A, sistem pendidikan dan pelatihan SDM sangat diperlukan, sehingga perlu dilaksanakan sistem pendidikan dan pelatihan *inhouse* atau *exhouse training* dengan mengikutsertakan SDM pada Diklat oleh pihak ketiga maupun yang dilaksanakan sendiri oleh pihak rumah sakit.

### **3. RSUD Petala Bumi**

RSUD Petala Bumi merupakan salah satu Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Riau yang menjadi Rumah Sakit rujukan fasilitas kesehatan tingkat pertama/puskesmas,

klirik pratama dalam kota Pekanbaru maupun Kabupaten disekitarnya, sehingga RSUD Petala Bumi merupakan Rumah Sakit rujukan tindak lanjut.

Pada Tahun 2011 Rumah Sakit Petala Bumi telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas C melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.03.05/I/8000/2010 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Petala Bumi Propinsi Riau yang mempunyai tugas dan fungsi mencakup upaya pelayanan kesehatan perorangan, pusat rujukan serta merupakan tempat pendidikan Institusi Pendidikan Kesehatan dan telah mendapatkan akreditasi Tingkat “**UTAMA**” dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Indonesia dengan nomor KARS-SERT/611/V/2019 pada tanggal 28 Mei 2019.

Sebagai Rumah Sakit rujukan tingkat lanjut, RSUD Petala Bumi berusaha meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Hal ini akan diselenggarakan dengan adanya kesepakatan bersama dalam memberikan pelayanan unggulan yaitu Pelayanan yang berkaitan dengan **kasus Stroke** dan kedepannya akan mewujudkan menjadi “**Rumah Sakit Khusus Otak**”. Untuk itulah pengembangan produk layanan, kapasitas tempat tidur, layanan penunjang, maupun jumlah SDM akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan. Pengembangan rumah sakit dengan layanan khusus dirasa perlu dilakukan tetapi haruslah dengan hati-hati dan menghitung berbagai indikator untuk mengetahui besarnya peluang tersebut.

Sesuai dengan gambaran umum kondisi rumah sakit, pelayanan kesehatan yang telah diberikan secara keseluruhan telah memperlihatkan peningkatan kinerja. Hal ini terlihat dari semakin membaik nya capaian kinerja. Tetapi untuk mewujudkan pelayanan yang prima masih banyak permasalahan baik internal maupun eksternal.

Analisis permasalahan berdasarkan kondisi lingkungan RSUD Petala Bumi dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Analisis Lingkungan Eksternal

##### a. Profil Pasar

Keadaan geografis Provinsi Riau yang berdampingan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand yang dapat dengan mudah dijangkau dan dikunjungi oleh masyarakat. Khusus dalam bidang kesehatan, berdasarkan banyak pengakuan masyarakat terutama yang berpenghasilan relatif tinggi, lebih senang memanfaatkan fasilitas kesehatan

negara tetangga. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa negara tetangga mempunyai keunggulan dalam bidang kualitas pelayanan dan fasilitas pelayanan serta didukung oleh sumber daya manusia yang lebih profesional sehingga memberikan rasa aman, nyaman dan keyakinan yang tinggi terhadap proses penyembuhan penyakit yang dideritanya.

b. Peta Pesaing

Dalam strategi bersaing, RSUD Petala Bumi memosisikan sebagai rumah sakit yang memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat dan menjadikan RSUD Petala Bumi sebagai salah satu alternatif rumah sakit di kota Pekanbaru. Dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan yang dimiliki sebenarnya hal tersebut merupakan modal dasar yang cukup kuat, hanya saja dengan makin berkembangnya jumlah RS swasta serta tidak tertutup kemungkinan adanya peluang bagi investor asing untuk melakukan investasi dalam penyelenggaraan kesehatan di Provinsi Riau dengan berbagai peralatan canggih dan SDM yang profesional maka RSUD Petala Bumi harus dapat mengantisipasinya dengan memiliki pelayanan unggulan.

2. Analisis Lingkungan Internal

- a. Rumah sakit berada dalam posisi pengembangan selain itu pemanfaatan rumah sakit cenderung meningkat, tetapi belum didukung dengan sarana peralatan yang lengkap.
- b. Sumber daya yang kurang memadai (SDM yang secara kuantitatif maupun kualitatif masih terbatas)
- c. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) masih belum berjalan secara optimal.
- d. Keterbatasan lahan/area rumah sakit sehingga penataan fungsi ruangan/bagian masih ada yang belum memenuhi syarat teknis sarana prasarana rumah sakit.

Kondisi lingkungan eksternal yang dinamis, kondisi internal RSUD dengan kemampuan berbagai sumber yang dimiliki, dikaitkan dengan permasalahan bidang kesehatan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Riau antara lain rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama bagi kelompok penduduk miskin; optimalisasi sistem pelayanan

kesehatan yang berorientasi promotif dan preventif masih rendah, tentu menghendaki terjadinya perubahan terhadap strategi dan arah pengembangan disesuaikan dengan isu strategis RSUD Petala Bumi dan kebutuhan pelanggan (konsumen).

Analisa di atas berguna untuk peningkatan cakupan pelayanan karena mengulas apa yang sebenarnya diinginkan oleh pasar dan siapa yang mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan yang ditawarkan. Sehingga berdasarkan analisa tersebut maka strategi yang dipilih yaitu:

a. Pengembangan Pelayanan

Pengembangan Pelayanan diarahkan sejalan dengan **pengembangan menuju kearah Rumah Sakit dengan unggulan Stroke** dan tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan paripurna sehingga pengembangan produk dan peningkatan terutama pada pelayanan penunjang dibagian Radiologi, Laboratorium dan Rehab Medik berupa peningkatan peralatan pemeriksaan serta peralatan lain yang mendukung dalam penegakan diagnosa oleh Dokter.

b. Intensifikasi produk jasa (Peningkatan kualitas pelayanan dengan penambahan sarana prasarana dan SDM sesuai dengan kompetensi)

#### 4. UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan

Rencana Pengembangan Layanan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan menurut Peraturan Gubernur Riau No. 25 Tahun 2022 Tanggal 20 Juni 2022 tentang Rencana Strategis Bisnis UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan sebagai berikut:

1. Keanekaragaman

Diversifikasi pada BLUD dapat dilihat dari berbagai jenis layanan yang sudah dikembangkan. Setiap layanan didukung oleh tenaga kesehatan profesional dan kompeten di bidangnya seperti ATLM, dokter spesialis patologi anatomi, dokter umum dan kesehatan lingkungan. Berarti UPT Labkesling mempunyai 4 jenis tenaga kesehatan yang dapat memberikan diversifikasi layanan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan lingkungan.

Diversifikasi pelayanan yang diberikan pada jam kerja pagi mencakup pelayanan loket, konsultasi pemeriksaan laboratorium dan hasil, konsultasi sanitasi dan pemeriksaan air, pemeriksaan narkoba, serta pemeriksaan kasus kejadian luar

biasa (KLB). Yang dilengkapi dengan pemberian pelayanan penjemputan/pengambilan sampel dan pengiriman hasil pemeriksaan.

Semua diversifikasi layanan di atas dimaksudkan untuk memenuhi keutuhan konsumen dan masyarakat akan layanan kesehatan yang lengkap

## 2. Pengembangan Pasar

UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan melakukan upaya pengembangan pasar dengan menjangkau konsumen dengan pengenalan produk layanan dan pemberian pelayanan pemeriksaan sederhana seperti pemeriksaan TD, golongan darah ataupun gula darah di kegiatan-kegiatan publik. Seperti pesta rakyat dalam rangka peringatan hari kesehatan nasional atau di kawasan *car free day*. Akses terhadap UPT Labkesling tergolong mudah karena berada di lokasi strategis, dekat dengan RS rujukan provinsi, serta dekat dengan sarana tempat-tempat umum, selain itu Keterjangkauan biaya pemeriksaan menjadikan UPT Labkesling memiliki rentang karakteristik konsumen dengan tingkat ekonomi kurang, menengah hingga tingkat ekonomi atas. Kelengkapan fasilitas, kenyamanan ruang pelayanan, profesionalitas petugas, kejelasan prosedur dan kelengkapan produk menjadi salah satu alasan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah atas memilih UPT Labkesling

## 3. Pengembangan Produk

Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT Labkesling dengan memperhatikan kebutuhan konsumen melalui hasil identifikasi kebutuhan dan umpan balik masyarakat. Beberapa produk layanan yang menjadi unggulan antara lain:

- a. Menjadikan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan sebagai laboratorium kalibrasi.
- b. Layanan medical check up (MCU).

## 4. Integrase vertical

Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertical dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi melalui koordinasi perencanaan anggaran, perizinan, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di Provinsi.

Lokasi UPT Labkesling yang strategis merupakan kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan keanekaragaman pelayanan kesehatan karena memiliki pangsa pasar yang juga beranekaragam. Rencana pengembangan program pelayanan

kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan sampai dengan tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan.

#### 5. Pengembangan jenis pelayanan

Peningkatan jumlah laboratorium swasta yang baru berdiri dengan melayani jenis pemeriksaan yang sama dengan UPT Labkesling, mengharuskan UPT Labkesling mencari inovasi baru agar lebih beragam dalam jenis pelayanan, sehingga diharapkan konsumen lebih memilih UPT Labkesling sebagai tempat pelayanan pemeriksaan laboratorium karena tawaran kemudahan yang diberikan dan dengan hanya mendatangi satu tempat sudah dapat melakukan banyak pemeriksaan.

Selain itu untuk menambah keberagaman pelayanan terhadap masyarakat, UPT Labkesling juga akan membuka pelayanan pemeriksaan kesehatan, penjemputan dan pengambilan sample,serta penambahan pemeriksaan di pelayanan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, jenis pelayanan yang akan dikembangkan di UPT Labkesling yaitu :

- a. Menyediakan pemeriksaan medical check up yang lengkap sesuai kebutuhan masyarakat
- b. Mengembangkan pemeriksaan laboratorium lingkungan (Emisi dan pemeriksaan Narkoba secara Konfirmasi).
- c. Memberikan layanan penjemputan sampel dan pengambilan sampel ke tempat serta pengiriman hasil pemeriksaan kepada konsumen.

#### 6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

Kebutuhan sarana dan prasarana di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan meningkat seiring dengan pemenuhan standar akreditasi dan peningkatan kunjungan. Ruang tunggu pasien menular diperluka bagi pasien/*suspect* TB

Beberapa rencana terkait penambahan sarana ataupun pengembangan sarana:

- a. Pemasangan IPAL sesuai standar
- b. Mengembangkan Sistem Informasi Laboratorium berbasis teknologi
- c. Melengkapi sarana keselamatan kerja seperti, kelengkapan APD, *eye wash*,
- d. Ruang tunggu khusus pasien menular
- e. Mengembangkan pemeriksaan Kultur dan resistensi TB
- f. Menyediakan Laboratorium Lingkungan dapat terakreditasi ISO 17025 : 2017

7. Peningkatan mutu sumber daya manusia pelayanan.

Seiring dengan upaya peningkatan mutu pelayanan di UPT Labkesling, perlu dilakukan rencana pengembangan SDM pelayanan meliputi:

- a. Penambahan tenaga ATEM
- b. Penambahan tenaga TLM
- c. Penambahan tenaga perawat penyelia dan ahli
- d. Pelatihan untuk SDM sesuai dengan keahlian masing-masing

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk menselaraskan antara Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dengan Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Riau dan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Riau terpilih periode Tahun 2019-2024, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang merupakan langkah-langkah untuk merumuskan program indikatif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya disusun arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan periode 2019-2024 seperti tabel 5.1 sebagai berikut :

**Tabel. 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

**URUSAN KESEHATAN**

<b>VISI RPJMD</b> : “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia ( RIAU BERSATU )”.				
<b>MISI ( 1 ) RPJMD</b> : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya.				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Menurunnya Mortalitas dan Morbiditas	1	Meningkatkan kesehatan Ibu, Anak dan kesehatan Reproduksi	1 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan menggunakan continuum of care dan penekanan pada upaya promotif dan preventif
		2	Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda	
		3	Peningkatan pengendalian penyakit	
		4	Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	
	2. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Peningkatan Pencapaian Universal Health Coverage	1 Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan pemanfaatan teknologi.
		2	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	
		3	Peningkatkan Jejaring Pelayanan Kesehatan	
		4	Peningkatkan Pelayanan Rumah Sakit dengan Berorientasi pada pasien safety	

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam mendukung visi misi Gubernur Riau. Rencana program selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan serta penganggaran. Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024, Dinas Kesehatan Provinsi Riau membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Penjabaran Program yang disusun dalam perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau meliputi :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 dan sub kegiatan sebanyak 39
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 dan sub kegiatan sebanyak 3
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 dan sub kegiatan sebanyak 2
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 dan sub kegiatan sebanyak 3
5. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 dan sub kegiatan sebanyak 21

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel 6.1 dan table 6.2 ( Form TC 27 ) sebagai berikut:

**Tabel 6.1 ( T-C 27 )**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP(Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
								2020		2021		2022		2023		2024		2025			
								Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )		
1.	Meningkatkan Kinerja ASN dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, Transparan dan Akuntabel			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	7,744,644,222								100 Persen	7,744,644,222	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	
				IKP 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	1400 Surat	1500 Surat	34,611,840								1500 Surat	34,611,840	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	
				IKP 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	156 Rekening	144 Rekening	1,635,462,996								156 Rekening	1,635,462,996	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	
				IKP 1	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Unit	6 Unit	339,985,000								6 Unit	339,985,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	
				IKP 1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	774,880,000								12 Bulan	774,880,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	
				IKP 1	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang diberikan jasa jaminan	180 Unit	200 Unit	109,444,000								200 Unit	109,444,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	
				IKP 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	13 Unit	13 Unit	-								13 Unit	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	
				IKP 1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	50 Jenis	50 Jenis	161,198,280								50 Jenis	161,198,280	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	
				IKP 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	25 Jenis	25 Jenis	190,714,000								25 Jenis	190,714,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	
				IKP 1	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	193,438,106								15 Jenis	193,438,106	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	
				IKP 1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	5500 Porsi	5500 Porsi	269,740,000								5500 Porsi	269,740,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	
				IKP 1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	12 kl	12 kl	542,980,000								12 kl	542,980,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Pusat/Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 1	Penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	100 OB	100 OB	2,686,600,000								100 OB	2,686,600,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	
				IKP 1	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	14 OH	14 OH	805,590,000								16 OH	805,590,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	
2					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100 Persen	1,687,412,250								100 Persen	1,687,412,250	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	
				IKP 1	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	30 Ruang	30 Ruang	901,212,250								30 Ruang	901,212,250	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP(Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Daerah penanggung jawab	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024					2025	
								Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )				Target	Rp ( Juta )
				IKP 1	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraa dinas /operasional yang dipelihara	17 Unit	17 Unit	375,700,000								17 Unit	375,700,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau		
				IKP 1	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 Unit	107 Unit	410,500,000								107 Unit	410,500,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau		
3					<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase tingkat kehadiran ASN</b>	<b>Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>575,400,000</b>								<b>100 Persen</b>	<b>575,400,000</b>	<b>Dinas Kesehatan Provinsi Riau</b>	<b>Provinsi Riau</b>		
				IKP 1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0 Stel	350 Stel	245,000,000								350 Stel	245,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau		
				IKP 1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	0 stel	134 stel	80,400,000								134 stel	80,400,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau		
				IKP 1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	0 stel	350 stel	250,000,000								350 stel	250,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau		
4	Terkendalinya Kejadian Mortalitas dan Morbiditas di Provinsi Riau	Meningkatnya Kemandirian Hidup Sehat			<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)</b>	<b>71.40 Persen</b>	<b>80 Persen</b>									<b>80 Persen</b>					
						<b>Kunjungan Antenatal (K4) (%)</b>	<b>81.90</b>	<b>92</b>	<b>7,435,165,300</b>								<b>92</b>	<b>7,435,165,300</b>	<b>Dinas Kesehatan Provinsi Riau</b>	<b>Pusat/Provinsi Riau, Kab/Kota</b>		
						<b>Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap )</b>	<b>83.57</b>	<b>92</b>									<b>92</b>					
						<b>Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita</b>	<b>25.2</b>	<b>25</b>									<b>25</b>					
				IKP 1	Pembinaan Pengelolaan Limbah medis Fasilitas Yankes	Persentase Puskesmas/RS yang melakukan pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai standar	9.34 Persen	41 Persen	108,516,600								41 Persen	108,516,600	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 1	Pembinaan kesehatan olahraga pada fasyankes	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	60 Persen	65 Persen	56,530,100								65 Persen	56,530,100	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 1	Pembinaan Kesehatan Kerja pada fasyankes	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	77.21 Persen	90 Persen	46,882,700								90 Persen	46,882,700	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 4	Pembinaan (UKBM) Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Persentase Capaian UKBM Aktif	36 Persen	48 Persen	386,000,000								48 Persen	386,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 2	Penyebarluasan dan Peggembangan Informasi Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebarluasan Informasi berkelanjutan	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	-								12 Kab/Kota	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 4	Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah OPD Yang Melaksanakan Minimal 3 Indikator GERMAS.	0 OPD	16 OPD	-								16 OPD	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 2	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang Memenuhi	Kab/Kota yang meningkat capaian PF (Persalinan di Fasyankes)	8 Kab/Kota	12 Kab/Kota	50,000,000								12 Kab/Kota	50,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 2	Pembinaan dalam peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia dan pelayanan Geriatri Terpadu	- persen	20 persen	-								20 persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Puskesmas yang Melaksanakan Program Kespro Caten	69 Puskesmas	150 Puskesmas	-								150 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 2	Pembinaan dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (ANC)	Jumlah Puskesmas yang memberikan layanan ibu hamil memenuhi standar ( ANC Terintegrasi)	120 Puskesmas	160 Puskesmas	200,000,000								160 Puskesmas	200,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP(Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024					2025	
								Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )				Target	Rp ( Juta )
				IKP 3	Pembinaan Pelayanan kesehatan anak balita dan prasekolah	Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan anak balita dan prasekolah sesuai standar	60 Anak sekolah	60 Anak sekolah	-								60 Anak sekolah	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 3	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Neonatus dan Bayi	Puskesmas yang memberikan layanan neonatus dan bayi memenuhi standar	110 Kasus	110 Kasus	-								110 Kasus	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 3	Pelacakan dan Validasi Data terhadap Kasus Kematian Neonatus dan Bayi	Jumlah Kasus Kematian neonatus dan bayi yang sudah Tervalidasi	0 Kasus	60 Kasus	185,000,000								60 Kasus	185,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 4	Pembinaan Penanggulangan Masalah Gizi Ibu hamil dan remaja putri	Persentase penanggulangan masalah gizi ibu hamil dan remaja putri	64 Persen	64 Persen	98,734,600								64 Persen	98,734,600	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 4	Pembinaan dan Penanggulangan Stunting	Persentase penanggulangan masalah gizi balita dan masyarakat	59 Persen	93 Persen	600,000,000								93 Persen	600,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 4	Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	Jumlah SDM yang dilakukan pembinaan dalam peningkatan kinerjanya selaku pengelola gizi	36 Orang	36 Orang	88,999,700								36 Orang	88,999,700	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 4	Pembinaan Surveilans Gizi	Persentase Status Gizi balita berdasarkan Indeks	12.9 Persen	13 Persen	200,000,000								13 Persen	200,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 4	Pembinaan Pemanfaatan Sarana Air minum yang berkualitas	Persentase pemanfaatan sarana air minum yang berkualitas	41.4 Persen	50 Persen	-								50 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 4	Pembinaan dan pengembangan wilayah STBM	Jumlah desa/keurahan yang melaksanakan 5 pilar STBM	1305 Desa/Kel	1170 Desa/Kel	-								1170 Desa/Kel	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 4	Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	45.75 Persen	60 Persen	72,423,400								60 Persen	72,423,400	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 4	Pengembangan wilayah pemukiman sehat	jumlah kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	4 Kab/Kota	5 Kab/Kota	250,000,000								5 Kab/Kota	250,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 4	Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	12.54 Persen	34 Persen	63,880,200								34 Persen	63,880,200	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi / Kab Kota		
				IKP 4	Pengadaan PMT Balita Kurus dan Bumil KEK dan Distribusi (Penguatan Intervensi Stunting)(DAK FISIK	Prevalensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)		14	5,028,198,000								14	5,028,198,000				
5		Meningkatnya Jaminan Kesehatan Pada Masyarakat			<b>PROGRAM PEMBIAYAAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan</b>	<b>Jiwa</b>	<b>100 Jiwa</b>	<b>189,036,386,450</b>								<b>100 Jiwa</b>	<b>189,036,386,450</b>	<b>Dinas Kesehatan Provinsi Riau</b>	<b>Provinsi / Kab/Kota</b>		
				IKP 1	Pembinaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan secara menyeluruh	78.84 Persen	80 Persen	154,500,000								80 Persen	154,500,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 1	Penyediaan Biaya Kesehatan & Penunjang bagi masyarakat miskin dan tidak mampu	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu peserta PBI dan Non PBI yang memberikan Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut	98.94 Persen	100 Persen	10,000,000,000								100 Persen	10,000,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 1	Analisis Penghitungan Pembiayaan Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Jumlah dokumen PHA yang tersedia	1 Dok	1 Dok	-								1 Dok	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Fakir miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah Daerah ke dalam JKN	Persentase Penduduk miskin dan tidak mampu yang didaftarkan Pemerintah kedalam Program JKN	80 Persen	87 Persen	178,881,886,450								87 Persen	178,881,886,450	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP(Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
								2020		2021		2022		2023		2024		2025			
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				IKP 1	Pelaksanaan Pertimbangan Klinis di Provinsi Riau	Persentase permasalahan klinis yang tertangani di Kab/Kota se Provinsi Riau	- Persen	50 Persen	-								50 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
6		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Pesentase Capaian Indikator Kinerja FKTL sesuai standar	25 Persen	35 Persen									35 Persen		Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi / Kab/Kota	
						Persentase FKTP sesuai standar	100 Persen	100 Persen									100 Persen				
						Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	100	100	15,375,152,875								100	15,375,152,875			
						Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan	100	100									100				
						Persentase Kepuasan pelanggan atas pelayanan laboratorium	55	60									60				
				IKP 1	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Persentase RSUD Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 Persen	45 Persen	153,680,000								45 Persen	153,680,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 1	Pembinaan Pelayanan Pendukung Kesehatan Rujukan di Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan	35 Persen	45 Persen	173,000,000								45 Persen	173,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 1	Pembinaan dan Penyelenggaraan SPGDT/PSC 119	Persentase Kab/Kota yang telah memberikan pelayanan rujukan kegawatdaruratan kepada masyarakat	30 Persen	41 Persen	843,940,000								41 Persen	843,940,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 1	Penyelenggaraan BPRS Provinsi Riau	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh BPRS	- Persen	100 Persen	200,000,000								100 Persen	200,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 1	Pembinaan Akreditasi RS di Provinsi Riau	Persentase RS yang telah memenuhi syarat akreditasi	75 Persen	85 Persen	166,000,000								85 Persen	166,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 1	Pembinaan Laboratorium klinik Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Provinsi Riau	Persentase Laboratorium klinik, Klinik, dan Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis sesuai standar	- Persen	35 Persen	68,012,000								35 Persen	68,012,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 1	Pembinaan dan Pengawasan Perizinan RS se Provinsi Riau	Persentase Perizinan RS yang dilayani sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100,000,000								100 Persen	100,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 2	Pembinaan Laboratorium di FKTP	Persentase FKTP yang telah melaksanakan Laboratorium sesuai Standar	8 Persen	20 Persen	110,984,700								20 Persen	110,984,700	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Tingkat Provinsi	Persentase Puskesmas di Prov Riau yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai standar	35 Persen	45 Persen	175,000,000								45 Persen	175,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 2	Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas) di Provinsi Riau	Persentase Puskesmas di Provinsi Riau yang melaksanakan Perkesmas sesuai standar	35 Persen	45 Persen	125,000,000								45 Persen	125,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 2	Pembinaan Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas di daerah destinasi wisata	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai standar di daerah destinasi wisata	- Puskesmas	3 Puskesmas	-								3 Puskesmas	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 2	Pembinaan Manajemen Puskesmas Tingkat Provinsi Riau	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan Manajemen Puskesmas sesuai Standar Mutu	75 Persen	85 Persen	125,000,000								85 Persen	125,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP(Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
								2020		2021		2022		2023		2024					
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				IKP 1	Pembinaan Registrasi dan Perizinan FKTP di Provinsi Riau	Persentase FKTP yang telah teregistrasi dan memiliki izin operasional	- Persen	100 Persen	86,753,200								100 Persen	86,753,200	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 2	Pembinaan Puskesmas PONED tingkat Provinsi Riau	Persentase Puskesmas PONED yang mampu PONED	15 Persen	25 Persen	122,764,000								25 Persen	122,764,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 2	Pembinaan Mutu & Akreditasi FKTP di Provinsi Riau	Persentase FKTP yang menjalankan Mutu dan Akreditasi sesuai standar	73 Persen	100 Persen	330,896,400								100 Persen	330,896,400	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 3	Manajemen penanggulangan krisis kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Persentase pelaksanaan manajemen krisis kesehatan	100 Persen	100 Persen	175,000,000								100 Persen	175,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 3	Pembinaan SDM Penanggulangan Krisis Kesehatan se Provinsi Riau	Persentase SDM Puskesmas Kab/Kota rawan bencana yang dilatih penanggulangan krisis kesehatan	15 Persen	50 Persen	197,890,000								50 Persen	197,890,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 3	Pemenuhan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi Riau	Persentase pemenuhan peralatan penanggulangan krisis kesehatan provinsi	Persen	25 Persen	449,000,000								25 Persen	449,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 4	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Daerah	Dok	1 Dok	400,000,000								1 Dok	400,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 4	Pembinaan Penyusunan perencanaan bersumber APBN dan APBD	Jumlah dokumen perencanaan bersumber APBN dan APBD yang dimanfaatkan	2 Dok	2 Dok	100,000,000								2 Dok	100,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 4	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Program Kesehatan di Provinsi Riau	Persentase Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi capaian program kesehatan Provinsi Riau.	100 Persen	100 Persen	184,000,000								100 Persen	184,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 4	Pembinaan Pengelolaan Data Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan) di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kab/Kota	13 Dok	13 Dok	-								13 Dok	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 4	Peningkatan kapasitas SDM Perencanaan Kesehatan	Persentase sdm perencanaan kesehatan yang meningkat kapasitasnya	100 Persen	100 Persen	-								100 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 4	Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi penyusunan kebijakan dan Manajemen Kesehatan	Persentase Kab/kota yang terkoordinasi dalam perencanaan kesehatan	100 Persen	100 Persen	-								100 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 4	Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan	Persentase FKTP yang terintegrasi dengan sistem Informasi Kesehatan	80 Persen	80 Persen	-								80 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 4	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi sesuai standar	100 Pkt	100 Pkt	720,000,000								100 Pkt	720,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 4	Koordinasi dan pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau	Persentase pengelolaan data dan Informasi kesehatan	85 Persen	85 Persen	-								85 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 5	Peningkatan kapasitas SDM Laboratorium klinis dan lingkungan	Persentase SDM laboratorium klinis dan lingkungan yang memenuhi kualifikasi sesuai standar	84.60% Persen	45 Persen	275,000,000								45 Persen	275,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 5	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium klinis	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan klinis sesuai standar	50% Persen	100 Persen	712,000,000								100 Persen	712,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 5	Pemenuhan ketersediaan bahan reagensia pelayanan laboratorium lingkungan	Persentase ketersediaan bahan reagensia pelayanan lingkungan sesuai standar	50% Persen	100 Persen	1,925,000,000								100 Persen	1,925,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP(Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Daerah penanggung jawab	Lokasi
								2020		2021		2022		2023		2024		2025			
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				IKP 5	Pemenuhan ketersediaan alat alat pelayanan laboratorium klinis	Persentase ketersediaan alat alat laboratorium pelayanan klinis sesuai standar	100 Persen	100 Persen	-								100 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 5	Pemenuhan ketersediaan alat alat pelayanan laboratorium lingkungan	Persentase ketersediaan alat alat laboratorium pelayanan lingkungan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	-								100 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 4	Bantuan operasional kesehatan (BOK)(DAK Non Fisik)	Persentase capaian program SPM dan Program Keluarga Sehat	Persen	100 Persen	7,456,232,575								100 Persen	7,456,232,575	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
7		Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>	<b>Persentase ODHA yang diobati</b>	<b>12 Persen</b>	<b>23 Persen</b>									<b>23 Persen</b>				
						Success Rate TB Paru	82 Persen	90 Persen									90 Persen				
						Annual Parasit Inciden (API)	0.01 <1/1000 pddk	<1/1000 <1/1000 penduduk pddk									<1/1000 <1/1000 penduduk pddk				
						Persentase capaian imunisasi dasar	71 Persen	93 Persen									93 Persen				
						Persentase Kab/Kota yang merespon alert sinyal kewaspadaan dini KLB > 80%	100 Persen	100 Persen									100 Persen				
						Persentase Penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	13.7 Persen	60 Persen									60 Persen				
						Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	33.2 Persen	60 Persen									60 Persen				
				IKP 1	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase ODHA yang mendapatkan pengobatan	12 Persen	23 Persen	190,500,000								23 Persen	190,500,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 1	Pembinaan dan Pengawasan Intensifikasi penemuan kasus IMS	Persentase bumul yang diperiksa syphilis dan diobati	3.32 Persen	80 Persen	84,680,000								80 Persen	84,680,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 2	Pembinaan dan Pengawasan Penemuan Kasus TB	Persentase Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB	37.4 Persen	90 Persen	-								90 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 2	Pembinaan dan Pengawasan Keberhasilan Pengobatan TB	Succes Rate TB	82 Persen	90 Persen	200,000,000								90 Persen	200,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 1-7	Pemenuhan kebutuhan obat dan logistik P3M	Persentase kebutuhan obat dan logistik P3M yang dapat dipenuhi	0 Persen	70 Persen	-								70 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 1-7	Pengadaan Logistik P3M	Persentase kebutuhan Logistik Program P3M yang dapat dipenuhi sesuai kebutuhan	- Persen	70 Persen	-								70 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 3	Pembinaan dan Pengawasan Program Malaria	Persentase pengobatan kasus malaria sesuai standar	0.01 Kasus	95 Kasus	110,000,000								95 Kasus	110,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 4	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Dasar	Persentase capaian IDL pada bayi usia 0-11 bulan	73 Persen	85 Persen	158,986,000								85 Persen	158,986,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 4	Pembinaan dan Pengawasan Program Imunisasi Lanjutan	Persentase Capaian Imunisasi Lanjutan	45 Persen	70 Persen	106,520,000								70 Persen	106,520,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 4	Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi ( PD3I)	Jumlah kasus AFP Non Polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk < 15 tahun pertahun di satu wilayah kerja tertentu.	41 Persen	50 Persen	59,148,000								50 Persen	59,148,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP(Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah penanggung jawab	Unit Kerja Daerah penanggung jawab	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024					2025	
								Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )				Target	Rp ( Juta )
				IKP 4	Pembinaan dan Pengawasan Program UCI	Persentase desa/kelurahan UCI	63.7 Persen	88 Persen	-								88 Persen	-	Dinas Kesehatan	Provinsi Riau,		
				IKP 4	Pengadaan Sarana Pendukung Imunisasi	Jumlah paket sarana pendukung imunisasi yang diadakan	3 Paket	3 Paket	-								3 Paket	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 4	Jaminan Mutu Kualitas Vaksin	Persentase Kab/Kota dengan rantai vaksin sesuai standar	95 Persen	80 Persen	-								80 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 4, 6, 7	Pengelolaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji 3 bulan sebelum operasional haji dan pemberian imunisasi sebagai proteksi terhadap meningitis meningokokus satu bulan sebelum berangkat	97,58 Persen	92 Persen	93,676,000								92 Persen	93,676,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 4, 6, 7	Pelayanan Kesehatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau	Persentase jemaah haji yang dilayani di embarkasi dan debarkasi Haji	- Persen	100 Persen	339,563,000								100 Persen	339,563,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 1-7	Pembinaan dan Pengawasan Program Surveilans Kesehatan	Persentase kab/kota yang mencapai indikator epidemiologi surveilans kesehatan	STP PKM Sentinel (31,25) STP PKM Non	50 Persen	50 Persen	50,000,000							50 Persen	50,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 7	Pembinaan dan Pengawasan Program Kesehatan Matra	Persentase situasi matra [minimal 2 situasi matra] di kab/kota yang dilakukan pengelolaan kesehatan	50 Persen	25 Persen	-								25 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 5	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB	Persentase kab/kota yang melaksanakan pencegahan, deteksi dan respon terhadap KLB	100 Persen	95 Persen	150,000,000								95 Persen	150,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 5	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	1.3 Persen	97 Persen	-								97 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 5	Pembinaan dan pengendalian kasus bersumber binatang	Persentase pencegahan dan pengendalian kasus bersumber binatang yang ditangani sesuai standar	58.33 Persen	70 Persen	106,153,000								70 Persen	106,153,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 5	Pengendalian Kasus Zoonosis	Persentase Kabupaten/ Kota yang eliminasi Rabies	Persen	100 Persen	-								100 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 5	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Penyakit DBD	Angka Kesakitan Penyakit Menular DBD	...IR < per 16.4 100.000 pddk	45 IR < per 100.000 pddk	66,446,600								45 IR < per 100.000 pddk	66,446,600	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 5	Pembinaan dan Pengawasan Kasus Pengendalian Kasus ISPA	Persentase Kab/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana Paeumonia melalui Program MTBS	7.8 Persen	70 Persen	45,911,600								70 Persen	45,911,600	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 5	Pembinaan dan Pengawasan Program Diare	Persentase kejadian diare yang diobati sesuai standar	9.78 Persen	100 Persen	46,828,000								100 Persen	46,828,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 5	Pembinaan dan Pengawasan Program Hepatitis Virus	Jumlah kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan Hepatitis B pada ibu hamil	58.33 Persen	85 Persen	51,052,600								85 Persen	51,052,600	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 5	Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Kasus Kecacingan	Persentase anak yang mengkonsumsi obat cacing	93.4 Persen	77 Persen	50,000,000								77 Persen	50,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 5	Pembinaan dan Pengawasan Program Kusta dan Frambusia	Persentase penderita kusta dan frambusia yang diobati	100 Persen	100 Persen	51,257,600								100 Persen	51,257,600	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 6,7	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ( PTM )	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada PTM	28.2 Persen	60 Persen	230,032,200								60 Persen	230,032,200	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP(Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024					2025	
								Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )				Target	Rp ( Juta )
				IKP 6,7	Pembinaan dan Pengawasan Program Pencegahan dan Pengendalian ODGJ dan NAPZA di Masyarakat	Persentase Fasyankes yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian ODGJ dan NAPZA di Masyarakat	0 Persen	21 Persen	110,000,000								21 Persen	110,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 6,7	Surveilans Penyakit Tidak Menular, Keswa dan NAPZA	Jumlah laporan surveilans PTM, Keswa dan napza	3 Laporan	3 Laporan	-								3 Laporan	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
8		Meningkatnya akses dan mutu Ketersediaan Farmasi dan Alkes dan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar			<b>PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALKES</b>	<b>Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar</b>	43.2	51									51		<b>Dinas Kesehatan Provinsi Riau</b>	<b>Provinsi Riau, Kab/Kota</b>		
						<b>Persentase sarana Produksi dan Distribusi Farmasi dan Alkes sesuai standar</b>	53	55	3,874,104,088								55	3,874,104,088				
						<b>Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin dan logistik</b>	99	98									98					
				IKP 1	Pembinaan Program Pemantauan obat dan Penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Riau	Persentase RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan Penyalahgunaan NAPZA	85% Persen	65 Persen	50,000,000								65 Persen	50,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 1	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional di Provinsi Riau	1. Persentase Fasyankes yg melakukan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional sesuai standar di Provinsi Riau	43% Persen	70 Persen	110,000,000								70 Persen	110,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 3	Pembinaan SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	Persentase SDM yang mampu melakukan pengelolaan obat dan vaksin di Puskesmas sesuai standar	92% Persen	83 Persen	-								83 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 3	Pembinaan dan Pengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ( PKRT ) , makanan minuman di Wilayah Provinsi Riau	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga ( PKRT ) yang dibina sesuai standar	46% Persen	55 Persen	150,000,000								55 Persen	150,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 3	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM, sarana, prasarana dan operasional pelayanan di UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau	100 Persen	100 Persen	-								100 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 3	Pembinaan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes se Provinsi Riau	Persentase IFLK kab/kota yang mempunyai ketersediaan perbekalan kesehatan dan alkes sesuai standar	87.20% Persen	87 Persen	117,000,000								87 Persen	117,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 3	Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai ( BMHP), alkes buffer stock dan penunjang logistik program	Persentase ketersediaan BMHP , alkes Buffer stock dan penunjang logistik program di Provinsi Riau	80% Persen	84 Persen	615,995,221								84 Persen	615,995,221	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 3	Pemenuhan kebutuhan obat buffer stok dan obat program Provinsi Riau	Persentase ketersediaan obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Riau	80% Persen	84 Persen	1,816,584,867								84 Persen	1,816,584,867	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 1	Penyusunan rencana kebutuhan obat, vaksin, dan logistik kesehatan tingkat Provinsi Riau	Jumlah dokumen rencana kebutuhan obat, vaksin dan logistik kesehatan Provinsi Riau	1 DOK Dok	1 Dok	200,000,000								1 Dok	200,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 3	Pembinaan pengelolaan obat dan vaksin di instalasi farmasi kab/kota sesuai standar	Persentase Instalasi Farmasi kab/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100,000,000								100 Persen	100,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP(Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024					2025	
								Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )				Target	Rp ( Juta )
				IKP 1	Pengelolaan sistem informasi manajemen obat dan vaksin di Provinsi Riau	Persentase Instalasi farmasi kab/kota yang melakukan akses pengelolaan obat dan vaksin melalui sistem Aplikasi SIFIT	80 Persen	80 Persen	90,000,000								80 Persen	90,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
					Penyediaan Prasarana Pendukung UPT Instalasi Farmasi Kesehatan (DAK Fisik)	Tersedianya prasarana pendukung provinsi		100	624,524,000								100	624,524,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau			
9		Meningkatnya ketersediaan dan Mutu SDM Kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase pelaksanaan diklat kesehatan yang sesuai standar</b>	80 Persen	100 Persen	9,730,655,300								100 Persen	9,730,655,300	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
						<b>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai Kompetensi Sesuai Standar</b>	30	45									45	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 1	Pengelolaan Registrasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	100 Persen	100 Persen	-								100 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (data sdmk, data renbut, ns, wkds)	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Riau	12 Dok	1 Dok	55,000,000								1 Dok	55,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 1	Pengelolaan uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional kesehatan	Persentase ASN yang mengikuti uji kompetensi	0 Persen	100 Persen	50,000,000								100 Persen	50,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 1	Pengawasan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Persentase pelaksanaan internsip tenaga kesehatan yang memenuhi standar	100 Persen	100 Persen	80,000,000								100 Persen	80,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 1	Pembinaan Tenaga Kesehatan Provinsi Riau (nakes teladan, tubel, pdds/ppdgs)	Jumlah SDM kesehatan yang dibina	org	95 org	124,016,300								95 org	124,016,300	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 1	Pengelolaan Paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah tenaga paramedis PTT Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dikelola sesuai standar	Orang	191 Orang	5,907,180,000								191 Orang	5,907,180,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 2	Pelatihan SDM UPT. BAPELKES	Jumlah SDM UPT. Bapelkes Yang mendapatkanpelatihan Sesuai Standar	9.00 org	15 org	150,000,000								15 org	150,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 2	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Bagi UPT. BAPELKES	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelatihan Sesuai Standar	0 Persen	27 Persen	850,000,000								27 Persen	850,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 2	Evaluasi Pasca Pelatihanyang dilaksanakan UPT Bapelkes	Persentase Peserta Yang Menerapkan Hasil Pelatihan	0 Persen	60 Persen	-								60 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 2	Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Yang Dilatih sesuai standar	0 org	90 org	2,464,459,000								90 org	2,464,459,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 2	Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan	Jumlah Kurikulum dan Modul yang Di Susun sesuai standar	0 Buku	2 Buku	50,000,000								2 Buku	50,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
10		Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase Fasyankes yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar</b>	61.92 Persen	65 Persen	228,313,800								65 Persen	228,313,800	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		
				IKP 1	Pengelolaan data sarana dan prasarana kesehatan di provinsi riau	persentase ketersediaan data sarana dan prasarana FKTP dan RS milik pemerintah yang sesuai standar	80% Persen	75 Persen	-								75 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP (Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi
								2020		2021		2022		2023		2024		2025			
								Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )		
				IKP 1	Verifikasi pembiayaan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Provinsi Riau	Persentase usulan pembiayaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang diverifikasi	100 Persen	100 Persen	228,313,800								100 Persen	228,313,800	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
				IKP 1	Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Bantuan Hibah Barang	Persentase usulan sarana prasarana pelayanan kesehatan bantuan hibah barang yang dapat dipenuhi	Persen	100 Persen	-								100 Persen	-	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau, Kab/Kota	
								237,987,988,885									237,987,988,885				

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2020**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/I KP (Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja Perangkat	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024				2025	
								Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )			Target	Rp ( Juta )
1.	Meningkatnya tata kelola rumah sakit	Meningkatnya fungsi administrasi berbasis teknologi informasi rumah sakit			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	42,908,521,500							100%	42,908,521,500	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	102 Surat	300 Surat	19,200,000							300 Surat	19,200,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	12 Bulan	48 Rekening	10,000,000,000							48 Rekening	10,000,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	990 Unit	372 Unit	4,745,500,000							372 Unit	4,745,500,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	10,500,000,000							12 Bulan	10,500,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	34 unit	26 Unit	33,580,000							26 Unit	33,580,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 Bulan	35 Jenis	900,000,000							35 Jenis	900,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	12 Bulan	107 Jenis	1,005,215,000							107 Jenis	1,005,215,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	91 Jenis	722,516,500							91 Jenis	722,516,500	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	20900 Porsi	23765 Porsi	522,510,000							23765 Porsi	522,510,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	146 orang	112 Kali	700,000,000							112 Kali	700,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	-	2880 Orang	6,660,000,000							2880 Orang	6,660,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	12 Bulan	1752 OH	7,100,000,000							1752 OH	7,100,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
2	Meningkatnya tata kelola rumah sakit	Meningkatnya fungsi administrasi berbasis teknologi informasi rumah sakit			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	100%	14,545,693,000							100%	14,545,693,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	130 Unit	600,000,000							130 Unit	600,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	-	3 Unit	3,500,000,000							3 Unit	3,500,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	-	53 Ruang	6,000,000,000							53 Ruang	6,000,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	15 Unit	290,991,348							15 Unit	290,991,348	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	896 Unit	950 Unit	4,154,701,652							950 Unit	4,154,701,652	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
3	Meningkatnya tata kelola rumah sakit	Meningkatnya fungsi administrasi berbasis teknologi informasi rumah sakit			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran ASN	100%	100%	4,074,680,200							100%	4,074,680,200	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	-	1850 Stel	1,251,000,100							1850 Stel	1,251,000,100	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	1703 Stel	1869 Stel	1,572,680,000							1869 Stel	1,572,680,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	-	1850 Stel	1,251,000,100							1850 Stel	1,251,000,100	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP (Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja Perangkat	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024				2025	
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan			Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik Rumah Sakit	75%	80%	8,738,113,500							80%	8,738,113,500	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Rumah Sakit	Jumlah jenis perlengkapan Keselamatan Pasien (Patient Safety) mendukung pelayanan di Rumah Sakit	1 jenis	3 jenis	929,350,000							3 jenis	929,350,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3RS) Rumah Sakit	Jumlah jenis perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3RS) mendukung pelayanan di Rumah Sakit	5 jenis	15 jenis	632,700,000							15 jenis	632,700,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyelenggaraan Program Pencegahan Infeksi Rumah Sakit	Jumlah Jenis perlengkapan Penyelenggaraan Program Pencegahan Infeksi (PP) mendukung pelayanan di Rumah Sakit	11 jenis	20 jenis	926,350,000							20 jenis	926,350,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengelolaan SIM - RS	Jumlah Prasarana pendukung operasional penyelenggaraan pengelolaan SIMRS	724 unit	724 Unit	3,888,233,500							724 Unit	3,888,233,500	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran Dan Kesehatan	Jumlah Frekuensi Tenaga Kesehatan yang bermitra Alih Teknologi	-	40 Kali	2,000,000,000							40 Kali	2,000,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pemeriksaan Psikologi (Psikotest) Penyelenggara pelayanan kesehatan	Jumlah pegawai yang mendapat pemeriksaan psikologi (psikotest) di Rumah Sakit	-	94 Orang	25,000,000							94 Orang	25,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Peningkatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah jenis Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang dilaksanakan	-	6 jenis	336,480,000							6 jenis	336,480,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase capaian standar pelayanan minimal Rumah Sakit	100%	100%	2,548,766,000							100%	2,548,766,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyusunan Standar Kesehatan	Persentase Penilaian Tingkat Akreditasi	1 Dokumen	100%	548,766,000							100%	548,766,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Peningkatan standar kompetensi SDM Fungsional Kesehatan	Jumlah Tenaga fungsional kesehatan yang kompetensi sesuai standar	-	1600 Orang	2,000,000,000							1600 Orang	2,000,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
6	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi standar untuk mendukung akreditasi rumah sakit	64%	73%	150,981,504,516							73%	150,981,504,516	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	4500 unit	3.857 jenis	19,524,553,050							3.857 jenis	19,524,553,050	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP (Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja Perangkat	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024				2025	
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
				IKP 1	Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat Jalan	Jumlah Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan Rawat Jalan yang Diadakan	688 Unit	1,126 Unit	11,161,196,500							1,126 Unit	11,161,196,500	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat Inap	Jumlah Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan Rawat Inap yang Diadakan	447 Unit	460 Unit	6,669,933,500							460 Unit	6,669,933,500	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat Gawat Darurat	Jumlah Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Rawat Pelayanan Gawat Darurat yang Diadakan	14 Unit	66 Unit	948,231,500							66 Unit	948,231,500	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Bedah Sentral	Jumlah Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan Bedah Sentral yang Diadakan	263 Unit	428 Unit	63,626,619,500							428 Unit	63,626,619,500	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Intensive	Jumlah Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan Intensive yang Diadakan	110 Unit	35 Unit	1,223,731,500							35 Unit	1,223,731,500	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Fetomaternal dan Neonatus	Jumlah Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan Fetomaternal dan Neonatus yang Diadakan	31 Unit	125 Unit	2,149,631,500							125 Unit	2,149,631,500	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Laboratorium	Jumlah Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan Laboratorium yang diadkan	16 Unit	80 Unit	3,423,708,000							80 Unit	3,423,708,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Diagnostik Terpadu	Jumlah Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan Diagnostik Terpadu yang diadkan	37 Unit	37 Unit	737,411,500							37 Unit	737,411,500	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Sterilisasi	Jumlah Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan Sterilisasi yang diadkan	6 jenis	3 Unit	200,000,000							3 Unit	200,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rehabilitasi Medik	Jumlah Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan Rehabilitasi Medik yang diadkan	7 Unit	50 Unit	2,612,126,300							50 Unit	2,612,126,300	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Jalan	Jumlah Perlengkapan Rumah tangga Pelayanan Rawat Jalan yang diadkan	285 Unit	44 Unit	200,988,000							44 Unit	200,988,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Inap	Jumlah Perlengkapan Rumah tangga Pelayanan Rawat Inap yang diadkan	590 Unit	401 Unit	3,579,352,306							401 Unit	3,579,352,306	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gawat Darurat	Jumlah Perlengkapan Rumah tangga Pelayanan Gawat Darurat yang diadkan	9 Unit	7 Unit	812,491,200							7 Unit	812,491,200	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Bedah Sentral	Jumlah Perlengkapan Rumah tangga Pelayanan Bedah Sentral yang diadkan	73 Unit	132 Unit	1,458,070,800							132 Unit	1,458,070,800	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Intensive	Jumlah Perlengkapan Rumah tangga Pelayanan Intensive yang diadkan	84 Unit	35 Unit	457,411,800							35 Unit	457,411,800	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Fetomaternal dan Neonatus	Jumlah Perlengkapan Rumah tangga Pelayanan Fetomaternal dan Neonatus yang diadkan	137 Unit	44 Unit	541,019,300							44 Unit	541,019,300	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Laundry	Jumlah Perlengkapan Rumah tangga pelayanan laundry yang diadkan	4 Unit	31 Unit	6,102,757,360							31 Unit	6,102,757,360	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP (Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja Perangkat	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024				2025	
								Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )			Target	Rp ( Juta )
				IKP 1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Diagnostik Terpadu	Jumlah Perlengkapan Rumah tangga Pelayanan Diagnostik Terpadu yang diadakan	-	71 Unit	521,041,300								71 Unit	521,041,300	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru	
				IKP 1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Jantung Terpadu	Jumlah Perlengkapan Rumah tangga Pelayanan Jantung Terpadu yang diadakan	-	22 Unit	1,784,836,800									22 Unit	1,784,836,800	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Kanker Terpadu	Jumlah Perlengkapan Rumah tangga Pelayanan Kanker Terpadu yang diadakan	-	87 Unit	616,549,800									87 Unit	616,549,800	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gizi	Jumlah Perlengkapan Rumah tangga Pelayanan Gizi yang diadakan	16 Jenis	29 Unit	3,677,840,000									29 Unit	3,677,840,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan Radiologi	Jumlah Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Pelayanan Radiologi yang diadakan	5 Unit	9 Unit	2,929,325,000									9 Unit	2,929,325,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	Pengadaan Peralatan Non Medis Pelayanan Farmasi	Jumlah Peralatan Non Medis Pelayanan Farmasi yang diadakan	12 Jenis	118 unit	3,164,500,000									118 unit	3,164,500,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan IP3MRS	Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan IP3MRS yang diadakan	13 Jenis	114 unit	1,819,485,000									114 unit	1,819,485,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Kanker Terpadu	Jumlah peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Kanker Terpadu yang diadakan	-	136 Unit	1,420,431,500									136 Unit	1,420,431,500	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Jantung Terpadu	Jumlah peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Jantung Terpadu yang diadakan	-	91 Unit	6,748,331,500									91 Unit	6,748,331,500	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS	Jumlah Pengolahan limbah RS yang terpelihara	3 jenis	12 Bulan	1,650,000,000									12 Bulan	1,650,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan Air Bersih RS	Jumlah Air bersih yang dikelola	-	4 kali	600,000,000									4 kali	600,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah	Jumlah Ambulance/ mobil jenazah yang dipelihara	14 Unit	11 Unit	250,000,000									11 Unit	250,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	Pengadaan Mebeuler RS	Jumlah Meubeler di RS	-	113 Unit	369,930,000									113 Unit	369,930,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	DED Radioterapi	Jumlah DED Radioterapi yang dibuat	-	-	-									-	-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	Review Design DED Service Building	Jumlah DED Service Building yang dibuat	-	-	-									-	-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	DED Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	DED Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dibuat	-	-	-									-	-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	DED Rehabilitasi Medik	Jumlah DED Rehabilitasi Medik yang dibuat	-	-	-									-	-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	DED Gedung Farmasi	Jumlah DED Gedung Farmasi	-	-	-									-	-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	Pengadaan Landscape	Jumlah Landscape yang diadakan	-	-	-									-	-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
				IKP 1	Review Master Plan	Jumlah Review Master Plan yang dibuat	-	-	-									-	-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP (Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja Perangkat	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024				2025	
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
				IKP 1	Pembangunan Logo dan Pagar Rumah Sakit	Jumlah Pagar dan Logo Rumah Sakit yang dibangun	-	-	-								-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pembangunan Rumah Singgah	Jumlah Rumah Singgah yang dibangun	-	-	-								-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah Gedung yang direhab	1 Gedung	-	-								-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pembangunan Gedung Rawat Inap Anak	Jumlah Gedung Rawat Inap Anak yang dibangun	-	-	-								-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pembangunan Gedung Poliklinik RS Tahap I	Jumlah Gedung Poliklinik RS Tahap I yang dibangun	-	-	-								-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pembangunan Gedung Poliklinik RS Tahap II	Jumlah Gedung Poliklinik RS Tahap II yang dibangun	-	-	-								-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pembangunan Gedung Radioterapi	Jumlah Gedung Radioterapi yang dibangun	-	-	-								-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pembangunan Gedung Service Building	Jumlah Gedung Service Building yang dibangun	-	-	-								-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pembangunan Gedung Farmasi	Jumlah Gedung Farmasi yang dibangun	-	-	-								-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
				IKP 1	Pembangunan Gedung Rehabilitasi Medik	Jumlah Gedung Rehabilitasi Medik yang dibangun	-	-	-								-	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru		
<b>B</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar</b>	<b>Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>			<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RS</b>	<b>Persentase capaian standar pelayanan minimal Rumah Sakit</b>	<b>71%</b>	<b>73%</b>	<b>255,000,000,000</b>								<b>73%</b>	<b>255,000,000,000</b>	<b>RSUD Arifin Achmad</b>	<b>Pekanbaru</b>	
				IKP 1	Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan	100 Persen	100 Persen	255,000,000,000								100 Persen	255,000,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru	
									<b>478,797,278,716</b>									<b>478,797,278,716</b>			

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif RSJ Tampan Provinsi Riau Tahun 2020**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP(Capaian)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja Perangkat	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024				2025	
								Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )			Target	Rp ( Juta )
<b>1.</b>					<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>21,632,500,000</b>							<b>100</b>	<b>21,632,500,000</b>	<b>RSJ Tampan</b>	<b>Pekanbaru</b>		
				IKP 1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	4,550	4,550	28,250,000							4,550	28,250,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Su	Jumlah rekening yang dibayar	36	36	2,889,600,000							36	2,889,600,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	396	396	7,256,820,000							396	7,256,820,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	12	5,050,000,000							12	5,050,000,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15	15	655,000,000							15	655,000,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	49	49	561,650,000							49	561,650,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	33	33	255,000,000							33	255,000,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	18	18	198,000,000							18	198,000,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	85	85	483,750,000							85	483,750,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	480	480	803,890,000							480	803,890,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga Administrasi Kantor yang disediakan	564	564	1,080,540,000							564	1,080,540,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	564	564	2,370,000,000							564	2,370,000,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
<b>2</b>					<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>500,000,000</b>							<b>100</b>	<b>500,000,000</b>	<b>RSJ Tampan</b>	<b>Pekanbaru</b>		
				IKP 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	50	50	500,000,000							50	500,000,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
<b>3</b>					<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Capaian Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik Rumah Sakit Jiwa Tampan</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>5,233,760,000</b>							<b>53</b>	<b>5,233,760,000</b>	<b>RSJ Tampan</b>	<b>Pekanbaru</b>		
				IKP 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3RS) Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan K3RS	65	65	198,700,000							65	198,700,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Pelayanan Konseling dan Testing HIV / AIDS	Jumlah Konseling dan Pemeriksaan HIV / AIDS	250	250	155,760,000							250	155,760,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyelenggaraan Peningkatan Terapy Rehab Napza	Jumlah kunjungan rehab napza	110	110	260,000,000							110	260,000,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengembangan Pelayanan Klinik Jiwa Anak dan Remaja	Jumlah kunjungan klinik Jiwa anak dan remaja	1800	1800	199,850,000							1800	199,850,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi IPWL, Jamkesda, BPJS dan Poliklinik	Frekuensi Sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi IPWL, Jamkesda, BPJS dan Poliklinik	36	36	284,900,000							36	284,900,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Upaya Kesehatan Lingkungan RS	Jenis Upaya Kesehatan Lingkungan	5	5	1,016,550,000							5	1,016,550,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyelenggaraan Terapi Kesehatan Jiwa	Jumlah Penyelenggaraan Terapi Kesehatan Jiwa	332	332	126,620,000							332	126,620,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa Komunitas (Masyarakat)	Jumlah Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa Komunitas (Masyarakat)	176	176	311,980,000							176	311,980,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/KP(Capaian)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja Perangkat	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024				2025	
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
				IKP 1	Pelayanan Penunjang ODGJ Bagi Penduduk Miskin	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang ODGJ Bagi Penduduk Miskin	169	169	487,800,000							169	487,800,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah Media Promosi Kesehatan RS	28	28	400,000,000							28	400,000,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyediaan Jasa Tenaga Medis dan Non Medis	Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis yang di Sediakan	732	732	1,791,600,000							732	1,791,600,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Penanganan Covid-19	Jumlah jenis belanja sarana dan prasarana medik dan non medik pelayanan bencana Covid-19 yang diadakan	0	-	-							-	-	RSJ Tampan	Pekanbaru		
<b>4</b>					<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase Capaian Standar Akreditasi Rumah Sakit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4,178,828,000</b>							<b>100</b>	<b>4,178,828,000</b>	<b>RSJ Tampan</b>	<b>Pekanbaru</b>		
				IKP 1	Penyusunan Standar Kesehatan	Persentase Penilaian Tingkat Akreditasi	100	100	1,425,318,000							100	1,425,318,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Diklat Teknis	Jumlah ASN dan Non ASN yang Mengikuti Diklat Teknis	240	240	2,507,510,000							240	2,507,510,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Audit Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Audit Mutu Pelayanan Rumah Sakit	316	316	246,000,000							316	246,000,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
<b>5</b>					<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi standar untuk mendukung akreditasi rumah sakit Jiwa Tampan</b>	<b>0.83</b>	<b>83%</b>	<b>11,456,010,000</b>							<b>83%</b>	<b>11,456,010,000</b>	<b>RSJ Tampan</b>	<b>Pekanbaru</b>		
				IKP 1	Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit	Jenis alat-alat RS yang diadakan	67	67	6,258,010,000							67	6,258,010,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	Jumlah Jenis mebeleur yang diadakan	43	43	5,000,000,000							43	5,000,000,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
				IKP 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah Jenis Ruang Lingkup Pemeliharaan	2	2	198,000,000							2	198,000,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
<b>6</b>					<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS</b>	<b>Persentase capaian standar pelayanan minimal rumah sakit Jiwa Tampan</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>29,985,470,000</b>							<b>85</b>	<b>29,985,470,000</b>	<b>RSJ Tampan</b>	<b>Pekanbaru</b>		
				IKP 1	Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM	85	85	29,985,470,000							85	29,985,470,000	RSJ Tampan	Pekanbaru		
								<b>72,986,568,000</b>								<b>72,986,568,000</b>					

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif RSUD Petala Bumi Provinsi Riau Tahun 2020**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/ KP(Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja Perangkat	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024				2025	
								Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )			Target	Rp ( Juta )
1.	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Rumah Sakit Yang Profesional	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Rumah Sakit sesuai Standar	Persentase Tata Laksana Administrasi Sesuai SOP		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	7,728,957,000								100%	7,728,957,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim		1300 Surat	21,750,000								1300 Surat	21,750,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang dibayar		60 Rekening	1,570,560,000								60 Rekening	1,570,560,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		21 Unit	261,950,000								21 Unit	261,950,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Rentang waktu penyediaan Jasa kebersihan kantor		12 bulan	1,353,380,000								12 bulan	1,353,380,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		16 Unit	39,100,000								16 Unit	39,100,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan		84 Jenis	340,013,000								84 Jenis	340,013,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Laporan yang dicetak dan digandakan		254 Jenis	708,305,000								254 Jenis	708,305,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		33 Jenis	50,000,000								33 Jenis	50,000,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman yang disediakan		6710 Porsi	261,870,000								6710 Porsi	261,870,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		21 Kali	425,306,000								21 Kali	425,306,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan		240 Orang Bulan	1,231,460,000								240 Orang Bulan	1,231,460,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Satpam yang disediakan		480 Orang Bulan	1,465,263,000								480 Orang Bulan	1,465,263,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
2	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Rumah Sakit Yang Profesional	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Rumah Sakit sesuai Standar	Persentase Tata Laksana Administrasi Sesuai SOP		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100%	1,366,675,000								100%	1,366,675,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		43 Unit	611,500,000								43 Unit	611,500,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		16 Unit	354,359,000								16 Unit	354,359,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang dipelihara		339 Unit	400,816,000								339 Unit	400,816,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
3	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Rumah Sakit Yang Profesional	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Rumah Sakit sesuai Standar	Persentase Tata Laksana Administrasi Sesuai SOP		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Kehadiran ASN		100%	116,496,000								100%	116,496,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Pengadaan Pakaian kerja lapangan	jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		249 stel	116,496,000								249 stel	116,496,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/ KP(Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja Perangkat	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024				2025	
								Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )	Target	Rp ( Juta )			Target	Rp ( Juta )
4	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit		Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Pelayanan Penunjang Klinik dan Non Klinik Rumah Sakit		40%	11,099,949,000								40%	11,099,949,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pasien (Patient Safety) Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan keselamatan pasien		-	-								-	-	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3RS) Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan K3RS		80%	1,885,150,000								80%	1,885,150,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyelenggaraan Program Pencegahan Infeksi Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Program PPI Rumah Sakit		80%	155,469,000								80%	155,469,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Peningkatan Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit	Jumlah pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif (PONEK)		-	-								-	-	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Pelayanan Terapi Rumatan Metadon	Jumlah pelayanan Terapi Rumatan Metadon		-	-								-	-	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Jumlah Modul Sistem Informasi yang disediakan		2 Modul	75,000,000								2 Modul	75,000,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Jumlah Media Promosi kesehatan yang disediakan		3 Media	144,350,000								3 Media	144,350,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyediaan Jasa Tenaga Medis Dan Non Medis	Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis yang disediakan		3000 Orang Bulan	8,839,980,000							3000 Orang Bulan	8,839,980,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru		
				IKP 1	Penyelenggaraan program klinik VCT HIV-AIDS	Persentase pemenuhan penyelenggaraan program klinik VCT-HIV AIDS		-	-								-	-	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyelenggaraan program klinik pelayanan Geriatri	Persentase pemenuhan penyelenggaraan program klinik Pelayanan Geriatri		-	-								-	-	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyelenggaraan program pengendalian resistensi antimikroba (PPRA)	Persentase pemenuhan penyelenggaraan program pengendalian resistensi antimikroba (PPRA)		-	-								-	-	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyelenggaraan Program TB-DOTS	Persentase pemenuhan penyelenggaraan program TB-DOTS		-	-								-	-	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
5	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase capaian standar pelayanan minimal Rumah Sakit Petala Bumi		90%	2,582,691,000								90%	2,582,691,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyusunan Standar Kesehatan	Persentase penilaian tingkat akreditasi		85%	70,000,000								85%	70,000,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyusunan Clinical Pathway	Jumlah Clinical Pathway yang disusun			-									-	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Diklat Teknis	Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti diklat teknis		220 Orang	2,512,691,000								220 Orang	2,512,691,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Indikator Kinerja Program/IKP (Capaian Program)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2018	Capaian Kinerja program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode		Unit Kerja Perangkat	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024				2025	
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
6	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit		Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase sarana dan prasarana RS memenuhi standar untuk mendukung akreditasi Rumah Sakit Petala Bumi		83%	25,355,092,000								83%	25,355,092,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain)	Jumlah Jenis perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang diadakan		6 Jenis	490,228,000								6 Jenis	490,228,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis	Jumlah alat kesehatan yang diadakan		293 Unit	8,092,301,000								293 Unit	8,092,301,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Pengadaan obat dan perbekalan farmasi	Jumlah Jenis Obat dan Perbekalan Farmasi yang diadakan		5 Jenis	9,790,000,000								5 Jenis	9,790,000,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Peningkatan Pelayanan Sterilisasi	Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai Pelayanan Sterilisasi yang diadakan		18 Jenis	467,635,000								18 Jenis	467,635,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyusunan DED Pembangunan gedung	Jumlah Dokumen yang disediakan		-	-								-	-	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Penyusunan Masterplan Gedung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen yang disediakan		-	-								-	-	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Pembangunan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun		-	-								-	-	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit		2 Jenis	3,642,688,000								2 Jenis	3,642,688,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah dan Sanitasi Rumah Sakit	Jumlah pemeliharaan ruang lingkup sanitasi Rumah Sakit		6 Ruang Lingkup Sanitasi	1,102,540,000								6 Ruang Lingkup Sanitasi	1,102,540,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit		20 Jenis	1,769,700,000								20 Jenis	1,769,700,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
7	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RS	Persentase capaian standar pelayanan minimal Rumah Sakit Petala Bumi		93%	15,325,000,000								93%	15,325,000,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
				IKP 1	Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal		93	15,325,000,000								93	15,325,000,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
									63,574,860,000									63,574,860,000			

**TABEL 6.2 ( TC 27 )**  
**REKAPITULASI PAGU PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021 - 2024**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI AKHIR RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	TOTAL 2021	TARGET	TOTAL 2022	TARGET	TOTAL 2023	TARGET	TOTAL 2024	TARGET			
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Menurunnya Mortalitas dan Morbiditas	Persentase Penurunan kematian ibu				≤ 2		≤ 2		≤ 2		≤ 2		≤ 2		Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota
		Persentase Penurunan Kematian Bayi				≤ 5		≤ 5		≤ 5		≤ 5		≤ 5			
		Persentase Penurunan Kematian Balita				≤ 2		≤ 2		≤ 2		≤ 2		≤ 2			
		Prevalensi Stunting				22,3		18,4		16		14		14			
		Persentase Orang Dengan HIV AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA On ART )				45		50		55		60		60			
		Success Rate TB				91		92		93		95		95			
		Persentase Kab/Kota dengan IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk				67		75		83		92		92			
		Persentase Pencegahan dan Pengendalian masalah Kesehatan yang Disebabkan oleh Penyakit Tidak menular				20		30		40		50		50			
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi				100		100		100		100		100			
			2. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Pencapaian Universal Health Coverage				87		90		92		95		95	
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak krisis kesehatan akibat dan/atau berpotensi bencana						100		100		100		100		100			
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi						95		96		97		98		98			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI AKHIR RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	TOTAL 2021	TARGET	TOTAL 2022	TARGET	TOTAL 2023	TARGET	TOTAL 2024	TARGET			
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kesehatan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kesehatan Masyarakat ( RSUD AA )				82		83		84		85		85		RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru
		Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD ( RSUD AA )				100		100		100		100		100			
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kesehatan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kesehatan Masyarakat ( RSJ TAMPAN )				86		88		89		90		90		RSJ Tampan	Pekanbaru
		Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD ( RSJ TAMPAN )				100		100		100		100		100			
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kesehatan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kesehatan Masyarakat ( RSUD PB )				91		92		93		94		94		RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
		Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD ( RSUD PB )				100		100		100		100		100			
			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(1) Persentase Capaian SPM Kabupaten se-Provinsi (2) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) yang dibiayai melalui budget sharing (3)Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1. Persen 2. Jiwa 3.Per 1000 Penduduk	40 698.611 1,25	442,255,577,755	55 750.000 1,26	435,484,212,733	70 800.000 1,27	353,152,156,877.00	85 850.000 1,28	346,321,815,371.91	85 850.000 1,28	1,577,213,762,737		
			1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	87	97,639,464,682	89	186,079,161,095	90	66,088,681,131.70	92	58,916,206,830.74	92	408,723,513,739		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI AKHIR RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	TOTAL 2021	TARGET	TOTAL 2022	TARGET	TOTAL 2023	TARGET	TOTAL 2024	TARGET	TOTAL 2024		
			1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	100	341,998,062,962	100	243,928,028,423	100	283,596,519,218.30	100	283,922,453,576.17	100	1,153,445,064,179		
			1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Terselenggaranya sistem informasi terintegrasi	Persen	100	1,684,984,105	100	3,619,327,129	100	1,540,000,000.00	100	1,546,321,838.00	100	8,390,633,072		
			1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang	Persentase perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang	Persen	100	933,066,006	100	1,857,696,086	100	1,926,956,527.00	100	1,936,833,127.00	100	6,654,551,746		
			<b>1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar</b>	<b>Persen</b>	<b>73</b>	<b>100,648,557,384</b>	<b>75</b>	<b>26,382,105,663</b>	<b>78</b>	<b>26,807,891,732.00</b>	<b>80</b>	<b>28,178,519,444.25</b>	<b>80</b>	<b>182,017,074,223</b>		
			1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM.	Dokumen	13	98,047,114,364	13	19,728,112,068	13	21,300,831,000.95	13	22,107,552,886.25	13	161,183,610,319		
			1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi	Persen	100	2,601,443,020	100	6,653,993,595	100	5,507,060,731.05	100	6,070,966,558.00	100	20,833,463,904		
			<b>1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, Alkes dan makanan minuma yang memenuhi standar</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>88,205,000</b>	<b>91</b>	<b>145,810,000</b>	<b>92</b>	<b>374,835,858.00</b>	<b>93</b>	<b>400,763,680.00</b>	<b>93</b>	<b>1,009,614,538</b>		
			1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, Alkes memenuhi rekomendasi syarat perizinan	Persen	100	62,405,000	100	89,150,000	100	189,150,000.00	100	201,000,822.00	100	541,705,822		
			1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase sarana UKOT memenuhi rekomendasi syarat perizinan	Persen	100	25,800,000	100	56,660,000	100	185,685,858.00	100	199,762,858.00	100	467,908,716		
			<b>1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>1. Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat 2. Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>33</b>	<b>3,277,263,000</b>	<b>42</b>	<b>762,430,362</b>	<b>58</b>	<b>3,933,944,126.00</b>	<b>83</b>	<b>4,002,108,659.00</b>	<b>83</b>	<b>11,975,746,147</b>		
						<b>60</b>		<b>65</b>		<b>70</b>		<b>75</b>		<b>75</b>			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI AKHIR RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TARGET	TOTAL 2021	TARGET	TOTAL 2022	TARGET	TOTAL 2023	TARGET	TOTAL 2024	TARGET			
			1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan GERMAS	Kab/Kota	3	3,032,670,000	5	200,000,000	7	3,241,944,126.00	12	3,314,908,659.00	12	9,789,522,785		
			1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kab/kota yang melaksanakan Pembinaan PHBS di 3 tatanan ( Rumah Tangga, Perkantoran dan sekolah )	Kab/Kota	1	185,063,000	4	412,430,362	8	520,000,000.00	12	520,000,000.00	12	1,637,493,362		
			1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jenis UKBM yang dibina	UKBM	4	59,530,000	4	150,000,000	4	172,000,000.00	12	167,200,000.00	12	548,730,000		
			<b>X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>330,047,882,205</b>	<b>100</b>	<b>318,653,255,133</b>	<b>100</b>	<b>319,308,086,219.34</b>	<b>100</b>	<b>329,405,282,153.17</b>	<b>100</b>	<b>1,297,414,505,710</b>		
				<b>2. Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>364,993,460,913</b>	<b>100</b>	<b>276,774,654,870</b>	<b>100</b>	<b>345,317,362,605.00</b>	<b>100</b>	<b>362,883,230,735.00</b>	<b>100</b>	<b>1,349,968,709,123</b>		
			X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dokumen	-	-	5	450,081,753	0	-	0	-	0	450,081,753		
			X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	Laporan	1	249,127,611,196	1	226,829,288,522	4	226,829,289,000.00	4	232,500,020,734.70	10	935,286,209,453		
			X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	Laporan	1	59,000,000	1	150,000,000	1	125,000,000.00	1	137,500,000.00	4	471,500,000		
			X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	Jenis	1	1,511,559,600	1	2,419,500,000	1	1,761,898,740.00	1	1,861,898,740.00	1	7,554,857,080		
			X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	Jenis	5	8,674,299,666	5	9,106,612,917	5	7,893,539,041.60	5	8,166,042,037.15	5	33,840,493,662		
			X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Unit	36	283,745,238	5	4,367,434,860	41	3,688,651,415.00	44	5,189,544,983.00	126	13,529,376,496		
			X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	Jenis	3	59,299,909,194	3	64,985,014,912	3	67,837,855,885.24	3	70,935,988,243.95	3	263,058,768,235		
			X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Jenis	4	11,091,757,311	4	10,345,322,169	4	11,171,852,137.50	4	10,614,287,414.38	4	43,223,219,032		
			X.XX.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Layanan BLUD sesuai standart	Persen	100	364,993,460,913	100	276,774,654,870	100	345,317,362,605.00	100	362,883,230,735.00	100	1,349,968,709,123		
			<b>Total Pagu Program</b>				<b>1,241,310,946,257</b>		<b>1,058,202,468,761</b>		<b>1,048,894,277,417</b>		<b>1,071,191,720,043</b>		<b>4,419,599,412,478</b>		

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2021– 2024**

**DINAS KESEHATAN**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI						
							2021		2022		2023		2024		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)				
			1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				628,783,212,121		488,394,673,721		351,782,194,026		353,855,144,888		1,822,815,224,756	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Menurunnya Mortalitas dan Morbiditas	Persentase Penurunan kematian ibu					≤ 2		≤ 2		≤ 2		≤ 2		≤ 2		Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
		Persentase Penurunan Kematian Bayi					≤ 5		≤ 5		≤ 5		≤ 5		≤ 5									
		Persentase Penurunan Kematian Balita					≤ 2		≤ 2		≤ 2		≤ 2		≤ 2									
		Prevalensi Stunting					22,3		18,4		16		14		14									
		Persentase Orang Dengan HIV AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA On ART)					45		50		55		60		60									
		Success Rate TB					91		92		93		95		95									
		Persentase Kab/Kota dengan IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk					67		75		83		92		92									
		Persentase Pencegahan dan Pengendalian masalah Kesehatan yang Disebabkan oleh Penyakit Tidak menular					20		30		40		50		50									
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi					100		100		100		100		100									
	2. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Pencapaian Universal Health Coverage					87		90		92		95		95		Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk ber dampak krisis kesehatan akibat dan/atau berpotensi					100		100		100		100		100									
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi					95		96		97		98		98									

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2021		2022		2023		2024		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)
			1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(1) Persentase Capaian SPM Kabupaten se-Provinsi  (2) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran ( PBI) yang dibiayai melalui budget sharing  (3)Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1. persen  2. jiwa  3. per 1000 penduduk	40 698.611 1,25	279,132,877,843   750.000	55  750.000	241,760,823,677   800.000	70  800.000	280,968,856,449   850.000	85  850.000	281,014,700,792   850.000	85  850.000	1,082,877,258,762   1,28	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota		
			1 02 02 101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	87	51,054,747	89	-	90	60,000,000	92	60,000,000	92	171,054,747	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota		
				Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5	51,054,747	0	-	6	60,000,000	10	60,000,000	21	171,054,747	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota		
			1 02 02 102	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	100	278,160,339,104	100	240,674,254,243	100	279,916,965,922	100	279,962,810,265	100	1,078,714,369,535	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota		
			1 02 02 102 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	130148	50,243,501,277	8409	70,587,726,745	8409	29,115,213,877	8409	17,172,074,220	155375	167,118,516,119	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota		
			1 02 02 102 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	128594	255,217,718	6430	150,000,000	6430	252,105,000	6430	252,105,000	147884	909,427,718	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota		
			1 02 02 102 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	7	1,384,515,908	4	520,000,000	7	1,174,840,630	7	1,174,840,630	25	4,254,197,168	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota		
			1 02 02 102 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1	39,450,421	1	50,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	4	169,450,421	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota		
			1 02 02 102 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	6,768,769,519	4	5,878,063,000	4	3,813,600,000	4	3,813,600,000	16	20,274,032,519	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota		
			1 02 02 102 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2	314,460,228	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	8	614,460,228	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota		
			1 02 02 102 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5	847,760,763	7	821,733,848	7	766,796,628	7	766,796,628	26	3,203,087,867	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota		
			1 02 02 102 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	3	1,418,671,161	-	-	3	526,471,966	3	526,471,966	9	2,471,615,093	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota		
			1 02 02 102 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	-	-	2	55,363,805	2	60,900,186	2	60,900,186	6	177,164,176	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI						
							2021		2022		2023		2024		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)				
			1 02 02 102 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	1,098,514,360	2	730,246,548	2	1,534,583,152	2	1,534,583,152	8	4,897,927,212	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 02 102 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	-	-	1	311,322,258	1	342,454,484	1	342,454,484	3	996,231,226	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 02 102 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Orang	-	-	197	50,000,000	210	55,000,000	220	55,000,000	627	160,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 02 102 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	3	214,093,853,935	3	159,046,648,916	3	239,848,000,000	3	251,836,984,000	12	864,825,486,851	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 02 102 17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	2	220,509,776	2	385,895,600	2	400,000,000	2	400,000,000	8	1,406,405,376	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 02 102 18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	2	270,274,860	2	415,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	8	1,485,274,860	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 02 102 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	8	82,339,455	8	389,155,415	8	300,000,000	8	300,000,000	32	1,071,494,870	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 02 102 23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1,038,472,572	2	1,067,200,808	3	1,070,000,000	5	1,070,000,000	11	4,245,673,380	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 02 102 24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	84,027,151	1	115,897,300	1	117,000,000	1	117,000,000	4	433,924,451	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 02 103	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terselenggaranya sistem informasi terintegrasi	Persen	100	808,810,986	100	631,570,348	100	540,000,000	100	540,000,000	100	2,520,381,334	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 02 103 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	3	231,997,422	-	-	-	-	-	-	3	231,997,422	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 02 103 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	5	576,813,564	5	631,570,348	5	540,000,000	5	540,000,000	20	2,288,383,912	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 02 104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang direkomendasikan	Persen	100	112,673,006	100	454,999,086	100	451,890,527	100	451,890,527	100	1,471,453,146	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 02 104 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	22	53,892,123	12	80,000,000	11	82,000,000	9	82,000,000	54	297,892,123	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 02 104 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	230	58,780,883	261	374,999,086	275	369,890,527	288	369,890,527	288	1,173,561,023	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI						
							2021		2022		2023		2024		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)				
			1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	73	87,539,364,465	75	6,443,547,000	78	6,641,999,281	80	7,101,433,917	80	107,726,344,663	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 03 101	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM.	Dokumen	13	87,382,578,872	13	6,048,945,000	13	6,241,999,281	13	6,448,944,939	52	106,122,468,092	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 03 101 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	15747	87,382,578,872	180	6,048,945,000	180	6,241,999,281	180	6,448,944,939	16287	106,122,468,092	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 03 102	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi	Persen	100	156,785,593	100	394,602,000	100	400,000,000	100	652,488,978	100	885,730,177	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 03 102 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	150	63,728,177	155	229,002,000	160	230,000,000	160	363,000,000	625	885,730,177	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 03 102 02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	93,057,416	1	165,600,000	1	170,000,000	1	289,488,978	4	718,146,394	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, Alkes dan makanan minuma yang memenuhi standar	Persen	90	88,205,000	91	145,810,000	92	374,835,858	93	400,763,680	93	1,009,614,538	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 04 101	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, Alkes memenuhi rekomendasi syarat perizinan	Persen	100	62,405,000	100	89,150,000	100	189,150,000	100	201,000,822	100	541,705,822	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 04 101 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Sarana	122	62,405,000	124	89,150,000	128	189,150,000	129	201,000,822	129	541,705,822	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 04 102	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase sarana UKOT memenuhi rekomendasi syarat perizinan	Persen	100	25,800,000	100	56,660,000	100	185,685,858	100	199,762,858	100	467,908,716	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 04 102 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	6	25,800,000	8	56,660,000	10	185,685,858	12	199,762,858	12	467,908,716	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat 2. Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif	Persen	33 60	3,277,263,000	42 65	762,430,362	58 70	3,933,944,126	83 75	4,002,108,659	83 75	11,975,746,147	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 05 101	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan GERMAS	Kab/Kota	3	3,032,670,000	5	200,000,000	7	3,241,944,126	12	3,314,908,659	12	9,789,522,785	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI						
							2021		2022		2023		2024		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)				
			1 02 05 101 01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	7	3,032,670,000	5	200,000,000	7	3,241,944,126	7	3,314,908,659	26	9,789,522,785	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 05 102	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kab/kota yang melaksanakan Pembinaan PHBS di 3 tatanan ( Rumah Tangga, Perkantoran dan sekolah )	Kab/Kota	1	185,063,000	4	412,430,362	8	520,000,000	12	520,000,000	25	1,637,493,362	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 05 102 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	185,063,000	1	412,430,362	1	520,000,000	1	520,000,000	4	1,637,493,362	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 05 103	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jenis UKBM yang dibina	UKBM	4	59,530,000	4	150,000,000	4	172,000,000	4	167,200,000	4	548,730,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			1 02 05 103 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	4	59,530,000	4	150,000,000	4	172,000,000	4	167,200,000	4	548,730,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan 2. Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD	Persen	100	258,745,501,813	100	239,282,062,682	100	59,862,558,312	100	61,336,137,839	100	619,226,260,646	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			X XX 01 101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dokumen	-	-	5	450,081,753	-	-	-	-	5	450,081,753	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			X XX 01 101 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	5	450,081,753	-	-	-	-	5	450,081,753	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			X XX 01 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	Laporan	1	249,127,611,196	1	226,829,288,522	4	49,991,749,601	4	51,365,329,128	10	577,313,978,447	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			X XX 01 102 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	19752	249,127,611,196	19752	226,829,288,522	3456	49,991,749,601	3456	51,365,329,128	46416	577,313,978,447	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			X XX 01 103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	Laporan	1	59,000,000	1	150,000,000	-	-	-	-	2	209,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			X XX 01 103 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	59,000,000	1	150,000,000	-	-	-	-	2	209,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			X XX 01 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	Jenis	-	-	-	-	1	201,600,000	1	201,600,000	1	403,200,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			X XX 01 105 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	-	-	1	201,600,000	1	201,600,000	2	403,200,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						
			X XX 01 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	Jenis	5	2,232,184,370	5	3,031,571,189	5	1,595,000,000	5	1,595,000,000	5	8,453,755,559	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							2021		2022		2023		2024		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
			X XX 01 106 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	195,619,129	2	309,000,000	2	190,000,000	2	190,000,000	8	884,619,129	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota				
			X XX 01 106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	920,194,215	3	1,168,651,907	3	600,000,000	3	600,000,000	12	3,288,846,122	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota				
			X XX 01 106 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	392,128,420	3	450,000,000	3	200,000,000	3	200,000,000	12	1,242,128,420	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota				
			X XX 01 106 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	195,000,000	2	379,999,830	2	180,000,000	2	180,000,000	8	934,999,830.000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota				
			X XX 01 106 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	529,242,606	8	723,919,452	8	425,000,000	8	425,000,000	32	2,103,162,058	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota				
			X XX 01 108	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi</b>	<b>Jenis</b>	<b>3</b>	<b>6,059,390,240</b>	<b>3</b>	<b>6,944,508,352</b>	<b>3</b>	<b>6,696,458,711</b>	<b>3</b>	<b>6,696,458,711</b>	<b>3</b>	<b>26,396,816,014</b>	<b>Dinas Kesehatan Provinsi Riau</b>	<b>Provinsi Riau / Kabupaten / Kota</b>				
			X XX 01 108 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	33,736,160	12	30,150,000	12	30,000,000	12	30,000,000	48	123,886,160	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota				
			X XX 01 108 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1,671,200,000	12	1,799,052,698	12	1,500,000,000	12	1,500,000,000	48	6,470,252,698	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota				
			X XX 01 108 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	4,354,454,080	6	5,115,305,654	6	5,166,458,711	6	5,166,458,711	3	19,802,677,156	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota				
			X XX 01 109	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara</b>	<b>Jenis</b>	<b>4</b>	<b>1,267,316,007</b>	<b>4</b>	<b>1,876,612,866</b>	<b>4</b>	<b>1,377,750,000</b>	<b>4</b>	<b>1,477,750,000</b>	<b>4</b>	<b>5,999,428,873</b>	<b>Dinas Kesehatan Provinsi Riau</b>	<b>Provinsi Riau / Kabupaten / Kota</b>				
			X XX 01 109 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	235,424,000	8	38,530,000	8	38,915,300	8	38,915,300	49	351,784,600	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota				
			X XX 01 109 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	-	17	236,470,000	17	238,834,700	17	238,834,700	51	714,139,400	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota				
			X XX 01 109 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	396	834,953,007	396	612,600,000	396	400,000,000	396	400,000,000	1584	2,247,553,007	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota				
			X XX 01 109 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	4	700,000,000	4	800,000,000	8	1,500,000,000	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota				
			X XX 01 109 011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	196,939,000	4	989,012,866	-	-	-	-	8	<b>1,185,951,866</b>	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Provinsi Riau / Kabupaten / Kota				

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2021- 2024

RSUD ARIFIN ACHMAD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI						
							2021		2022		2023		2024		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)						
			1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				439,691,038,098		450,867,941,387		502,456,036,911		515,748,257,365		1,908,763,273,761								
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kesehatan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kesehatan Masyarakat					82		83		84		85		85		RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru						
			1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(1) Persentase Capaian SPM Kabupaten se-Provinsi (2) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran ( PBI) yang dibiayai melalui budget sharing (3)Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1. persen 2. jiwa 3. per 1000 penduduk	40 698.611 1,25	99,053,994,110	55 750.000 1,26	157,658,104,923	70 800.000 1,27	47,521,804,222	85 850.000 1,28	39,639,773,397	85 850.000 1,28	1,877,565,032,158	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru						
			1 02 02 101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	87	42,728,097,853	89	153,567,086,622	90	45,011,197,926	92	36,990,395,648	92	278,296,778,049	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru						
			1 02 02 101 02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	1,923,021,465	-	-	-	-	-	-	1	1,923,021,465	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru						
			1 02 02 101 03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	-	-	-	31,378,657,000	3	2,000,000,000	2	1,000,000,000	5	34,378,657,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru						
			1 02 02 101 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	564	22,990,726,977	2217	73,790,295,000	2138	11,666,959,200	868	9,986,313,225	5787	118,434,294,402	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru						
			1 02 02 101 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	83	317,140,231	-	-	-	-	-	-	83	317,140,231	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru						
			1 02 02 101 12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	305	2,689,351,920	723	11,045,767,730	1161	9,730,200,600	1153	3,441,987,659	3342	26,907,307,909	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru						
			1 02 02 101 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Paket	5	5,409,675,661	4	4,880,665,741	4	4,280,665,741	4	5,280,665,741	17	19,851,672,884	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru						
			1 02 02 101 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	421	1,605,845,618	19416	3,018,161,151	12029	1,589,619,280	12287	2,233,542,705	44153	8,447,168,754	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru						
			1 02 02 101 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	1916	5,388,888,981	2611	19,550,000,000	2611	5,345,036,105	2611	5,000,000,000	9749	35,283,925,086	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru						
			1 02 02 101 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Unit	-	-	51	6,310,000,000	52	6,625,500,000	56	6,086,008,468	159	19,021,508,468	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							2021		2022		2023		2024		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
			1 02 02 101 19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Unit	8	2,403,447,000	8	3,593,540,000	10	3,773,217,000	10	3,961,877,850	36	13,732,081,850	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			1 02 02 102	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	100	55,449,723,138	100	354,495,520	100	761,840,296	100	819,413,311	100	57,385,472,265	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			1 02 02 102 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	3517	54,966,723,138	-	-	-	-	-	-	3517	54,966,723,138	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			1 02 02 102 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2	483,000,000	2	354,495,520	2	372,220,296	2	390,831,311	8	1,600,547,127	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			1 02 02 102 28	Pengelolaan Penelitian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian	Dokumen	-	-	0	-	33	389,620,000	36	428,582,000	69	818,202,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			1 02 02 103	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terselenggaranya sistem informasi terintegrasi	Persen	100	876,173,119	100	2,987,756,781	100	1,000,000,000	100	1,006,321,838	100	5,870,251,738	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			1 02 02 103 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	11	876,173,119	42	2,987,756,781	-	-	-	-	53	3,863,929,900	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			1 02 02 103 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Unit	-	-	-	528	1,000,000,000	457	1,006,321,838	985	2,006,321,838	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru					
			1 02 02 104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang direkomendasikan	Persen	100	-	80	748,766,000	100	748,766,000	100	823,642,600	100	2,321,174,600	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			1 02 02 104 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	-	-	0	-	30	748,766,000	30	823,642,600	30	1,572,408,600	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			1 02 02 104 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Penilaian Tingkat Akreditasi	Persen	-	-	80	748,766,000	0	-	0	-	80	748,766,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	73	1,310,681,163	75	2,915,724,958	78	2,381,550,655	80	2,652,288,787	80	9,260,245,563	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			1 02 03 102	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi	Persen	100	1,310,681,163	100	2,915,724,958	100	2,381,550,655	100	2,652,288,787	100	9,260,245,563	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			1 02 03 102 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	Orang	379	1,310,681,163	2063	2,855,224,958	2227	2,312,800,655	2796	2,576,663,787	7465	9,055,370,563	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			1 02 03 102 02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	-	-	1	60,500,000	1	68,750,000	1	75,625,000	3	204,875,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan 2. Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD	Persen Persen	100 100	339,326,362,825	100 100	290,294,111,506	100 100	452,552,682,034	100 100	473,456,195,181	100 100	1,555,629,351,546.22	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang Dipenuhi	Laporan	-	-	-	-	4	105,450,194,165	4	108,012,633,883	8	213,462,828,048	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 102 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	-	-	-	-	10440	105,450,194,165	10560	108,012,633,883	21000	213,462,828,048	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	Laporan	-	-	-	-	1	125,000,000	1	137,500,000	2	262,500,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							2021		2022		2023		2024		TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
			X XX 01 103 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	1	125,000,000	1	137,500,000	2	262,500,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	Jenis	1	951,260,860	1	2,419,500,000	1	1,000,000,000	1	1,100,000,000	1	5,470,760,860	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 105 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	951,260,860	1	2,419,500,000	2	1,000,000,000	1	1,100,000,000	5	5,470,760,860	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	Jenis	5	2,879,292,474	5	2,931,884,982	5	2,701,505,042	5	3,208,079,359	5	11,720,761,856	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 106 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	197,962,200	1	197,221,770	1	212,999,512	1	234,299,463	4	842,482,944	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	29	1,427,988,674	29	1,467,528,462	13	1,000,000,000	18	1,243,423,813	89	5,138,940,949	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 106 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	491,174,000	3	377,300,000	4	407,484,000	4	448,232,400	14	1,724,190,400	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 106 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	610,773,600	1	615,278,750	3	784,501,050	3	955,951,155	8	2,966,504,555	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 106 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	21	151,394,000	38	274,556,000	67	296,520,480	78	326,172,528	204	1,048,643,008	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Unit	-	-	5	4,317,434,860	41	3,000,000,000	44	4,500,000,000	126	11,817,434,860	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 107 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	3	4,317,434,860	1	3,000,000,000	4	4,500,000,000	8	11,817,434,860	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	Jenis	3	41,476,955,783	3	45,368,174,544	3	47,782,647,174	3	50,175,529,533	3	184,803,307,034	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 108 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	24,600,000	12	50,000,000	12	75,000,000	12	82,500,000	48	232,100,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 108 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12,356,390,304	12	12,356,390,304	12	13,097,773,722	12	13,752,662,408	48	51,563,216,739	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 108 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	29,095,965,479	8	32,961,784,240	9	34,609,873,452	9	36,340,367,125	34	133,007,990,295	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Jenis	4	8,254,033,100	4	5,193,247,750	4	7,051,866,138	4	6,608,909,414	4	27,108,056,402	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 109 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	131,810,900	15	374,280,000	15	392,994,000	15	412,643,700	60	1,311,728,600	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 109 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	465,335,200	13	388,547,750	13	407,975,138	13	428,373,894	52	1,690,231,982	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 109 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3,956,887,000	266	284,700,000	700	715,325,000	735	842,776,460	1704	5,799,688,460	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 109 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	5	250,000,000	5	270,000,000	5	297,000,000	15	817,000,000	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 109 011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1250	3,700,000,000	1389	3,895,720,000	2348	5,265,572,000	2052	4,628,115,360	7039	17,489,407,360	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				
			X XX 01 110	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Layanan BLUD sesuai standart	Persen	100	285,764,820,608	100	230,063,869,370	100	285,441,469,516	100	299,713,542,992	100	1,100,983,702,486	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
										2021		2022		2023		2024						
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			X	XX	01	110	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	21	285,764,820,608	21	230,063,869,370	21	285,441,469,516	21	299,713,542,992	21	1,100,983,702,486	RSUD Arifin Achmad	Pekanbaru

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2021– 2024**

RSJ TAMPAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				98,235,528,508		55,848,487,777		94,692,361,092		98,471,382,403		347,247,759,780		
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kesehatan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kesehatan Masyarakat					86		88		89		90		90		RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(1) Persentase Capaian SPM Kabupaten se-Provinsi  (2) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai melalui budget sharing	1. persen  2. jiwa	40  698.611	29,513,481,177	55  750.000	8,573,905,876	70  800.000	5,960,800,000	85  850.000	6,122,936,873	85  850.000	50,171,123,926	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	87	26,651,463,703	89	5,972,479,876	90	3,500,000,000	92	3,552,936,873	92	39,676,880,452	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 101 01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal	Unit	1	5,092,682,290	-	-	-	-	-	-	1	5,092,682,290	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 101 03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis	Unit	1	16,280,679,000	-	-	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	5	18,280,679,000	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 101 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	-	-	-	-	1	1,000,000,000	-	-	1	1,000,000,000	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 101 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	204	4,369,140,000	221	5,174,479,876	45	1,000,000,000	95	1,052,936,873	565	11,596,556,749	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 101 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	141	262,809,259	-	-	-	-	-	-	141	262,809,259	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 101 12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	108	219,700,000	131	100,000,000	150	500,000,000	450	1,500,000,000	839	2,319,700,000	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 101 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	58	236,453,154	192	500,000,000	0	-	0	-	250	736,453,154	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 101 19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Unit	2	190,000,000	2	198,000,000	0	-	0	-	4	388,000,000	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 102	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	100	2,041,624,474	100	2,025,118,000	100	1,884,500,000	100	1,993,700,000	100	7,944,942,474	RSJ Tampan	Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			1 02 02 102 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	420	346,830,000	0	-	0	-	0	-	420	346,830,000	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 102 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	3	564,968,878	3	1,109,450,000	3	1,109,500,000	3	1,109,500,000	12	3,893,418,878	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 102 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2	365,243,652	2	150,000,000	2	150,000,000	2	200,000,000	8	865,243,652	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 102 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	2	615,431,404	2	643,668,000	3	500,000,000	2	550,000,000	9	2,309,099,404	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 102 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Orang	197	41,965,540	203	122,000,000	207	125,000,000	217	134,200,000	824	423,165,540	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 102 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	107,185,000	0	-	0	-	0	-	1	107,185,000	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang direkomendasikan	Persen	100	820,393,000	100	576,308,000	100	576,300,000	100	576,300,000	100	2,549,301,000	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 02 104 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan	Unit	16	820,393,000	16	576,308,000	16	576,300,000	16	576,300,000	16	2,549,301,000	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	73	2,635,319,298	75	6,981,410,637	78	6,037,627,232	80	6,490,294,000	80	22,144,651,167	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 03 101	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM.K.	dokumen	13	2,114,476,848	13	5,127,540,000	13	5,127,540,000	13	5,640,294,000	52	18,009,850,848	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 03 101 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di	Orang	61	2,114,476,848	80	5,127,540,000	80	5,127,540,000	80	5,640,294,000	301	18,009,850,848	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 03 102	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi	Persen	100	520,842,450	100	1,853,870,637	100	910,087,232	100	850,000,000	100	4,134,800,319	RSJ Tampan	Pekanbaru
			1 02 03 102 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	124	520,842,450	266	1,853,870,637	150	910,087,232	150	850,000,000	690	4,134,800,319	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan 2. Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD	Persen Persen	100 100	66,086,728,033	100 100	40,293,171,264	100 100	82,693,933,860	100 100	85,858,151,530	100 100	274,931,984,687	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	Laporan	0	-	0	-	4	40,567,182,345	4	41,552,964,876	8	82,120,147,221	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 102 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0	-	0	-	4729	40,567,182,345	4729	41,552,964,876	9458	82,120,147,221	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	Jenis	1	560,298,740	0	-	1	560,298,740	1	560,298,740	1	1,680,896,220	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 105 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	560,298,740	0	-	1	560,298,740	1	560,298,740	3	1,680,896,220	RSJ Tampan	Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			X XX 01 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	Jenis	5	2,163,487,849	5	1,713,749,364	5	1,420,000,000	5	1,550,000,000	5	6,847,237,213	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 106 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	112,390,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	150,000,000	4	502,390,000	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	17	1,298,366,131	7	458,499,364	8	500,000,000	8	500,000,000	40	2,756,865,495	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 106 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	451,600,000	1	641,550,000	1	300,000,000	3	300,000,000	6	1,693,150,000	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 106 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	99,999,718	1	93,700,000	1	100,000,000	2	100,000,000	5	393,699,718	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 106 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	32	201,132,000	50	400,000,000	50	400,000,000	60	500,000,000	192	1,501,132,000	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	Jenis	3	8,068,553,870	3	7,928,276,400	3	8,022,750,000	3	8,725,000,000	3	32,744,580,270	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 108 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	21,150,000	12	22,750,000	12	22,750,000	12	25,000,000	48	91,650,000	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 108 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2,349,600,000	12	2,000,000,000	12	2,000,000,000	12	2,200,000,000	48	8,549,600,000	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 108 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	5,697,803,870	3	5,905,526,400	3	6,000,000,000	3	6,500,000,000	12	24,103,330,270	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Jenis	4	1,022,146,604	4	1,200,000,000	4	1,200,000,000	4	1,000,000,000	4	4,422,146,604	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 109 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	10	300,000,000	10	300,000,000	10	300,000,000	30	900,000,000	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 109 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	418,135,500	9	250,000,000	9	250,000,000	9	250,000,000	49	1,168,135,500	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 109 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	27	604,011,104	536	650,000,000	500	650,000,000	500	450,000,000	1563	2,354,011,104	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 110	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Layanan BLUD sesuai standart	Persen	100	54,272,240,970	100	29,451,145,500	100	30,923,702,775	100	32,469,887,914	100	147,116,977,159	RSJ Tampan	Pekanbaru
			X XX 01 110 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	16	54,272,240,970	16	29,451,145,500	16	30,923,702,775	16	32,469,887,914	16	147,116,977,159	RSJ Tampan	Pekanbaru

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2021-2022**

RSPB

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			1	02	02	101				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			55,042,987,177		55,930,620,169		88,957,116,923		91,600,536,302		291,531,260,571				
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kesehatan Masyarakat Terhadap Kesehatan Masyarakat							91		92		93		94		94		RSUD Petala Bumi	Pekanbaru		
			1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(1) Persentase Capaian SPM Kabupaten se-Provinsi (2) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai melalui budget sharing (3)Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1. persen 2. jiwa 3. per 1000 penduduk	40 698.611 1,25	15,582,160,324 750.000 1,26	55 800.000 1,27	22,076,798,303 850.000 1,28	70 850.000 1,28	13,474,531,000 850.000 1,28	85 850.000 1,28	14,312,318,000 850.000 1,28	85 850.000 1,28	65,445,807,627	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
			1	02	02	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	87	9,235,784,078	89	21,125,014,643	90	12,291,318,000	92	13,080,788,000	92	55,732,904,721	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
			1	02	02	101	03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	0	-	2	11,785,968,600	0	-	0	-	2	11,785,968,600	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			1	02	02	101	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit	1	775,160,660	0	-	0	-	0	1	775,160,660	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
			1	02	02	101	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	1	347,200,000	1	347,200,000	1	457,000,000	1	557,000,000	4	1,708,400,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			1	02	02	101	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	178	5,110,280,000	138	2,198,097,500	225	9,103,500,000	300	9,160,000,000	841	25,571,877,500	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			1	02	02	101	12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	-	1521	174,213,810	2550	634,930,000	3550	972,900,000	7621	1,782,043,810	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			1	02	02	101	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Paket	0	-	0	-	2	390,000,000	2	400,000,000	4	790,000,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			1	02	02	101	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	0	-	17	248,942,510	15	142,888,000	25	232,888,000	57	624,718,510	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			1	02	02	101	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	149	1,119,071,480	150	1,119,071,480	200	1,563,000,000	250	1,758,000,000	749	5,559,142,960	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			1	02	02	101	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	4	1,884,071,938	4	5,251,520,743	0	-	0	-	8	7,135,592,681	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			1	02	02	102		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>6,346,376,246</b>	<b>100</b>	<b>874,160,660</b>	<b>100</b>	<b>1,033,213,000</b>	<b>100</b>	<b>1,146,530,000</b>	<b>100</b>	<b>9,400,279,906</b>	<b>RSUD Petala Bumi</b>	<b>Pekanbaru</b>
			1	02	02	102	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	286	6,259,602,194	0	-	0	-	0	286	6,259,602,194	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
			1	02	02	102	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	3	21,554,772	0	-	0	-	0	3	21,554,772	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
			1	02	02	102	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	8	824,160,660	8	1,033,213,000	8	1,146,530,000	24	3,003,903,660	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			1	02	02	102	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2	32,000,000	2	50,000,000	0	-	0	-	4	82,000,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			1	02	02	102	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	3	33,219,280	0	-	0	-	0	3	33,219,280	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru	
			1	02	02	104		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang direkomendasikan	Persen	100	-	100	77,623,000	100	150,000,000	100	85,000,000	100	312,623,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			1	02	02	104	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	0	-	13	77,623,000	13	150,000,000	13	85,000,000	13	312,623,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	73	8,761,821,644	75	9,340,998,068	78	10,820,662,720	80	11,007,684,947	80	39,931,167,379	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			1	2	3	101		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM.	Dokumen	13	8,550,058,644	13	8,551,627,068	13	9,931,291,720	13	10,018,313,947	52	37,051,291,379	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			1	02	03	101	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	255	8,550,058,644	255	8,551,627,068	260	9,931,291,720	260	10,018,313,947	1030	37,051,291,379	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			1	02	03	102		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi	Persen	100	211,763,000	100	789,371,000	100	889,371,000	100	989,371,000	100	2,879,876,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			1	02	03	102	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	25	211,763,000	100	789,371,000	150	889,371,000	200	989,371,000	475	2,879,876,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan 2. Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD	Persen Persen	100 100	30,699,005,209	100 100	24,512,823,798 100	100 100	64,661,923,203 100	100 100	66,280,533,355 100	100 100	186,154,285,565	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	Laporan	0	-	0	-	4	30,820,162,889	4	31,569,092,847	8	62,389,255,736	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	0	-	0	-	3234	30,820,162,889	3430	31,569,092,847	6664	62,389,255,736	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			X	XX	01	106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi	Jenis	5	1,399,334,973	5	1,429,407,382	5	2,082,034,000	5	1,715,962,679	5	7,065,723,034	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	106	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	29,600,000	1	29,938,030	1	85,000,000	1	95,000,000	4	239,538,030	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	106	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	449,504,363	4	508,239,722	4	686,050,000	4	698,470,000	15	2,342,264,085	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	106	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	212,689,665	0	-	0	-	0	-	10	212,689,665	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	106	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	200,100,000	4	200,100,000	4	600,000,000	4	615,000,000	16	1,615,200,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	106	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	344,379,945	3	344,379,630	3	372,000,000	3	307,492,679	12	1,368,252,254	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	106	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	163,061,000	17	346,750,000	30	338,984,000	40	438,984,000	97	1,287,779,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Unit	35	100,000,000	5	50,000,000	41	179,300,000	44	229,050,000	126	558,350,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	107	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	100,000,000	2	50,000,000	5	179,300,000	10	229,050,000	18	558,350,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	Jenis	3	3,695,009,301	3	4,744,055,616	3	5,336,000,000	3	5,339,000,000	3	19,114,064,917	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	108	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8,000,000	12	10,800,000	12	30,000,000	12	30,000,000	48	78,800,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	108	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1,136,742,000	12	1,342,180,800	12	1,750,000,000	12	1,750,000,000	48	5,978,922,800	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	108	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	819	2,550,267,301	840	3,391,074,816	840	3,556,000,000	840	3,559,000,000	3339	13,056,342,117	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Jenis	4	548,261,600	4	1,029,720,800	4	1,292,236,000	4	1,227,628,000	4	4,097,846,400	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			X	XX	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	85,370,000	5	222,796,000	5	300,796,000	5	310,796,000	20	919,758,000	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	113,451,600	8	307,492,000	8	437,492,000	8	447,492,000	32	1,305,927,600	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	300	349,440,000	350	499,432,800	504	553,948,000	554	469,340,000	1708	1,872,160,800	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru
			X	XX	01	110		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase Layanan BLUD sesuai standart</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>24,956,399,335</b>	<b>100</b>	<b>17,259,640,000</b>	<b>100</b>	<b>24,952,190,314</b>	<b>100</b>	<b>26,199,799,829</b>	<b>100</b>	<b>93,368,029,478</b>	<b>RSUD Petala Bumi</b>	<b>Pekanbaru</b>
			X	XX	01	110	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	20	24,956,399,335	20	17,259,640,000	20	24,952,190,314	20	26,199,799,829	20	93,368,029,478	RSUD Petala Bumi	Pekanbaru

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan terukur sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan adalah kinerja yang secara langsung yang harus dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah. Dengan demikian, indikator kinerja sangat penting untuk dilakukan pengukuran setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi yang diemban. Dimana IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU ditetapkan sebagai dasar penilaian kinerja Perangkat Daerah, dengan memuat sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) dan indikator keluaran (output) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Indikator kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau sesuai Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang dituangkan Dinas Kesehatan kedalam Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang menunjukkan kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam 5 tahun mendatang. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 diukur melalui 11 (sebelas) Indikator dengan rincian sebagai berikut (table T.C-28)

**Tabel 7.1. ( Form T.C 28 )**  
**Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024**

No	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran / Program	Kondisi 2019	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perubahan Pada Tahun					Kondisi Akhir
					Realisasi 2020	2021	2022	2023	2024	
1	Menurunnya Mortalitas dan Morbiditas	1. Meningkatkan kesehatan Ibu, Anak dan kesehatan Reproduksi.	Persentase Penurunan kematian ibu	Naik dari 109 menjadi 125 kasus(14,7)	Naik dari 125 menjadi 129 kasus ( 3,2%)	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
			Persentase Penurunan Kematian Bayi	Naik dari 422 mjd 496 (17,5%)	Naik dari 496 mjd 596(20,16%)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
			Persentase Penurunan Kematian Balita	Naik dr 479 mjd 545(13,8%)	Naik dr 545 mjd 632 (16%)	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
		2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda.	Persentase <b>Stunting</b>	24,1 ((SSGBI/SUSEN AS)	NA	22	18,4	16	14	14
			Persentase Orang Dengan HIV AIDS yang menjalani terapi ARV (ODHA On ART )	22%	40	45	50	55	60	60
			Success Rate TB	73	90,4	91	92	93	95	95
		3. Peningkatan pengendalian penyakit	Persentase Kab/Kota dengan IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk	50%	58%	67	75	83	92	92
			Persentase Pencegahan dan Pengendalian masalah Kesehatan yang Disebabkan oleh Penyakit Tidak menular	15,2	15	20	30	40	50	50
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100	99,8	100	100	100	100	100

No	Sasaran	Strategi	Indikator Sasaran / Program	Kondisi 2019	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perubahan Pada Tahun					Kondisi Akhir
					Realisasi 2020	2021	2022	2023	2024	
2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Meningkatkan Pencapaian Universal Health Coverage. 2. Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan 3. Meningkatkan Jejaring Pelayanan Kesehatan 4. Meningkatkan Pelayanan Rumah Sakit dengan Berorientasi pada pasien safety 5. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Pencapaian Universal Health Coverage	76,73	76,63	87	90	92	95	95
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak krisis kesehatan akibat dan/atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	95%	91%	95	96	97	98	98
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kesehatan Masyarakat							
			RSUD Arifin Achmad RSJ Tampan RSU Petala Bumi	80,19 87,0 93,7	82,19 85 90	82 86 91	83 88 92	84 89 93	85 90 94	85 90 94
			Persentase Capaian SPM Kab/Kota Se Provinsi Riau	NA	NA	40	55	70	85	85
			Jumlah Penduduk yang menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) yang dibiayai oleh Budget Sharing	681.435	692.072	698.611	750.000	800.000	850.000	850.000
			Ratio Daya Tampung RS Rujukan	0,97	0,96	1,25	1,26	1,27	1,28	1,28
			Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah memiliki tenaga kesehatan sesuai standard	45,7	NA	73	75	78	80	80
			Persentase Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alkes, dan Makan Minuman yang memenuhi standard	100	90	90	91	92	93	93
			Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS	NA	NA	33	42	58	83	83
			Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat ( UKBM ) Aktif	53,92	57,8	60	65	70	75	75

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat visi dan misi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 terkait urusan bidang kesehatan yang memuat , tujuan, strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang berpedoman pada perubahan RPJMD Provinsi Riau yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima).

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Keberhasilan pencapaian tujuan, target dan sasaran perubahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau Periode 2019-2024 perlu mendapat dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait (stakeholders) guna terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh komponen yang terlibat, dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya bidang kesehatan sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap deviasi pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga pada akhirnya pembangunan kesehatan Provinsi Riau khususnya pada tahun 2019 -2024 dapat terwujud sesuai arah kebijakan yang telah ditentukan dalam mewujudkan citacita masyarakat Provinsi Riau yang sehat dan sejahtera.

### Definisi Operasional ( DO) Indikator Tujuan, Sasaran dan Program

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Definisi Operasional	Formulasi
<b>INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN</b>			
1	Angka Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.	Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur ( Age Specific Death Rate / ASDR ) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian
<b>II Menurunnya Mortalitas Dan Morbiditas</b>			
1	Persentase Penurunan Kematian Ibu	Kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu pada tahun sebelumnya} - \text{jumlah kematian Ibu tahun berjalan}}{\text{Jumlah kematian Ibu tahun sebelumnya}} \times 100\%$
2	Persentase Penurunan Kematian Bayi	Kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal)	$\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi pada tahun sebelumnya} - \text{jumlah kematian Bayi tahun berjalan}}{\text{Jumlah kematian bayi tahun sebelumnya}} \times 100\%$
3	Persentase Penurunan Kematian Balita	Kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita)	$\frac{\text{Jumlah Kematian Balita pada tahun sebelumnya} - \text{jumlah kematian Balita tahun berjalan}}{\text{Jumlah kematian balita tahun sebelumnya}} \times 100\%$
4	Prevalensi Stunting	Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD	$\frac{\text{Jumlah balita pendek dan sangat pendek berdasarkan indikator TB/U (Tinggi Badan dibagi Umur)}}{\text{Jumlah balita yang diukur tinggi badannya}} \times 100\%$
5	Persentase Orang Dengan HIV Aids yang menjalani terapi ARV. ( ODHA On ART )	Jumlah Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) yang sedang menjalani terapi obat Anti Retro Virus (ARV) terus menerus, baik pada ODHA yang baru memulai terapi di tahun ini maupun ODHA yang memulai terapi dari tahun-tahun sebelumnya	$\frac{\text{Jumlah ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) yang menjalani terapi ARV}}{\text{Jumlah ODHA hasil estimasi}} \times 100\%$
6	Success Rate TB	Jumlah pasien yang sembuh dan pengobatan lengkap	$\frac{\text{Jumlah Pasien Baru T B BTA Positif (sembuh pengobatan lengkap)}}{\text{Jumlah Pasien Baru T B BTA Positif yang diobati}} \times 100\%$
7	Persentase Kab/Kota dengan IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk	Penderita DBD : Penderita demam tinggi mendadak berlangsung 2-7 hari, disertai manifestasi perdarahan (antara lain uji tourniquet positif, petekie, ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis dan/atau melena, dsb) ditambah trombositopenia (trombosit $\leq 100.000 / \text{mm}^3$ ) dan hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit $\geq 20\%$ ).	$\frac{\text{Persentase Kab/Kota dengan IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk}}{\text{penduduk}} \times 100\%$
		Angka Kesakitan DBD (Incidence Rate) : Jumlah penderita DBD/Jumlah penduduk pada tempat dan waktu yang sama x 100.000	

8	Persentase Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan yang disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular	Penduduk usia 15 sd 59 tahun yang dilakukan screening/ deteksi dini faktor resiko dengan tekanan darah tinggi dan dengan gula darah tinggi	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 sd 59 tahun yang dilakukan screening/ deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 sd 59 tahun}} \times 100\%$
9	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB ( di provinsi, dinilai dari persentase Jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi KLB	$\frac{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan standart}}{\text{Jumlah Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB}} \times 100\%$
<b>III Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>			
1	Persentase Pencapaian Universal Health Coverage	Capaian Pemerintah Daerah menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunaannya	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang Mempunyai jaminan kesehatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
2	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk berdampak Krisis Kesehatan Akibat dan /atau Berpotensi Bencana	Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%.	$\frac{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana dalam satu tahun.}} \times 100\%$
3	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	Pengakuan terhadap mutu pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah , setelah dilakukan penilaian bahwa Puskesmas dan RS Pemerintah telah memenuhi standar akreditasi	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan ( RS dan Puskesmas) Yang Terakreditasi}}{\text{Jumlah semua RS dan Puskesmas}} \times 100\%$
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	Hasil pengukuran dari kegiatan survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1(satu) sampai dengan 4 (empat) untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan publik yang digunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kualitas mutu kerja	Rata-Rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan ( Dalam penghitungan IKM terdapat 14 unsur atau indikator yang dikaji)
			$\frac{\text{Total dari persepsi nilai per unsur} \times \text{nilai penimbang}}{\text{Jumlah unsur}}$
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
	(1) Persentase Capaian SPM Kabupaten se-Propinsi	Rara2 Capaian SPM Kab/ Kota yang terdiri dari 12 indikator yaitu Pelayanan kesehatan Ibu hamil, Ibu Bersalin, Bayi baru lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Penderita Diabetes Melitus, orang dengan gangguan jiwa berat ,orang terduga tuberkulosis, orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	$\frac{\text{Capaian SPM Kab/Kota}}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\%$

	(2) Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai melalui budget sharing	Masyarakat miskin dan tidak mampu yang menjadi peserta jaminan kesehatan , iurannya dibiayai melalui budget sharing	Jumlah Masyarakat miskin dan tidak mampu yang menjadi peserta jaminan kesehatan , iurannya dibiayai melalui budget sharing
	(3) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan dengan menghitung kemampuan rumah sakit rujukan menerima dan menampung pasien rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah memiliki Tenaga Kesehatan sesuai Standar	Faskes ( Puskesmas dan RSUD Type C) milik Pemerintah memiliki nakes sesuai standar ( Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; Permenkes No.3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit) dibagi dengan Jumlah faskes pemerintah yang ada	$\frac{\text{Jumlah Faskes ( Puskesmas dan RSUD Type C) milik Pemerintah memiliki Nakes sesuai standar}}{\text{Jumlah Faskes pemerintah di Provinsi Riau}} \times 100 \%$
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		
	Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, Alkes dan makanan minuma yang memenuhi standar	Sarana produksi dan distribusi farmasi yang memenuhi persyaratan perizinan dan standar CPOB , CDOB ( cara produksi/distribusi obat yang baik) yang perizinan baru, perubahan, perpanjangan, izin masih berlaku dan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan memenuhi standar persyaratan perizinan baru, perpanjangan, perubahan dan izin masih berlaku / standar CPAKB, CDAKB (cara produksi/distribusi alat kesehatan yang baik) yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pada tahun berjalan	Jumlah sarana produksi dan distribusi farmasi yang memenuhi persyaratan perizinan dan standar CDOB ( cara distribusi obat yang baik) yang perizinan baru, perubahan, perpanjangan, izin masih berlaku dan sarana distribusi alat kesehatan memenuhi standar persyaratan perizinan baru, perpanjangan, perubahan dan izin masih berlaku / standar CDAKB (cara distribusi alat kesehatan yang baik) yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pada tahun berjalan / Jumlah sarana produksi dan distribusi farmasi yang ada x 100 %
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
	(1).Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembudayaan GERMAS yang memenuhi 2 Kriteria 1. Memiliki kebijakan Germas 2. Menerapkan kebijakan Germas	$\frac{\text{Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Provinsi Riau}} \times 100 \%$
	(2). Persentase UKBM Aktif	UKBM aktif adalah UKBM ( Desa Siaga, Poskestren, SBH, Posyandu) yang memenuhi Standar Kriteria	$\frac{\text{Jumlah UKBM Aktif}}{\text{Jumlah UKBM yang ada di Provinsi Riau}} \times 100 \%$

LAMPIRAN II

**Definisi Operasional dan Formulasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renstra 2020 sd 2024**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formulasi
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	(1) Persentase Capaian SPM Kabupaten se-Provinsi	Rata2 Capaian SPM Kab/ Kota yang terdiri dari 12 indikator yaitu Pelayanan kesehatan Ibu hamil, Ibu Bersalin, Bayi baru lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Penderita Diabetes Melitus, orang dengan gangguan jiwa berat ,orang terduga tuberkulosis, orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	$\frac{\text{Capaian SPM Kab Kota}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100 \%$
	(2) Jumlah Masyarakat yang menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran ( PBI) PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) Pemda	Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang didaftarkan menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) PBPU Pemda melalui Budget Sharing antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi	Total Jumlah Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang didaftarkan menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) PBPU Pemda melalui Budget Sharing antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi.
	(3) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah tempat tidur RS dibandingkan dengan jumlah penduduk Riau dikali 1.000	$\frac{\text{Jml daya tampung Rumah Sakit Rujukan}}{\text{Jml Pddk}} \times 1000$
	(4) Persentase peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien sesuai standar		
<b>Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dibandingkan dengan kebutuhan	Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dibandingkan dengan kebutuhan
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan yang disediakan	Jumlah jenis obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan yang disediakan pada tahun tertentu	Jumlah jenis obat buffer stok dan obat program untuk pelayanan kesehatan yang disediakan untuk didistribusikan ke Instalasi Farmasi Kab/Kota
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan/alat penunjang medik yang disediakan di UPT Labkesling	Total Jenis alat kesehatan/ alat penunjang medik yang disediakan pada tahun tertentu
Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis Pengadaan Sarana Fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Jumlah Jenis Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di adakan di UPT Labkesling	Total Jenis sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan di UPT Labkesling pada tahun tertentu
Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah ketersediaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan		
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan / alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang diadakan	Jumlah dan jenis ketersediaan BMHP yang diadakan untuk di Instalasi Farmasi di 12 Kab/Kota pada waktu tertentu	Jumlah dan jenis ketersediaan BMHP yang diadakan untuk di Instalasi Farmasi di 12 Kab/Kota pada tahun tertentu

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formulasi
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang menerima alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas lainnya	Jumlah Instalasi Farmasi Kab/Kota yang menerima alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas lainnya	Jumlah Instalasi Farmasi Kab/Kota yang menerima alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas lainnya
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat laboratorium, bahan, dan reagensia pelayanan laboratorium klinis dan lingkungan yang diadakan sesuai standar	Jumlah ketersediaan alat, bahan, dan reagensia di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Total ketersediaan jenis alat,bahan dan reagensia yang diadakan di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan
<b>Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Kesehatan utk UKP Rujukan,UKM & UKM Rujukan yang dilakukan / jumlah layanan sesuai standar x 100 %
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan /atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan seratus persen	Jumlah Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama dikali seratus persen
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah penduduk terdampak KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan di provinsi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard dibagi Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang dibina sesuai standar	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin dan Nifas yang dikelola dan dibina sesuai standar  2. Jumlah Pelayanan Kesehatan Neonatus, Bayi, Balita APRAS dan Remaja sesuai Standar	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin dan Nifas yang dikelola dan dibina sesuai standar  2. Jumlah Pelayanan Kesehatan Neonatus, Bayi, Balita APRAS dan Remaja sesuai Standar
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Puskesmas yang dibina dalam Pelayanan Kesehatan Usila	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Usila yang dikelola dan dibina sesuai standar	1. Jumlah Pelayanan Kesehatan Usila yang dikelola dan dibina sesuai standar
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah pelayanan kesehatan gizi masyarakat yang dibina	Penguatan Intervensi Stunting, Pelacakan Kasus Gizi Buruk, Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil, Penanggulangan Masalah Gizi Remaja Putri, Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi	Penguatan Intervensi Stunting, Pelacakan Kasus Gizi Buruk, Penanggulangan Masalah Gizi Ibu Hamil, Penanggulangan Masalah Gizi Remaja Putri, Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formulasi
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga	<p>Kabupaten / Kota yang melaksanakan kesehatan kerja jika memenuhi kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal 60 % Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kesehatan kerja minimal level 1</li> <li>2. Tersedianya SK / SE yang mendukung pelaksanaan kesehatan kerja di tingkat kabupaten / kota</li> <li>3. Pembinaan Kesehatan kerja di Sektor formal</li> <li>4. Pembinaan Kesehatan dan keselamatan kerja ( K3 ) fasilitas pelayanan kesehatan di Kab/Kota</li> </ol> <p>Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan olahraga jika memenuhi kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 60 % Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga level 1</li> <li>2. Tersedianya SK/SE tentang olahraga/aktivitas fisik ditingkat kab/kota</li> <li>3. Pembinaan Kebugaran jasmani pekerja di tingkat kab/kota</li> </ol>	Jumlah Kabupaten yang Melaksanakan kesehatan kerja dan Olah Raga
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kab/Kota yang mencapai indikator Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sesuai Standar	<p>Kabupaten / Kota yang memenuhi syarat dari 6 indikator : I. STBM ( Desa dan Kelurahan yang melaksanakan 5 Pilar STBM ), II. PKM ( Pengawasan Kualitas air minum ( Persentase sarana air minum yang diawasi kualitas hasil produksi secara eksternal oleh Dinkes Kab/Kota dan KKP yang dibuktikan dengan pemeriksaan kualitas air minum untuk parameter fisika , kimia , mikrobiologi dalam tahun berjalan ) III. KKS ( Kabupaten Kota Sehat ( Kabupaten yang menyelenggarakan KKS dengan Kriteria 1, memiliki hasil verifikasi oleh provinsi 2. Memiliki Tim Pembina KKS, 3 Memiliki SK forum KKS, 4. Mempunyai Rencana Kerja Tim Pembina, 5. Mempunyai Rencana Kerja Forum ) IV. Limbah Medis Fasyankes : Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar V. TPM ( Tempat Pengelolaan Pangan ) yaitu : TPM yang memenuhi syarat kesehatan yang dibuktikan dengan sertifikat laik hygiene sanitasi ( SLHS ) VI. TFU ( Tempat Fasilitas Umum ) : Tempat Fasilitas Umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar</p>	Jumlah Kab/Kota yang mencapai indikator Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sesuai Standar

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formulasi
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jenis media promosi kesehatan yang dikelola	Jenis saluran media promosi kesehatan yang digunakan dalam pelayanan promosi kesehatan sesuai standar, ( Media Cetak, Media Luar Ruang, Media Audia Visual, Media Elektronik, Media, Media Sosial, Webinar, Sosialisasi melalui Website, Seminar, Penyuluhan Langsung ke Masyarakat, Kerjasama Media Online, Event, Pameran. Road	Jenis media promosi kesehatan yang dikelola
Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah FKTP yang dibina pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah FKTP yang dibina pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Kesehatan Tradisional lainnya yang meliputi Pengumpulan data kes. tradisional, Fasilitas registrasi(perizinan) dan Bimbingan teknis serta pemantauan pelayanan kesehatan tradisional	Jumlah FKTP yang dibina pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis pembinaan penyakit menular langsung, penyakit tular vektor zoonotik dan penyakit tidak menular sesuai standar	Jumlah jenis penyakit menular dan tidak menular terdiri dari Hepatitis, Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Kecacingan, Filariasis, Zoonosis, Demam Berdarah Dengue (DBD), Diare, Kusta, Frambusia, Malaria, Diabetes Melitus dan Hipertensi yang dilakukan pembinaan	Jumlah absolut jenis penyakit menular dan tidak menular yang dilakukan pembinaan di Kab/Kota
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah calon jemaah haji yang akan berangkat mendapatkan pelayanan kesehatan di Kab/Kota	Jumlah absolut calon jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Kab/Kota
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah RS dan IPWL yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan obat dan Penyalahgunaan NAPZA	Jumlah RS dan IPWL yang dipantau dalam pelaksanaan penyalahgunaan penggunaan obat dan NAPZA pada waktu tertentu	Jumlah RS dan IPWL yang dipantau dalam pelaksanaan penyalahgunaan penggunaan obat dan NAPZA pada tahun tertentu dari jumlah RS dan IPWL yang ada di Provinsi Riau
Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang dibayarkan Premi PBI (Penerima Bantuan Iuran) PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) Pemda oleh Kabupaten/ Kota.	Jumlah Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang didaftarkan menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) yang dibiayai melalui Budget Sharing antara Pemerintah Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi Riau.	Total Jumlah Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang didaftarkan menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) yang dibiayai melalui Budget Sharing antara Pemerintah Kab/Kota dengan Pemerintah Provinsi Riau.
Sub Kegiatan : Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Surveilans Kesehatan yang dikelola dan dibina	Jumlah Pengelolaan dan Pembinaan kasus gizi buruk/kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan Imunisasi di Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengelolaan dan pembinaan untuk kasus gizi buruk/kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan Imunisasi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formulasi
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Indikator SPM Bidang Kesehatan Kab/Kota yang dikoordinasikan	Jumlah jenis kegiatan terdiri dari HIV-Aids, IMS, Tuberkulosis, Diabetes Melitus, Hipertensi, Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM di Kab/Kota	Jumlah absolut jenis kegiatan terdiri dari HIV-Aids, IMS, Tuberkulosis, Diabetes Melitus, Hipertensi, Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM di Kab/Kota
Sub Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pembinaan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jenis pelayanan yang terdiri dari pelayanan kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional(POR), Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), Pembinaan PONEB, Pembinaan Puskesmas di daerah destinasi wisata, Pembinaan Manajemen Puskesmas, Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat ( RKO) dan Rencana Kebutuhan Logistik (RKL)	Jumlah Jenis pelayanan yang terdiri dari pelayanan kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional(POR), Pembinaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), Pembinaan PONEB, Pembinaan Puskesmas di daerah destinasi wisata, Pembinaan Manajemen Puskesmas, Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat ( RKO) dan Rencana Kebutuhan Logistik (RKL)
Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah pelayanan kegawat daruratan yang ditangani	Jenis Pelayanan Kegawat Daruratan yang ditangani meliputi Kecelakaan lalu lintas, Informasi Kesehatan, Informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Rujukan/Penjemputan Pasien, dll terkait pelayanan kesehatan	Total Jumlah Pelayanan Kegawat Daruratan yang ditangani.
Sub Kegiatan : Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah RSUD Kab/Kota yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan	Jumlah RS milik Pemerintah yang melaksanakan program pendukung kesehatan rujukan minimal 80%	RS Milik Pemerintah yang melaksanakan program pendukung minimal 80%
<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	Persentase Terselenggaranya sistem informasi terintegrasi	Sistem Informasi Kesehatan yang menyediakan mekanisme saling hubung antar subsistem informasi dan lintas sistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluannya, sehingga data dari suatu sistem atau subsistem secara rutin dapat melintas/mengalir, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem atau subsistem yang lain.	Sistem Informasi Terintegrasi/ Sistem Informasi yang ada x 100 %
Sub. Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah data dan informasi yang dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi	Jumlah data dan informasi yang dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi	Jumlah data dan informasi yang dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi
Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola dan dibina sesuai standar	Jumlah Sistem Informasi kesehatan yang terdiri dari biaya koneksi internet, pembinaan SIKDA, Aplikasi KOMdat, Aplikasi SPM, SIFIT (Instalasi Farmasi) yang dikelola dan dibina pada waktu tertentu	Jumlah Sistem Informasi kesehatan yang terdiri dari biaya koneksi internet, pembinaan SIKDA, Aplikasi KOMdat, Aplikasi SPM, SIFIT (Instalasi Farmasi) yang dikelola dan dibina pada waktu tertentu
<b>Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang direkomendasikan</b>	Rumah Sakit ( FKTL) dan FKTP yang mengajukan perijinan dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau sesuai dengan SOP dan standar	Rumah Sakit ( FKTL) dan FKTP yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau sesuai dengan SOP dan standar / FKTP dan FKTL yang mengajukan ijin x 100 %
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah perizinan RS yang dilayani	Jumlah RS yang mengajukan perpanjangan ijin operasional	RS yang pada tahun bersangkutan ijin operasionalnya habis masa berlakunya dan mengajukan perpanjangan ijin nya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formulasi
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah FKTP dan FKTL yang terakreditasi	Jumlah FKTP dan RS Milik Pemerintah yang terakreditasi	Jumlah FKTP dan RS Milik Pemerintah yang terakreditasi dibagi Total FKTP dan RS milik pemerintah yang telah teregistrasi dikali seratus persen
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Faskes pemerintah memiliki nakes sesuai Standar</b>	Faskes ( Puskesmas dan RSUD Type C) milik Pemerintah memiliki nakes sesuai standar ( Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; Permenkes No.3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit) pada waktu tertentu	Jumlah Faskes ( Puskesmas dan RSUD Type C) milik Pemerintah memiliki nakes sesuai standar ( Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; Permenkes No.3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit) / Jumlah faskes pemerintah yang ada x 100 %
<b>Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM.</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan SDM Kab/Kota dan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan SDM Kab/Kota dan Provinsi
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	<b>Jumlah Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan sesuai standar di fasilitas kesehatan</b>	<b>Jumlah paramedis PTT di Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar pada waktu tertentu</b>	<b>Jumlah paramedis PTT di Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar</b>
<b>Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensi</b>	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dari jumlah SDM Kesehatan yang ada pada waktu tertentu	jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan / jumlah SDM Kesehatan di institusi kesehatan x 100 %
Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Jumlah SDM Kesehatan yang terdiri SDM pengelola obat dan vaksin , SDM Kesehatan di faskes , Dinkes, UPT mengikuti pendidikan dan pelatihan pada waktu tertentu	Jumlah SDM Kesehatan yang terdiri SDM pengelola obat dan vaksin , SDM Kesehatan di faskes , Dinkes, UPT mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun tertentu
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang dibina	Jumlah SDM Kesehatan pemegang program di Kab/Kota yang dibina	
Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	25% dari total pegawai UPT Labkesling ditambah SDM UPT Labkesling yang telah dilatih pada tahun sebelumnya
Sub Kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya dan difasilitasi melalui BAPELKES	Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formulasi
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, Alkes dan makanan minuma yang memenuhi standar</b>	Sarana produksi dan distribusi farmasi yang memenuhi persyaratan perizinan dan standar CPOB , CDOB ( cara produksi/distribusi obat yang baik) yang perizinan baru, perubahan, perpanjangan, izin masih berlaku dan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan memenuhi standar persyaratan perizinan baru, perpanjangan, perubahan dan izin masih berlaku / standar CPAKB, CDAKB (cara produksi/distribusi alat kesehatan yang baik) yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pada tahun berjalan	Jumlah sarana produksi dan distribusi farmasi yang memenuhi persyaratan perizinan dan standar CDOB ( cara distribusi obat yang baik) yang perizinan baru, perubahan, perpanjangan, izin masih berlaku dan sarana distribusi alat kesehatan memenuhi standar persyaratan perizinan baru, perpanjangan, perubahan dan izin masih berlaku / standar CDAKB (cara distribusi alat kesehatan yang baik) yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pada tahun berjalan / Jumlah sarana produksi dan distribusi farmasi yang ada x 100 %
<b>Kegiatan : Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>	Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, Alkes memenuhi rekomendasi syarat perizinan	Jumlah sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, Alkes yang memenuhi rekomendasi syarat perizinan dibandingkan dengan jumlah sarana produksi dan distribusi yang masuk dalam sistem perijinan online pada waktu tertentu	Jumlah sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, Alkes yang memenuhi rekomendasi syarat perizinan / jumlah sarana produksi dan distribusi yang masuk dalam sistem perijinan online x 100 %
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah sarana produksi dan distribusi farmasi dan alat kesehatan yang dibina dan diawasi	Jumlah sarana produksi dan distribusi farmasi dan alat kesehatan ( PAK, PBF,PKRT) yang dibina dan diawasi pada waktu tertentu	Jumlah sarana produksi dan distribusi farmasi dan alat kesehatan ( PAK, PBF,PKRT) yang dibina dan diawasi pada waktu tertentu
Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase sarana UKOT memenuhi rekomendasi syarat perizinan	Usaha Kecil Obat Tradisional yang menjadi kewenangan Provinsi untuk diberikan rekomendasi sebelum keluar ijin	Jumlah sarana UKOT memenuhi rekomendasi syarat perizinan/ Jumlah sarana UKOT yang mengajukan ijin x 100 %
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Sarana UKOT yang memenuhi standar	Jumlah Sarana UKOT yang mengurus izin , perpanjangan dan izin masih berlaku memenuhi standar perizinan	Jumlah Sarana UKOT yang mengurus izin , perpanjangan dan izin masih berlaku memenuhi standar perizinan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat</b>	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembudayaan GERMAS yang memenuhi 2 Kriteria 1. Memiliki kebijakan Germas 2. Menerapkan kebijakan Germas	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembudayaan GERMAS di bagi seluruh Kab/Kota dikali 100 %
	<b>Persentase UKBM Aktif</b>	UKBM aktif adalah UKBM ( Desa Siaga, Poskestren, SBH, Posyandu) yang memenuhi Standar Kriteria	Jumlah UKBM Aktif dibagi dengan UKBM seluruhnya dikali 100 %
<b>Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan GERMAS</b>	Kabupaten/Kota yang melaksanakan Minimal 3 Indikator GERMAS : 1. Aktivitas Fisik, 2. Makan Buah dan Sayur, 3 Chek Kesehatan Berkala	Jumlah Kabupaten yang menerapkan kebijakan GERMAS

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program ( outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formulasi
Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perjanjian kerjasama bidang kesehatan yang dikeluarkan	Dokumen Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan dengan Pihak 3 ( OPD, ORMAS, Organisasi Profesi, Dunia Usaha, Komunitas dan Mitra Potensial lainnya yang mendukung GERMAS	Jumlah perjanjian kerjasama bidang kesehatan yang dikeluarkan
<b>Kegiatan : Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah kab/kota yang melaksanakan Pembinaan PHBS di 3 tatanan ( Rumah Tangga, Perkantoran dan sekolah )</b>	Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pembinaan PHBS di tatanan Rumah Tangga , Perkantoran, dan Sekolah sesuai dengan Indikator PHBS sesuai tatanan ( RT : 10 Indikator, Sekolah : 8 Indikator , Perkantoran: 9 Indikator )	<b>Jumlah kab/kota yang melaksanakan Pembinaan PHBS di 3 tatanan ( Rumah Tangga, Perkantoran dan sekolah )</b>
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kab/kota yang melaksanakan Pembinaan PHBS di 3 tatanan ( Rumah Tangga, Perkantoran dan sekolah )	Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pembinaan PHBS di tatanan Rumah Tangga , Perkantoran, dan Sekolah sesuai dengan Indikator PHBS sesuai tatanan ( RT : 10 Indikator, Sekolah : 8 Indikator , Perkantoran: 9 Indikator )	Jumlah kab/kota yang melaksanakan Pembinaan PHBS di 3 tatanan ( Rumah Tangga, Perkantoran dan sekolah )
<b>Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah UKBM Aktif Kab/Kota</b>	UKBM aktif adalah UKBM yang memenuhi Standar Kriteria	Jumlah UKBM Aktif
Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah peserta bimtek pengelola UKBM di Kab/Kota	Bimbingan Teknis yang dilakukan kepada pengelola UKBM kab/kota ( Pengelola Posyandu, Poskestren, SBH, dan Desa Siaga )	Jumlah Pengelola UKBM yang disupervisi

LAMPIRAN III

**Definisi Operasional dan Formulasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renstra 2020 sd 2024  
Rumah Sakit**

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Formulasi</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>		
<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi</b>		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan pada tahun tertentu
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi</b>		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Jumlah Pengadaan pakaian lapangan yang diadakan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan yang diadakan pada tahun tertentu
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi</b>		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang digunakan	Total Jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang digunakan pada tahun tertentu
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dimanfaatkan	Total peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan pada tahun tertentu
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum yang disediakan	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	Total porsi makanan dan minuman yang disediakan pada tahun tertentu
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang dimanfaatkan	Total jenis barang cetakan dan penggandaan yang dimanfaatkan pada tahun tertentu

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Formulasi</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang diikuti	Total rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti pada tahun tertentu
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Total perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada tahun tertentu
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</b>		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim via jasa pengiriman	Jumlah Surat Menyurat yang dikirim via jasa pengiriman	Total urut Menyurat yang dikirim via jasa pengiriman pada tahun tertentu
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon/internet, air dan listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Total rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan pada tahun tertentu
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah tenaga administrasi, tenaga kebersihan kantor, tenaga keamanan, tenaga Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi, taman dan halaman, tenaga informasi dan teknologi, Tenaga Ahli, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia yang disediakan	Total tenaga administrasi, tenaga kebersihan kantor, tenaga keamanan, tenaga Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi, taman dan halaman, tenaga informasi dan teknologi, Tenaga Ahli, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada tahun tertentu
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>		

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Formulasi</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang fungsional	Jumlah unit Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Total unit pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara pada tahun tertentu
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran dinas operasional atau lapangan yang fungsional	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Total Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara pada tahun tertentu
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin di rumah sakit yang dipelihara	Total Peralatan dan Mesin di rumah sakit yang dipelihara pada tahun tertentu
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruangan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Jumlah ruangan gedung kantor dan bangunan rumah sakit yang direhabilitasi/dipelihara	Total ruangan gedung kantor dan bangunan rumah sakit yang direhabilitasi /dipelihara pada tahun tertentu
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Total Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi pada tahun tertentu
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase pencapaian pelayanan BLUD</b>	<b>Perhitungan capaian kinerja pelayanan</b>	<b>Rata-rata nilai capaian kinerja dari seluruh pelayanan dalam SPM Rumah Sakit</b>
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis layanan dan penunjang pelayanan BLUD yang dilaksanakan	Jumlah jenis pelayanan dalam SPM Rumah Sakit	Jumlah jenis pelayanan dalam SPM Rumah Sakit
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan</b>	<b>Jumlah tempat tidur RS dibandingkan dengan jumlah penduduk Riau dikali 1.000</b>	<b>Jml daya tampung Rumah Sakit Rujukan /Jml Pddk X 1.000</b>
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana dan alat kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dibandingkan dengan kebutuhan	Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dibandingkan dengan kebutuhan

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Formulasi</b>
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pembayaran Utang Gedung Rawat Inap Anak	Jumlah Sisa utang Gedung Rawat Inap Anak yang dibayarkan	Total sisa utang gedung Rawat Inap Anak yang dibayarkan pada tahun tertentu
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang diadakan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang diadakan	Total Jenis alat kesehatan/ alat penunjang medik yang diadakan pada tahun tertentu
Pengadaaaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang diadakan	Jumlah Jenis sarana di fasilitas layanan kesehatan yang di adakan	Total jenis sarana di fasilitas layanan kesehatan yang diadakan pada tahun tertentu
Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang diadakan	Jumlah Jenis prasarana fasilitas layanan kesehatan yang diadakan	Total jenis prasarana fasilitas layanan kesehatan yang diadakan pada tahun tertentu
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang diadakan	Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang diadakan	Total Jenis Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang diadakan pada waktu tertentu
Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Jenis Barang Penunjang Oprasional RS yang diadakan	Jumlah jenis barang penunjang operasional RS yang diadakan	Total jenis barang penunjang operasional RS yang diadakan pada tahun tertentu
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan yang dipelihara	Jumlah jenis alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara	Total jenis alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara pada tahun tertentu
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara	Jumlah jenis Sarana fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara	Total jenis Sarana fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara pada tahun tertentu
Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang dipelihara	Jumlah jenis Prasarana fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara	Total jenis Prasarana fasilitas layanan kesehatan yang dipelihara pada tahun tertentu
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan</b>	<b>Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dibandingkan dengan kebutuhan</b>	<b>Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dibandingkan dengan kebutuhan</b>

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Formulasi</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi Bencana yang dikelola	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan seratus persen	Jumlah Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama dikali seratus persen
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah media promosi kesehatan yang di sediakan	Jumlah jenis media promosi kesehatan yang disediakan	Jumlah jenis media promosi kesehatan yang disediakan pada tahun tertentu
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Penelitian yang Dikelola	Jumlah Jenis Penelitian yang dikelola di rumah sakit	Jumlah Jenis Penelitian yang dikelola di rumah sakit pada tahun tertentu
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Terselenggaranya sistem informasi terintegrasi</b>	<b>Jumlah unit di rumah sakit yang terint</b>	<b>Jumlah unit yang terintegrasi dibagi dengan seluruh unit dikali 100%</b>
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Prasarana pendukung operasional penyelenggaraan pengelolaan SIMRS yang disediakan	Jumlah Prasarana pendukung operasional penyelenggaraan pengelolaan SIMRS yang disediakan rumah sakit	
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang direkomendasikan</b>	<b>Rumah Sakit ( FKTL) dan FKTP yang mengajukan perijinan dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau sesuai dengan SOP dan standar</b>	<b>Rumah Sakit ( FKTL) dan FKTP yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau sesuai dengan SOP dan standar / FKTP dan FKTL yang mengajukan ijin x 100 %</b>
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Penilaian Akreditasi	Persentase angka yang diperoleh pada penilaian akreditasi	Nilai capaian akreditasi

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Formulasi
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Fasilitas Kesehatan pemerintah memiliki tenaga kesehatan sesuai Standar	Faskes ( Puskesmas dan RSUD Type C) milik Pemerintah memiliki nakes sesuai standar ( Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; Permenkes No.3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit) pada waktu tertentu	Jumlah Faskes ( Puskesmas dan RSUD Type C) milik Pemerintah memiliki nakes sesuai standar ( Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; Permenkes No.3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit) / Jumlah faskes pemerintah yang ada x 100 %
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kes. Yang Mengikuti Uji Mutu & Kompetensi	Jumlah SDMk yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dari jumlah SDMk yang ada pada waktu tertentu	jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan / jumlah SDM Kesehatan di institusi kesehatan x 100 %
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang Mengikuti Kompetensi	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada waktu tertentu	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun tertentu
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mendapat pemeriksaan psikologi (Psikotest) di rumah sakit	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mendapat pemeriksaan psikologi (psikotest) di rumah sakit pada waktu tertentu	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mendapat pemeriksaan psikologi (psikotest) di rumah sakit pada waktu tertentu

Lampiran IV

**MATRIK PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**  
**MATRIK VERIFIKASI PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2019 - 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Riau

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	<b>COVER</b>	JUDUL COVER : "PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024 DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU	-	-	√	-	-
2.	<b>PERGUB PENETAPAN</b>	Menunggu Peraturan Gubernur Riau tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Riau 2019-2024	-	-	√	-	-
3.	<b>DAFTAR ISI</b>	Sesuai dengan isi Renstra Perangkat Daerah	-	-	√	-	-
4.	<b>DAFTAR TABEL</b>	Judul Tabel dan Halaman Tabel	-	-	√	-	-
5	<b>DAFTAR GAMBAR</b>	Judul Gambar dan Halaman Gambar	-	-	√	-	-
5.	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>						
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat	-	-	√	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		<p>Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.</p> <p><b>Tambahan</b> Alasan dan perlunya melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah, seperti mempedomani hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.</p>					
	1.2 Landasan Hukum	<p>Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.</p> <p><b>Tambahan</b> Landasan Hukum yang baru : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>	-	-	√	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		<p>Indonesia Nomor 6322).</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).</p> <p>3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> <p>4. Keputusan Menteri lainnya .....</p>					
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah	-	-	√	-	-
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. (Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	-	-	√	-	-
2.	<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT</b>	Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas	-	-	√	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	<b>DAERAH</b>	secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.					
	2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).  <b>Catatan</b> Penyesuaian draf struktur baru	-	-	√	-	- -
	2.2 Sumber Daya Perangkat	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki	-	-	√	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	Daerah	Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.					
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.	<b>BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah</b> Disesuaikan dengan urusannya.	Tabel T-C.23  Tabel T-C.24	<b>v</b>	-	-
		Menyajikan Tabel T-C.23 dan T-C.24	-	-	<b>v</b>	-	-
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan,	-	-	<b>v</b>	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.					
3	<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>						
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35	<b>BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah</b> - Disesuaikan dengan urusannya.	Tabel T-B.35	v	-	-
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala	<b>Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</b> - Disesuaikan dengan urusannya.		v	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.					
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota	Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.	-	-	√	-	-
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.	-	-	√	-	-
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1. Gambaran pelayanan Perangkat	<b>Bab IV. Analisis Isu-su Strategis</b> Disesuaikan dengan urusannya.		√	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		<p>Daerah;</p> <p>2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;</p> <p>3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;</p> <p>4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan</p> <p>5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.</p> <p>Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.</p>					
4	<b>BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN</b>						
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	<p>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.</p> <p><b>Catatan</b> Jika melakukan Perbaikan IKU Renstra Perangkat Daerah, harus mempedomani hasil evaluasi Kemenpan RB/Evaluasi Inspektorat</p>	<b>Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</b> Berdasarkan kepada Indikator Sasaran Kepala Daerah.	Tabel T-C.25	v	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		Provinsi Riau/Hasil Evaluasi Renstra.					
		Menggunakan Tabel T-C.25	-	-	√	-	-
5	<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu Tabel T-C.26 yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.	<b>Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah</b> Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.	Tabel T-C.26	√	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.26	-	-	√	-	- -
6	<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T- C.27.  <b>Catatan</b> 1. Rencana Program, Kegiatan, sub	BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.	Tabel T-C.27.	√	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		<p>kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah mengacu kepada Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang masih berlaku untuk Tahun 2020, dengan menyangdingkan antara target dan realisasi baik terhadap kinerja maupun anggaran.</p> <p>2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, (sesuai Tabel T-C.27) dimulai Tahun 2021 (RKPD Perubahan) s/d 2024).</p>					
		Menggunakan Tabel T-C.27	-	-	√	-	-
7	<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARA AN BIDANG URUSAN</b>	Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari	BAB IX. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tabel T-C.28.	√	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		<p>Tabel T-C.28.</p> <p><b>Catatan</b>            Bagi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Indikator Kinerja Daerah, maka :            1. Tabel 7.1 mengacu kepada Tabel T-C.28, berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang masih berlaku untuk tahun 2020 menyandingkan antara target dengan realisasi            2. Tabel 7.2 mengacu kepada Tabel T-C.28, berpedoman kepada Bab IV Tujuan dan Sasaran yang baru untuk tahun 2021 s/d 2024</p>					
		Menggunakan Tabel T-C.28	-	-	√	-	-
8	BAB VIII PENUTUP	1.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2.Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3.Rencana tindak lanjut. 4.Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan	-	-	√	-	-

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan					
9	LAMPIRAN	Formulasi Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan lain – lain yang diperlukan	-	-	√	-	-

<p>Dinas Kesehatan Provinsi Riau</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jefri Herimen, S.Sos</li> <li>2. Nita Cahyaning, SKM, M.Si</li> <li>3. Donal, SKM, M.Si</li> <li>4. Mohammad Khairuddin, SKM, MM</li> <li>5. Syamdi, S.IP</li> </ol>	<p>Pekanbaru, 11 Juli 2022</p> <p>Verifikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Heri Yanto, S.Hut., M.T</li> <li>2.</li> </ol>
---	--

## LAMPIRAN V



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
**DINAS KESEHATAN**  
JL. CUT NYAK DIEN III PEKANBARU TELP. (0761) 23810 – 26032, FAX (0761) 24260  
Website : <http://dinkes.riau.go.id> Email : [dinaskesehatan@riau.go.id](mailto:dinaskesehatan@riau.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU Nomor : 126/SK/Dinkes-1.1/2024

#### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024

#### KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
  - b. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
  - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421 );
  2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 );
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249 );

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 ( Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12 );
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019-2024 ( Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ( Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42 );
10. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Riau;

Menetapkan

#### MEMUTUSKAN

PERTAMA

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024.

: Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, sebagaimana Diktum Pertama dimaksud mempunyai tugas :

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat kabupaten/kota Provinsi Riau;
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan dibidang Kesehatan kab/kota Provinsi Riau;
3. Melakukan Pengkajian evaluasi Rencana Kerja ( RENJA ) tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Program Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
6. Melaksanakan penyelarasan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah ( RPJMD ) Pemerintah Provinsi Riau;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Gubernur Riau Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Kesehatan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu
- KEDUA : Susunan Tim Penyusun Perubahan Rencan Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : Juli 2021

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau  
  
Dra. Hj. MIMI YULIANI NAZIR, Apt, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660717 199102 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
2. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Riau;
3. Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

Nomor : 188/SK/Dinkes-1.1/...

Tanggal, Juli 2021

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU  
TAHUN 2019 – 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
<b>A</b>	<b>PEMBINA</b>	Dra. Hj. Mimi Yuliani Nazir, Apt, MM	Kepala Dinas Kesehatan
<b>B</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	Elly Hayatinur, SP, M.Kes Achmad Jajuli, SKM, MKM Nita Cahyaning, SKM, M.Si Donal, SKM, M.Si Syamdi, S.JP Emi Zermila, SKM Sarifah Dewi, SKM, M.Si	Sekretaris Dinas Kesehatan Ka. Sub.Bag. Perencanaan dan Program Perencana Ahli Madya Perencana Ahli Madya Perencana Ahli Muda Perencana Ahli Pertama
<b>C</b>	<b>( KELOMPOK KERJA I ) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	dr. Yohanes, M.Si M. Ridwan, SKM, M.Kes drg. Zulfa Davisra, M. Kes dr. Dahlia Eka Octa Fitria Octarita, S. Farm, Apt Nunung Kemala Sari Zain, SH dr. Neng Kasmiati, MH Herman Mahat, SKM, MM dr. Siska Hidayani Erawati, S.Si, M.Si Daddi Deqlanus, SKM Zulfayeni, S.ST, M.Kes DR. Irwan Muryanto dr. Heru Murtono	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kepala UPT. Instalasi Farmasi dan Logistik Kasie. Pelayanan Kesehatan Rujukan Kasie. Yan Kes. Primer & Yan Kes. Tradisional. Kasie. Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kasie. Kesga & Gizi Kasie. Kes. Lingk. Kes. Kerja dan Olah Raga Kasie. Surveilans & Imunisasi Kasie. Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular Kasie. Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular Nutrisi Madya Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
	<p>( KELOMPOK KERJA I )  PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN  PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN</p>		
<p><b>RSUD. Arifin Achmad</b>  1 Ketua  2 Sekretaris  3 Anggota  4 Anggota</p>	<p>Dian Sjahrial, S.Kom  Vinita Kemala Hayati, SKM, MM  Aditawarman, SE  Heinrita, SE</p>	<p>Ka.Subbag.Penyusun Program &amp; Anggaran  Ka. Sub.Bag. Evaluasi &amp; Pelaporan  Perencana Ahli Pertama  Perencana Ahli Pertama</p>	
<p><b>RSJ. Tampan</b>  1 Ketua  2 Sekretaris  3 Anggota  4 Anggota</p>	<p>Hawari Dinal, S.Sos, H.Si  Maya Yosanova, S.Si,Apt  Santi Marlina, SKM  Ervita Dona, SKM</p>	<p>Kepala Bagian Perencanaan  Ka.Subbag.Perencanaan Jiwa &amp; Napza  Analis Perencanaan Penganggaran  Analis Rencana Program dan Kegiatan</p>	
<p><b>RSUD. Petala Bumi</b>  1 Ketua  2 Sekretaris  3 Anggota  4 Anggota</p>	<p>Dwiasto Kawijayan, S.Kom, M.Si  Noorhidayati, SKM  Yuswari Indra, SKM  Fauzi Azmi</p>	<p>Ka.Subbag.Perencanaan Program  Perencana Ahli Muda  Perencana Ahli Muda  Staf Perencanaan</p>	
<p><b>Koordinator Rumah Sakit</b></p>	<p>Anderi Hidayat, SKM</p>	<p>Perencana Ahli Pertama</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
D	<p>( KELOMPOK KERJA II )  PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER  DAYA MANUSIA KESEHATAN</p> <p>1 Ketua  2 Sekretaris  3 Anggota  4 Anggota  5 Anggota  6 Anggota</p>	<p>Ade Asmara, SKM  Asrul, SKM, MKM  Aiffan, S. Sos  Ayura Frimayona, S. Kep  Hemma Malini, SKM  Yenni Febriyanti, SKM, M. Kes</p>	<p>Ka. Bid. SDK dan Kefarmasian  Kepala Seksi SDMK  Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan  Adminkes Muda  Adminkes Pertama  Penyusun Program Pengembangan Tenaga Teknis &amp; Fungsional  Non Pendidikan</p>
E	<p>( KELOMPOK KERJA III )  PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN  DAN MAKANAN MINUMAN</p> <p>1 Ketua  2 Sekretaris  3 Anggota  4 Anggota  5 Anggota</p>	<p>Ns. Islamiyah, S. Kep, MKM  Nurul Fadhila, S. Si, M. Si, Apt  Ns. Novi Yanti J, S. Kep. MKL  Nuraslinawati, SKM  Suningsih, Amd. Keb</p>	<p>Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan  Adminkes Madya  Adminkes Muda  Adminkes Pertama  Pengelola Obat dan Alat Kesehatan</p>
F	<p>( KELOMPOK KERJA IV )  PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG  KESEHATAN</p> <p>1 Ketua  2 Sekretaris  3 Anggota  4 Anggota  5 Anggota</p>	<p>Amir Azan, SKM, M. Si  Rozita, Amd. Farm  drg. Ari Ardani, M. Si  Anusriwan, SKM, MPH  Ika Irawati, SKM, M. Si</p>	<p>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat  Kasie. Promkes &amp; Pemberdayaan Masyarakat  Administrator Kes. Ahli Madya  Administrator Kes. Ahli Madya  Penyuluh Kesmas Ahli Madya</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
G	( KELOMPOK KERJA V ) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1 Ketua 2 Sekretaris 3 Anggota 4 Anggota 5 Anggota	Zulhemi, S.Sos. Herman Effendi, SKM Moh. H. Khairuddin, SKM, MM Dwi Sri Rahayu, SKM Dolly Lestari, Amd.	Ka. Sub. Bag. Perlengkapan dan Keuangan Ka. Sub. Bag. Kepegawaian dan Umum Perencana Ahli Muda Analis Perencana Evaluasi dan Pelaporan Arsiparis Terampil Mahir

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau



Formulir E.27  
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan  
Renstra Dinas Kesehatan  
Provinsi : Riau

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi	√			
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi..	√			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan	√			

Pekanbaru, Juni 2022  
 KEPALA DINAS KESEHATAN  
 PROVINSI RIAU

  
 H. ZAINAL ARIFIN, SKM, M.KES  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19700405 198912 1 001